

MUI SUMUT:
TENDA BESAR UMAT ISLAM



Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID & TANAH WAKAF



Dr. H. Ali Murthado, M.Hum (Ed.)

PERLINDUNGAN ATAS

**EKSISTENSI MASJID
& TANAH WAKAF**

Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.

PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID & TANAH WAKAF

Dr. H. Ali Murthado, M.Hum. (Ed.)



Diterbitkan Oleh:
CV. MANHAJI Bekerjasama dengan
Komisi Hukum, Perundang-undangan
HAM dan Advokasi
MUI Prov. Sumut
Medan 2019

**PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID
DAN TANAH WAKAF**

Penulis :

Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum.

Editor :

Dr. H. Ali Murthado, M.Hum.

Copyright © 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penata Letak :

Johan Iskandar, S.Si

Perancang Sampul :

Muhammad Hakiki, S.Kom

Diterbitkan Oleh:

CV. MANHAJI Bekerjasama dengan
Komisi Hukum, Perundang-undangan
HAM dan Advokasi MUI Prov. Sumut
Medan 2019

e-mail: cvmanhaji@yahoo.com - muisumut.com

Cetakan Pertama : Desember 2019

ISBN: 978-602-0746-61-6



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas rahmat dan berkah Nya, telah terselenggara *Focus Group Discussion (FGD) Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, yang diprakarsasi oleh Komisi Hukum Perundang-undangan, Advokasi dan Hak Asasi Manusia - Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut). *Alhamdulillah*, dengan izin Nya, buku ini telah kami susun berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari para narasumber kami, didukung data-data dokumentasi lembaga dan data sekunder pendukung lainnya, baik sumber dari kepustakaan maupun dari berbagai media.

Sholawat beriring salam buat besar junjungan 'alam, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan dalam berjuang untuk membela kepentingan agama, bangsa dan Negara dengan cara-cara yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Kami sangat menyadari, meskipun perjuangan umat Islam melindungi eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara dirasakan begitu besar tantangannya, tetapi keluhuran budi pekerti dan akhlak yang mulia tetap mesti diutamakan. *Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad*.

Permasalahan masjid di kota sudah muncul sejak lama, paling tidak pada tahun 1979 masjid di Jalan Zainal Arifin, Medan di Desa Madras telah terjadi pembongkaran masjid dan telah pula dibangun rumah toko (ruko) permanen di atas tanah pertapakan masjid. Dalam hal ini MUI Sumatera Utara pada tahun 1979 telah mengeluarkan fatwa pada tanggal 7 Maret 1979. Belum ada jumlah yang pasti tentang jumlah masjid di Sumatera Utara yang dirobohkan, digusur, dilenyapkan, atau dipindahkan oleh pengembang, pemangku kepentingan, atau pengusaha lainnya.

Penyusunan buku ini telah digulirkan seiring dengan persiapan, diskusi terbatas dan pengumpulan data yang telah kami lakukan sejak Juli 2019 lalu. Dari diskusi terbatas tersebut akhirnya disepakati untuk melakukan pengumpulan data primer dari para subjek sejarah yang telah mengalami secara langsung, masuk ke pusaran konflik dan dinamika perjuangan yang berkaitan dengan problematika eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara, bahkan sebagian masih terus berlangsung hingga saat ini.

Selain berdiskusi dengan para mujahid masjid, kami juga menganggap penting untuk mendapatkan informasi dari instansi terkait dan pihak-pihak yang kami anggap paling berkompeten dan ahli terkait masalah yang sedang kami kaji ini. Rencana kami pun bergulir menjadi dua sesi diskusi. Sesi pertama, fokusnya pada sejarah dan dinamika permasalahan yang terjadi. Sedangkan sesi kedua, lebih pada analisis sosial, politik, ekonomi, hukum dan aspek lain terkait penyelesaian masalah eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara.

Dari pelaksanaan sesi pertama, kami berupaya merumuskan kembali, apa sebenarnya yang telah diperjuangkan dan bagaimana cara memperjuangkannya. Kami berharap, dari berbagai pengalaman para mujahid masjid dan tanah wakaf ini, kami dapat memetik hikmah, baik dari sisi pengalaman terbaik mereka maupun dari sisi mengambil *i'tibar* (pembelajaran) yang telah mereka dapat. Sudah banyak contoh kasus yang didiskusikan, di antaranya Masjid al Ikhlas, Masjid Amal Silaturrahim, Masjid Nurul Hidayah, tanah wakaf Arakundo dan lain sebagainya.

Melalui sesi kedua pula, kami berupaya memormulasikan gagasan dan menindaklanjuti kembali *i'tikad* baik semua sahabat dan stakeholder kami untuk bersama-sama berdiskusi, menguraikan masalah eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara, di antaranya, dari Kanwil Depag, Kanwil BPN, BWI Sumut dan para tuan guru dan orang-orang yang kami tuakan.

Harapan kami, upaya ini dapat terus bergulir hingga pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), ditindaklanjuti dengan terwujudnya komitmen dan pemahaman bersama yang tertuang secara tertulis dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait sertifikasi masjid dan tanah wakaf.

MoU ini dibuat, guna memastikan bahwa masjid dan tanah wakaf sebagai aset umat Islam harus disertifikatwakafkan, meskipun kami sadar, hal itu pun belum tentu akan dapat menjamin masjid dan tanah wakaf tidak akan bermasalah lagi dengan pengembang.¹

Ucapan terima kasih kami haturkan sebesar-besarnya kepada para narasumber kami dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Sesi I yang kami laksanakan pada 31 Agustus 2019: Bapak Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI); Bapak H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut); Affan Lubis (Ketua PA 212 Sumut, Ketua APMAS); Ibu Hj. Mariani (Pewakif Arukundo); Ibu Sulhani Harahap (Pewakif Arakundo); Ibu Marwiyah (Pewakif Arakundo); Bapak Rusdi (Sekretaris APMAS); Bapak Ahsanul Fuadi Saragih (Tokoh Islam Sumut); Bapak Razali Taat (Ketua KAUMI Sumut) dan Bapak Andi AT (Harian Waspada).

Demikian juga, terima kasih kami haturkan sebesar-besarnya kepada para narasumber kami dalam FGD Sesi II yang kami selenggarakan pada tanggal 3 September 2019: Bapak Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA (Ketua Komisi Hukum Perundang-undangan, Advokasi dan Hak Asasi Manusia); Bapak Prof. Dr. H.M Yasir Nasution (Dewan Pertimbangan MUI Sumut); Bapak Prof. Dr. M Yamin Lubis, SH, MS, CN (Kom Kumdang MUI Sumut); Bapak Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA (Ketua Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut); Bapak Dr. Hashim Purba, SH, M.Hum (Kom Kumdang MUI Sumut); Bapak Dr. Faisal Akbar, SH, M.Hum (Kom Kumdang MUI Sumut); Ibu DR. Hj. Chairul Bariyah, SH, M.Hum (Kom Kumdang MUI Sumut); Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH, M.Hum (Dosen UMSU); Bapak Obed. M.Simamora (BPN Sumut); Bapak Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP (Ketua BWI Sumut); Bapak H. Abdul Manan (Kemenag SU); Bapak Dr. Zulham, M.Hum (Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN SU); Bapak OK Saidin (Guru Besar USU); Bapak Dr. Muhammad al Farabi (Kanwil Kemenag SU); Bapak Drs. Zakaria Lubis, MM (BWI Sumut); Bapak H. Baharuddin Ahmad (BWI Sumut); Bapak Dr. Djaharuddin Batubara (BWI Sumut) dan Bapak Gusman Saputra (BPN Sumut).

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. H. Ali Murthado, M.Hum yang bersedia menjadi editor buku ini, sehingga buku ini mudah dipahami.

¹ Akmal Syahputra, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Kami menyadari, buku ini masih membutuhkan koreksi dan saran yang konstruktif, hingga dapat dilengkapi dan lebih baik lagi. Juga kami mohon maaf kami jika dalam pendeskripsian buku ini terdapat bahasa yang dianggap menyudutkan pihak tertentu, kami hanya mencoba menggambarkan suasana ketika terjadinya peristiwa berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai pihak. Semoga berkah, bermanfaat dan mendatangkan kemashlahatan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

Hormat saya,

Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum
Penulis



KATA SAMBUTAN

KETUA UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

Alhamdulillah, wassholatu wassalamu 'ala Rosulillah wa 'alihi wa man
quwalah. Asyhadu an lailaha illah wa asyhadu anna Muhammadan
'abduhu warosuluh. Wa ba 'du.

Buku ini disusun dari hasil *Fokus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum MUI Sumut yang dilengkapi dengan rujukan sumber-sumber lain, baik penelitian, dokumen institusi, artikel dan sumber media. Hasil diskusi itu kemudian diramu menjadi sebuah buku yang dapat diterbitkan MUI Sumut.

Isi buku ini mengenai rekam jejak permasalahan yang dialami umat Islam, tepatnya terancamnya eksistensi masjid dan wakaf. Permasalahan yang dibahas dalam buku ini tidak mencakup semua masalah masjid dan perwakafan, tetapi lebih fokus pada membuka kembali catatan sejarah mengenai masjid-masjid yang dirobohkan, dipindahkan, tidak dikeluarkan izinnya atau dirusak misalnya dengan cara dibakar; dan tanah wakaf yang beralihfungsi, dijual, disewakan atau disengketakan.

Persoalan masjid dan tanah wakaf sebenarnya lebih merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam membangun peradaban Islam. Ada empat konsep yang paling mendasar dalam membangun peradaban Islam, semuanya ada pada konsep masjid dan tanah wakaf, yaitu ibadah,

manfaat, pertanggungjawaban dan keadilan sosial.¹ Tidak ada jalan lain membangun peradaban Islam yang terbukti dalam sejarah kecuali melalui jalan ini, yakni memakmurkan masjid dan mengelola harta benda wakaf secara professional, sehingga berkembanglah asset umat Islam; sehingga terjaminlah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umat Islam.

Perkembangan zaman telah menggerus sebagian besar tradisi Islam yang mulia, sebagaimana yang telah diurusutamakan oleh para generasi terbaik terdahulu. Bahkan, sisa-sisa peradaban Islam pun sudah banyak yang punah, berganti gaya hidup dan tradisi baru yang tidak memberi tempat sama sekali bagi Islam sebagai *dien* yang paling tinggi dan tiada yang lebih tinggi melebihi Islam. Kendati demikian, sebagai umat yang membawa rahmat bagi semesta alam, Umat Islam tetap harus menjaga fungsi dan perannya, sebagai umat yang berakhlak mulia, umat yang selalu mengutamakan perdamaian, umat yang selalu menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang memikat hati, meskipun tak jarang umat Islam menjadi bulan-bulanan kezaliman dan sasaran fitnah.

Umat Islam bangsa Indonesia, khususnya umat Islam di Sumatera Utara telah membuat sejarah dalam melindungi eksistensi masjid dan tanah wakaf. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa besarnya di hadapan Allah dan Rasul Nya. Semoga Allah menjaga hati mereka agar tetap semata mencari keridhaan Nya. Semoga Allah melindungi mereka, sebagaimana mereka melindungi fondasi peradaban umat Islam dari perampasan dan penyimpangan syariat.

Buku ini juga banyak berisi informasi tentang peraturan perundang-undangan terkait wakaf, termasuk fatwa MUI Sumut dan fatwa-fatwa MUI di berbagai lapisan, baik MUI Pusat, MUI provinsi maupun MUI daerah Kabupaten/ Kota lain di Indonesia terkait masjid dan wakaf. Buku ini tidak mewakili secara menyeluruh mengenai konsep masjid dan wakaf, juga tidak banyak menyinggung UU Agraria/

¹ Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara). *Konsep Wakaf dalam Islam*, MUISumut.com, 30 Maret 2019, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/03/30/konsep-wakaf-dalam-islam/>, sebelumnya, artikel ini telah dipublikasikan pada November 2012 dan 7 September 2013.

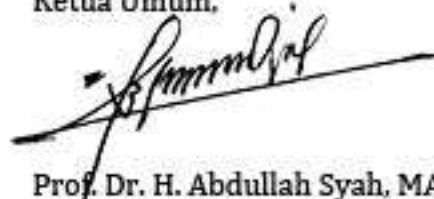
Pertanahan dan UU Yayasan, selain hanya berkaitan langsung dengan lahan masjid dan tanah wakaf.

Selain itu, buku ini juga sangat menganjurkan dilakukannya sertifikasi terhadap tanah wakaf, termasuk untuk masjid, mushalla, madrasah, perkuburan kaum Muslimin dan sebagainya. Sertifikasi tanah wakaf patut dijadikan agenda umat Islam Sumatera Utara ke depan. Dengan adanya sertifikat tanah wakaf, semakin memudahkan Umat Islam untuk melangkah ke agenda berikutnya, membangun profesionalisme pengelolaan masjid dan tanah wakaf, *in syaa Allah*. Tanpa sertifikasi, hal itu cukup sulit untuk dilakukan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ambil peran dalam penerbitan buku ini, terutama Ketua BWI Sumut dan Kakanwil BPN Sumut. Juga kepada semua pakar hukum, pertanahan dan perwakafan dari dalam dan luar negeri. Semoga usaha ini menjadi amal jariah yang diridai Allah, amin.

Medan, 10 Oktober 2019

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara
Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA



KATA SAMBUTAN

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Assalamulaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat dan karunia-Nya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara d.h.i, Komisi Hukum Perundang-undangan, HAM dan Advokasi dapat menerbitkan Buku Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara.

Penyusunan buku ini tentunya dimaksudkan untuk mengungkap fakta, keprihatinan sekaligus sebuah pembelajaran untuk bagaimana kedepan semua kita baik sebagai pribadi muslim maupun pemegang amanah pada sebuah institusi terpanggil hati nuraninya untuk menyelamatkan Rumah Allah berupa masjid maupun dalam arti luas, menyelamatkan harta Allah berupa wakaf.

Apa yang diungkapkan oleh teman teman yang concern dalam mempertahankan eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf yang telah diurai dalam buku ini, mungkin itu baru sebagian kecil dari Kasus Masjid dan tanah wakaf yang terganggu eksistensinya, yang muncul kepermukaan dan dapat dipertahankan kembali. Tetapi kasus kasus lain yang tidak terungkap, menurut kami jauh lebih banyak lagi hanya karena kasusnya jauh dipelosok sehingga tidak mengemuka.

Ancaman terhadap Eksistensi Masjid, Mushollah, Madrasah dan Harta Wakaf pada umumnya terjadi adalah akibat kekosongan hukum

atau regulasi tentang perwakafan di tanah air kita, termasuk karena lemahnya pengadministrasian sehingga harta wakaf tersebut tidak dilindungi oleh dokumen yang memadai selama berpuluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun. Maka tatkala, Nazhir yang menerima amanah untuk memelihara, mengelola harta wakaf meninggal, tidak ada regulasi yang mengatur siapa yang menggantikan dan siapa yang berhak mengangkat penggantinya. Akibatnya Nazhir jadi turun temurun digantikan anaknya seolah menjadi harta warisan. Bagaimana pula jika seorang Nazhir tidak amanah, apa sanksi hukumnya serta berapa lama masa bhakti seorang menjadi Nazhir, belum lagi menyangkut tugas dan kewajiban serta tanggung jawab seorang Nazhir.

Regulasi terhadap perwakafan kita barulah diperjelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagai Implementasinya lahirlah Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai sebuah lembaga Independen dengan tugas utama mengamankan, memajukan dan mengembangkan Perwakafan Nasional, dan mendorong agar harta wakaf menjadi bersifat dengan pengertian harta wakaf tidak saja memiliki nilai ibadah ritual sosial, tetapi mempunyai nilai ekonomis bagi kesejahteraan umat.

Namun walaupun sudah memiliki Undang-Undang Wakaf, Peraturan Pemerintah beserta peraturan-peraturan lainnya yang menjadi turunannya, serta lahirnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak serta merta atau tidak semudah itu dapat merubah keadaan yang sudah cukup mapan terjadi disekitar perwakafan kita selama ini. Harus ada semangat yang sama, persepsi yang sama dan komitmen bersama untuk menjaga eksistensi masjid dan harta wakaf dengan semua elemen yang ada dan sama sama memiliki komitmen untuk memenuhi regulasi yang ada. Hal ini penting, agar ada langkah bersama, tindakan yang sama dan tekad bersama yaitu menyelamatkan harta wakaf yang menjadi kewajiban kita semua sebagai seorang pribadi muslim lebih-lebih lagi bagi yang memegang posisi pada setiap amahan jabatan yang dipercayakan Negara maupun yang dipercayakan umat kepadanya.

Dengan demikian akan dapat diuraikan permasalahan setiap objek wakaf yang ada dan apa solusi yang harus dilakukan sehingga eksistensi harta wakaf aman dari gangguan, ancaman, maupun rayuan para pihak yang menginginkannya.

Semoga dengan terbitnya buku ini akan menggugah nurani kita semua, betapa eksistensi masjid dan wakaf ini kedepan semakin penting untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab kita semua.

Terimakasih, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua

Medan, Shafar 1441 H
Oktober 2019 M



BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Ketua,

Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN Ketua Umum MUI Provinsi Sumatera Utara (Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA)	ix
KATA SAMBUTAN Ketua BWI Prov. Sumatera Utara (Drs. Syariful Mahya Bandar, MAP)	xiii
DAFTAR ISI	xvii
PROLOG: Dr. H. Arso, M.Ag	xxi
BAGIAN PERTAMA : EKSISTENSI MASJID DAN WAKAF DI INDONESIA	3
1. Jumlah Masjid dan Tanah Wakaf	10
2. Masalah Eksistensi Masjid di Sumatera Utara	14
1. Masjid al Ikhlas di Jalan Timor Medan	15
2. Masjid Amal Silaturrahim Perumnas Sukaramai	32
3. Masjid at Thayyibah di Jalan Multatuli Medan	37
4. Masjid Roudhatul Islam Jalan Puteri Hijau Medan	39
5. Masjid Nurul Hidayah Jalan Pancing Medan	40
6. Masjid Taqwa Belawan	42
7. Masjid al Khairiyah Jalan Puteri Hijau Medan	42

8. Masjid Ar Ridho Polonia Medan	42
9. Masjid Masjid al Jihad Pulo Brayan Medan	43
10. Masjid al Ikhlas Jalan Nyiur, Perumnas Simalingkar Medan	43
11. Masjid al Munawwarah, Sarulla Tapanuli Utara	43
12. Masjid Jendral Sudirman Jalan Pattimura Medan	59
13. Masjid Taqwa Polonia Medan	59
14. Masjid Fisabilillah Porsea	60
15. Masjid Taqwa dan Masjid Nurhikmah Aek Loba, Asahan.	63
3. Masalah Eksistensi Tanah Wakaf di Sumatera Utara	63
1. Tanah Wakaf Arakundo (YAPRSBI)	65
2. Yayasan Al Ishlahiyah Binjai	74
3. Tanah Wakaf Tengku Darwisah Sergai	75
4. Rumah Sakit Haji Medan	77
5. Tanah Wakaf Masyarakat Arab Jalan Kuda (Madrasah Arabiyah)	83
6. Tanah Wakaf Jl. Tuasan Medan Timur	83
7. Tanah Wakaf Aras Kabu Deliserdang	88
8. Masalah Tanah Wakaf Lainnya	92

**BAGIAN KEDUA: PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID
DAN TANAH WAKAF DI SUMATERA UTARA. 97**

1. Perlindungan Negara	97
2. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	107
3. Perlindungan Fatwa Majelis Ulama Indonesia	116
4. Advokasi melalui LADUI MUI Sumut	120
5. Perlindungan umat Islam dan Masyarakat	123

**BAGIAN KETIGA : PENATAAN NAZHIR DAN SERTIFIKASI
TANAH WAKAF** 137

1. Menata Kemampuan Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf	142
2. Risiko Hukum Kesalahan Pengelolaan Dana Wakaf	160

3. Penyelesaian Perselisihan Perwakafan	168
4. Sertifikasi Tanah Wakaf di Sumatera Utara	177
5. Kerjasama Untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf	222
BAGIAN KEEMPAT: PENGALAMAN TERBAIK, PEMBELAJARAN DAN CATATAN AKHIR	237
1. Perlindungan Masjid Melalui Wakaf Produktif	248
2. MUI Sumut Menjadi Penggerak Wakaf Produktif Melalui Uang	250
DAFTAR PUSTAKA	255



PROLOG

RUSLAGH ATAS TANAH PERTAPAKAN MASJID AL IKHLAS JALAN TIMOR DINYATAKAN CACAD HUKUM

Bergulirnya reaksi perobohan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor semakin memuncak dan memanans. Oleh karena itu pihak Kodam Bukit Barisan menyelenggarakan pertemuan yang dihadiri oleh pejabat Kodam bersama seluruh pimpinan ORMAS ISLAM, MUI dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Dr. H. Maratua Simanjuntak, selaku Ketua FKUB Sumatera Utara, Dr. H. Arso, SH,M.Ag, yang pada ketika selaku Ketua Bidang Hukum dan Perundang- Undang MUI Sumatera Utara, mewakili Ketua Umum MUI Sumatera Utara, Prof. M. Hatta selaku Ketua Umum MUI Kota Medan, Hamdani Harahap, SH, MH, selaku Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI MUI SUMATERA UTARA) dan beberapa Pimpinan Ormas lainnya yang cukup terkenal dan menggelorakan aksinya agar Masjid Al IKHLAS tetap eksis. Pertemuan diselenggarakan seusai sholat Dzuhur yang didahului makan siang nasi kotak bersama seluruh yang hadir. Setelah acara dibuka oleh protokol (pembawa acara dari pihak Kodam selaku pengundang), kemudian pihak pejabat Kodam menyampaikan presentasi pemaparan panjang lebar hampir satu jam, yang pada intinya menyimpulkan bahwa " RUSLAG ATAS TANAH PERTAPAKAN DIMANA TERLETAK MASJID AL IKHLAS JALAN TIMOR SUDAH SAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT. Maksud pemaparan tersebut sebenarnya dapat diduga diharapkan dapat disepakati oleh seluruh peserta pertemuan untuk menyetujui perobohan Masjid Al Ikhlas tersebut. Untuk itu pembawa acara mempersilakan peserta yang hadir untuk menyampaikan

pendapat atau tanggapan atas hal tersebut. Pada ketika itu agak senyap tak ada yang angkat tangan untuk menyampaikan tanggapan. Maka Saya Dr. H. Arso SH, M.Ag, selaku mewakili MUI Prop Sumut angkat tangan dan oleh pembawa acara dipersilakan untuk langsung menyampaikan pendapatnya. Pada saat itu saya kemukakan yang pada intinya kurang lebih sebagai berikut : " Terima kasih kepada pimpinan (maksudnya pembawa acara) atas kesempatan ini. Pemaparan yang disampaikan panjang lebar oleh Bapak penyaji telah kami ikuti dan perhatikan secara sungguh-sungguh, sehingga menarik dan perlu kami tanggapi. Tadi dikemukakan serangkaian prosedur yang telah ditempuh dengan menunjuk seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berkesimpulan bahwa Ruslagh atas tanah yang dikemukakan penyaji telah sah menurut hukum positif. Hal ini perlu kita cermati bahwa Negara kita yang menganut hukum positif, harus dipahami dengan cermat dan pemahaman yang benar. Berdasarkan undang-undang tentang ketentuan pokok kehakiman, harus dipahami oleh seluruh pejabat penegak hukum bahwa kita menganut hukum positif yang tertulis, namun kita wajib menghargai hukum yang hidup ditengah masyarakat. Oleh karena itu saya berpendapat, oleh karena ruslagh yang dikemukakan tadi tidak menyinggung dan tidak menjelaskan bahwa di atas tanah tersebut adanya bangunan Masjid Al Ikhlas yang sudah terbangun lama sejak dahulu sebagai fasilitas tempat ibadah yang dipergunakan oleh Umat Islam, maka ruslagh yang bapak jelaskan itu CACDAD HUKUM. Hal ini saya nyatakan demikian karena menurut hukum yang hidup ditengah masyarakat, bahwa bangunan Masjid yang sudah dipergunakan sebagai tempat ibadah, hukumnya adalah wakaf, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara". Seketika itu suasana agak terkesima. Ada nada suara dari pejabat Kanwil Kemenag (Sdr. Burhanudin Batubara, jika tidak silap), yang mengomentari bahwa jika ada Masjid untuk perubahan perlu ditempuh prosedur sesuai dengan SKB tiga Menteri. Dan ada seorang lagi suara dari FUI, yang menyatakan jika sudah ada pendapat dari MUI (yaitu pendapat saya tersebut diatas), itulah yang dapat diperpegangi. Oleh karena tidak mencapai kesepakatan tentang ruslagh tersebut untuk menyetujui pembongkoran Masjid Al Ikhlas tersebut, maka pimpinan pertemuan pada ketika itu mengambil keputusan untuk menunda pertemuan tersebut pada hari akan

ditentukan kemudian. Dan pertemuan dinyatakan selesai dan bubar tanpa mengambil kesepakatan apapun.

Kemudian selang seminggu setelah selesai pertemuan tersebut yang belum ada kesepakatan, pihak Kodam BB dengan beberapa orang pejabat utusannya kurang lebih sebanyak 6 orang menghadap langsung beraudensi dengan Ketua Umum MUI dengan mengambil tempat di ruang aula kantor MUI lantai-2, diterima oleh Ketua Umum yang didampingi oleh Saya (DR. H. Arso SH, M.Ag) dan Dr. Maratua Simanjuntak. Namun dalam perbincangan antara utusan Kodam BB tersebut dengan pihak MUI, ketua umum MUI Sumut Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA bersikukuh pada Fatwa MUI Sumatera Utara tahun 1982, bahwa tanah yang dibangun Masjid maka otomatis adalah wakaf. Dan setiap wakaf harus dipertahankan sebagai wakaf, dan MUI Sumatera Utara berpendapat hal yang telah disampaikan oleh Sdr H. Arso dalam pertemuan tersebut sudah benar. Sehingga dipandang pertemuan tersebut belum membuat kesepakatan apapun.

Sebulan kemudian muncul diberita waspada adanya yang mengatasnamakan 40 ormas Islam menyetujui pembongkaran masjid al Ikhlas tersebut dengan imbalan ganti rugi atau satatusnya tidak jelas adanya sebesar Rp.700 juta. Entah siapa yang mengelola pemanfaatan uang yang Rp. 700 Juta dimaksud tidak dapat diperoleh informasi. Wallahu a'alam. Maka pada suatu malam sekitar jam 2 dini hari hingga menjelang subuh terjadi pembongkaran / penghancuran Masjid hingga rata dan beberapa orang yang tinggal di Masjid sekitar 18 orang diamankan di kepolisian. Sejak itu lokasi terpasang tenda, kemah yang bertuliskan pelatihan Cihandak. Akibat tersebut maka jamaah shalat Jumat diadakan persis di tengah jalan Timor yang berlangsung cukup lama ada beberapa kali sholat Jumat. Melalui berbagai dialog dan pertemuan pertemuan menanggapi kondisi tersebut maka akhirnya Masjid Al Ikhlas atas perintah Bapak Panglima Kodam dibangun kembali. Dan hingga sakarang tetap eksis sebagai Masjid tempat beribadah yang tetap meriah jamaahnya. Alhamdulillah.

Dr. H. Arso. M.Ag (Wakil Ketua MUI Sumatera Utara)

Bagian Pertama

**EKSISTENSI MASJID
DAN TANAH WAKAF DI INDONESIA**



BAGIAN PERTAMA: EKSISTENSI MASJID DAN TANAH WAKAF DI INDONESIA

Buku ini merupakan berisi dokumentasi dari rangkaian kegiatan diskusi group terfokus atau *focus group discussion* (FGD) yang kemudian dilengkapi dengan data-data pendukung, baik dari dokumen hukum seperti putusan pengadilan, surat-surat, penelitian-penelitian terkait maupun pemberitaan media.

FGD yang dilakukan melibatkan antara lain Direktur LADUI MUI SU, Hamdani Harahap, Ustadz Sudirman Timsar Zubil dari Forum Umat Islam (FUI), Affan Lubis dan sejumlah tokoh lain yang dikenal sangat aktif dalam membela eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara. Selain itu, pada sesi yang berbeda MUI Sumut juga mengumpulkan para pakar hukum di Sumatera Utara dan mengundang sejumlah instansi terkait di antaranya BPN Sumut, Kemenag Sumut dan BWI Sumut, duduk bersama membahas permasalahan perlindungan terhadap eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara.

Buku ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dan rujukan alternatif pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) antar *stakeholder*, yang direncanakan *in syaa Allah*, akan melibatkan lebih banyak peserta aktif, di antaranya peserta utusan dari seluruh daerah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara. Rakorda tersebut, selain berfungsi sebagai wahana perumusan program-program yang memberikan dampak luas bagi Umat Islam, juga dapat dijadikan momentum penegasan komitmen bersama melalui lahirnya kesepakatan tertulis berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) khususnya terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf. Semoga, segala i'tikad baik

dan sumbangsih pemikiran seluruh elemen umat Islam dan instansi pemerintah dalam proses dan tahapan kegiatan ini bernilai amal sholih dan beroleh keberkahan dari Allah SWT.¹

Menurut Ramlan Yusuf Rangkuti, perlindungan terhadap eksistensi masjid dan tanah wakaf begitu sangat penting mengingat banyaknya masalah yang berhubungan dengan keberadaan masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara, di antaranya, perubuhan masjid, penghilangan masjid, pembakaran masjid, kesulitan pengurusan izin mendirikan bangunan masjid, pemindahan masjid, alihfungsi tanah wakaf, penjualan tanah wakaf oleh anak nazhir, penyewaan tanah wakaf dan kemudian berubah fungsi menjadi tempat yang diperkenankan dalam syari'at; dan sebagainya. Selain itu, masih banyak masjid dan mushalla yang belum bersertifikat wakaf dan masih banyak tanah wakaf yang belum dilengkapi surat-surat sehingga belum dapat disertifikasi. Tak kalah pentingnya adalah, masalah lemahnya pemahaman nazhir selaku manager yang diamanahkan mengelola dan mengembangkan asset umat Islam.²

Hadirnya BPN Sumut dalam diskusi yang dilaksanakan sangat memberikan banyak masuk kepada MUI Sumut, khususnya dalam mendudukan masalah tanah wakaf berdasarkan sudut pandang administrasi pertanahan. Selain itu, BPN Sumut juga cukup memberikan cukup banyak informasi terkait persyaratan sertifikasi, peran dan kewenangan masing-masing pihak dalam pengurusan surat menyurat, proses, tahapan, biaya yang diperlukan serta kewenangan yang dimiliki BPN, hingga pada jenjang yang lebih teknis, juga diberikan masukan mengenai tugas-tugas petugas BPN di tingkat Kecamatan.³

Hadirnya tokoh yang berkompeten mewakili Kementrian Agama Sumatera Utara (Kemenag Sumut) juga tak kalah pentingnya, sehingga dapat memberi masukan kepada MUI Sumut mengenai PTAW dan pembuat akta di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kehadiran

¹ Akmal Syahputra, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

² Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

³ Ramlan Yusuf Rangkuti, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

tokoh-tokoh kunci ini, akan memberi pemahaman yang lebih baik bagi MUI Sumut untuk diteruskan ke MUI Kabupaten/ Kota. Manfaatnya sangat jelas, yakni dapat membantu umat Islam di Sumatera Utara dalam pengurusan surat menyurat terkait sertifikasi masjid, musholla dan tanah wakaf. Walaupun tidak dapat diselesaikan semuanya tahun ini, setidaknya, 33 Kabupaten/ Kota se-Sumatera Utara sudah memulai langkah-langkah yang lebih terarah dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf, termasuk masjid, mushalla, pesantren dan sebagainya. Pertanyaan utama yang hendak dijawab buku ini bukanlah sudah berapa banyak yang disertifikasi? Tetapi, langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh umat Islam untuk menambah sedikit demi sedikit jumlah tanah wakaf, sehingga pada akhirnya diharapkan, semua masjid, musholla, pesanteran dan tanah wakaf lainnya dapat disertifikasi. Sehingga, MUI Sumut tidak dikatakan "cuma bias bercakap saja." Demikian juga elemen umat Islam dan komponen Negara yang lain, agar tidak dikatakan demikian, karena sudah berbuat, sudah berkontribusi, sehingga bisa bercakap dengan orang lain. "Ini yang sudah kami lakukan." Jadi, tidak perlu saling menyalahkan atau menyalahkan pihak lain. Tetapi membenahi diri sendiri, pada langkah selanjutnya membenahi institusi masing-masing jauh lebih bermanfaat.

Banyaknya, persoalan eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara, terlebih sebagian besar terjadi di Kota Medan sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Di kalangan Umat Islam yang memiliki semangat memperjuangkan keberadaan masjid dari perampasan yang dilakukan para pengembang atau pihak lain, terpaksa harus mempertahankan tanah wakaf dengan otot. Orang-orang lapangan ini telah membuat sejarah, bahwa pernah suatu masa Umat Islam harus dengan otot melindungi masjid. Negara terkesan tidak hadir dalam hal ini. Dalam masalah penghancuran Masjid al Ikhlas misalnya, penyelesaiannya dianggap sebagai sebuah keberhasilan bagi Umat Islam mempertahankan masjid tersebut agar tidak digusur. Meskipun awalnya tidak ada surat dan dokumen yang dimiliki, sehingga mempertahankannya harus dengan otot berhadapan dengan preman-preman kafir dan munafik, namun dalam prosesnya Umat Islam mampu menunjukkan kemampuannya berdialog dan menyelesaikan masalah dengan cara yang arif dan bijaksana, sehingga masjid tersebut tidak jadi dipindahkan.

Masjid al Ikhlas, hanya satu dari belasan masjid yang masih membutuhkan saran-saran dan masukan dari seluruh Umat Islam, masih membutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk dicarikan solusinya. Sehingga pada saat Rakorda, berlangsung, MUI Sumut dapat meneruskan masukan dan saran-saran tersebut ke MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.⁴

Hal senada juga dikemukakan oleh Komisi Kumandang MUI Sumut, Hashim Purba, SH, M.Hum. Menurutnya, persoalan tanah wakaf di Indonesia termasuk di Sumatera Utara memang sangat krusial, salah satunya adalah pengalaman sewaktu mempertahankan Masjid al Ikhlas di Jalan Timor. Masih ada beberapa masjid lain yang mengalami ancaman penyerobotan. Memang, di awal mencuatnya masalah itu, tidak ada ketidakpastian hukum, para pembela masjid tidak memegang sepucuk surat pun yang dapat dijadikan legalitas. Sementara pada saat yang sama, mereka berhadapan dengan peraturan, perundang-undangan dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik UU di bidang pertanahan maupun aturan di bidang lain.⁵

Patut disyukuri, dengan terbitnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf). Dalam UU tersebut, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memindahkan miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Menurut Syari'ah, benda wakaf yang dimiliki bersifat tahan lama dan memiliki nilai ekonomis.

Dalam UU Wakaf, selain diatur subjek wakaf, juga diatur objek wakaf. Objek wakaf terdiri dari dua bentuk, benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, salah satunya adalah tanah, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun. Selain UU Wakaf, hukum terkait pertanahan juga terkait dengan hukum agraria, yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pembaharuan Agraria (UUPA).⁶

Dari sisi peruntukannya, UU Wakaf, mengatur peruntukan wakaf, antara lain: Pertama, sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan

⁴ Rangkuti, 2019. FGD...Selasa, 3 September 2019 di MUI Sumut.

⁵ Prof. Dr Hashim Purba, SH, M.Hum (Kom Kumandang MUI Sumut), 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁶ Hashim Purba, 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

kesehatan bantuan fakir miskin, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Peruntukan ini juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan syariat.

Salah satu kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Sumatera Utara yakni berkaitan dengan orangtua yang mewakafkan tanah miliknya kepada nazhir, terjadi sekitar tahun 1963. Oleh anaknya kemudian menggugat tanah tersebut. Sementara para pengurus BKM dan para saksi bahwa tanah tersebut adalah wakaf orang tuanya semunya sudah pada meninggal. Artinya, persoalan wakaf, selalu muncul di belakang hari. Ketika benda wakaf itu masih berada di satu generasi dan orang-orang yang mengelola awal masih hidup. Tetapi, ketika masuk generasi berikutnya dan orang-orang sudah tidak mengetahui lagi sejarah tanah tersebut, maka muncullah masalah. Dalam UU Wakaf, pengaturan wakaf lebih tegas, pengaturannya meliputi hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan terhadap wakaf. UU Wakaf pasal 40 mengatur, wakaf tidak bisa dijadikan jaminan, tidak bisa disita pengadilan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual, tidak bias diwariskan, dan tidak boleh ada pengalihan hak.⁷

Perubahan dalam pengelolaan tanah, benda dan harta wakaf, diatur dalam bagian perubahan, bahwa tidak boleh dilakukan perbahan kecuali ada izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengaturan ini terkait dengan ikrar wakaf. Perubahan yang dimaksud berhubungan dengan kepentingan tata ruang atau perubahan peruntukan kawasan. Perubahan tata ruang propinsi, misalnya, pembangunan jalan.

UU Wakaf juga mengatur mengenai pidana terkait antara lain penyalahgunaan, penyerobotan, prosedur pendaftaran wakaf, sebagaimana mengutip Peraturan Menteri Agraria tahun 2017. Peraturan Menteri tersebut, juga mengatur, untuk mendaftarkan tanah wakaf, pendaftaran harus dibuat atas nama nazhir. Nazhir mengajukan pengajuan dengan melampirkan dokumen, baik berupa Surat Permohonan, untuk tanah wakaf yang berasal eks Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) jika berupa rusun, surat ukur, Sertifikat Hak Milik (SHM), HGB, harus ada ikrar wakaf, pengesahan wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kecamatan; harus melampirkan surat pernyataan dari nazir, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa,

⁷ Purba, *FGD...*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

ruslaag, tidak boleh kepala kantor Pertanahan atas nama nazir, bukan atas nama nazir. Dari sisi kapasitas hukumnya, memang dimungkinkan adanya perubahan nazhir, disebut dengan pengganti, apabila nazhir tersebut telah menyatakan berhenti yang dibuktikan dengan surat berhenti dari kedudukannya, atau telah meninggal dunia. Hal-hal lain yang juga diatur antara lain mengenai organisasi BKM, mekanisme internal, pembubaran, Anggaran Dasar (AD) organisasi, perseorangan yang berubah status, pergantian yang terjadi dan didaftarkan kembali, yang semuanya harus ada penetapan dari BWL.⁸

Masalah-masalah umum harta benda wakaf yang sering terjadi adalah ketika nazhir meninggal dunia. Perlu dicermati adanya Surat persetujuan terkait pengelolaan ahli waris ketika nazhir telah meninggal dunia. Jika nazhir berupa badan hukum, perlu dicermati pada sertifikat wakafnya terbit terlebih dahulu, bagaimana administrasinya di kantor pertanahan dan pencatatannya di buku tanah. Seringkali pewakif tidak memperhatikan potensi masalah umum tersebut. Salah satu masalah yang terjadi, yaitu, saat bulan puasa, seorang anak mendirikan bengkel di atas tanah wakaf yang dikelola oleh alharhum ayahnya (mantan lurah). Ahli waris nazhir tidak mau menyerahkan bengkelnya dengan alasan untuk cari makan. Setelah lelah menasehati, tetapi tetap tak bergeming, akhirnya masyarakat mengambil inisiatif berbagi rejeki, mengumpulkan dana selama 2 Minggu, sehingga akhirnya tanah wakaf dan kios bengkelnya ditebus dengan harga senilai Rp. 400 juta. Pelajaran yang dapat diambil dari masalah ini, adalah pentingnya legalitas dalam pengelolaan tanah dan harta benda wakaf, sebab masih banyak tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas. Sering terjadi masalah tanah wakaf timbul karena semakin tidak jelasnya asal-usul tanah yang akan diwakafkan, sehingga, di belakang hari, tiba-tiba timbul gugatan orang, misalnya yang mengaku sebagai ahli waris.⁹

Dengan demikian, mengetahui sejarah tanah sangat penting dalam mempermudah sertifikasi. Sebenarnya, sertifikasi masjid yang terletak di perumahan karyawan kebun HGU tidak diperpanjang lagi, juga dapat dilakukan. Tentu saja harus melalui pengajuan pelepasan asset dan tanah tersebut memang tidak pernah dikelola lagi. Masalah seperti ini juga terjadi di Sumatera Utara, awalnya dibangun Musholla, kemudian

⁸ Purba, *FGD...*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁹ Purba, *FGD...*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

masyarakat sudah mengganti semua fisik bangunan dan telah menjadi masjid. Sebenarnya, jika ada kemauan dari Kepala Desa, ia dapat mewakili jamaah untuk mengajukan permohonan pelepas aset, karena kebun tidak dikelola lagi merupakan hak Tuhan. Tetapi, nyatanya hingga saat ini masalah legalitas tanah masjid tersebut masih belum *clear*.

Contoh kasus lain adalah Masjid as Shobirin, yang berlokasi tidak jauh dari UIN SU Medan, dalam sejarahnya awalnya adalah Mushalla, terletak di atas tanah yang cukup lebar, yakni seluas 60 m x 58 m, dibeli dengan ganti rugi. Kini menjadi masjid yang cukup untuk menampung 400 jamaah. Masjid ini juga pernah berkonflik dengan pihak pengembang, Citra Land Bagia, karena sempat ditutup dan dipagari besi. Pemagaran masjid itu dilawan oleh Umat Islam dengan kekuatan massa. Selain tetap mempertahankan masjid di lapangan, masalah itu juga dibawa ke pengadilan, dan tanah Masjid as Shobirin dimenangkan oleh Putusan Pengadilan. Salah satu poin penting dalam kasus ini adalah fungsi masjid sebagai fasilitas umum. Di dalam hukum pertanahan, juga dikenal istilah *constatering*, pencocokan asset antara tertulis dengan yang sebenarnya ada di lapangan (lokasi). *Constatering* digunakan dalam berita acara terkait Masjid itu. Selanjutnya, dikeluarkan sita jaminan. Bersama sejumlah ormas Islam, masjid tersebut kembali direbut. Jelasnya, dalam proses penyelesaian masalah, umat Islam sellau menemukan jalan keluarnya. Jadi, begitu pentingnya sertifikat tanah wakaf untuk masjid dan sertifikasi tanah wakaf.¹⁰

Hasyim Purba menegaskan, masalah lain yang terkait eksistensi masjid dan tanah wakaf adalah mengenai istibdal. Pembolehan istibdal juga tidak sembarangan, perlu argumentasi dan alasan yang syar'i, apalagi alasan sebenarnya adalah hanya untuk kepentingan pengembang. Sewaktu masjid al Ikhlas di Jalan Timor hendak dipindahkan, kepada Gubernur Sumut saat itu ia katakan, "Pak Gatot, walau pun kalian bangun seratus masjid kalian bangun, jika letaknya tidak di Jalan Timor," Umat Islam dalam masalah itu telah berkorban dan mengalah, sampai akhirnya tidak memperlmasalahkan lagi ketika masjid al Ikhlas dibangun kembali di Jalan Timor, meskipun masih ada selisih luas tanah dengan luas masjid yang dirobohkan sebelumnya. Hal itu dapat dimaklumi mengingat begitu sulitnya perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun.¹¹

¹⁰ Purba, FGD..., Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

¹¹ Purba, FGD..., Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Jumlah Masjid dan Tanah Wakaf

Menurut Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Djusuf Kalla, jumlah masjid yang terdaftar di Indonesia sebanyak 800.000 masjid, jumlah itu sudah termasuk mushalla, tanpa pernah menyebutkan angka yang pasti.¹² Jumlah masjid yang lebih spesifik baru dikemukakan oleh Ditjen Bimas Islam Kemenag (24 November 2018). Data masjid dan mushalla yang telah diinput melalui aplikasi SIMAS sebanyak 511.899. Jumlah ini terdiri dari 242.823 masjid dan 269.076 mushalla. Data terakhir yang dihimpun secara manual melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi, ada 741.991 rumah ibadah umat Islam di seluruh Indonesia, dengan rincian 296.797 masjid dan 445.194 mushalla. Dengan demikian, masih ada sekitar 230 ribuan data yang masih dalam proses verifikasi dan validasi untuk kemudian diinput ke dalam SIMAS.¹³

Situs resmi Kemenag (2004), dalam Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia (SIMAS) menyebutkan, di Sumatera Utara terdapat sebanyak 9705 masjid, sebagian berstatus wakaf, sebagian di antaranya masih berstatus SHM (sertifikat hak milik).¹⁴ Situs Dream pula mencatat, secara spesifik masjid di Sumut terindeks sebanyak 2391, sebanyak 100 di antaranya tercatat sebagai Musholla.¹⁵ Di Kota Medan, jumlah masjid tercatat mengalami peningkatan, dari 1040¹⁶ masjid pada tahun 2013, menjadi 1300 masjid pada tahun 2016.¹⁷ Menurut data Kementerian Agama pada tanggal 1 April 2001, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 358.710 lokasi dengan luas 819.207.733,99 atau 8 juta hektar lebih.

¹² Wapres JK: Ada 800 Ribu Masjid yang Terdaftar di Indonesia, *TribunNews*, Sabtu, 10 November 2018 18:25 WIB, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-indonesia>

¹³ Kemenag: Kini Data Masjid dan Mushalla Tersedia di Aplikasi SIMAS, *RRI.co.id*, 24 November, 2018, 19:30, http://rri.co.id/post/berita/602948/nasional/kemenag-kini_data_masjid_dan_mushalla_tersedia_di_aplikasi_simas.html

¹⁴ Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, diakses dari http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/9700/?provinsi_id=2

¹⁵ Daftar Masjid/ Musholla di Sumatera Utara, <https://m.dream.co.id/sim/sumatera-utara/index240.html>

¹⁶ Alhamdulillah! Kota Medan Miliki 1.040 Masjid, *BeritaSumut*, Jumat 04 Januari 2013 20:53:00, diakses dari <http://beritasumut.com/peristiwa/Alhamdulillah--Kota-Medan-Miliki-1-040-Masjid>

¹⁷ 1300 Masjid di Medan, *Akhyar: Alhamdulillah, Pertumbuhan Umat Islam Pesat*, *Sentral Berita* 17 April 2016, diakses dari <https://sentralberita.com/2016/04/konsep-otomatis-368/>

Sebanyak 76% dari jumlah itu sudah memiliki sertifikat, sementara 24% lagi belum memiliki sertifikat. Padahal, tanah seluas ini, bila dikelola secara produktif, tentunya membawa hasil yang cukup besar yang dapat membantu kemajuan ekonomi umat.¹⁸

Data Departemen Agama sampai dengan September 2002 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362.471 lokasi/persil dengan luas 538.198.586 M². Namun bila dilihat dari segi pendaftarannya pada lembaga yang berwenang dalam hal ini BPN (Badan Pertanahan Nasional), baru sebanyak 75 % tanah wakaf yang terdaftar sedangkan sisanya 25 % belum mendapat sertifikat. Adapun di Sumatera Utara malah lebih parah lagi dari 16.505 lokasi, tanah wakaf yang terdaftar baru 7.675 (46,50 %) lokasi, sebuah realitas implementasi hukum yang sangat rendah dibanding dengan rata-rata nasional.¹⁹ Data wakaf yang dirilis Depag pada Mei 2004 atau 2 tahun kemudian, luas tanah wakaf yakni seluas 1.566.672.406.

Dari ketiga data yang disebut berasal dari sumber yang sama dapat terlihat betapa tidak sinkronnya data tanah wakaf di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, baik dari segi jumlah lokasi maupun luasnya.

Data Tanah Wakaf di Indonesia 2004

No	PROPINSI	LUAS TANAH WAKAF (M²)
1	DI Aceh	64.176.332,00
2	Sumatra Utara	100.898.713,00
3	Sumatra Barat	6.546.488,00
4	Riau	688.977.314,00
5	Sumatra Selatan	5.688.774,00
6	Bengkulu	9.381.617,00

¹⁸ Ramli Abdul Wahid (Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi serta Anggota Komisi Fatwa MUI SU), Medan, 23 Januari 2014. *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, diakses dari <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/>

¹⁹ Data diperoleh dari Kantor Agama Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara tahun 2006

7	Jambi	15.314.912,41
8	Lampung	17.942.504,30
9	DKI Jakarta	9.831.478,23
10	Banten	22.293.671,00
11	Jawa Barat	58.755.959,06
12	Jawa Tengah	54.909.003,68
13	DI. Jogjakarta	2.076.481,10
14	Jawa Timur	100.681.062,00
15	Kalimantan Barat	30.898.209,00
16	Kalimantan Tengah	4.830.556,00
17	Kalimantan Selatan	11.977.962,09
18	Kalimantan Timur	3.711.692,11
19	Sulawesi Utara	3.307.508,00
20	Sulawesi Tengah	7.184.153,00
21	Sulawesi Selatan	28.466.621,80
22	Sulawesi Tenggara	4.562.396,00
23	Bali	1.247.938,00
24	Nusa Tenggara Barat	23.941.033,55
25	Nusa Tenggara Timur	4.672.084,98
26	Maluku	29.066.523,00
27	Maluku Utara	1.888.019,00
28	Gorontalo	393.310,00
29	Papua	249.871.107,00
30	Bangka Belitung	3.178.983,00
Total Jumlah		1.566.672.406

Sumber : Data Wakaf DEPAG RI per Mei 2004²⁰

²⁰ Danny Alit Danardono, *Wakaf Produktif, Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf di Propinsi DKI Jakarta)*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2008, h.1, diakses dari <https://docplayer.info/amp/68557229-Lampiran-a-data-tanah-wakaf-di-indonesia.html>, lihat juga, lib.ui.ac.id/file?file=digital/117216-T%2024969-pengaruh%20wakaf-lampiran.pdf

Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia²¹

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Aceh	13.178	7.211,23	6.384	877,72	6.794	6.333,51
2.	Sumatera Utara	10.857	8.223,16	6.257	793,51	4.600	7.429,65
3.	Sumatera Barat	5.011	606,04	3.520	416,49	1.491	189,55
4.	Riau	7.912	2.057,64	2.761	452,87	5.151	1.604,78
5.	Jambi	6.227	988,96	3.291	399,61	2.936	589,35
6.	Sumatera Selatan	3.942	941,62	1.961	146,96	1.981	794,67
7.	Bengkulu	2.294	408,69	1.643	235,17	651	173,52
8.	Lampung	11.484	5.483,43	6.919	2.778,83	4.565	2.704,60
9.	Kep. Bangka Belitung	1.093	201,08	749	150,90	344	50,18
10.	Kepulauan Riau	1.367	238,07	415	61,13	952	176,94
11.	D K I Jakarta	6.580	266,03	4.073	157,43	2.507	108,60
12.	Jawa Barat	70.106	4.862,84	38.888	2.212,72	31.218	2.650,12
13.	Jawa Tengah	92.699	4.641,43	69.180	3.430,83	23.519	1.210,60
14.	D I Yogyakarta	9.880	350,15	8.920	311,93	960	38,22
15.	Jawa Timur	61.679	4.070,01	33.962	2.204,02	27.717	1.865,99
16.	Banten	15.276	1.065,89	8.533	550,79	6.743	515,10
17.	Bali	1.433	208,94	1.293	187,58	140	21,36
18.	Nusa Tenggara Barat	8.828	1.348,05	5.658	859,28	3.170	488,76
19.	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26	985	209,90	322	125,36
20.	Kalimantan Barat	2.647	523,21	1.525	244,24	1.122	278,97
21.	Kalimantan Tengah	2.994	608,17	1.804	336,65	1.190	271,52
22.	Kalimantan Selatan	7.845	912,99	7.020	788,89	825	124,10
23.	Kalimantan Timur	2.563	656,07	1.252	197,68	1.311	458,39
24.	Kalimantan Utara	403	131,82	153	98,67	250	33,15
25.	Sulawesi Utara	775	102,78	344	34,40	431	68,37
26.	Sulawesi Tengah	2.145	895,07	1.369	138,60	776	756,47
27.	Sulawesi Selatan	7.109	905,78	4.432	361,20	2.677	544,58

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*, Siwak Kemenag, diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_yanah_wakaf.php

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
28.	Sulawesi Tenggara	1.099	109,13	827	71,37	272	37,76
29.	Gorontalo	1.853	383,43	938	271,55	915	111,88
30.	Sulawesi Barat	2.945	520,24	936	108,52	2.009	411,72
31.	Maluku	436	62,96	205	34,36	231	28,59
32.	Maluku Utara	313	46,72	225	25,37	88	21,35
33.	Papua	287	59,97	141	19,28	146	40,69
34.	Papua Barat	44	18,12	29	2,92	15	15,20
		Jumlah	364.611	49.444,98	226.592	19.171,38	138.019
						30.273,61	

Masalah Eksistensi Masjid di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, tercatat sedikitnya belasan masjid telah mengalami penghancuran, pengusuran, permasalahan hukum atau gangguan. Angka pastinya, belum didapat. Di antara contoh kasus penghancuran masjid adalah Masjid at Thoyyibah, Masjid Raudhatul Islam dan Masjid al Ikhlas di Jalan Timor Kecamatan Medan Timur.

Masjid at Thoyyibah dan Masjid Raudhatul Islam di Jalan Peringatan Kelurahan Silalas Kecamatan Medan Barat yang berada di tengah-tengah masyarakat, sedangkan Masjid al Ikhlas berada di lingkungan militer (Hubdam I/ BB).²²

Selain digusur, ada pula masjid yang hilang, yaitu Masjid Jendral Sudirman di Komplek Kavaleri Padang Bulan; ada pula masjid yang bermasalah dengan pengembang dan pengusaha, yaitu masjid Nur Hidayah Jalan Pancing, Masjid ar Ridho, Masjid Taqwa dengan hotel Hermes di Polonia,²³ ada lagi, Masjid al Hidayah di Komplek PJKA Gang Buntu Medan dan Masjid ar Ridho di Komplek Kodam Polonia.

Wakil Sekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain, pada Selasa, 27 Maret 2019 menegaskan, sedikitnya 13 buah masjid yang pernah mengalami pengusuran dan dijerat masalah lain di Sumatera Utara. Penegasan itu

²² Sudirman Timsar Zubil, 2019. (Ketua Umum FUI Sumatera Utara/ Ketua BKM Al Ikhlas) *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, Senin, 05 Desember 2011, 13:47:38 WIB, diakses dari <http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2011/12/05/16913/fenomena->

²³ Tengku Zulkarnain, 2019. *Rencana...*

sekaligus membantah pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumatera Utara (Poldasu) Kombes Rina Sari Ginting, bahwa berita tentang ada masjid yang digusur di Sumatera Utara adalah hoax.²⁴ Dikatakan, Kota Medan merupakan daerah yang paling banyak berkontribusi menyakiti umat Islam. Lebih dari 10 masjid yang dirobohkan, digusur, dilenyapkan atau dipindahkan oleh pengembang keturunan Cina, pemangku kepentingan, atau pengusaha lainnya. Bahkan, ada masjid yang sudah punya surat wakaf resmi dari negara pun digusur dan dirobohkan di kota Medan.²⁵

1. Masjid al Ikhlas di Jalan Timor Medan

Masjid al Ikhlas Medan sempat diruntuhkan dan dimusnahkan. Kejadiannya tahun 2011 silam. Lokasi tanah juga sudah dipagar. Tapi Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara (Sumut) dan Masyarakat Islam serta Ormas-ormas Islam di Medan terus berjuang. Akhirnya, dengan keputusan Jendral TNI Edi Pramono, KASAD saat itu, *Alhamdulillah*, masjid ini dikembalikan ke masyarakat Islam dan dibangun bertingkat dua, walau dengan ukuran tanah yang berkurang banyak. Terimakasih kepada Bapak Jendral Edi Pramono yang telah mengembalikan Masjid al Ikhlas.²⁶

Masjid al Ikhlas yang berlokasi di Jalan Timor No 23, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara telah berdiri sejak 1975, merupakan salah satu masjid tertua di wilayah itu. Namun, Rabu, 4 Mei 2011, tepat pukul 00.55 WIB dini hari, bangunan Masjid al Ikhlas mulai dirobohkan dengan menggunakan tiga bulldozer dan beko, hingga rata dengan tanah. Berikut sejarah perjuangan mempertahankan eksistensinya:

²⁴ Tengku Zulkarnain, 2019, *Rencana...*

²⁵ *Terkait Isu Penggusuran 12 Masjid di Sumut, Poldasu: Itu Hoax!!*, MetroOnline, Co, Senin, 26 Maret 2018, 13:55WIB, <https://www.metro-online.co/2018/03/terkait-isu-penggusuran-12-mesjid-di.html> Metro_Online.co; lihat juga Tengku Zulkarnain, *Rencana Jahat Penggusuran Masjid Amal Silaturrahim di Medan*, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-penggusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medantengku-zulkarnaintida/1651091238317321/>

²⁶ *Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid...; Tengku Zulkarnain, Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

Di bawah ini kronologis pembongkaran Masjid al-Ikhlas tersebut:

- 12 Mei 2009, rencana pembongkaran Masjid al Ikhlas telah dimulai, ditandai dengan dibongkarnya plang nama Masjid al Ikhlas.
- 13 Mei 2009, Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI SU) beraudensi dengan Dandim, memohon dukungan atas penolakan perobohan Masjid al Ikhlas. Di hari yang sama, Pangdam ke lokasi Masjid dan menunda pembongkaran Masjid al Ikhlas.
- 16 Juli 2009, FUI SU beraudensi kepada Pangdam I/ Bukit Barisan (BB) yang diterima Mayjend Burhanuddin Amin di Makodam I/ BB. Pertemuan silaturahmi itu diawali dengan saling tukar cenderamata, dilanjutkan dengan pembicaraan berkisar soal-soal agama dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, FUI SU mewakili jamaah Masjid al Ikhlas menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan bantuan beliau membuka kembali akses masuk ke Masjid al Ikhlas. FUI SU juga meminta kepada Pangdam untuk berkenan memberikan payung hukum tertulis agar keberadaan Masjid al Ikhlas dapat dipertahankan.
- 2 Desember 2009, audensi yang kedua FUI kepada Pangdam I/BB Burhanuddin Amin. Pangdam menyosialisasikan proses/langkah *ruislaag* yang telah dilakukan oleh pihak Kodam I/BB. Pangdam menyatakan bahwa sebagai prajurit beliau tidak mungkin bertentangan dengan atasannya dan harus menyerahkan Aset Kodam I/BB berupa eks. Kantor Hukdam I/BB, termasuk Masjid al Ikhlas kepada pengembang.²⁷
- 5 Februari 2011, masjid akan dibongkar oleh Kodam I / BB. Kosen dan 200 lembar atas seng telah sempat dibongkar. FUI menyampaikan kepada Pengawas yang memimpin pembongkaran tersebut bahwa janji dari Pangdam I / BB yang akan terlebih dahulu membangun masjid pengganti sebelum Masjid al Ikhlas dibongkar. Pengawas pembongkaran yang juga Prajurit Kodam I/BB itu mengatakan tidak tahu adanya janji Pangdam tersebut dan karenanya ingin menanyakan kepada atasannya. Setelah menghubungi atasannya dengan telepon seluler, pengawas

²⁷ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

pembongkaran tersebut memerintahkan kepada para tukang untuk berhenti melakukan pembongkaran. Selanjutnya dikarenakan Nazir Masjid al Ikhlas telah ditarik dari kesatuannya, untuk mengisi kekosongan pengelolaan masjid, FUI SU berinisiatif dengan membuka Posko bersama Ormas-ormas Islam lain yang sepaham guna mempertahankan eksistensi Masjid al Ikhlas. Jamaah Masjid al Ikhlas bermusyawarah dan memilih nazhir yang baru.²⁸

- 7 Februari 2011, FUI SU dan Ormas Islam menggelar aksi unjuk rasa menolak pembongkaran Masjid al Ikhlas. FUI SU diterima oleh Komisi A dan E DPRD-SU. DPRD meminta agar Pihak pengembang tidak melakukan perobohan masjid sebelum proses hukum selesai.²⁹
- 14 Februari 2011, digelar rapat dengar pendapat Ormas Islam dengan Komisi A & E DPRD Sumut, Kodam I/BB, Kanwil Kemenag SU, MUI Kota Medan, PT Ganda Reksa Mulya (GRM) dan jamaah Masjid al Ikhlas, Jl Timor Medan. Hadir dari Komisi E DPRD Sumut, Aduhut Simamora, Hj. Rahmianna Delima, Nurhasanah S.Sos, Enda Mora Lubis, Megalia Agustina, Zulkifli Husein, H. Ahmad Husein Hutagalung, Arlene Manurung, Dari Komisi A DPRD Sumut, H. Hasbullah Hadi, Sony Firdaus, H Raudin Purba, Nurul Azhar Lubis. Dari Kodam I/BB, Kol Inf. Broto, Letkol Inf Azhar M, Letkol Inf Hariyono, R. Napitupulu, Dari Kanwil Kemenagsu, Kandepag Kota Medan dan rombongan. Dari Ormas Islam, S. Timsar Zubil, Affan Lubis, Irwansyah, Heriansyah, R. Setia Budi, Indra Suheri, Rony R Siregar, M Hadi Nainggolan, Sarjana, SH. Dari PT GRM, Taufik Sitepu, SH. Rapat itu antara lain menyepakati, memang bangunan masjid adalah wakaf, tanah milik TNI. DPRD Sumut mengingatkan PT GRM agar jangan ada pembongkaran terhadap Masjid al Ikhlas karena berpotensi masalah sosial yang dapat memicu konflik horizontal dan menimbulkan isu SARA. DPRD Sumut juga meminta Pemko Medan menahan izin pembangunan di lokasi Masjid sebelum masalah diselesaikan. Bila diizinkan umat Islam dapat membeli tanah tersebut. DPRD Sumut akan memanggil lagi PT

²⁸ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

²⁹ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

GRM untuk membicarakan tapak tanah itu.³⁰ Dalam pertemuan dengan Komisi A dan E DPRD Sumut, melalui kuasa hukumnya, pihak PT. GRM menegaskan tidak akan pernah melepaskan asset miliki mereka. Padahal, Ketua Komisi A Drs. Hasbullah Hadi SH, yang memimpin pertemuan tersebut telah meminta agar PT GRM melepas lahan Masjid al Ikhlas. Bila perlu Umat Islam membayar harga lahan tersebut. Namun, pihak pengembang tetap bersikukuh agar lahan Masjid al Ikhlas diserahkan kepada mereka.³¹

- 23 Februari 2011, Rapat bersama Pimpinan Kemenag Medan, MUI Medan, DMI Medan dan LADUI-SU. Memutuskan bahwa masjid adalah harta wakaf yang harus dipertahankan. Dalam kasus Masjid al Ikhlas, akan dipertahankan sesuai prosedur yang ada. Opsi terakhir yang bisa ditempuh adalah tanah akan dibeli sehingga pertapakan Masjid tidak beralih fungsi.
- 10 Maret 2011, Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI), telah membuat sebuah *Legal Opinion Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Masjid al Ikhlas dan menyimpulkan bahwa perlu kiranya MUI Sumatera Utara Membuat Fatwa agar Pembongkaran terhadap Masjid Al Ikhlas tidak dilakukan. Nomor surat laporan: 01/ADV-MUI-SU/III/2011.
- 17 Maret 2011, digelar pertemuan dengan Kodam I BB, dihadiri Kemenag Kota Medan, MUI Kota Medan, MUI Sumut. Umat Islam diwakili oleh MUI, Kemenag dan Ormas Islam yang hadir satu suara agar Masjid al Ikhlas tidak dibongkar.
- 21 Maret 2011, Pihak PJKA menyurati Pihak Kenadziran Musholla Al Abror (yang diklaim Kodam sebagai Masjid Pengganti Masjid Al Ikhlas), dengan nomor surat : JB.310/III/44/DIV-2011, bertanggal 21 Maret 2011. Inti surat tersebut menjelaskan bahwa Pembangunan Musholla al Abror tidak pernah diizinkan dan agar pembangunan segera dihentikan. Surat tersebut juga ditembuskan kepada: Kakandepag Kota Medan, Ketua MUI Kota Medan, KUA Kecamatan Medan Timur.
- 23 Maret 2011, pihak Kodam I/BB mengadakan sholat Zuhur bersama di Masjid al Ikhlas, dilanjutkan dengan pemberian

³⁰ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

³¹ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

Tausiyah kepada jamaah masjid dari Bintal TNI AD. Berdasarkan Undangan dari Kodam I/BB dengan No. Surat: B/143/III/2011, mereka memasang plang di depan Masjid al Ikhlas, Bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Milik TNI AD Bersertifikat No 847, AN Dephan Cq TNI AD Kodam I/BB. Dilarang Membangun dan Menduduki Tanpa Izin Pemilik. Diancam KUHP 551." Selain itu mereka juga membangun Tenda/ Camp Pelatihan di lokasi Masjid al Ikhlas. dan memasang spanduk bertuliskan "Latihan Jihandak Yon Zipur dalam Rangka Antisipasi Teror di Kota Medan dan sekitarnya."³²

- 27 Maret 2011, MUI Kota Medan mengeluarkan fatwa dengan No: 47/Kep/MUI-MDN/III/2011 tentang Status Tanah Yang Dibangun di Atasnya Masjid. Yang Memutuskan "bahwa tanah yang direlakan pemiliknya untuk dibangun di atasnya masjid adalah wakaf, walaupun tidak diikrarkan."
- 11 April 2011, FUI SU mengadukan Perihal Sengketa Masjid Al Ikhlas dan Upaya perobohannya ke Komnas HAM, di Jakarta. Diterima oleh Jhony Nelson Simanjuntak dan Bakti Eko. Komnas HAM berjanji akan melakukan investigasi terhadap tindakan pengrusakan dan pembongkaran sejumlah masjid di Medan, dan akan menanyakan langsung Poltabes Medan untuk mengusut dan menangkap pelaku.³³
- 25 April 2011, TNI Kodam I/BB membongkar tenda/camp yang terdapat di lokasi Masjid Al Ikhlas. Namun hanya beberapa jam, kemudian, camp dipasang kembali.³⁴
- 26 April 2011, KASAD berkunjung ke Medan. Pada hari yang sama, dilaksanakan Pertemuan Kodam I/BB dengan 40 ormas yang diundang sesuai dengan Undangan dari Kodam I/BB dengan Nomor: B/1010/IV/2011. Pertemuan itu beroleh sebuah kesepakatan bahwa Masjid al Ikhlas direlakan untuk dibongkar dengan kompensasi Rp. 700 Juta rupiah yang akan dialokasikan untuk pembangunan masjid-masjid di Kota Medan dan pengembangan Ormas-Ormas yang hadir. Sekitar pukul 19.00

³² *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

³³ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

³⁴ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

WIB, TNI Kodam I/BB membongkar Tenda/Camp Pelatihan dan keluar dari lokasi Masjid al Ikhlas.

- 28 April 2011, sebanyak 44 Pengacara Pembela Masjid al Ikhlas resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Nomor Register 220/Pdt.G/2011/PN Mdn. Setelah didaftarkan, TPM menyampaikan surat tanggal 28 April 2011 Nomor 01/TPM-A/IV/2011 kepada Panglima Kodam (Pangdam) I/BB yang isinya agar Pangdam I/BB memberikan perlindungan kepada Masjid al Ikhlas untuk tidak dilakukan pembongkaran. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Bapak Presiden RI, Bapak Wakil Presiden RI, Bapak Ketua DPR RI, Bapak Ketua DPD RI, Bapak Menteri Agama RI di Jakarta, Bapak Menteri Pertahanan RI, Bapak Panglima TNI, Bapak KASAD TNI, Bapak Kapolri, Bapak Ketua Komnas HAM RI, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Bapak Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Ketua Majelis Ulama Propinsi Sumatera Utara, Bapak Ketua DPRD Kota Medan, Bapak Walikota Medan, Bapak Kapolresta Medan, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota, Bapak Kapolsektas Medan Timur.
- 2 Mei 2011, Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI SU) dan Perwakilan ormas Islam beraudiensi dengan Kapoldasu yang diwakili oleh Kabid Binkum Polda Sumatera Utara, Jhon Henry. Dalam audiensi tersebut, diharapkan Polri dapat mengamankan Masjid. Hal ini dikarenakan adanya isu bahwa Masjid akan segera dirobohkan oleh Kodam I/BB bersama-sama ormas Islam yang lain yang berpotensi terjadi konflik horizontal antar ormas-ormas Islam. Kabid Binkum Menjelaskan, hanya bisa membantu pengamanan kalau status Stanfas Masjid sudah keluar dari Pengadilan, atau ada rekomendasi dari Gubernur dan DPRD Provsu.
- 3 Mei 2011, sebanyak 3 Mobil Brimob disiagakan di sekitar lokasi Masjid al Ikhlas. Kabid Binkum Kapoldasu, Jhon Henry bersilaturahmi ke Masjid al Ikhlas dan menjelaskan kembali bahwa Polisi hanya akan mengamankan UU dan peraturan yang ada. Jhon Henry juga mengakui sudah mendapatkan informasi bahwa Gubsu

sudah meminta Pangdam agar menunda pembongkaran Masjid al Ikhlas.³⁵

- 4 Mei 2011 Pukul 00.55 WIB dini hari, terjadi penghancuran Masjid al Ikhlas di Jalan Timor Medan.³⁶ Ratusan orang tak dikenal (OTK) masuk ke dalam Masjid al Ikhlas.
- 4 Mei 2011, digelar pertemuan antara Dandim dan MUI di Kapoldasu.
- 5 Mei 2011, FUI SU menggelar diskusi dengan Kontras Sumut, dan mendapatkan informasi bahwa tanggal 3 Mei 2011 Kapoldasu telah meminta Kodam I/BB agar tidak membongkar Masjid Al Ikhlas.³⁷
- 6 Mei 2011, sholat Jum'at bersama dilaksanakan di Jl. Timor, di depan reruntuhan Masjid al Ikhlas yang dipimpin oleh KH M al Akhattat dari Jakarta. Dilanjutkan dengan Aksi Demo ke DPRD Sumut, mengutuk dan meminta agar pelaku penyerangan jamaah Masjid diungkap dan Masjid al Ikhlas dibangun kembali; serta menuntut Pangdam I/BB Leo Siegers dicopot dari jabatannya. Pihak DPRD Sumut berjanji dalam waktu 1 minggu akan berkoordinasi dan memanggil pihak-pihak terkait.
- 9 Mei 2011, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI) Sumut mengeluarkan fatwa bahwa penghancuran masjid al Ikhlas adalah haram.³⁸ Temuan-temuan selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memberi petunjuk yang mendukung pernyataan MUI Sumut itu.³⁹ Pada saat yang hampir bersamaan, sungguh luar biasa perhatian DPR RI terhadap kasus Gereja Yasmin yang pembangunannya bermasalah itu. Kenapa untuk masjid Al Ikhlas yang telah dihancurkan secara melanggar hukum (tengah malam dan tidak memenuhi prosedur lainnya) itu, DPR RI bersikap lain? Apakah dikarenakan jemaah masjid Al Ikhlas taat hukum dan bersikap santun lalu dirasa tidak perlu mendapat prioritas perhatian? Sungguh, kalau begitu logika

³⁵ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

³⁶ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

³⁷ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

³⁸ *MUI Sumut: Penghancuran Masjid Al Ikhlas Haram!* Harian Mandiri, 9 Mei 2011.

³⁹ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

para anggota dewan yang terhormat sangat menyedihkan dan berbahaya, karena tidak adil!⁴⁰

- 10 Mei 2011, persidangan pertama atas gugatan kepada Kodam I/BB seharusnya digelar. Namun Ketua Majelis Hakim menunda sidang dikarenakan surat kuasa yang diberikan Kodam I/BB kepada Kuasa Hukum, belum ditandatangani oleh Pangdam I/BB Leo Siegers.
- 15 Mei 2011 FUI SU dan Ormas Islam, bersilaturahmi kepada Tuan Syekh Haji Hasyim al Syarwani, Guru besar Besilam. Dalam silaturahmi tersebut, Tuan Syekh menitikkan air mata tanda sedih dan kecewa dengan informasi yang disampaikan FUI SU dan Ormas Islam Sumut atas dihancurkannya Masjid Al Ikhlas, Jl Timor Medan. Menurut beliau secara hukum Islam, secara tegas menyatakan bahwa pembongkaran masjid jelas jelas melanggar aturan. Tidak ada yang boleh menghilangkan hak wakaf.⁴¹ Syekh Basilam menyatakan kekecewaannya saat mendengarkan laporan bahwa Masjid al Ikhlas Jalan Timor Medan telah dibongkar oleh pihak Kodam I/BB apalagi dilakukan di tengah malam. Sekretaris Umum Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Leo Imsar Adnan didampingi Ketua FUI Medan Rahmat Setiabudi, Bendahara Hadi dan anggota DPRD Sumut, Enda Mora Lubis mengatakan, pembongkaran Masjid al Ikhlas Jalan Timur yang berada di atas tanah TNI AD Eks kantor Hubdam I/BB itu dinilai sebagai perbuatan haram sesuai dengan fatwa MUI Sumut. MUI Sumut pernah mengeluarkan fatwa bahwa masjid itu adalah tanah wakaf sebab sudah ada dari dulu. Difatwakan, tanah wakaf tidak bisa diperjualbelikan, dihibah ataupun diwariskan kepada siapapun.⁴² FUI menilai, pihak Kodam I/BB tidak konsisten dengan ucapannya. Beliau mensinyalir nuansa KKN yang cukup

⁴⁰ DPR RI akan Fasilitas Pertemuan antara Pemerintah Pusat, Pemkab Bogor dan Jemaat Gereja Yasmir, Kompas, 30 November 2001, h. 4, dalam Sudirman Timsar Zubil, 2019, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁴¹ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴² *Ulama Sumut Tangisi Masjid yang Dibongkar*, Hidayatullah, Jum'at, 20 Mei 2011, 09:56 WIB <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/05/20/50131/ulama-sumut-tangisi-masjid-yang-dibongkar.html>

kuat dalam membebaskan lahan itu ke pengembang dan ini mestinya jadi perhatian pemerintah.

- 20 Mei 2011 FUI-SU dan Ormas Islam menggelar Aksi Unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) menuntut sikap dari Gubsu atas perobohan paksa Masjid al Ikhlas yang merupakan wakaf dan statusnya masih dalam sengketa di Persidangan PN Medan. Namun dalam aksi itu, Gubsu tak bersedia menemui demonstran, sehingga FUI SU dan Ormas Islam membubarkan diri dengan tertib.⁴³
- 26 Mei 2011, pertemuan dengan Kodam I/BB, Ormas Islam, Kemenag Sumut, DPRD Medan, DPRD Sumut dan Tuan Syekh Besilam digelar. Dalam pertemuan tersebut, Kasdam menyatakan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembongkaran al Ikhlas adalah TNI c/q Kodam I/BB. Umat Islam saat itu satu suara dan meminta pihak Kodam I/BB dan Pengembang mendirikan kembali Masjid al Ikhlas. BKPRMI yang hadir dalam pertemuan tersebut yang diwakili oleh Syaifudin Awi menandakan, hanya 1 yang bisa menyelesaikan kasus ini, yaitu bangun kembali Masjid al Ikhlas di tempat semula. DPRD Sumut diwakili oleh Husein Hutagalung menyampaikan permohonan kepada Pangdam I/BB agar berkenan kiranya mendekati pengembang dan merelakan tanah di mana berdiri Masjid al Ikhlas untuk dilepas dan diserahkan kepada umat, atau kalau perlu dibeli. "Apalah artinya dari sekian Miliar dana yang ada, sedikit tanah tersebut direlakan untuk umat Islam, dan kalau perlu dibeli," gugah Hutagalung.⁴⁴
- 2 Juni 2011, Diskusi Publik dengan tema "Masjid al Ikhlas antara Wakaf dan Bisnis" dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel, Medan. Bertindak sebagai pembicara Ust Tengku Zulkarnaen, Hasyim Purba, SH. M.Hum, Ust Sudirman Timsar Zubil, Irwansyah, SH. M.Hum. Diskusi itu melahirkan sejumlah rekomendasi.
- 10 Juni 2011, FUI, KAHMI Medan dan 32 Ormas yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam beraudiensi dengan Plt. Gubsu. Di kesempatan itu dipaparkan mengenai sejarah Masjid al Ikhlas serta kronologis rencana hingga penghancuran Masjid al Ikhlas

⁴³ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴⁴ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

yang dilakukan oleh Kodam I/BB; dan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan terhadap pelanggaran HAM, Pidana dan Perdata yang telah TNI lakukan. Pada kesempatan itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyampaikan dukungannya bagi Aliansi Ormas Islam untuk menempuh jalur-jalur yang memungkinkan. Beliau akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, utamanya di jajaran Muspida plus. Pada hari yang sama, lokasi Jalan Timor yang biasa digunakan oleh Jamaah Masjid al Ikhlas dan Ormas Islam, dilempari tinja (kotoran manusia), kotoran Hewan, Bangkai Tikus dan Telur Busuk oleh OTK (Orang tak dikenal).⁴⁵

- 19 Juli 2011, MUI Sumut mengeluarkan surat yang menyatakan Masjid Al-Ikhlas Medan yang dalam sengketa itu sebagai wakaf. Sehingga, tindakan Kodam I/ Bukit Barisan (Kodam I/BB) yang telah menggusur dan menukarguling bangunan masjid itu sebagai tindakan salah sesuai dengan ketentuan Islam. Kepastian itu dinyatakan MUI Sumut berdasarkan Surat No. C.179/DP-P II/SR/VIII/2011 tanggal 19 Juli 2011 kepada Forum Umat Islam (FUI) Sumut, yang sengaja meminta perlindungan dan fatwa kepada MUI Sumut, sehubungan dengan tindakan perubuhan masjid al Ikhlas yang dilakukan Kodam I BB. Surat itu ditandatangani lengkap oleh Ketua Umum MUI Sumut, Prof. Dr. H Abdullah Syah dan Sekretaris MUI Sumut, Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution. Dalam konsideran surat MUI Sumut itu ditegaskan, Masjid al Ikhlas adalah wakaf. Sehingga pada masjid tersebut berlaku fatwa MUI Sumut tanggal 16 Februari 1982, yaitu menjadi wakaf dan tidak bisa diperjualbelikan, kecuali setelah proses hukum wakaf sesuai keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ-II/522 tahun 2010. Affan Lubis, salah seorang aktivis FUI Sumut mengatakan, keluarnya surat MUI Sumut semakin memantapkan FUI SU untuk memperjuangkan Masjid al Ikhlas untuk dibangun kembali. Tapi pihak Kodam I BB menyatakan tidak mungkin itu dilakukan, kecuali membangun masjid penggantinya di lokasi lain.⁴⁶

⁴⁵ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴⁶ *Kasus Masjid Al-Ikhlas, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf*, REPUBLIKA.CO.ID, Senin 25 Juli 2011 06:37 WIB, diakses dari <https://republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/25/lov2z9-kasus-masjid-alikhlas-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf>

- 24 Juli 2011, Surat MUI Sumut dikirimkan oleh FUI Sumut kepada Republika sebagai informasi perkembangan masalah pembongkaran Masjid al Ikhlas.⁴⁷
- Kamis, 28 Juli 2011, Tim dari Komisi I DPR RI juga mempelajari kasus itu, mencari informasi dengan datang langsung lokasi bekas masjid itu di Jalan Timor, Medan, Di lokasi tersebut, tim DPR RI mendapatkan penjelasan dari salah seorang pengurus FUI SU Affan Lubis mengenai status hukum Masjid al Ikhlas yang juga bekas rumah ibadah milik Detasemen Perhubungan Kodam I Bukit Barisan yang dipindahkan ke kawasan Namurambe, Kabupaten Deli Serdang. Sambil menunjukkan sejumlah surat, Affan menyebutkan bahwa pengembangan Masjid al Ikhlas dilakukan melalui dana wakaf dari umat Islam. Dana tersebut didapatkan melalui sedekah dan infaq umat Islam ketika mengikuti shalat Jumat di Masjid al Ikhlas. "Dalam satu hari ini harus tuntas," kata Yahya didampingi sejumlah anggota Komisi DPR lainnya seperti Azwar Abubakar, Maiyasak Johan, Mayjen (Purn) Tritamtomo Syahfan Badri, dan Neil Iskandar Daulay. Ketua I Bidang Hukum dan Pengerahan Massa FUI Sumut Indra Suheri mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan anggota Komisi I DPR dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam di Sumut terhadap keberadaan Masjid al Ikhlas tersebut.⁴⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI Sumut) dan Majelis Ulama Indonesia Kota medan (MUI Kota Medan), bahwa Masjid al Ikhlas Jalan Timor Medan adalah 'wakaf' dan MUI Sumut serta MUI Kota Medan tidak menyetujui/ menolak pembongkaran masjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan. Kapolda Sumut sudah memberi masukan kepada Pangdam 1/BB agar Masjid Al Ikhlas dibongkar/

⁴⁷ MUI Sumut: Masjid Al Ikhlas Wakaf, BWL.or.id, Rabu 27 Juli 2011, 07:00 WIB, diakses dari <https://bwl.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/800-mui-sumut-masjid-al-ikhlas-wakaf?lang=ar> dikutip dari sumber: Republika. Baca juga Kasus Masjid al Ikhlas, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf, Dakwatuna, 27 Juli 2011, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2011/07/25/13601/kasus-masjid-al-ikhlas-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf/>

⁴⁸ DPR Pelajari Kasus Pembongkaran Masjid di Medan, REPUBLIKA.CO.ID, Kamis 30 Jun 2011 19:18 WIB, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/unum/11/06/30/lnlriq-dpr-pelajari-kasus-pembongkaran-masjid-di-medan>

dihancurkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut) telah merekomendasikan agar Kodam I/BB tidak membongkar (menangguhkan pembongkaran) Masjid al Ikhlas, sampai adanya penyelesaian Masjid Al Ikhlas, dan adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Masalah Masjid Al Ikhlas, ini sudah diajukan gugatannya ke pengadilan, dan Pengadilan Negri Medan, telah menerima pendaftaran gugatan masalah Masjid al Ikhlas, dengan nomor registrasi 220/PDT.6/2011/PN.Medan.

Sehubungan dengan pengancuran Masjid Al Ikhlas, tersebut, maka Pemerintah harus melakukan pengusutan secara tuntas dan proses hukum kepada para oknum aparat, oknum pengusaha dan oknum Ormas yang terlibat dalam konspirasi penghancuran Masjid Al Ikhlas, demi terciptanya penegakan hukum dan rasa aman di masyarakat; Mendesak Pemko Medan untuk membongkar pagar tembok di lahan eks. Masjid Al Ikhlas, yang dibuat Pengembang + Kodam I/ BB, karena apa yang dilakukan Pengembang + Kodam I/ BB tersebut adalah tindakan ilegal; Mendesak Pemprov dan Pemko Medan untuk melakukan tindakan nyata membangun kembali Masjid al Ikhlas, di lokasi semula. Meminta MUI Pusat agar menindak anggotanya di MUI Sumut maupun MUI Kota Medan yang ikut mendukung penghancuran Masjid al Ikhlas, dan masjid lainnya di Kota Medan; dan Mendesak Panglima TNI untuk mencopot Pangdam I/ BB Mayjend. Leo Siegers dan Staff "yang bertanggung jawab langsung atas penghancuran Masjid al Ikhlas, dari jabatannya, demi terpeliharanya kondusifitas di Sumatera Utara, Melakukan gugatan sengketa TUN terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 847 Tahun 2006 dan menuntut PTUN untuk membatalkan Sertifikat Hak Pakai No. 847 atas nama Dephan RI, karena penerbitan sertifikat tersebut cacat hukum, karena mengabaikan keberadaan Masjid Al Ikhlas.

Berdasarkan Perspektif Hukum Positif (UU No. 41 Tahun 2004) maupun Hukum Syari'ah, Masjid al Ikhlas Jalan Timur Medan adalah berstatus wakaf, milik umat Islam, bukan milik Kodam I/BB. Penghancuran Masjid Al Ikhlas, Jalan Timur Medan, rumah ibadah umat Islam adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam pasal 2-B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang pada prinsipnya, "Negara menjamin dan melindungi warga Negeranya dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing.

Proses "*ruislagh*" yang dilakukan Kodam I/ BB dinilai cacat hukum, karena secara materil (fisik) terdapat Masjid Al Ikhlas yang berada di atas tanah yang di *ruislagh*, yang seharusnya tanah dan bangunan Masjid al Ikhlas tersebut dikeluarkan dan objek *ruislagh* yang merupakan hak sosial sebagai rumah ibadah sesuai dengan Hukum Pertanahan "penghancuran Masjid sebagai waqaf, merupakan tindak pidana, sesuai dengan UU Waqaf pasal 67 (1) dan ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004. "Penculikan" 18 orang jamaah Masjid al Ikhlas, dan Penyanderaan mereka di Mapolresta Medan dalam "penghancuran" Masjid al Ikhlas Jalan Timor Medan dan perampasan barang milik pribadi jamaah, berupa handphone, dompet, helm, buku-buku kuliah dan lain sebagainya adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius. Penghancuran Masjid al Ikhlas oleh Kodam I/ BB, merupakan pengingkaran atas janji Panglima Kodam I/ BB sebelumnya, dan juga merupakan tindakan melanggar hukum dan pelecehan terhadap Institusi resmi di Sumatera Utara serta mezalimi umat Islam, karena; Pangdam I/ BB sudah berjanji bahwa Masjid al Ikhlas tidak akan dibongkar sebelum ada dibangun masjid pengganti di sekitar lokasi Masjid al Ikhlas, yang minimal sama besar dan indahnya. Temyata masjid pengganti belum ada, Masjid al Ikhlas sudah dihancurkan.⁴⁹

Berikut adalah kutipan temuan di persidangan yang disampaikan sebagai pertimbangan pernyataan sikap Aliansi Ormas-ormas Islam kepada Plt. Gubernur Propinsi Sumatera Utara sebagai berikut: 1. Dari aspek Hukum (1) Berdasarkan pasal 29 UUD Negara RI Tahun 1945, dinyatakan: (1) Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu;

(2) Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan: wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah;

(3) (a) Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Tentang Hukum Masjid dan Asal Hukum Harta Wakaf, ditetapkan di Medan, 16 februari 1982, yang pada substansi

⁴⁹ Lihat juga <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2011/05/10/14581/kronologis-penyerangan-penculikan-penghancuran-masjid-al-ikhlas-medan/>

menyatakan: "... Apabila kita melihat satu bangunan Masjid dan tidak mengetahui apakah Masjid itu pada tanah wakaf atau bukan, maka tetaplah hukumnya Masjid. Begitu pula apabila seseorang tanahnya sementara untuk Masjid, maka hukumnya menjadi Masjid yang berkekalan.... Apabila sebidang tanah dijadikan Masjid atau Pekuburan Umum, maka tanggallah daripadanya hak seseorang dan ia telah menjadi wakaf tanpa berhajat kepada lafazz, oleh karena itu dibolehkan kepada umum menanam mayat pada tanah tersebut dan oleh karena masjid tidak sah kecuali wakaf.... Apabila harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan, akan tetapi apabila ditukar atau dijual dapat yang lebih besar manfaatnya, maka dalam hal ini harta wakaf tersebut belum boleh dijual, karena kebolehan menjual harta wakaf itu hanyalah karena dharurat untuk memelihara wakaf jangan sampai sia-sia; (b) Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Nomor: C179/DP-P/II/SR/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011, yang pada substansinya menyatakan: Bahwa kedudukan Hukum Masjid Al Ikhlas Jalan timor Medan adalah wakaf;

(4) Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan Nomor: 47/kep/MUI-MDN/III/2011 tentang status tanah yang dibangun di atasnya Masjid, ditetapkan di Medan Tanggal 27 Maret 2011, yang pada substansinya menetapkan: "Bahwa tanah yang direlakan pemiliknya untuk dibangun diatasnya Masjid adalah wakaf, walaupun tidak diikrarkan;

(5) Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai ahli di persidangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yaitu Dr.Hasyim Purba,SH., M.Hum., sebagai ketua program Hukum Perdata Fakultas Hukum USU, dan Drs.H.Asro,S.H., M.Ag., dari MUI Provinsi Sumatera Utara, dan Zaidar,S.H., M.Hum., sebagai ahli hukum Agraria Fakultas Hukum USU, yang pada substansinya menyatakan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan adalah wakaf sesuai sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, dan Fatwa MUI Sumut 16 Pebruari 1982, Fatwa MUI Kota Medan tanggal 27 Maret 2011, serta penerbitan sertifikat Nomor 847 tahun 2006 adalah cacat hukum administrasi karena tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis dengan adanya Masjid yang berfungsi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara

Agraria /Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 seharusnya tidak memasukkan tanah dan masjid dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 847 tahun 2006;

(6) Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang mengetahui sejarah tanah dan sumber dana pembangunan Masjid Al Ikhlas, yaitu Hasyim Huseini, Murwinto, Irwan Idris, Muslim Kamal, Afrian Effendi, Muhammad Yahya Rum, H. Maslin Batubara, dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Medan, menyatakan sejarah tanah Masjid Al Ikhlas eks. HUBDAM I BB adalah tanah sultan Deli, dan pembangunan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor Yang dimulai sejak tahun 1967 bersumber dari wakaf, infaq dan shadaqoh sumbangan jama'ah dan masyarakat Islam sekitar Masjid Al-Ikhlas Jalan Timor Medan sesuai dengan pengakuan HUBDAM I BB dalam Sejarah Singkat Masjid al Ikhlas Hubdam I/BB yang ditandatangani di Medan, tanggal 23 November 1986 oleh pengurus masjid al Ikhlas Hubdam I/ BB A. Halim Hasibuan (Koptu NRP-485384) dan Diketahui oleh Kepala Perhubungan Sartono (Kolonel CHB NRP-19183);

(7) Berdasarkan keterangan saksi dari tergugat intervensi II (Kodam I/ Bukit Barisan) bernama James Land Siregar dan Jonas Manurung Pada persidangan di PTUN Medan pada tanggal 3 Nopember 2011 antara lain menyatakan permohonan sertifikat hak pakai awalnya 12.000 yang dikabulkan 9825, tidak tahu ada izin dari Kanwil tentang ruislagh, ruislagh Hubdam I/BB Jalan Timor bersamaan dengan asset Kodam I/ BB di Jalan Listrik dan jalan Gatot Subroto. Adapun saksi yang kedua bernama Jonas Manurung antara lain menerangkan sesuai dengan data yang ada di KODAM I/BB, proses ruislagh dimulai 2007 sampai 2009, terdapat masjid dilahan yang dikuasi HUBDAM I/BB dengan luas bangunan 550 meter;

(8) Berdasarkan keterangan saksi dari penggugat (Badan Kenadziran Masjid Al Ikhlas Jalan Timor) bernama Murwinto dipersidangan PTUN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011, dan sesuai dengan persidangan dalam acara pemeriksaan setempat atau (sidang lapangan) pada tanggal 16 November 2011 berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh saksi para penggugat bernama Murwinto bersama dengan panitra pengganti setelah diperintahkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan setempat terdapat perbedaan ukuran dengan

lebar sebelah barat (jalan timor) adalah 105 meter dan panjang sebelah selatan 100,5 meter dan pengukuran tidak di teruskan karena permintaan tergugat intervensi II untuk tidak melanjutkan pengukuran dan disetujui oleh majelis hakim, sedangkan di dalam sertifikat hak pakai nomor 847 tahun 2006 tidak terdapat uraian ukuran akan tetapi berdasarkan skala ukuran panjang dan lebar sertifikat masing-masing tidak sampai 100 meter dengan luas 9.825 meter. Dengan demikian dapat dikualifikasikan terdapat selisih luas ukuran di sertifikat hak pakai nomor 847 tahun 2006 dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga berakibat pada kerugian keuangan Negara.⁵⁰

Aspek Politik (1) Keputusan Departemen Pertahanan Republik Indonesia melakukan tukar menukar (ruislag) asset KODAM I BB kepada PT. Ganda Reksa Mulya di antaranya terdapat objek sertifikat hak pakai nomor 847 tahun 2006 yang didalamnya terdapat masjid Al-Ikhlas merupakan keputusan yang keliru yang berakibat pada pencitraan negatif secara nasional maupun internasional terhadap Departemen Pertahanan Republik Indonesia, dan umumnya terhadap pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan Negara; (2) Tidak optimalnya struktur TNI AD terhadap penyelesaian masalah penghancuran masjid Al Ikhlas jalan Timor Medan yang termasuk dalam sertifikat hak pakai nomor 847 tahun 2006 dalam memberikan pertimbangan dan ketegasan kepada PT. Ganda Reksa Mulya sebagai akibat di antaranya dari tukar menukar (ruislagh) asset Kodam I/ BB, berakibat pada pencitraan negatif TNI AD khususnya terhadap Kodam I/ BB; (3) Rendahnya atau lambatnya keperdulian Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Plt. Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai mediator atau mengeluarkan diskresi (bersyarat) terhadap pihak-pihak terkait khususnya kepada PT. Ganda Reksa Mulya yang memiliki kepentingan bisnis, berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat (islam) dalam program pembangunan pemerintah khususnya dalam bidang agama; (4) Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kota Medan,

⁵⁰ Sudirman Timsar Zubil, Sudirman Timsar Zubil, Ketua Umum FUI Sumatera Utara, Ketua BKM Al Ikhlas, *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, dipublikasikan pada Senin, 05 Desember 2011, 13:47:38 WIB, <http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2011/12/05/16913/fenomena->, bersumber dari surat yang ditulis di Medan, 4 Desember 2011.

yaitu DPRD Kota Medan dan Walikota Medan terhadap pembangunan tembok dinding tanpa izin di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 847 tahun 2006, adalah bukti tidak adanya kepedulian dan ketegasan serta tindakan administrasi yang membuktikan tidak adanya persamaan hak politik dan hukum masyarakat (Islam) dengan TNI sebagai pelindung dari kepentingan bisnis PT. Ganda Reksha Mulya.⁵¹ Selain aspek hukum dan aspek politik adapula aspek ekonomi, sosial, budaya dan aspek keamanan yang disampaikan Aliansi Ormas-Ormas Islam Sumut kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara, akan tetapi karena akan terlalu panjang saya hanya mengutip dua aspek di atas (hukum dan politik).⁵²

Penyelesaian Politik Bahwa dari aspek hukum saya merasa yakin bahwa PTUN Medan akan mengabulkan gugatan BKM Masjid Al Ikhlas terhadap BPN kota Medan. Seperti kata pengacara H.M.K Adian Pinem, SH, M. Hum, tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan gugatan BKM Al Ikhlas terhadap BPN Kota Medan. Sehingga akan menjadi preseden buruk apabila putusan hakim bertentangan dengan fakta di persidangan. Sunguhpun begitu saya berpendapat bahwa penyelesaian politik merupakan solusi terbaik untuk kasus masjid Al Ikhlas, karena selain akan memakan waktu yang lama, proses hukum akan membuahkan hasil kalah menang. Sejalan dengan pendapat saya di atas, Aliansi Ormas-Ormas Islam di dalam pertimbangan nomor VI aspek keamanan pasal 2 mengatakan, "Pengecualian hukum dengan asas kekeluargaan untuk membebaskan dan membangun kembali masjid Al Ikhlas jalan Timor Medan dengan luas bangunan fisik lebar 22 meter dan panjang 25 meter (luas bangunan 550 meter persegi) adalah penghormatan dan pengorbanan terhadap masyarakat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".⁵³

Kepedulian Pemerintah untuk dapat terlaksananya penyelesaian politik dalam kasus masjid Al Ikhlas sangat ditentukan oleh sejauh mana kepedulian pemerintah baik itu Pemkot Medan, Pemprov SU, dan juga pemerintah pusat. Begitu juga dengan pihak legislatif, dalam hal ini baru DPRD Sumut saja yang telah memberikan perhatian dan dukungan optimal. DPR RI yang pernah mengirimkan tim kecil dari

⁵¹ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁵² Sudirman Timsar Zubil, 2019 *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁵³ Sudirman Timsar Zubil, 2019. *Fenomena Penghancuran Masjid...*

Komisi I sampai saat ini belum mengeluarkan rekomendasi, dan karena itu Alisansi Ormas-Ormas Islam sejak sekitar 3 bulan yang lalu telah mengirim surat ke komisi I DPR RI meminta agar kasus masjid Al Ikhlas dibawa ke Rapat Dengar Pendapat (RDP). Akan tetapi permintaan tersebut belum mendapat jawaban.⁵⁴

Jadi, kasus penghancuran Masjid al Ikhlas tidak saja menyangkut aspek hukum, melainkan juga menyentuh aspek akidah, harkat dan martabat umat Islam. Sehingga, dihimbau agar majelis hakim menimbang dan memutus perkara gugatan BKM al Ikhlas terhadap BPN Kota Medan No. 59/6/2011/PTUN-MDN dengan keadilan hati nurani, sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan. Berkenan kiranya majelis hakim yang mengadili perkara tersebut dengan amar: (1) Mengabulkan gugatan penggugat; (2) Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat no. 847 tanggal 10 Agustus tahun 2006 seluas 9825 M2 atas nama Departemen Pertanahan Nasional Republik Indonesia; (3) Semoga keputusan majelis hakim nanti akan menjadi langkah awal bagi dibangunnya kembali Masjid Al Ikhlas di lokasi semula, dengan luas dan bagusnya minimal sama dengan keadaan sebelum dirobohkan.⁵⁵

2. Masjid Amal Silaturrahim Perumnas Sukaramai

Tahun 1955, masjid yang ditumbuhi beberapa pohon mahoni besar di halamannya itu berdiri kokoh tepatnya di Gang Melur, Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area, berdiri di atas tanah wakaf dari Imam Sukarno, seluas 12 x 20 meter secara lisan.⁵⁶ Sebelumnya menjadi masjid, awalnya dibangun mushalla (langgar), Musholla Amal Silaturrahim. Karena jumlah jamaahnya bertambah, langgar itu kemudian berubah fungsi menjadi masjid.⁵⁷

⁵⁴ Sudirman Timsar Zubil, 2019. *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁵⁵ Sudirman Timsar Zubil, 2019. *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁵⁶ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁵⁷ *Masjid Amal Silaturrahim Disebut Berdiri di Tanah Wakaf Hendak Ditutup, Ormas Islam di Medan Laporkan BKM*, KITAKINI.news 22 Agustus 2019, diakses dari <https://kitakini.news/30614/masjid-amal-silaturrahim-disebut-berdiri-di-tanah-wakaf-hendak-ditutup-ormas-islam-di-medan-laporkan-bkm/>

- Tahun 1979, terjadi kebakaran besar di Kecamatan Medan Area, tetapi masjid itu tidak kena. Disebabkan adanya pembangunan Asia Mega Mas, masjid itu mau dipindahkan, tetapi tidak diketahui ke mana pindahnya.
- Sekitar tahun 1985, terbentuk panitia untuk memindahkan masjid ini.
- Tahun 1993, lahan untuk lokasi pindah belum didapatkan. Akhirnya beraudiensi kepada Perumnas, PT IRA. Masjid Amal Silaturahmi Gag Melir diminta untuk dipindahkan ke dalam Komplek Perumahan Rumah Susun.
- Tahun 1995, mulai terjadi pemindahan. Pemindahan itu terjadi pada tahun 1995. Tanah yang Gang Melur itu, setengah digantirugi oleh Perumnas, setengah digantirugi oleh PT. IRA. Sedangkan bangunannya, tanahnya dihargai sekitar Rp.6 jutaan, bangunannya dihargai sekitar Rp.6 jutaan, jadi sekitar Rp.12 juta lebih dihargai Masjid Amal Silaturahmi Gang Melur. Tanahnya dipindahkan, di perbatasan antara Perumnas dan Asia Mega Mas. Setelah dicek, sepertunya, masjid menjadi fasilitas umum kedua belah pihak. Tanahnya disediakan Perumnas, kewajiban membangunnya PT. IRA. Dibangunlah masjid di atas tanah Perumnas itu, keluarlah uang Rp. 51 juta. Di tahun yang sama, Masjid Amal Silaturahmi 'baru' itu diresmikan oleh Bachtar Ja'far. Yang menyerahkan kepada kenaziran pada waktu itu adalah PT. IRA, karena kontribusi wakafnya Rp. 38 juta. Pada waktu itu, surat-suratnya ada. Tetapi karena kita tidak mepedulikan itu, kelemahan umat Islam, akhirnya sampai sekarang tidak ada. Mulai tahun 2011, mulai berkembang isu, akan ada perumahan Rumah Susun (Rusun), penataan daerah kumuh. Mulailah masyarakat risau.⁵⁸ Pemindahan itu mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik.⁵⁹

⁵⁸ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁵⁹ *Masjid Amal Silaturahmi Disebut Berdiri di Tanah Wakaf Hendak Ditutup, Ormas Islam di Medan Laporkan BKM*, KITAKINI.news 22 Agustus 2019, diakses dari <https://kitakini.news/30614/masjid-amal-silaturahmi-disebut-berdiri-di-tanah-wakaf-hendak-ditutup-ormas-islam-di-medan-laporkan-bkm/>

- Tahun 2011, mulai dihembuskan isu penataan daerah kumuh yang merisaukan masyarakat.
- Pada tahun 2015-2016, Perumnas dengan BKM Masjid 'perang' sampai pernah terjadi lempar-lemparan. Jadi umat Islam diminta untuk mem-backup BKM supaya masjid itu jangan dipindahkan. Dengan peremajaan Rusun itu masjid itu akan dipindahkan.
- Februari 2017, dibuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang mewakafkan adalah ahli waris nazir. Sebagai alasan, dibuat semacam penyerahan dari PT. IRA kepada kenaziran. Terbitlah APAIW. Ternyata, dibelakangnya, setelah ditelusuri, Perumnas sudah mendapatkan IMB pada September 2016, dan harus sudah mulai membangun dalam 6 bulan sejak dikeluarkan, jika melewati batas waktu 6 bulan, maka terhitung 27 Maret 2017 sudah tidak berlaku.
- 1 April 2017, digelar Rapat di Kantor MUI Kota Medan, turut diundang pihak Perumnas, Ormas Islam, BKM, KUA, BWI, MUI Kecamatan, Kepolisian, Forum masjid juga diundang. Dalam rapat tersebut, diputuskan bahwa masjid jangan direlokasi. Baik KUA maupun MUI Kecamatan, Ormas Islam, BWI kota Medan memutuskan itu harta wakaf, jangan dipindahkan. Keputusan itu diminta juga disampaikan kepada Perumnas pusat.
- 5 April 2017. Pada waktu *ground breaking* dihadiri 4 Menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan 2 menteri lainnya. Direktur Utama Perum Perumnas menyatakan tidak akan memindahkan Masjid Amal Silaturrahim dan justru berjanji akan memperindah masjid itu.⁶⁰ Di acara itu hadir Walikota, Gubernur, Kejaksaan dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.⁶¹

⁶⁰ Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, MuslimOnline.Id, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>

⁶¹ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

- 7 April 2017, keluarlah surat apresiasi MUI Kota Medan kepada pihak Perumnas, bahwa masjid itu tidak dipindahkan bahkan akan diperindah.
- Medio Mei 2017, pihak Perumnas menemui lagi Dinas Tata Kota. Pihak Tata Kota mengatakan, itu IMB-nya sudah ada, tinggal membangun saja.
- 2 Juni 2017, terjadi pertemuan antara pihak BWI, Perumnas dan BKM untuk sepakat membuat MoU ke depan, agar masjid itu dipindahkan.⁶²
- 16 Juni 2017, Mou ditandatangani oleh 5 nazir, 9 pengurus BKM, diketahui oleh BWI Kota Medan, KUA Kecamatan yang tadinya waktu pertemuan keras tapi di penandatanganan juga, diketahui oleh Camat setempat dan Lurah setempat.⁶³
- 12 Maret 2018. Puluhan warga dan jamaah Masjid Silaturrahim di Komplek Asia Mega Mas mulai berjaga-jaga di masjid. Mereka menolak rencana Pemko Medan yang akan memindahkan masjid itu ke tempat lain karena lokasi semula akan dibangun rusunawa. Dikabarkan, tanah wakaf masjid akan diserahkan Pemko Medan pada Perum Perumnas, yang sedang membangun rusunawa tepat di belakang masjid.⁶⁴
- 17 Maret 2018, Wakil Sekjend MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menegaskan, umat Islam, MUI Pusat, MUI Propinsi Sumatera Utara, MUI Kota Medan, dan semua Ormas Islam di Sumatera Utara tegas menolak pemindahan Masjid Amal Silaturrahim. Kepada BWI Pusat diminta agar memeriksa Ketua BWI Kota Medan karena kami mendengar orang ini ikut terlibat

⁶² H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁶³ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁶⁴ *Terkait Masjid Amal Silaturrahim, DPRD Medan: Tanah Wakaf Tidak Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Bisnis*, Medan Bisnis, Selasa, 13 Mar 2018 19:08 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/o/28874/>; Lihat juga http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/03/13/28874/terkait_masjid_amal_silaturrahim_dprd_medan_tanah_wakaf_tidak_bisa_dialihkan_untuk_kepentingan_bisnis/

menyetujui pemindahan masjid. Padahal menurut berita, masa jabatannya belum diperpanjang BWI Pusat. BWI Pusat diminta, jangan diperpanjang masa tugas orang ini. Sejumlah ulama dan beberapa anggota DPRD Kota Medan dan DPRD Sumut sedang mengusut apakah orang ini benar telah mengeluarkan surat di luar wewenangnya di saat masa vakum jabatan, karena belum diperpanjang oleh BWI Pusat. Kepada Bapak Presiden RI, Kapolri, Menteri PUPR dan semua pihak terkait kami diminta agar memperhatikan tuntutan Umat Islam ini dengan penuh perhatian. Presiden RI dipercaya dengan bijaksana mengawasi masalah yang sangat sensitif itu.⁶⁵

- 18 Mei 2018, pihak pengembang Komplek Asia Megamas, PT Ira Widya Utama menyatakan, telah mewakafkan dan mengganti rugi relokasi masjid sebesar Rp 51.800.000. Tetapi, pihaknya tidak pernah dilibatkan akan rencana pemindahan masjid oleh Perum Perumnas dan menolak keras rencana tersebut. Itu dimuat dalam pernyataan tertulis PT Ira.⁶⁶
- 2 Oktober 2018, terbit Surat dari Menteri Agama, isinya, boleh memindahkan masjid tersebut. Tetapi jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan, maka batal demi hukum.
- 17 Januari 2019, Direktur LADUI MUI SU H. Hamdani Harahap SH MH meminta kepada Ketua MUI Kota Medan agar dapat mengeluarkan fatwa bahwa Masjid Amal Silaturahmi pengganti yang dibangun Perum Perumnas adalah masjid *dhiror*. Surat bernomor 108/LADUI-MUISU/2019 bertanggal 16 Januari 2019 itu disebutkan, LADUI MU SU telah mempelajari SK Menteri Agama RI No. 580 tahun 2018 tentang pemberian izin perubahan status/tukar menukar tanah wakaf. Faktanya, masjid dipindahkan hanya untuk kepentingan bisnis Perum Perumnas seperti yang terjadi

⁶⁵Tengku Zulkarnain, Rencana Jahat Penggusuran Masjid Amal Silaturrahim di Medan <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-penggusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medantengku-zulkarnainti-da/1651091238317321/>

⁶⁶ Masjid Amal Silaturrahim Disebut Berdiri di Tanah Wakaf Hendak Ditutup, Ormas Islam di Medan Laporkan BKM, KITAKINI.news 22 Agustus 2019, diakses dari <https://kitakini.news/30614/masjid-amal-silaturrahim-disebut-berdiri-di-tanah-wakaf-hendak-ditutup-ormas-islam-di-medan-laporkan-bkm/>

selama ini di Medan. Pada poin c di surat itu disebutkan, masjid dirubuhkan hanya untuk kepentingan Kapitalis dalam hal ini bukan untuk kepentingan Nazir Masjid Amal Silaturahmi (MAS). LADUI MUI SU menilai Menteri Agama melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut untuk kepentingan lain. Berdasarkan QS at Taubah: 107-108, Masjid Amal Silaturahmi yang baru dibangun oleh Perum Perumnas dapat difatwakan sebagai masjid *dhiror*. LADUI MUI SU juga menyurati BWI Sumut agar mempengaruhi atau mengambil alih kewenangan dari BWI Kota Medan agar membatalkan surat rekomendasi No. 013/BWI/A/RS/V/2018 tentang persetujuan penukaran Masjid Amal Silaturahmi Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan. Sebelumnya, masyarakat khususnya Umat Islam Kota Medan menolak pemindahan Masjid Amal Silaturahmi akibat pembangunan Rusun. Umat Islam berpegang pada UU Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa MUI yang menyebutkan masjid tidak dapat dipindahkan begitu saja. Kenyataannya Perum Perumnas telah selesai membangun Masjid Amal Silaturahmi sekitar 30 meter dari lokasi masjid sebelumnya. Sehingga surat rekomendasi BWI Kota Medan ditambah lagi SK 580/2018 dari Menteri Agama menjadi polemik di kalangan warga Kota Medan.⁶⁷

3. Masjid at Thayyibah di Jalan Multatuli Medan

Kronologis persoalan Masjid at Thayyibah Jalan Multatuli Medan:

- 23 Desember 2005, sebanyak 22 orang mengatasnamakan warga setempat menandatangani Surat yang ditujukan kepada Lurah Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun. Isinya antara lain, menyetujui relokasi Masjid at Thayyibah.
- 21 Februari 2006 diadakan lagi pertemuan di kantor Depag Kota Medan yang membicarakan klarifikasi rencana relokasi masjid tersebut. Tapi, pertemuan itu tidak menghasilkan kesimpulan apa pun.

⁶⁷ Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, MuslimOnline.Id, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>

- 10 Maret 2006, dilakukan pertemuan yang difasilitasi Lurah dan Camat yang dihadiri KUA Medan, Ketua LPM, pengurus Masjid at Thayyibah dan Wakapolsek Medan serta warga Medan Maimun. Pertemuan itu menghasilkan satu keputusan bahwa Masjid at Thayyibah tidak boleh direlokasi. Tapi dengan kekuatan uang, PT. MIL membujuk sebagian warga untuk menerima relokasi tersebut. Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumatera Utara, Timsar Zubil mengungkapkan, telah terjadi kongkalikong antar beberapa pihak menyangkut kasus penggusuran masjid ini. Seseorang yang mengaku anaknya pewaqif adalah salah satu pelaku di balik peristiwa itu. Padahal setelah dikonfirmasi ke Pemko Medan, Sekda Medan mengaku pihaknya tak pernah memberikan izin atas pembongkaran Masjid at Thayyibah. Sutito, tim advokasi MUI pula menyatakan, harta waqaf itu tidak bisa diubah status, itu haknya Allah, tidak boleh seorang pun yang merasa memiliki.⁶⁸
- 23 April 2007, Ketua Komisi Fatwa pada pertemuan di kantor MUI Kota Medan. Dinyatakan beliau, "Jangan dulu masjid At Thoyyibah lama dibongkar, dan jangan pula masjid baru pengganti diresmikan sampai ada keputusan dari Mahkamah Agung mengenai kasasi yang diajukan oleh masyarakat."
- Kamis 10 Mei 2007, Ratusan aparat dan preman berjaga-jaga di sekitar Masjid at Thoyyibah di jalan Multatuli, Maimun Medan Sumatera Utara. Alat-alat berat juga terlihat disiagakan menunggu instruksi. Dan tepat pukul 13.00 WIB, masjid yang berusia 51 tahun itu sudah luluh lantak, tinggal puing-puing. Warga sekitar tak berdaya mencegahnya. Sebagian hanya tertegun menyaksikan pembongkaran liar itu. Masjid Thoyyibah itu dibongkar paksa oleh developer PT. MIL milik Beny Basri, karena di lokasi masjid itu rencananya akan diperluas pembangunan pertokoan.

Masjid seluas 917 meter persegi itu oleh pihak developer dipindahkan ke tempat lain berjarak 100 meter. Sekitar 300 KK yang selama ini ikut mempertahankan keberadaan Masjid at Thayyibah ada dugaan permainan curang dari pihak yang menginginkan pemindahan

⁶⁸ *Masjid Dhirar Berdiri di Medan?* hidayatullah.com, Ahad, 27 Mei 2007, 03:20 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/05/27/41275/masjid-dirar-berdiri-di-medan.html>

masjid tersebut. Dugaan warga muslim di sana cukup beralasan. Sebab, jika ditinjau dari kekuatan hukumnya, masjid itu tidak boleh dipindahkan dengan alasan apa pun. Lahan masjid yang masih dalam proses kasasi (pemeriksaan tingkat kasasi perkara dengan No.90/G. TUN/ 2005-PTUN-MDN. Banding No.18/BDG/ 2009/PTUN-MDN dan kasasi No.25/K/2006/PTUN-MDN) di pengadilan semestinya tidak boleh ada pembongkaran. Dengan demikian, mustahil aksi liar ini atas instruksi pengadilan. Selanjutnya Kakandepag Kota Medan pada 21 Februari 2006 juga menyatakan bahwa Masjid at Thayyibah berstatus wakaf dari seorang waqif bernama Syamsuddin. Artinya, jika terjadi transaksi jual beli atas lahan masjid Thayyibah, maka jual beli tersebut tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan, karena harta waqaf tidak boleh dijualbelikan.

"Sebagai ulama saya merasa malu di kota Medan sampai 12 Masjid dihancurkan untuk kepentingan bisnis..." ungkap Drs. KH Tengku Zulkarnain MM saat menjadi saksi ahli di PN Medan dalam gugatan Perdata atas penghancuran Masjid At Thoyyibah oleh preman-preman suruhan Direktur PT. MIL, Drs. Benny Basri, pada 10 Mei 2007.

Kamis, 13 September 2012. Sidang putusan terhadap gugatan perdata kasus perubuhan Masjid at thayibah, Jalan Multatuli Medan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) lagi-lagi berakhir ricuh. Pasalnya, majelis hakim yang mengadili perkara ini memenangkan pihak tergugat yaitu PT MIL.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang diketuai Wahidin, memenangkan pihak tergugat karena pertimbangan bahwa penggugat, yakni masyarakat di kawasan Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, tidak pernah melaporkan tindak pidana sekaitan dengan perubuhan masjid tersebut pada tahun 2007. Puluhan masyarakat yang selalu setia hadir di setiap persidangan dan didominasi oleh kaum ibu-ibu langsung berteriak dan menghujat majelis hakim.

4. Masjid Raudhatul Islam Jalan Puteri Hijau Medan

Masjid Roudhatul Islam terletak di dekat Emerald Garden Hotel Jalan Puteri Hijau Medan. Masjid tersebut digusur dan dimusnahkan bahkan jalan Negara di sana dipagar oleh PT Jatimasindo. Masjid ini sudah ada sertifikat wakafnya dari negara. Berkat perjuangan FUI SU dan seluruh Ormas Islam

Sumatera Utara masjid itu dikembalikan kepada kaum muslimin. Sudah dibangun kembali dengan uang Umat Islam. Walaupun alas hak tanahnya sampai saat ini belum dikembalikan oleh pihak Jatimasindo kepada kaum muslimin, khususnya pihak Pengurus Masjid.⁶⁹

Masjid Roudhotul Islam dekat hotel Emerald, Jalan Puteri Hijau Medan. Pengembangnya adalah PT Jati Masindo, milik adik kandung koruptor buron, Adlin Lies, seorang keturunan Cina. Di belakang hotel itu PT Jati Masindo juga telah menghilangkan masjid al Khairiyah dan Madrasah al Khairiyah lenyap tanpa bekas. Padahal menurut surat ruislag dari Menteri BUMN semua rumah ibadah yang ada di tanah ruislag milik PTPN II tidak boleh berubah fungsi alias tetap difungsikan sebagai rumah ibadah. Terbukti gereja di sebelah lokasi masjid al Khairiyah sampai sekarang tetap kokoh berdiri dan berfungsi sebagai gereja Oikumene. Tapi masjid al Kahiriyah yang bersebelahan dihilangkan dengan sengaja oleh pengembang. Setelah melalui perjuangan panjang yang memakan tenaga dan airmata berhasil direbut umat Islam dan dibangun kembali, tapi surat hak alas masjid itu sampai sekarang belum diberikan kepada BKM Masjid oleh Pengembang.⁷⁰

Konspirasi Jahat juga dialami pula oleh Masjid Raudhatul Islam di Kelurahan Silalas jalan Peringatan Kecamatan Medan Barat pada tanggal 11 April 2011. Seperti kasus Masjid At Thayyibah, dalam penghancuran Masjid Raudhotul Islam Pemko Medan dan MUI Kota Medan dengan rekomendasi (fatwa)nya No.557/Kep/MUI/MEDAN/VI/2009 punya kontribusi yang menentukan bagi terlaksananya keinginan pengembang untuk mengusir Masjid Raudhotul Islam.⁷¹

5. Masjid Nurul Hidayah Jalan Pancing Medan

Masjid Nurul Hidayah, berlokasi di simpang Jalan Pancing dengan Jalan Unimed, hendak dipindah. Sejenak kita seakan terlena dan sepakat

⁶⁹ *Wasekjen MUI: Pengusuran Masjid-Masjid....*; Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁷⁰ Tengku Zulkarnain, *Rencana Jahat Pengusuran Masjid Amal Silaturrahim di Medan* <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-pengusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medan> [tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-pengusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medan](https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-pengusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medan) [tengkuzulkarnainti da/1651091238317321/](https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-pengusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medan)

⁷¹ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

bahwa masjid tersebut akan dipindah ke pinggir jalan dari posisinya semula yang sedikit menjorok ke dalam. Tapi ketahuilah, bahwa masjid tersebut adalah wakaf (sesuai fatwa MUI) sehingga keberadaannya wajib dipertahankan. Dari sketsa gambaran lahan yang akan dibangun, nampak jelas bahwa posisi masjid tersebut sangat tidak menguntungkan mereka. Dan, dimulailah operasi senyap melakukan pendekatan-pendekatan ke berbagai pihak guna memuluskan jalan memindahkan masjid tersebut.

Pada kasus Masjid Nurul Hidayah ini, tidak adanya landasan syar'i yang kuat sebagai alasan pemindahannya. Dan hanya alasan kepentingan bisnis yg muncul disana. Oleh karenanya biarlah masjid-masjid tersebut berdiri di tempatnya di tanah wakaf tersebut sampai ada alasan yang syar'i untuk memindahkan masjid tersebut. Masjid ini sempat mengalami teror akan digusur juga. Sudah hampir digusur pada tahun 2007 dan berhasil dipertahankan FUI SU dan Ormas Islam di Medan. Sekarang sedang dalam upaya membangunnya lebih baik.⁷²

Dalam penyelesaian kasus Masjid Nurul Hidayah, MUI Sumut telah dua kali diterima oleh Kemenag Sumut. MUI Sumut selalu mendorong terjaganya dialog antara Kemenag Sumut bersama Forum Ummat Islam (FUI). FUI merupakan gerakan umat Islam yang selalu cepat merespons masalah masjid, memperjuangkan dan berupaya agar terlaksananya sertifikasi wakaf. Tetapi, setelah dua kali pertemuan, penyelesaiannya masih juga terkandung-kandung. Untuk pertemuan selanjutnya dengan Kemenag Sumut dianggap masih perlu diagendakan ulang, sekaligus menyiapkan data yang dianggap penting untuk memperjuangkan masjid tersebut ketika berdialog dengan PTPN. Selain mengagendakan dialog dengan pihak PTPN, membangun komunikasi dengan pihak pemerintah Deliserdang, misalnya dengan cara beraudiensi, khususnya kepada Bupati Deliserdang juga perlu diagendakan. Diharapkan, dialog yang dilakukan juga dapat melibatkan MUI Deliserdang. Perlu penegasan kepada BWI (Deliserdang) agar tidak terkesan menyelesaikan masalah separuh hati, sebab Nurul Hidayah butuh legalitas untuk status wakafnya.

⁷² Wasekjen MUI: *Pengusuran Masjid-Masjid....*; Baca juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

6. Masjid Taqwa Belawan

Sengketa tanah wakaf untuk dijadikan rumah ibadah di Jalan Abdul Sani Muthalib, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Tanah itu dijadikan Mushalla Al Hidayah. Setelah berjalannya waktu, wakaf itu dilakukan rehab dan dinaikkan status menjadi masjid dengan diganti nama Masjid Taqwa. Namun, terjadi perselisihan masalah nama masjid yang tidak diterima warga di wilayah tersebut. Masalah itu sudah dilakukan mediasi oleh Polres Pelabuhan Belawan dengan memberikan tekanan, agar tidak ada aktivitas di rumah ibadah itu sebelum dikeluarkannya status tanah wakaf dari BPN Kota Medan. Masalah ini sempat menimbulkan kekisruhan karena adanya penyerangan dan perusakan.⁷³

7. Masjid al Khairiyah Jalan Puteri Hijau Medan

Masjid al Khairiyah terletak di belakang Emerald Garden Hotel Jalan Puteri Hijau Medan. Masjid ini bersebelahan dengan Madrasah Al Khairiyah dan Gereja Okumene. Masjid al Khairiyah musnah dan Madrasah al Khairiyah juga musnah. Tapi Gereja Okumene sampai saat ini masih berdiri tegak. Pelaku pengusuran diduga adalah PT Jatimasindo. Tersangkanya adalah Nazir Masjid al Khairiyah saat itu. Persoalan masjid ini sudah diadukan ke Polresta Medan sejak tahun 2004 yang lalu. Tersangkanya juga sudah ada. Tapi proses hukum sampai saat ini belum tuntas. Bahkan bulan lalu (sekitar Februari 2018, pen.) kembali diadukan oleh Forum Umat Islam Sumatera Utara ke Polresta Medan langsung kepada Kapolresta Medan yang baru untuk diproses ulang. Berkas sudah diserahkan kembali ke pihak Polresta Medan untuk diproses lanjut. Kami menunggu lanjutan proses hukumnya.⁷⁴

8. Masjid Ar Ridho Polonia Medan

Masjid Ar-Ridho terletak di Polonia Ujung, di bekas Kompleks TNI. Masjid ini dibongkar dan dimusnahkan. Namun dengan perjuangan kaum muslimin di sana masjid ini berhasil dibangun kembali.⁷⁵

⁷³ Massa Muhammadiyah Demo ke Mapolres Belawan: Tangkap Pelaku Perusakan Masjid! Sumut Pos, 18 Juli 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/07/18/tangkap-pelaku-perusakan-masjid/>

⁷⁴ Wasekjen MUI: Pengusuran Masjid-Masjid.... Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁷⁵ Wasekjen MUI: Pengusuran Masjid-Masjid.... Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

9. Masjid al Jihad Pulo Brayan Medan

Masjid al Jihad Pulo Brayan Medan pernah diruntuhkan pada sekitar tahun 1990-an. Digusur dan mau dipindahkan ke sebelah rel kereta api di belakang ruko-ruko milik saudara kami keturunan Cina. Saat itu masjid al Jihad sempat rata dengan tanah. Tapi berkat perjuangan kaum Muslimin di sana, masjid al Jihad berhasil dipertahankan setelah memakan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, airmata dan harta. Ustadz Tengku Zulkarnain bersama almarhum *al hafizh* Haji Mahyuddin merupakan dua tokoh yang ikut memperjuangkan masjid tersebut bersama masyarakat Muslim Pulo Brayan saat itu.⁷⁶

10. Masjid al Ikhlas Jalan Nyiur, Perumnas Simalingkar Medan.

Masjid al Ikhlas Jalan Nyiur di Perumnas Simalingkar Medan pernah diklaim oleh Yayasan keluarga Amal Sholih sebagai aset Yayasan tersebut. Hal ini telah dilaporkan kepada pihak Poldasu oleh FUI SU. Setelah perjuangan beberapa tahun laporan perkara ini malah di SP3 oleh Poldasu. Sekarang FUI SU mempertimbangkan untuk menggugat Prapradilan untuk mempertahankan masjid itu.⁷⁷

11. Masjid al Munawwarah, Sarulla Tapanuli Utara

Masjid al Munawwarah terletak di tepi sungai dikhawatirkan akan roboh. Akan dipindahkan ke lokasi tanah wakaf dari hamba Allah di tepi Jalan Raya. Pembangunan sudah dilaksanakan sebagiannya

⁷⁶ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>, lihat juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah, KH Tengku Zulkarnani (Facebook Page)*, diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>

⁷⁷ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>, lihat juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah, KH Tengku Zulkarnani (Facebook Page)*, diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>

berupa pondasi dan tiang tiang beton. Semula masyarakat sekitar tidak keberatan. Bahkan seorang pendeta yang baik telah membawa surat persetujuan warga yang ditandatangani para warga. Namun belakangan pembangunan masjid ditolak karena diduga adanya "provokator." Lurah akhirnya menolak memberikan izin dan Bupati pun menyetop pembangunan masjid ini. Lokasi masjid ini di Sarulla, Tapanuli Utara.⁷⁸

Sarulla, terletak di Pahae Jae, Tapanuli Utara, berbatasan dengan Tapanuli Selatan, masjid yang mulai tergerus erosi, karena terletak di pinggir sungai. Lalu, masyarakat ingin memindahkan lebih ke depan, lebih ke pinggir jalan. Sudah ada wakaf dari seorang ibu, boru Siregar, berdomisili di Jakarta. Masjid itu sudah sempat dibangun, Sudah sempat berdiri kurang lebih 14-15 tonggak (tiang). Namun, sampai sekarang masjid itu tidak bisa dibangun karena baik Lurah, Camat maupun Bupati tidak mau mengeluarkan atau menerbitkan IMB. Jadi, meskipun sudah ada wakaf dan sudah mau dibangun, tetapi masih terkendala oleh penguasa yang tidak Islami, mereka yang kafir semua, tidak mau mengizinkan dibangun masjid di lokasi yang lebih strategis di pinggir jalan. Walhasil masjid tidak bisa dibangun. Untuk itu perlu sudah keseriusan umat Islam untuk menyelesaikan masalah ini.⁷⁹

Permasalahan mendirikan rumah ibadah ini muncul ke permukaan pada tahun 2013 dan diekspose ke media massa dalam pemindahan sekaligus pendirian Masjid al Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kasus ini dinilai tidak lazim, karena selama ini hubungan antarumat beragama -Kristen-Islam- di Taput dikenal rukun yang direkat oleh kekerabatan dan kearifan lokal *dalihan natolu*, yaitu falsafah yng dimaknakan sebagai kebersamaan yang adil dalam kehidupan masyarakat Batak.⁸⁰ Tahun 1998, gagasan pembangunan masjid sudah dimulai. Tahun 2010, sekelompok umat Kristen dan memberi respons penolakan. Tanggal 4 Maret 2013, penolakan pembangunan masjid dilakukan secara

⁷⁸ Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁷⁹ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019, *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁸⁰ *Falsafah Orang batak Toba dalam Dalihan Natolu*, hal. 1, dalam Verianto Sihotang, 2013, *Pendirian...* <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

terbuka melalui unjuk rasa, dimuat *Republika*, 5 Maret 2013⁸¹ dan media local pada 6 Maret 2013.⁸² Di tengah-tengah kekerabatan dan berbersamaan dalam kerukunan hidup antarumat beragama tiba-tiba muncul permasalahan berupa penolakan pendirian masjid. Informasi kasus ini cenderung terbatas, ditutupi-tutupi dan dilokalisir.⁸³ Verianto Sihotang (2013) dan M.Yusuf Asry (2013) kemudian melakukan penelitian mengenai kasus ini.

Rencana membangun masjid oleh Umat Islam (104 KK) yang berasal dari 6 desa dan 1 kelurahan di wilayah setempat (Kelurahan Pasar Sarulla 47 KK, desa Nahornop Marsada 40 KK, desa Parsala Samosir 8 KK, desa Tor Dolok Nauli 2 KK, desa Sibulung-bulung 3 KK, desa Silangkitang 3 KK dan desa Parbuluan Nainggolan 1 KK) dilatarbelakangi oleh konoso Masjid yang lama dianggap semakin sulit menampung umat Islam yang semakin banyak, apalagi saat bulan Ramadhan tiba. Selain itu, lokasi Masjid lama yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat dan tidak mempunyai areal parkir yang memadai. Situasi ini menjadi alasan utama mengapa Mesjid perlu dipindahkan dan diperbesar.

Tahun 1998, gagasan rehabilitasi dan pemindahan Masjid al Munawwar telah mulai. Di tengah krisis ekonomi melanda bagian besar negara dunia, termasuk Indonesia muncul gagasan merehab Masjid al Munawar. Penggagas awal antara lain: H. Mawardi Panggabean, Mandong (almarhum), Maruli Gultom, Jaiman Harianja dan Syarif Sianturi (almarhum). Niat itu tertunda hingga krisis ekonomi berakhir dan kehidupan ekonomi stabil, sambil mengupayakan lokasi masjid yang strategis. Kesepakatan berpihak kepada pilihan kedua. Rehab dan pemindahan masjid sempat tertunda selama 12 tahun.

⁸¹Muhammad Hafil, *Pembangunan Masjid Ditantang*, *Republika*, Jakarta, 6 Maret 2013, h.1, dalam Sihotang, 2013, *Pendirian...*

⁸²*Panitia Tidak Hargai Adat Istiadat, Aliansi Masyarakat Tolak Pembangunan Masjid di Pahae*, *Sinar Indonesia Baru*, Tarutung, tanggal 6 Maret 2012, h. 1 & 15. Masjid Al Munawar di Kecamatan Pahe Jae, Kabupaten Tapanuli Utara dimulai tahun 2010, dan penelitian Verryanto Sihotang, Maret 2013.

⁸³Abdurrahman Munir Aritonang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, wawancara 7 Maret 2013, dalam Sihotang, 2013, *Pendirian...*

Tahun 2010, gagasan mendirikan masjid mulai dirintis. Pendirian masjid Al Munawar bukan menambah jumlah masjid seperti yang dinyatakan sementara umat Kristiani, melainkan pemindahan lokasi dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada dengan jarak sekitar 100m (Abdurrahman Munir, 07 Maret 2013). Masjid lama akan difungsikan menjadi Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA). Tahun 2010, telah tersedia lokasi untuk pembangunan Masjid Al Munawarah sebidang tanah wakaf Hj. Berlian Siregar seluas 804 m². Lokasi terletak di pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera yang berdekatan dengan dua Gereja yaitu Gereja Huria Kristen Batak Kristen Protestan (HKBP) dan Gereja Advent (Gereja Masih Advent Hari Ke Tujuh/GMAHK). Gereja berada dan masuk kedalam melalui Jalan Huta Gultom sekitar 50m melewati sebuah rumah/ tanah Harianja Sihombing (Muslim) belok ke kiri sekitar 20m. Bangunan kedua gereja berjajar. Jalan menuju kedua gereja melewati calon lokasi masjid. Jarak kedua gereja calon lokasi masjid yang pertama ini sekitar 30 m.

24 Nopember 2010, rencana pembangunan masjid akan diawali Serah Terima Tanah Waqaf dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan pada hari Rabu tanggal pukul 09.00 WIB. Undangan dibuat oleh Badan Kenadziran Masjid al Munawar Sarulla No.005/MALM/012/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh A.M. Sihombing (ketua), M. Panggabean (sekretaris) dan Sihol Nainggolan (bendara), serta turut mengundang Hj. Berlian Siregar (pewaqaf tanah) dan Komaluddin Royhan Gultom (Kepala KUA Pahae Jae), perihal Serah Terima Waqaf dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahae Jae. Mereka yang diundang meliputi: Bupati Tapanuli Utara, Kepala Kantor Kemenag, Ketua Pengadilan Agama Tarutung, Ketua MUI Kabupaten Tapanuli Utara, Uspika Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa Nahornop Marsada, Pengurus Masjid se Luat Pahae, Tokoh Agama/Adat se Luat Pahae, Keluarga almarhum Tumpal Harianja, dan jamaah Al Munawar Sarulla. Sebagian undangan telah diedarkan, dan direncanakan akan diresmikan oleh Bupati Tapanuli Utara. Tiba-tiba terjadi penolakan oleh warga Kristiani, dengan alasan lokasi masjid bedekatan dengan 2 gereja Kristen. Umat Kristen yang menolak pendirian masjid mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, sekaligus menyerahkan surat penolakan pembangunan masjid atas nama masyarakat. Mereka disertai oleh seorang

anggota DPRD Taput (Ottonier Simanjuntak dari PDIP). Pada kesempatan tersebut Bupati berhalangan hadir, dan atas nama Bupati ialah Sekretaris Daerah Drs. H.P Marpaung mengirim surat No. 451/5761/kesra/2010 tertanggal 22 Nopember 2010 yang ditujukan kepada Pengurus Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahe Jae perihal Pemberitahuan mengimbau agar menunda acara serah terima Waqaf an Peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Raya Sarulla sebelum ada kesepakatan dan penyelesaian permasalahan atas keberatan masyarakat Desa Nahornop Marsada. Dengan memperhatikan surat Bupati tersebut, dan sebahagian undangan telah disebar, sedangkan waktu sangat "mepet" surat diterima tanggal 22 Nopember 2010 pukul 23.00 wib, maka diambil kesepakatan, bahwa peresmian peletakan batu pertama ditunda, sedangkan serah terima waqaf tetap dilangsungkan. Hal ini memperhatikan para pejabat yang diundang telah hadir, sekalipun umumnya diwakilkan kecuali yang tidak hadir ialah Bupati dan Kepala Desa Nahornop Marsada (Ramona Siburian). Panitia memutuskan hanya dilangsungkan acara Serah Terima Akta Ikrar Waqaf dari Waqif (Hj. Berlian Siregar) kepada Nadzir Masjid al Munawar Ahmad Sihombing, M. Panggabean dan Sihol Nainggolan. Acara berlangsung lancar.

September 2010, seorang keluarga Muslim (Tumpal Harianja) mewakafkan tanah seluas 24 x 35 M di desa yang sama untuk dijadikan pembangunan Mesjid yang lebih luas. Tak lama berselang, panitia pembangunan Mesjid memasang papan informasi tentang rencana pembangunan Masjid agar dapat diketahui masyarakat setempat.

24 November 2010, panitia pembangunan Mesjid berencana mengadakan acara peletakan batu pertama dengan mengundang pemerintah dan beberapa pihak (Bupati, DPRD, Kemenag, Kodim, Polres, Muspika Pahae Jae dan pendeta). Tetapi penolakan terjadi oleh sebagian masyarakat. Alasannya menyalahi aturan adat. Para penolak menuntut panitia pembangunan masjid untuk meminta persetujuan natua-tua (tokoh adat) sebelum melakukan pembangunan Masjid. Alasan lain, disebabkan karena lokasi Masjid yang akan dibangun berjarak sekitar 30 meter dari dua gereja HKBP. Walhasil, rencana peletakkan batu pertama dibatalkan panitia. Camat Pahae Jae mencoba mencari solusi dengan mempertemukan kedua belah pihak. Di pertemuan itu "disepakati," panitia diharuskan lagi meminta izin dari para natua-tua

dan memindahkan lokasi pembangunan sejauh sekitar 80 meter dari gereja HKBP. Memang, lokasi pendirian Masjid tersebut terletak di kota yang sama dengan kantor pusat HKBP yang penduduk setempat mayoritas beragama Kristen Protestan dan menjadi Jemaat Gereja HKBP. Setelah persyaratan pembangunan Masjid telah dijalankan, panitia mempersiapkan pemindahan pembangunan ke lokasi kedua. Seperti sebelumnya, juga dengan mengundang pihak terkait dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tetapi, terjadi penolakan pembangunan Masjid.

Pendirian⁸⁴ rumah ibadat menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 6 Tahun 2006 ialah dilakukan dengan cara: 1) tetap menjaga kerukunan umat beragama, 2) tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dan 3) mematuhi peraturan perundang-undangan (PBM Bab IV Pasal 13 ayat 2), pendirian rumah ibadat yang tidak memenuhi ketentuan di atas sering menimbulkan masalah, kecuali atas saling pengertian dan toleransi yang terkondisikan berdasarkan kearifan lokal.

Pihak BKM Al Munawar pada awalnya telah berupaya pendirian masjid dilakukan pendekatan adat/ budaya, bahkan telah terjadi pembicaraan dan kesepakatan akan menyembelih dua ekor kerbau. Namun ketika membicarakan teknis pelaksanaannya tiba-tiba pihak Kristen tidak melanjutkan lagi dengan menyatakan "rasa tidak setuju dengan rencana pembangunan Masjid yang terletak di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada" (Pernyataan ini secara tersurat ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara yang ditanda tangani 117 warga tertanggal 22 November 2010). Namun ketika lokasi masjid dipindahkan sekitar 120 m dari lokasi pertama juga umat Kristen tetap menyatakan "tidak setuju" dengan alasan "keputusan lokasi masjid"⁸⁵.

Alasan pemindahan Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla (Pasar) ke Desa Nahornop Marsada, yang lokasinya berjarak sekitar 100m

⁸⁴ Kata "pendirian" di sini mengacu pada istilah yang digunakan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 ialah identik dengan "pembangunan," lihat Sihotang, 2013, *Pendirian...* <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

⁸⁵ Wawancara dengan Ramdju Gultom, Penanggung jawab, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian, Pahe Jae, 8 Maret 2013.

ke arah barat, sebagai berikut: (1) Daya tampung Masjid al Munawar terbatas. Pada saat kegiatan shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat tarawih bulan Ramadhan dan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam Masjid Al Munawar tidak mampu menampung jamaah. Kapasitas daya tampung masjid sekitar 150 jamaah, sedangkan shalat id sekitar 500-an. Warga Muslim dari 5 desa sekitarnya mencapai 350 orang, belum termasuk perantau yang mudik lebaran sekitar 50 orang. Sekalipun emperan Masjid telah dipenuhi dan jalan gang telah digunakan tetapi tetap juga tidak mampu menampung jamaah sehingga mereka tidak jadi shalat, dan mengurungkan niat mengikuti kegiatan keagamaan. Di sekitarnya tidak ada lahan lain yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan pengembangan lokasi masjid, jarak dengan jalan raya sekitar 40m, lebar jalan gang masuk antara 180 cm s/d 2 m sehingga tidak masuk mobil, dan jika digunakan jalan raya di samping jauh juga akan mengganggu lalu lintas kendaraan antarlintas Sumatera. Pengguna Masjid menyetujui dan sekaligus mengusulkan pendirian masjid yang ditanda tangani oleh 123 warga Muslim. (2) Konstruksi bangunan Masjid Al Munawar tergolong tua dan tidak layak. Masjid Al Munawar didirikan tahun 1941 atau 62 tahun yang lalu dinilai sebagai bangunan yang sudah tua, dan segi kualitas konstruksi tidak layak lagi, sedangkan kawasan ini tergolong rawan gempa bumi; (3) Kondisi lingkungan masjid kumuh. Letak Masjid Al Munawar dekat Pasar Sarulla, berada di bawah selokan, dan di sebelah barat Masjid di seberang kali terdapat ternak babi milik warga Kristen (Elko Nainggolan), dan sebelah timur ternak bebek warga Kristen (Jaman Pasaribu). Aromanya kadangkala tercium di masjid. (4) Pergeseran arah kiblat. Dengan adanya pedoman arah kiblat oleh MUI maka ditinjau ketepatan arah kiblat, sehingga bergeser sekitar 20 derajat ke arah utara. Pergeseran ini berdampak mempersempit kapasitas jamaah shalat yang selama hanya menampung paling banyak sekitar 150 jamaah. 5) Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar. Bupati Tapanuli Utara (Torang Lumbantobing) telah merespon surat permohonan Badan Kenadziran Masjid al Munawar (BKM) melalui surat No. 451.2/0201/Kesra.2013 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan "pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla". (6) Tidak berkeberatan pendirian Masjid Raya Al Munawar. Ketua (Pdt. S. Manogari Silitonga, M. Th) dan Sekretris (Pdt.

macikalManalu, S.PAK) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui surat No. 28/FKUB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara yang ditanda tangani oleh PDT. S. Manogari Silitonga, M.Th (Ketua) dan Pdt. Marical Manalu, S.PAK (Sekretaris) menyatakan "pada dasarnya tidak berekeberatan berdirinya Masjid Raya Al Munawar di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada dengan ketentuan telah mendapat persetujuan resmi secara tertulis dari masyarakat Desa Nahornop Marsada (yang berkeratan); (7) Rapat Unsur Pimpinan Daerah, DPRD, BKAG Kabupaten dan Kecamatan, Pengurus FKUB, Kemenag, MUI Kabupaten dan Kecamatan, Uspika, aparat desa, tokoh masyarakat Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahe Jae, memutuskan persetujuan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla akan dimulai awal Januari tahun 2013.

Dasar penolakan perencanaan pemindahan dan pendirian masjid Al Munawarah dari Desa Sarulla ke Desa Nahondop Marsada muncul penolakan dari sementara warga yang Beragama Kristen. Sikap keberatan ini disampaikan kepada Badan Kenadziran Majid Raya Sarulla, Pahe Jae (BKM). Bahkan atas nama masyarakat Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria menyatakan keluh kesah/ rasa tidak setuju dengan rencana pembangunan Masjid yang terletak di dusu Aek Bulu desa nahornop Marsada. Pernyataan tersurat yang ditanda tangani oleh 117 warga umat Kristen yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 22 Nopember 2010. Alasan yang dijadikan dasar ketidak setujuan pendirian Masjid Al Munawar, sebagai berikut: (1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada terdiri dari 86 KK yang beragama Kristen dan 6 KK yang beragama Islam; (2) Di sekitar lokasi yang akan dibangunnya masjid telah terlebih dahulu berdiri 2 unit Gereja, yaitu Gereja HKBP Nahornop Marsada dan Gereja Advent (GMAHK) yang berjarak lebih kurang 30m¹⁴. Pada tanggal 5 Februari 2013 menyusul surat atas nama Masyarakat Desa Nahornop Marsada yang ditanda tangani 11 warga kepada Bupati Tapanuli Utara menyatakan memohon peninjauan kembali surat Bupati No. 451.2/020/Kesra/2013 tertanggal 14 Januari 2013 perihal "Dukungan Pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla". Dukungan tersebut atas dasar hasil rapat tanggal 18 Januari 2013 yang diikuti unsur pemerintah, aparat dan tokoh masyarakat di kantor kepala Desa Nahornop Marsada yang menyimpulkan "persetujuan pendiria masjid raya al munawar akan

dimulai awal Januari tahun 2013", dengan alasan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan kenyamanan pelaksanaan natal bagi umat Kristiani. Tas dasr ini pula BKM Al Munawar memulai pembangunan masjid tanggal tanggal 1 Februari 2013. Pada tanggal 4 Maret 2013, Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian melakukan unjk rasa ke kantor Bupati Taput dengan menyampaikan aspirasi tersurat, yang antara lain isinya anatar lain: (1) masyarakat (baca umat Kristen) Desa Nahornop Marsada tidak setuju terhadap pembangunan Masjid tersebut (al Munawar), dan Keputusan rapat tanggal 18 Desember 2013 yang mengatakan masyarakat dan tokoh masyaraakat menyetujui pendirian pendirian masjid tersebut adalah suatu kebohongan, karena pada hari dan waktu tersebut hari pecan sehingga masyarakat tidak menghadirinya. Atas surat dukungan Bupati dimohon ditinjau kembali, dan jika tuntutan ini tidak dipenuhi akan datang (unjuk rasa kembali) dengan massa lebih banyak lagi dengan tempo 7 X 24 jam, sebagaimana tersebut dalam surat aliansi: 14 Surat tertanggal 22 Nopember 2010 awal diangkatnya kasus ini secara formal yag dismpaikan kepada Bupati Tapanuli Utara dengan tembusan surat kepada Ketua DPRD, Kantor Kemenag, Ephorus HKBP, FKUB, Uspika Kecamatan Pahe jae dan Kepala Desa Nahornop Marsada. Padahal gagasan pendirian masjid telah dimulai sejak tahun 1998 yang berarti telah digagas 12 tahun sebelumnya. "Apabila tuntutan ini tidak dilaksnakan dalam empo 7 x 24 jam kami berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi"⁸⁶ [Surat Aliansi... Republika, 05 Maret 2013:1).

Aksi pertama penolakan terhadap rencana pembangunan masjid tahun 2010 karena lokasi berdekatan dengan gereja dan jumlah KK umat. Setelah lokasi dipindahkan sekitar 120 m tetap tidak setuju dengan alasan tidak ikut rapat bersama karena hari pekan.

Menurut analisis, pemindahan masjid al Munawar dengan mendirikan Masjid bangun baru dengan nama yang sama dari perspektif PBM tahun 2006, sebagai masjid yang berdiri tahun 1941. Tidak perlu perusedur seperti pembangunan atau rahabilitasi rumah ibadat dengan merubah desain harus dengan IMB baru. Pendirian masjid karena

⁸⁶Surat Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian dengan penanggung jawab Ramdju Goltum, tanggal 4 Maret 2013, halaman 2, dan Rebuplika, 5 Maret 2013, halaman 1.

pertimbangan pemindahan pada tempat yang lebih layak, maka Bupati Tapanuli Utara mengeluarkan izin melalui surat resmi tanggal 14 Januari 2013. Namun secara formal perlu dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati. Namun untuk kondisi umum, dalam pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadat belum pernah ada yang mengajukan IMB, melalui proses rekomendasi dan pertimbangan dari Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan demikian sah-sah saja membangun masjid tersebut dengan hanya merupakan pemindahan lokasi dan ada izi dari Bupati. (8) Penolakan pemindahan dengan mendirikan masjid baru pada tempat yang relatif jauh dari gereja yang ada (sekitar 150m), tanpa alasan logis dan tidak melanggar PBM tahun 2006 perlu dipertimbangkan. Karena faktor kedekatan masji dengan Gereja telah menjadi biasa di tanah air ini. Misalnya hanya dibatasi oleh jalan antara gereja dengan Masjid Istiqlal Jakarta, bahkan terbiasa menggunakan halaman parker rumah ibadat dari masing-masing rumah ibadat tersebut. Demikian pula ada gereja berbatasan dinding dengan masjid seperti di Tanjung periuk Jakarta, bahkan satu dinding antara Gereja Nazareth dengan Masjid Al Azhar di Kota Palangkaraya. Sedangkan jarak antara lokasi masjid al Munawarah dengan gereja di Pahe Jae sekitar 150m. Seperti kurang pas dijadikan alasan penolakan, baik dari segi jarak maupun hanya pemindahan lokasi dari masjid lama yang dinilai kurang memadai. Jika alasan jumlah umat Islam lebih sedikit dibandingkan dengan umat Kristaini, maka secara logika akan menjadi masalah bagi rumah ibadat yang telah berdiri sejak lama tanpa masalah dan pendirian rumah ibadah baru diseluruh tanah air, dan tentunya bukan solusi yang arif dan bijaksana. Isi surat ini tidak sejalan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, secara khusus pasal 14 ayat (2) jumlah pengguna rumah ibadat dan dukungan warga. Dalam hal tidak terpenuhi persyaratan tersebut, pemerintah Tapanuli Utara berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat tersebut (ayat (3)).

Senin, 14 Maret 2011, Camat Pahae Jae (Elyanto Sitompul, ST) melalui surat No. 005/191/06/III/2011 tanggal 11 Maret 2011 mengundang masyarakat yang berkeberatan dan pengurus Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar, masing-masing 10 orang. Rapat penyelesaian masalah tersebut, tetapi "tidak memperoleh

kesepakatan” Pada tanggal 24 Agustus 2012 melalui surat No. 001/Pemdes/2008/VII/2012, Kepala Desa (Ramona Siburian) meminta untuk mempertimbangkan ataupun menunda rencana pembangunan masjid sampai waktu yang tepat, mengingat kurang kondusif karena banyak masyarakat yang tidak menyetujui rencana pembangunan masjid tersebut. Karena informasi dari Jasa Sitompul (anggota DPRD Tapanuli Utara), bahwa hari Senin 27 Agustus 2012 rencana pembangunan masjid akan segera dimulai.

24 Agustus 2012, Kepala Desa Nahornop Marsada mengeluarkan surat penundaan pembangunan Mesjid. Alasannya, menunggu suasana kondusif. Respon masyarakat yang menolak pembangunan masjid dikatakan semakin menguat. Camat Pahae Jae kembali memfasilitasi pertemuan dengan sejumlah pihak terkait tapi tak memberi solusi apa pun.

1 Desember 2012, BKM Masjid Raya Al Munawar melalui surat No. 018/BKM-ALM-P/XII/2012 yang ditujukan kepada Bupati, memohon Ijin Pendirian Rumah Ibadah Masjid Raya Al Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada. Pada tanggal 14 Januari 2013, Bupati Tapanuli Utara melalui surat No.451.2/0201/kesra/2013 yang ditujukan kepada Pengurus Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar, perihal “Dukungan Pendirian Masjid Raya al Munawar Sarulla”. Bahwa berdasarkan rapat pembahasan tanggal 18 Desember 2012 yang dihadiri berbagai pihak, mulai dari unsur Pemda, DPRD, Kemenag, FKUB, BKAG, MUI, Uspika, aparat desa dan masyarakat, rapat di kantor Kepala Desa Nahornop Marsada memutuskan “persetujuan pendirian Masjid Raya al Munawar Sarulla akan dimulai awal Januari Tahun 2013”, dengan alasan antara lain untuk kenyamanan pelaksanaan Natal bagi umat Kristen. Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla dengan ketentuan: (1) Mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (2) Pada saat pembangunan panitia tetap memperhatikan azas-azas kerukunan umat beragama. (3) Apabila pada saat pembangunan ditemui kendala/masalah panitia Pembangunan mencari solusi dengan tetap berpedoman saling menghormati/ menghargai sesama warga masyarakat.

Tahun 2012, penduduk Kecamatan Pahe Jae tercatat 8.102 jiwa. Dari segi etnis hampir semua etnis Batak, hanya satu-dua etnis Minang

dan Jawa. Dari segi budaya etnis Batak relatif kuat dalam sistem kekerabatan dan kearifan lokal *dalihun natolu* masih berperan dalam masyarakat, peran *natua-tua*/ pemuka adat dan peran pemuka agama relatif kuat sehingga dalam kehidupan sosial dan adat masih kental dengan kerukunan, baik antarumat beragama mau-pun antarmarga⁸⁷. Penduduk Pahe Jae pada tahun 2012 kebanyakan beragama Kristen, dengan komposisi: Kristen 8.102 jiwa (76,78%), Islam 2.372 jiwa (22,47%), Katolik 78 jiwa (0,78%), sedangkan pemeluk Hindu, Buddha dan Khonghucu tidak ada. Rumah ibadat sebanyak 42 buah, terdiri dari: 6 masjid (14,28%), 35 gereja Kristen (83,33%) dan sebuah gereja Katolik (2,38%). Kebutuhan rumah ibadat jika mengacu pada jumlah umat Kristiani (8.102 umat: 35 gereja) berarti 1 (satu) gereja 2.314 jiwa. Itu berarti, untuk jumlah umat Islam yang ada saat itu dibutuhkan 7 masjid yang berarti secara realita kurang satu dari 6 masjid yang telah ada. Kecamatan Pahe Jae ialah salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Luas wilayah Kecamatan Pahe Jae 203,20 km². Secara administrative kecamatan ini terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Salah satunya Desa Nahornop Marsada yang menjadi sentra lokus penelitian ini. Jarak Desa Nahornop Marsada dari Desa Sarulla ibukota Kecamatan Pahe Jae 1 km, dari Tarutung ibukota Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 42 km, dan dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara lebih-kurang 323 km dan dari Tarutung 281 km.⁸⁸ Waktu tempuh dari Medan dengan kendaraan taxi sekitar 8 jam atau dengan bus penumpang sekitar 10 jam, Tarutung ke Pahe Jae antara 30 hingga 45 menit.

Jumat, 14 Desember 2012, direncanakan akan diadakan gotong-royong massal pengurus dan jamaah Masjid se Pahae Jae, namun Ketua DPRD Kabupaten Taput minta ditunda melalui Romwelt Gultom tanggal

⁸⁷ Muhidin Panggabean, Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)/ mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabpaten Tapanuli Utara, Tarutung, wawancara 9 Maret 2013, dalam Verianto Sihotang, 2013. *Pernyataan Sikap ASB: Mendukung Pendirian Mesjid di Kab.Tapanuli Utara*, Ourvoice.onid, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

⁸⁸ *Letak Geografis dan Astronomis Kabupaten Tapanuli Utara*, h.2-3, dalam Sihotang, 2013. *Pernyataan ...*, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

13 Desember 2012. Pelaksanaan ditunda menunggu Tim khusus Pemda yang akan berkunjung tanggal 18 Desember 2012. Karena pendirian masjid di lokasi ini tidak disetujui oleh sementara umat Kristen Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara, maka Panitia Pembangunan Masjid membatalkan rencana pembangunannya, dan memperhatikan serta memenuhi anjuran Penatua ST Saur Harianja (beragama Kristen) lalu dipindahkan dengan menggeser lokasi ke arah Timur, jarak dari gereja sekitar 150m. Lokasi tanah pembangunan masjid yang kedua ini adalah sawah dan di lingkungan sawah, hanya terdapat sebuah rumah seorang Kristen yang berbatasan dengan lokasi masjid. Lokasi masjid kedua ini juga dipinggir Jalan Raya lintas Sumatera (alternatif) adalah wakaf dari Hj. Berlian Siregar dengan luas 2004 m², sebagai tukar guling tanah lokasi masjid yang pertama.

21 Januari 2013 melalui surat BKM Al Munawar No. 003/BKMAL-PJ/4/2013 yang ditujukan Camat, Dan Ramil, Kapolsek, kepala KUA, BKAG Pahae Jae, MUI Kecamatan Pahae Jae, Kepala Desa Nahornop Marsada dan Pengurus/ Jamaah Masjid se Pahae Jae berisi permohonan bantuan pengamanan dan gotong royong massal.

Jumat, 25 Januari 2013, dimulai pukul 09.00 WIB. BKM al Munawar menyelenggarakan Gotong royong meratakan lokasi pertapakan Masjid Raya al Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada. Kegiatan ini dihadiri 166 orang, dan berlangsung lancar dan aman.

30 Januari 2013, melalui surat BKM Al Munawar No. 004/BKMAL-PJ/1/2013 yang ditujukan kepada Camat, Dan Ramil, Kapolsek dan Kepala Desa Nahornop Marsada berisi mohon bantuan pengamanan untuk menindaklanjuti gotong royong. BKM Al Munawar menyelenggarakan gotong royong lanjutan pemerataan tanah pertapakan Masjid Raya Al Munawar dengan menggunakan alat berat (excavator) pada hari Jum'at 1 Februari 2013 dimulai pukul 08.00 wib. Kegiatan gotong royong berlangsung lancar dan aman. Pembangunan dimulai pengerukan tanah dan pemasangan tiang besi 'cakarayam' sejak 1 Februari 2013, dan terus berlangsung hingga 6 Maret 2013.

6 Februari 2013, BKM Al Munawar melalui surat No. 005/BKMAL-PJ/II/2013 ditukan kepada kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Utara berisi permohonan membantu penentuan arah kiblat.

BKM Al Munawar menyelenggarakan penentuan arah qiblat shalat Masjid Al Munawar pada hari Jum'at 8 Februari 2013 pukul 08.00 wib. Kegiatan ini berjalan lancar dan aman. Dengan kehadiran Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat yang mengatasnamakan wakil pemerintahan kabupaten mengimbau secara lisan penghentian sementara pembangunan Masjid Al Munawar, dan juga dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Maret 2013, maka BKM Al Munawar/Panitia menghentikan sementara kegiatan pembangunan pada hari Rabu 6 Maret 2013. Kunjungan Tim dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan penyampaian oleh Ka. Satpol PP (Pudi Sitorus) menyatakan pemerintah akan mencari solusi atas ketidaksetujuan sementara masyarakat (umat Kristen) secepatnya, 1 Minggu, 2 Minggu dan tidak lewat dari bulan Maret ini.

4 Maret 2013, ratusan masyarakat yang mengatasnamakan '*Aliansi Masyarakat Peduli Kedamaian*' melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bupati Taput dengan tuntutan menolak pembangunan Masjid. Alasannya, jumlah umat Islam sangat sedikit di wilayah tersebut dan dianggap panitia telah melanggar aturan adat. Meski demikian, Pengurus Masjid terus berupaya melakukan dialog dengan beberapa pihak. Dari situasi itu, pemerintah Taput dianggap tak memiliki sikap jelas dalam penyelesaian pembangunan Masjid al Munawar.

Jum'at, 8 Maret 2013, rapat BKM al Munawar digelar di Masjid al Munawar. Diperoleh kesepakatan, bahwa BKM dan Panitia Pembangunan Masjid Al Munawar serta umat Islam sepakat penghentian sementara pembangunan Masjid hingga akhir bulan Maret (*coolingdown*) dengan memberi kesempatan kepada pemerintah memediasi para pihak untuk kelancaran pembangunan Masjid Al Munawar. Saat jeda itu Panitia akan berkomunikasi dengan Bupati, dan melakukan kontak kepada mereka yang tidak setuju pembangunan Masjid melalui pendekatan adat/budaya, sekaligus mendukung upaya pemerintah. Panitia Pembangunan Masjid Raya Al Munawar Sarulla dibentuk oleh Badan Kenadziran Masjid Raya Sarulla Al Munawar, Kecamatan Pahe Jae tertanggal 16 Februari 2013, Panitia berjumlah 61 orang, dengan Pengurus Inti terdiri dari: Pariang Harianja (ketua), Muara Roy Siregar (Ketua I), Rahmatulla Simanjuntak (Ketua II), Mahdonel Simanungkalit (Sekretaris Umum).

Kamat Sitompul (Sekertaris I), Hanafi Sihotang (Sekretris II), Riskon Sianturi (Bendahara umum), Jaiman Sitompul, S.Pd (Bendara I), dan Basaruddin Nainggolan (Bedahara II). Panitia Inti dibantu oleh tiga Seksi (Peralatan, Humas, dan Dana), serta 16 koordinator di berbagai daerah⁸⁹. Sedangkan sebelumnya langsung ditangani oleh BKM Al Munawar yang diketuai oleh A.M. Sihombing, dan M. Panggabean sebagai sekretaris, Sihol Nainggolan selaku bendahara⁹⁰ 11. Dari wawancara lapangan terungkap akar permasalahan ketidaksetujuan pendirian Masjid Al Munawar pada awalnya merupakan masalah intern keluarga waqif tanah untuk lokasi masjid. Keluarga dari suami waqif ialah Tumpal (almarhum). Kakak kandung Tumpal beragama Kristen tidak memahami sejarah dan makna waqaf. Kakaknya meninggal sang isteri mewaqafkan tanahnya untuk masjid. Demikian pula adik dari Tumpal kenapa harta peninggalan Tumpal tidak dibagi kepada Saudara almarhum. Hal ini dipicu lagi dengan beberapa rumah kontrakan Hj. Berlian Siregar diambil dari pengontrak yang berkebetulan beragama Kristen untuk direhab. Begitu pula sawah yang selama ini dikerjakan oleh penggarap yang berketepatan beragama Kristen ditarik kembali untuk lokasi masjid. Ketidak senangan keluarga nampak dari Saudara kandung almarhum justeru mengupayakan tanda tangan warga untuk menolak pendirian Masjid.⁹¹

Rabu, 27 Maret 2013, pertemuan kerukunan umat beragama, memberikan sedikit titik terang atas sikap tegas pimpinan HKBP, Pdt WTP Simarmata MA, yang menyatakan mendukung pembangunan Masjid al Munawar di Dusun Pahae Jae. Pimpinan HKBP juga mendesak Pemerintah Kabupaten Taput segera memberi izin dan syarat-syarat kelengkapan yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid tersebut. Walau demikian, berdasarkan informasi dari contact person kami (Pengurus Masjid al Munawar Sarulla) hingga saat ini pembangunan Mesjid al Munawar di Desa Nahornop Marsada Kec. Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara belum dapat dilanjutkan.

⁸⁹ Surat Keputusan Badan Kenadziran Masjid Raya Al Munawar Sarulla Kecamatan Pahe Jae No. 007/BKMALM- P2013 tanggal 16 Februari 2013.

⁹⁰ Wawancara dengan A.M. Sihombing, Ketua Badan Kenadziran Masjid Raya Sarulla, Pahe Jae, 10 Maret 2013.

⁹¹ Wawancara dengan Hj. Berlian Siregar, pewaqif tanah untuk lokasi Masjid Al Munawar isteri almahum Tumpal, Sarulla Pahe Jae, 8 Maret 2013.

Aliansi Sumut Bersatu (ASB) terkait masalah masjid al Muwwar, ASB menyatakan sikap: (1) memberi dukungan, solidaritas dan simpati kami terhadap jamaah Masjid al Munawar bertahun-tahun terkendala membangun masjid; (2) menghimbau masyarakat dan pemerintah Desa Nahornop Marsada mendukung pembangunan Mesjid al Munawar sebagai sikap yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan pendapat; (3) mengapresiasi upaya dan sikap Ephorus HKBP untuk mendukung pembangunan Mesjid al Munawar sebagai bentuk terwujudnya kerukunan umat beragama dan penegakan hak atas kebebasan beragama; (4) mendorong setiap pimpinan lembaga keagamaan dan masyarakat untuk secara aktif mempromosikan upaya-upaya penghormatan atas keberagaman hingga terwujudnya perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang plural; (5) meminta kepada pemerintah Kab.Taput untuk memberikan jaminan kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah yang telah diatur dalam konstitusi UUD 45 pasal 28 E dan pasal 29 ayat 2 serta perlindungan khusus kepada kelompok minoritas agama / keyakinan yang rentan menjadi korban intoleransi.⁹²

Dalam Yusuf Asry, disimpulkan, dalam masalah masjid al Munawwar: Pertama, pendirian Masjid Raya Al Munawar Sarulla Pahe Jae pada hakikatnya ialah pemindahan lokasi Masjid yang berdiri sejak tahun 1941 tersebut yang dinilai tidak memadai lagi, baik daya tampung maupun kontruksi bangunannya dan kondisi lingkungan; Kedua: Pendirian Masjid Al Munawar kesepakatan bulat seluruh warga yang beragama Islam untuk lima desa dan pembangunannya telah mendapat dukungan tertulis dari Bupati Tapanuli Utara; Ketiga Penolakan pendirian Masjid Al Munawar pada awalnya untuk lokasi pertama karena pertimbangan berdekatan dengan bangunan gereja dan jumlah umat, namun setelah dipindah ke lokasi berjarak sekitar 120m, tetap tidak setuju dengan alasan kepatutan. Keempat: Alasan dibalik penolakan tersebut sangat dimungkinkan karena "kurang pendekatan antar pemuka Islam dengan pemuka Kristiani, karena awalnya internal

⁹² Veryanto Sitohang, Direktur Aliansi Sumut Bersatu, 12 April 2013, *Pernyataan Sikap ASB: Mendukung Pendirian Mesjid di Kab.Tapanuli Utara*, Ourvoice.onid, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

masalah keluarga pewaqif, dan intervensi pihak perantau, dan kurang tegasan pemerintah daerah.

Di akhir studi, Yusuf Asry merekomendasikan, perselisihan dalam pendirian Masjid Al Munawwarah hendaknya diupayakan kembali melalui fasilitasi Pemerintah Daerah (Bupati) bersama Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tapanli Utara, dengan mediasi para pemuka agama Islam dan Kristiani serta Tetua Adat;

Selain itu, Bupati hendak bertindak tegas mengamankan kebijakan dikeluarkannya tentang dukungan pendirian Masjid al Munawar dengan mengedepankan kearifan lokal sebagaimana yang terkondisikan selama ini dan atauberpedoman pada PBM tahun 2006 yang nantinya perlu untuk semua umat beragama secara adil dan transparan;

Untuk pendirian rumah ibadat ke depan hendaknya mengacu pada palaksanaan PBM tahun 2006, dengan meningkatkan sosialisasi PBM kepada para pejabat birokrasi terkait di tingkat Kabupaten Taput hingga kecamatan dan desa; Kepada Kantor Kemenag Taput hendaknya mendorong dan memfasilitasi penerbitan IMB Masjid Al Munawar yang diupayakan oleh Panitia Pembangunan Masjid tersebut.⁹³

12. Masjid Jendral Sudirman Jalan Pattimura Medan

Seiring dengan *diruslaagnya* Kompleks Kaveleri, masjid ini juga hilang. Berbeda dengan di Jakarta, saat Kompleks Militer *diruslaag*, bangunan masjid di atas tanah itu diserahkan oleh KASAD Jendral Edi Pramono kepada kaum Muslimin di Jakarta. (Republika).⁹⁴

13. Masjid Taqwa Polonia Medan

Masjid Taqwa ini terletak di dekat Hotel Hermes di Polonia. Hotel ini membangun tempat parkir sangat dekat ke Masjid Taqwa

⁹³ M.Yusuf Asry, *Pendirian dan Penolakan Pembangunan Masjid al Munawwar Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara*, <http://radiatorayfm.com/> bersumber dari penelitian El Munir Aritonang, M.AP, diakses dari <https://parapejuanghidup.wordpress.com/2013/04/26/pendirian-dan-penolakan-pembangunan1-masjid-al-munawar-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara2-oleh-m-yusuf-asry3/>

⁹⁴ Wasekjen MUI: *Pengusuran Masjid-Masjid....*; Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

dan pastinya menyalahi izin dan AMDAL. Bahkan saat hujan lebat pernah tembok dari lantai 4 Hotel semplak dan menimpa atap masjid. Walau sudah didemo berkali-kali oleh umat Islam, juga telah diadakan perdamaian di depan Notaris tapi pihak Hermes kemudian menyalahi perjanjian dan malah membangun Residen (Perumahan), sehingga menimbulkan reaksi kembali. Akhirnya pihak Walikota menghentikan pembangunan Hermes Residence tersebut.⁹⁵

14. Masjid Fisabilillah Porsea

Di Porsea, Masjid Fii Sabilillah dibakar, sempat mau dibakar sampai tiga kali, kali pertama dan kedua mereka gagal membakarnya, kali yang ketiga barulah mereka berhasil membakar masjid tersebut sampai habis ludes. Masjid itu dibangun oleh seorang Syekh yang pertama kali mendakwahkan agama Islam di Tapanuli Utara itu. Kuburannya masih berdekatan dengan masjid itu. *Alhamdulillah*, masjid kemudian bisa dibangun kembali, atas peran Saudara Affan Lubis bersama alm. Togo, Alm. Pak Hadi, juga Pak Leo. Waku peristiwa itu, FUI dapat dikatakan masih solid. Saat itu FUI bekerja untuk membangun kembali masjid itu. Ustadz Ustad Sudirman Timsar Zubil yang meletakkan batu pertama masjid Fii Sabilillah.⁹⁶

Masjid Fii Sabilillah merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Porsea yang diperkirakan sudah berusia ratusan tahun, berdiri di wilayah mayoritas Nasrani.⁹⁷ Menurut laporan, mesjid yang juga dahulu disebut Mesjid Syekh Ali Martaib itu telah tiga kali dibakar secara sengaja.⁹⁸

⁹⁵ Wasekjen MUI: *Pengusuran Masjid-Masjid....*, Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁹⁶ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁹⁷ *Masjid Tertua di Toba Samosir Dibakar OTK, Namun Tak Seheboh Pembakaran Gereja di Singkil*, RiauTerbit.com, Sabtu, 17 Oktober 2015, <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/777/masjid-tertua-di-toba-samosir-di-bakar-otk,namun-tak-seheboh-pembakaran-gereja-di-singkil.html>

⁹⁸ *Masjid Tertua di Toba Samosir Dibakar OTK, Namun Tak Seheboh Pembakaran Gereja di Singkil*, RiauTerbit.com, Sabtu, 17 Oktober 2015, <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/777/masjid-tertua-di-toba-samosir-di-bakar-otk,namun-tak-seheboh-pembakaran-gereja-di-singkil.html>

Masjid Fii Sabilillah di Desa Lumban Huluan Lobu, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Masjid ini pernah dibakar Orang Tidak Dikenal (OTK) sebanyak tiga kali. Pada kali yang ketiga masjid ini musnah terbakar. Masjid ini dibangun kembali oleh FUI SU dan para donatur dari kalangan umat Islam. Sementara pelaku pembakaran tidak pernah terungkap.⁹⁹

Tahun 1986, Masjid berusia ratusan tahun tersebut dibakar pertama kali, saat itu Masjid masih bernama Masjid Fii Sabilillah, dibakar seluruh karpet dan sajadah yang berada di dalamnya. Tahun 2008 (sumber lain menyebut tahun 2009) kembali dibakar, yaitu pembakaran terhadap mushaf-mushaf al Qur'an dan buku-buku keagamaan hingga mengenai Mihrab masjid.¹⁰⁰

Jumat 27 Juli 2010 sekitar pukul 05.00 WIB, ba'da shubuh, masjid itu kembali dibakar OTK. Kondisi lapangan menunjukkan, kebakaran itu cenderung karena disengaja dan direncanakan, seperti yang dilaporkan waspadamedan. Pasca pembakaran, kondisi bangunan masjid tinggal puing-puing, hanya sebagian kecil bagian dinding papan yang tersisa.¹⁰¹ Persatuan Batak Islam (PBI) berharap agar pengungkapan kasus pembakaran rumah Allah itu diselesaikan secara tuntas.¹⁰² Namun, pasca pembakaran Masjid tersebut belum ada pengusutan serius dari Polres Tobasa. Poldasu diminta mengambil alih pengusutan kasus ini.¹⁰³

5 November 2010. FUI SU menyesalkan pernyataan Kapoldasu di

⁹⁹ Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

¹⁰⁰ *Tiga Kali Dibakar, Masjid Fii Sabilillah Berdiri Kembali*, EraMuslim, Rabu, 22 Jumadil Awwal 1432 H / 27 April 2011 11:48 WIB, diakses dari <https://www.eraMuslim.com/berita/nasional/tiga-kali-dibakar-masjid-fii-sabilillah-berdiri-kembali.htm>

¹⁰¹ *Masjid Tertua di Toba Samosir Dibakar OTK, Namun Tak Seheboh Pembakaran Gereja di Singkil*, RiauTerbit.com, Sabtu, 17 Oktober 2015, <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/777/masjid-tertua-di-toba-samosir-di-bakar-otk,namun-tak-seheboh-pembakaran-gereja-di-singkil.html>

¹⁰² *Tiga Kali Dibakar, Masjid Fii Sabilillah Berdiri Kembali*, EraMuslim, Rabu, 22 Jumadil Awwal 1432 H / 27 April 2011 11:48 WIB, diakses dari <https://www.eraMuslim.com/berita/nasional/tiga-kali-dibakar-masjid-fii-sabilillah-berdiri-kembali.htm>

¹⁰³ *Masjid Di Porsea Sengaja Dibakar*, Voa-Islam, Jum'at, 27 Muharram 1441 H / 20 Agustus 2010 17:09 wib, mengutip sumber Waspada, diakses dari <https://www.voa-islam.com/read/suaraislam/2010/08/20/9388/masjid-di-porsea-sengaja-dibakar/>

media massa, bahwa pembakaran Masjid Fi Sabilillah tersebut dilakukan oleh orang Islam sendiri. Karena merasa tidak masuk akal, sejumlah pengurus FUI SU melakukan investigasi ke lokasi Masjid Fi Sabillallah tersebut menemui nazir dan jama'ah juga masyarakat. Ternyata, alasan pembakaran Masjid tersebut oleh orang Islam karena perebutan harta warisan dan pengurus Badan Kenaziran Masjid (BKM) seperti yang disampaikan Kapoldasu Irjen. Pol. Oegroseno tidak pernah terjadi. Nazir dan jama'ah Masjid Fi Sabilillah yang minoritas di tengah-tengah mayoritas pemeluk agama Kristen hidup rukun dan solid.¹⁰⁴

Sabtu, 23 April 2011, Masjid Fii Sabilillah yang terletak di Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir kini berdiri tegak kembali. Secara simbolik telah diresmikan dengan serah terima kunci Masjid Fii Sabilillah dari Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI SU) kepada BKM/Nadzir Masjid disaksikan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lumban Julu Bapak Hasiholan. Acara peresmian diikuti oleh sedikitnya 100 orang warga Muslim sekitar Masjid Fii Sabilillaah yang terletak di Jalan Lintas Parapat-Porsea. Kepala KUA Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Tobasa, Hasiholan dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada FUI SU yang telah membantu dalam penyelesaian Pembangunan Masjid Fii Sabilillah tersebut.

Rabu, 4 Agustus 2015, belum ada pengusutan serius dari Polres Tobasa. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Batak Islam (PBI) Prof DR H Abdul Muin Sibuea, MPd mengutuk keras pelaku dan mendesak Poldasu mengambil alih dan mengusut tuntas kasus itu.¹⁰⁵

¹⁰⁴ FUI Sumut Surati Presiden Yudhoyono soal Pembakaran Masjid, Hidayatullah, Jun'at, 5 November 2010 - 09:14 WIB, diakses dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2010/11/05/45473/fui-sumut-surati-presiden-yudhoyono-soal-pembakaran-masjid.html>

¹⁰⁵ Masjid Tertua di Toba Samosir Dibakar OTK, Namun Tak Seheboh Pembakaran Gereja di Singkil, RiauTerbit.com, Sabtu, 17 Oktober 2015, <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/777/masjid-tertua-di-toba-samosir-di-bakar-otk,namun-tak-seheboh-pembakaran-gereja-di-singkil.html>

15. Masjid Taqwa dan Masjid Nurhikmah Aek Loba, Asahan

Masjid Taqwa (Aek Loba, Asahan) dan Nur Hikmah (Aek Loba, Asahan) dibakar pada pada satu malam yang sama di Aek Loba. Walaupun Masjid Taqwa tidak sampai musnah terbakar, akan tetapi masjid Nur Hikmah musnah dilalap api. Pelaku dikabarkan pihak Kepolisian sebagai orang gila. Kejadian terjadi sekitar tahun 2011 lalu. Peresmian masjid baru Nur Hikmah dilakukan oleh Bupati Asahan pada 16 Maret 2012.¹⁰⁶

Dalam banyak kesempatan, FUI SU mengaku selalu siap untuk berdialog dengan pihak Poldasu, dialog yang diharapkan dapat memberi solusi demi keamanan dan persatuan bangsa.¹⁰⁷

Demikian kasus-kasus yang berkenaan dengan persoalan masjid yang di Sumatera Utara umumnya dan Kota Medan khususnya guna memberikan ilustrasi tentang perjuangan dan pengeloan wakaf. Karena itu, dalam upaya memberikan perlindungan kepada harta wakaf, antara lain harus serius, harus dirasakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai sebagai seorang Muslim. Sehingga, dengan adanya modal keseriusan ini, walau pun tidak punya apa-apa pun berupa dana atau fasilitas, tetapi tetap bisa berjalan.

Sementara masih banyak lagi kasus-kasus yang mungkin akan hadir dihadapan kita terutama berkaitan dengan persoalan wakaf.

Masalah Eksistensi Tanah Wakaf di Sumatera Utara

Di bawah ini data mengenai jumlah tanah wakaf di Sumatera Utara:

¹⁰⁶ Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

¹⁰⁷ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>, lihat juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah, KH Tengku Zulkarnani (Facebook Page)*, diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>

Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Sumatera Utara¹⁰⁸

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Aceh	13.178	7.211,23	6.384	877,72	6.794	6.333,51
2.	Sumatera Utara	10.857	8.223,16	6.257	793,51	4.600	7.429,65
3.	Sumatera Barat	5.011	606,04	3.520	416,49	1.491	189,55
4.	Riau	7.912	2.057,64	2.761	452,87	5.151	1.604,78
5.	Jambi	6.227	988,96	3.291	399,61	2.936	589,35
6.	Sumatera Selatan	3.942	941,62	1.961	146,96	1.981	794,67
7.	Bengkulu	2.294	408,69	1.643	235,17	651	173,52
8.	Lampung	11.484	5.483,43	6.919	2.778,83	4.565	2.704,60
9.	Kep. Bangka Belitung	1.093	201,08	749	150,90	344	50,18
10.	Kepulauan Riau	1.367	238,07	415	61,13	952	176,94
11.	D K I Jakarta	6.580	266,03	4.073	157,43	2.507	108,60
12.	Jawa Barat	70.106	4.862,84	38.888	2.212,72	31.218	2.650,12
13.	Jawa Tengah	92.699	4.641,43	69.180	3.430,83	23.519	1.210,60
14.	D I Yogyakarta	9.880	350,15	8.920	311,93	960	38,22
15.	Jawa Timur	61.679	4.070,01	33.962	2.204,02	27.717	1.865,99
16.	Banten	15.276	1.065,89	8.533	550,79	6.743	515,10
17.	Bali	1.433	208,94	1.293	187,58	140	21,36
18.	Nusa Tenggara Barat	8.828	1.348,05	5.658	859,28	3.170	488,76
19.	Nusa Tenggara Timur	1.307	335,26	985	209,90	322	125,36
20.	Kalimantan Barat	2.647	523,21	1.525	244,24	1.122	278,97
21.	Kalimantan Tengah	2.994	608,17	1.804	336,65	1.190	271,52
22.	Kalimantan Selatan	7.845	912,99	7.020	788,89	825	124,10
23.	Kalimantan Timur	2.563	656,07	1.252	197,68	1.311	458,39

¹⁰⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimasy Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Sumatera Utara*, Siwak Kemenag, diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?_pid=ytavb2wyuhpstgl4avrmkxcedjqt09

No	Nama Wilayah	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
24.	Kalimantan Utara	403	131,82	153	98,67	250	33,15
25.	Sulawesi Utara	775	102,78	344	34,40	431	68,37
26.	Sulawesi Tengah	2.145	895,07	1.369	138,60	776	756,47
27.	Sulawesi Selatan	7.109	905,78	4.432	361,20	2.677	544,58
28.	Sulawesi Tenggara	1.099	109,13	827	71,37	272	37,76
29.	Gorontalo	1.853	383,43	938	271,55	915	111,88
30.	Sulawesi Barat	2.945	520,24	936	108,52	2.009	411,72
31.	Maluku	436	62,96	205	34,36	231	28,59
32.	Maluku Utara	313	46,72	225	25,37	88	21,35
33.	Papua	287	59,97	141	19,28	146	40,69
34.	Papua Barat	44	18,12	29	2,92	15	15,20
Jumlah		364.611	49.444,98	226.592	19.171,38	138.019	30.273,61

1. Tanah Wakaf Arakundo (YAPRSBI).

Tanah Wakaf YAPRSBI adalah tanah wakaf berdasarkan Fatwa MUI Sumut melalui Keputusan Nomor: 001/Kf/MUI-SU/V/2016 tentang: Status Wakaf Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam. Dengan demikian, berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf, termasuk tanah tidak dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (pasal 40).

Terkait masalah Arakundo, Pak Ketua Irman Hanif telah mempercayakan kepada Pak Amir dalam menyusun komposisi tim. Dalam proses hukum, tetap diperlukan koordinasi dengan Hamdani Harahap guna kebutuhan pemikiran strategis yang kemudian berbagi peran dan melakoni di lapangan, misalnya, ketika tanah wakaf mau digusur, kekuatan massa dikerahkan untuk mengeruduk pihak pengembang. Dalam pendampingan dan manajemen aksinya koordinasi antara Hamdani dan FUI SU di lapangan juga terus diperlukan. Untuk tanah Wakaf Arakundo, setidaknya FUI SU telah menyiagakan sedikitnya 20

laskar yang dapat bergerak menahan preman-preman suruhan Cina kafir yang sudah terlalu lancang menyerobot tanah wakaf. Belakangan ia dikagetkan adanya AIPW tanah wakaf Arakundo, tahun 2016 dan adanya Fatwa, tanah wakaf dilarang diperjualbelikan. Walau sempat dikabarkan akan mengurungkan niat dan mengundurkan aktifitas pengembangan, tetapi ternyata kerakusannya tetap dilanjutkan melalui pengacaranya.

Kerakusan itu ditunjukkan dengan tetap dilakukannya pemasangan pagar di atas tanah wakaf, pada saat polisi sedang tidak disiagakan di situ. Masyarakat sudah membangun koordinasi dengan Kapolres dan ustadz-ustadz di kawasan Medan Timur. Mediasi pernah dilakukan, diikuti beberapa personel polisi dari Polsek Medan Timur, Babinsa, ustadz, dihadiri pengacara pengembang di kantor camat. Dalam masalah ini polisi dianggap cenderung bersikap diam. Pernah dipertanyakan kepada Kanit Intel, dijawab tergantung Komandan. Salah seorang masyarakat sempat dibuat geram dan sempat menyeletuk, "Di mana keberanian kalian, menegakkan hukum. Badan besar, tapi mental persis anak SD."

Hamdani Harahap langsung mengingatkan kepada masyarakat agar tidak emosial, "Jangan ada cela hukum, sehingga masyarakat yang akan dikriminaliasi. Ikuti saja proses hukum, jangan diganggu," ucapnya.

Hamdani Harahap terus menggalang kekuatan dan menyinergikan semua bentuk dukungan guna menyelamatkan harta wakaf. Semua perlu dilaksanakan secara terencana. Sehingga selain melalui perlawanan hukum, tokoh-tokoh Islam juga dapat menggalang kekuatan untuk melakukan gugatan *class action*. Sehingga untuk itu, perlu dipikirkan menghubungkan mereka secara transparan dengan pihak Yayasan, sehingga skenario yang dibangun secara terbuka, tidak menimbulkan potensi masalah setelah masyarakat dan elemen umat Islam lain memenangkan perjuangan. Untuk pemikiran yang strategis juga perlu lebih membuka diri kepada orang-orang tertentu. "Pandangan strategis ke depan didiskusikan bersama, dikoordinasikan secara terbuka. Tak ada yang ditutup-tutupi," cetus Hamdani.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Prof. Aslim sendiri sudah pasang badan untuk membela tanah Wakaf Arakundo dan siap menghadapi segala risiko perjuangan. Perlawanan fisik juga tetap disiapkan dengan membangun Posko, untuk menghadapi beberapa suruhan preman yang dibayar untuk memancing-mancing keruicuhan, supaya masyarakat terjebak dan ujung-ujungnya diamankan. Pembelajaran yang terjadi, Sihotang sudah dijadikan tersangka. Yayasan telah menyanggah semua tuduhan. Substansi masalahnya, tanah wakaf itu sudah disertifikatkan, lalu diambil secara licik, tanah itu adalah infaq zakat sedekah dari ibu-ibu ini. Sehingga tidak ada dokumen untuk saat ini. Tetapi yang dipertanyakan hak copy di BPN. Ahli waris tidak menguasai tanah, pewakifnya sudah meninggal.

Sebagai yayasan, permohonan tetap akan diajukan yayasan untuk menyertifikatkan tanah di BPN. Tapi kenyataannya, tanah wakaf Arakundo adalah hasil wakaf, fakta di lapangan juga dikuasai oleh masyarakat. Sebelumnya sudah diminta agar tidak ada penangkapan, tiba-tiba penangkapan terjadi juga,

Prof. Aslim, adalah orang yang pertama dipanggil oleh polisi, tapi Allah menolongnya. Beliau ditekan, kalau tidak menandatangani maka ia akan ditangkap polisi, sehingga beliau menandatangani. Memang, saat pemanggilan, banyak ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal, awalnya masyarakat setempat diproses berujung pada penemuan 3 jenis dokumen.¹¹⁰ Ketika menghadapi pertanyaan mengenai legalitas tanah, sudah dijelaskan, tanah wakaf itu ada surat, tetapi diambil secara licik dan kini dalam proses gugatan, kemudian didesak lagi dasar hukum menguasai tanah, masyarakat menjelaskan, Fawa MUI. "Ulama kami yang memutuskan begitu." Tetapi setelah diketahui mengenai fatwa, malah membuat mereka lebih ganas lagi.¹¹¹

Sebelumnya, Prof. Aslim juga pernah dipanggil polisi terkait Arakundo dan telah diselesaikan oleh Hamdani. Masalahnya dikira sudah selesai. Apalagi, MUI Sumut juga sudah memutuskan tanah wakaf Arakundo sebagai wakaf. Sehingga, mulai muncul pertanyaan,

¹¹⁰ Hamdani Harahap, SH, MH (Direktur LADUI MUI SU), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

¹¹¹ Hamdani Harahap, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

bagaimana sebenarnya kedudukan keputusan penetapan Komisi Fatwa di mata hukum?¹¹²

Target awal dari kelompok Arakundo adalah membatalkan sertifikat yang telah diambil secara licik. Dalam menghadapi teror-teror dari preman bayaran, diharapkan terus menyeimbangkan kekuatan.¹¹³ Tokoh-tokoh OKP juga banyak yang mendukung perjuangan tanah wakaf Arakundo, apalagi yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat dengan pengurus inti tokoh-tokoh pemuda. Masyarakat menyadari, yang sedang dihadapi adalah jaringan mafia yang sudah dikenal dengan cara-cara premanismenya. Sehingga, sejumlah tokoh pemuda juga terus mengawal, memberi dukungan semangat dan mengikuti perkembangannya.¹¹⁴

Dalam dokumen resmi pengadilan disebutkan, tanah wakaf Arakundo, merupakan tanah wakaf yang dikuasai dan diusahai oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI) seluas 2400/M2 terletak di Jalan Sei. Arakundo Kelurahan Se. Sikampung D Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

Pada tanggal 19 Agustus 2019, Majelis Ulama Sumatera Utara Sumatera Utara (MUI-SU) melalui Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) MUI Sumut, menyurati Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) cq Ketua Komisi A dalam rangka permohonan perlindungan dan pengawasan politik terhadap masalah tanah wakaf yang dikuasai dan diusahai oleh Yayasan Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam (YAPRSBI).

Surat bernomor 132/LADUI-MUISU/VII/2019 yang ditandatangani bersama Klien Drs, Indra Suheri, dkk., dan kuasa hukumnya H. Hamdan Harahap, SH, MH, Raja Makayasa Harahap, SH dan Rahmat Yusup Simamora, SH, MH itu mengungkapkan, sejak 1967 hingga kini (Agustus 2019, pen.), status YAPRSBI adalah tanah wakaf sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2018 oleh Kepala Kantor Urusan Agama

¹¹² Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

¹¹³ Harahap, 2019. *FGD ...*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

¹¹⁴ Hj. Mariani, Sulhani Harahap dan Marwiyah (Pewakif Arakundo), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

(KUA) Medan Petisah. Sebelumnya, MUI Sumut juga telah memfatwakan status wakaf tanah tersebut melalui Fatwa MUI Sumut No. 001/KF/MUI-SU/V/2016.

Selasa, 13 Agustus 2019, Ustadz Indra Suheri bersama ibu-ibu militan dari masyarakat telah mengajukan protes. Tiba-tiba pembongkaran paksa terjadi sehingga mengakibatkan 3 dokumen, 2 sertifikat dan 1 IMB raib. Padahal, dokumen-dokumen itu adalah data yuridis. Walhasil, di dinding beton itu dipasang spanduk: Tanah ini wakaf, sesuai Fatwa MUI. Jadi, secara fisik Arakundo memang dikuasi masyarakat, tetapi sertifikat tidak lagi dimiliki. Untuk itu, konsep gugatan dan draft surat kuasa perlu segera disiapkan terkait dokumen, antara lain 2 sertifikat dan 3 dokumen lainnya. Sedangkan langkah secara fisik, sebagaimana yang pernah dibicarakan oleh Bunda Ani, Prof Arif dan Hamdani Harahap agar di lokasi tanah wakaf Arakundo dibuat dapur umum, karena tanah wakaf itu harus dijaga sepanjang 24 jam. Sejak itu, makanan di situ selalu berlimpah. Jadi, upaya merebut kembali tanah wakaf Arakundo terus terjadi.¹¹⁵ Para Emak-emak, sejumlah Ormas Islam dan Mujahid Sholat Ashar memprotes pihak pengembang yang datang ke lokasi tanah wakaf membawa peralatan bangunan pagar. Mereka menghalangi dan menghentikan aktifitas para pengembang di lokasi serta menjaga lokasi tersebut selama 24 jam. Diketahui, ternyata pihak pengembang telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) berdasarkan terbitnya SIMB.

Keberadaan ibu-ibu militan, baik yang muda maupun yang sudah tua juga sangat berperan besar. Jumlahnya lebih dari 40 orang. Secara hukum terkait tanah wakaf Arakundo, sudah digugat di Pengadilan dan dimenangkan oleh masyarakat. Lalu dimohonkan agar mendinginkan suasana, tetapi ada yang dilapor ke Polda, sudah digelar perkara, sehingga sudah ditangguhkan penyidikan, tiba-tiba saat Ramadhan konflik dihidupkan lagi dengan keluarnya surat perintah penyidikan baru. Oleh Polresta keputusan dihentikan, pengurus ditangkap. Tetapi Allah menolong Prof. Aslim. Keadaan tidak menguntungkan bagi pengurus sehingga menekan hak kelola, karena berada ancaman, juga karena sudah ada yang ditangkap polisi. Lalu diteken. Keadaan menjadi

¹¹⁵ Hj. Mariani, Sulhani Harahap dan Marwiyah (Pewakif Arakundo), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

lepas kendali, akhirnya diambil kesimpulan, sehingga dilakukan *class action* 3 hari kemudian.¹¹⁶

Tim Hukum LADUI MUI-SU kemudian menyurati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan untuk membatalkan izinya, karena pada tahun 2017 dan 2018 tanah masih dalam perkara dan saat itu sempat dimenangkan pihak Yayasan RSBI melawan Mukhlis dkk. LADUI MUI-SU mempertanyakan keberadaan dan proses terbitnya SIMB dan Sertifikat atas tanah wakaf tersebut, sebab berdasarkan data fisik yang dikuasai dan diusahai Yayasan, penerbitan SIMB dan SHM sangat tidak masuk akal.

Melalui surat tersebut, LADUI MUI-SU mendorong pihak Kepolisian atau Pejabat Negara mencari tahu orang yang mempengaruhi oknum Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pejabat Negara lainnya sehingga menyalahgunaan fungsi dan jabatannya secara melawan hukum terkait masalah tanah wakaf Jalan Sei. Arakundo tersebut. Surat perihal permohonan perlindungan dan pengawasan politik itu juga ditembuskan kepada DP MUI SU, Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara, Kapoldasu, Ka. Kajatisu, Walikota Medan, Kapolrestabes Medan, Camat Medan Petisah, Lurah Sei. Sikambang D dan Klien yang bersangkutan.

5 Oktober 2015, puluhan massa berseragam serba putih yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Umat Islam (LUI) mendatangi Polresta Medan Jalan HM Said, Kecamatan Medan Timur, Mereka langsung naik ke lantai dua ruang Satreskrim Polresta Medan dalam rangka memenuhi panggilan penyidik Polresta Medan terkait aduan adanya dugaan pemalsuan akta otentik tanah wakaf di Jalan Sei Arukundo/ Darussalam. Para ustadz diadukan dengan tuduhan memberikan keterangan palsu atas akta otentik. Satu persatu ustadz yang tergabung dalam pengurusan yayasan pun dipanggil. Ada juga indikasi para pelapor merekayasa sejumlah berkas terkait lahan Yayasan Asrama Putri serta RS Bersalin Islam (YAPRSBI).¹¹⁷

¹¹⁶ Hj. Mariani, Sulhani Harahap dan Marwiyah (Pewakif Arakundo), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

¹¹⁷ FPI dan LUI 'Serbu' Polresta Medan, WOL 5 Oktober 2015, diakses dari <http://waspada.co.id/medan/fpi-dan-lui-serbu-polresta-medan>

Pada Juli 2019, MUI Sumut melalui LADUI MUI-SU juga meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Medan agar tidak memeroses/ tidak menerbitkan Hak Atas Tanah (sertifikat) atas tanah wakaf seluas 2400M2 di Jalan Sei. Arakundo Kel. Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ke atas nama pihak ketiga itu melalui Surat No. 123/LADUI-MUISU/VII/2019.

Dalam surat permohonan itu diungkapkan, tanah wakaf tersebut berbatasan dengan Jalan/ Gg. Sejahtera (d/h dahulu perladangan Ibu Sinaga), sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wonggo (sekarang gereja), sebelah Selatan berbatasan dengan Gg. Mesjid (sekarang, Jalan Sei. Arakundo), dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah T. Jakub, Alm. Kadjid, dahulu Djuari. Pada saat surat itu dikirimkan, tanah wakaf tersebut telah dipagari keliling, sementara di atas tanah tersebut berdiri bangunan Rumah Sakit Bersalin Islam yang dikelola oleh Yayasan Asrama Putrid an Rumah Sakit Bersalin Islam yang sudah berdiri sejak 1967 dan fisiknya masih ada hingga saat ini.

Sejarah tanah wakaf Arakundo itu berawal dari anjuran Alm. Ustadz Bahrum Saleh Nasution kepada ibu-ibu perwiridan yang hendak bersalin agar ditangani dokter wanita. Atas anjuran itu, para ibu perwiridan mengumpulkan wakaf, zakat dan sedekah Umat. Uang yang terkumpul membeli tanah milik Ahmad, sesuai Surat Ganti Kerugian tanggal 28 Mei 1967, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei. Sikambing D dan Camat Kecamatan Medan Barat, maka didirikanlah TK Al Qur'an. Selanjutnya Rumah Sakit Bersalin. Oleh karena sumber uangnya berasal dari umat Islam, maka status tanah/ bangunan tersebut adalah wakaf, sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf No. 1 Tahun 2016 dan Fatwa MUI. Sejarah tanah ini juga diungkapkan dalam sejumlah dokumen Putusan, sejak di Pengadilan Negeri Medan melalui berkas PUTUSAN Nomor 289/Pdt/2018/PT MDN (setebal 61 halaman)¹¹⁸, Putusan Nomor 335/Pdt/2018/PT MDN (setebal 35 halaman)¹¹⁹ hingga berkas Putsan Mahkamah Agung untuk Putusan Nomor 622/Pdt.G/2015/PN Mdn pada

¹¹⁸ https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?_URL=289_pdt_2018_pt_mdn.pdf

¹¹⁹ https://siperka.pt-medan.go.id/file_putusan/?_URL=335_Pdt_2018_PT_MDN.PDF

Rabu bertanggal 20 Juli 2016 (setebal 76 halaman)¹²⁰ dan PUTUSAN (akhir) Nomor 469/Pdt.G/2016/PN Mdn pada Selasa, bertanggal 13 Juni 2017 (setebal 50 halaman).¹²¹ Proses pembelaan terhadap tanah wakaf ini juga banyak mendapatkan perhatian dari media, baik media lokasi maupun nasional. Beberapa di antaranya dikutip dalam buku ini.

Jumat, 16 Agustus 2019, kaum ibu berada di YAPRSBI untuk membacakan al Quran Surah Yasin 41 mengharap pembelaan Allah SWT atas tanah wakaf yang selama ini untuk kepentingan sosial. Tanah Wakaf YAPRSBI di Jalan Sei Arakundo No.40 Seisikambing D, Medan Petisah, adalah tempat para ibu yang sedang hamil untuk pemeriksaan kehamilan secara berkala tanpa dipungut bayaran. Selain itu, kata dia, tempat ini difasilitasi oleh donatur yang menyediakan peralatan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Dinyatakan, manfaat membaca Surah Yasin sebanyak 41 kali untuk setiap sesuatu (maksudnya untuk memohon sesuatu). "Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada qalbunya, dan qalbu dari al Quran adalah Surat Yasin. Barangsiapa yang membaca Surat Yasin, maka Allah akan mencatat baginya pahala membaca al Quran sebanyak 10 kali." HR. Ad-Darami dan At-Tirmidzi. Hamdani Harahap MH mengatakan, tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo Kel. Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah Kota Medan seluas 2.400 M adalah tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 01 tahun 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kota Medan dan berdasarkan Fatwa MUI No.001/ KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 dan telah memenangkan perkara melawan Mukhlis, dkk. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No. 470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Reg. No.: 289/Pdt/2018/PTMdn, menyatakan bahwa tentang adanya pelepasan hak dari YAPRSBI kepada pihak ketiga dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan Reg. No.415/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan secara hukum Pengurus Yayasan tidak berwenang mengalihkannya. Sebab tanah terperkara

¹²⁰ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/885272e2937b2322574c1816c8532b7e/pdf>, Lihat duduk perkara terkait putusan Nomor 622/Pdt.G/2015/PN Mdn di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/0ccbf120d0ba89deaa2b64f3f1484845>

¹²¹ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/863034f2e657e7602d0fd9226de644ff/pdf>, Lihat duduk perkara terkait Putusan Nomor 470/Pdt.G/2016/PN Mdn di <https://siperka.pt-medan.go.id/web/index/detail/1038>

adalah tanah wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan oleh siapapun sebagaimana di atur dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 67 'Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹²²

Pada Jumat, 19 Agustus 2019, LADUI MUI-SU juga menyurati Kepala Kantor Pertahanan Kota Medan perihal permohonan keberatan sekaligus permohonan pembatalan Serifikat Hak Milik (SHM) No. 01609 Tahun 2018 an. Octoduti Saragi Rumahorbo melalui Surat bernomor 131/LADUI-MUI-SU/VIII/2019.

Ladui MUI Sumut meminta Kadis PMDPTSP agar membatalkan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Tanah Wakaf di Jln Sei Arakundo Kelurahan Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan seluas 2.400 M. bertanggal 14 Agustus 2019, perihal permohonan pembatalan sertifikat SHM No. 101601 Tahun 2017 atas nama Octoduti Saragi Rumahorbo melalui Surat No. 127/LADUI-MUISU/VIII/2019/. Hamdani Harahap, Jumat (16/8) saat melihat langsung Tanah Wakaf mengungkapkan, saat ini tanah wakaf telah diduduki Forum Umar Islam (FUI) Kota Medan dan FUI Sumut serta ratusan kaum ibu yang selama ini menggunakan gedung di lahan wakaf itu untuk kegiatan sosial. Hamdani memaparkan, dirinya dalam ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Drs. Indra Suheri dkk, Penggugat dalam perkara Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn, memohon kiranya berkenan membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor 0723/0728/0130/2.511102/07/2019 an. OCTODUTI SARAGI RUMAHORBO. 24 Juli 2019. "Alasan pembatalan itu yakni, bahwa klien kami telah menyurati Walikota Medan melalui surat No.:118/LADUI-MUISU/V/2019, 20 Mei 2019 ditembuskan ke Camat Medan Petisah, Lurah Sei Sikambing D yang pada pokoknya berisi tanah yang terletak di Jl. Sei Arakundo Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan seluas 2.400 M adalah tanah wakaf berdasarkan Akta lkrar Wakaf No. 01 tahun 2016 yang diterbitkan oleh KUA Kota Medan dan berdasarkan Fatwa MUI .No. 001/ KF/MUI-SU/V/2016 tertanggal 03 Mei 2016 dan telah memenangkan perkara melawan MUKHLIS, Dkk. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. No.470/Pdt.G/2016/PN.Mdn Jo. Putusan

¹²² Tanah Wakaf akan Diambil Alih, Kaum Ibu Baca Yasin 41, Waspada.co.id, 16 Agustus 2019, diakses dari <http://waspada.id/tanah-wakaf-akan-diambil-alih-kaum-ibu-baca-yasin-41>

Pengadilan Tinggi Reg. No.:289/Pdt/2018/PTMdn. Bahwa tentang adanya pelepasan hak dari Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam kepada pihak ketiga dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan Reg. No. 415/Pdt.G/2019/PN.Mdn dan secara hukum Pengurus Yayasan tidak berwenang mengalihkannya sebab tanah terperkara adalah tanah wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan oleh siapapun sebagaimana di atur dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 67 'Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,"kata Hamdani Harahap.¹²³

2. Yayasan Al Ishlahiyah Binjai

Senin 29 Juli 2019, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (LADUI MUI-SU) Hamdani Harahap, MH bertemu dengan Ketua Umum MUI SU Prof Dr H Abdullah Syah MA didampingi Wakil Ketua H Arso. Pada pertemuan itu, Ketua MUI mengharapkan agar kemelut yang terjadi di tubuh Yayasan Al Ishlahiyah Binjai dapat diselesaikan secara baik-baik dengan mengutamakan semangat islah, dengan sangat baik-baik, mengingat yayasan tersebut adalah lembaga pendidikan milik umat. Sesama umat Nabi Muhammad yang menjadi umat membawa rahmat bagi sekalian alam. Ketua MUI juga menunjuk LADUI MUI SU sebagai penasehat hukum untuk Yayasan

¹²³ *Batalkan IMB Gedung Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang akan diperjuangkan FUI dan Laskar Umat Islam agar tidak berpindah tangan, diakses dari <http://www.waspada.id/ladui-mui-sumut-minta-kadis-pmdptsp-batalkan-imb>. Lebih jauh mengenai Octoduti Saragi Rumahorbo, diketahui, sebagaimana disebut dalam sebuah dakwaan penuntut umum pada kasus penipuan, sekira awal Mei 2018, Octoduti Saragi Rumahorbo mendatangi rumah saksi korban Albert di Jalan Flores, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan. Dia menawarkan bisnis menguntungkan yang hendak dijalankan terdakwa Muhammad Firdaus, Agus Fitri, dan Hendy. Dengan bujuk rayu, saksi korban akhirnya tergiur menanamkan modal dengan dua kali mentranfer dana Rp3 miliar dan Rp1,8 miliar. Albert diiming-imingi mendapatkan keuntungan 10 persen setiap bulannya dari total modal yang diinvestasikan korban. Namun, jangankan mendapat keuntungan 10 persen setiap bulan, modal pokoknya Rp4,8 miliar pun tidak kembali. Dakwaan yang menyebut kasus lain yang melibatkan OSR ini terekam dalam Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan berkedok bisnis bernilai Rp4,8 miliar; pengadaan alat kesehatan (alkes), Kamis (1/8/2019), di Ruang Cakra 7 PN Medan. Baca: <https://topmetro.news/69187/penipuan-berkedok-bisnis-miliaran-rupiah-disidang/>*

Ishlahiyah Binjai yang terdaftar di Kemenkum HAM dengan Ketua Umum Dr HM Jamil MA yang juga Ketua Umum MUI Kota Binjai dan Sekretaris Umum Drs. H Ahmad Fauzi guna memberikan advokasi dan bantuan hukum.

Hamdani bersama Ketua Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai, periode 2018-2023, Dr HM Jamil, Ketua Pembina H Riswan Rika, Sekretaris Drs H Ahmad Fauzi, Wakil Ketua Drs H Yundiser, Bendahara H Khudri Kamil dan pengurus lainnya, menilai polisi harus menanggukkan penyidikan. Sebab berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan, ada prasa 'wajib' didaftarkan. Jika tidak terdaftar, maka konsekwensi hukumnya adalah kepengurusan tidak sah serta tidak mengikat.

Kamis 1 Agustus 2019, LADUI MUI SU meminta kepada Polda Sumut, untuk menanggukkan penyidikan terkait laporan Dr H Syahril Efendi Pasaribu. Terkait perselisihan dualisme kepemimpinan di Yayasan al Ishlahiyah Binjai ini, Polda Sumut telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Hamdani Harahap mengharapkan Polda Sumut lebih responsif serta mengedepankan fakta fisik dan yuridis terkait kemelut ini. Kapoldasu khususnya Dirreskrimum Poldasu dapat menanggukkan penyidikan, terhadap perselisihan kepemimpinan dan kepengurusan Yayasan al Ishlahiyah Binjai pimpinan Dr HM Jamil. Alasan penanggukan itu sangat mendasar, mengingat pihak pelapor H Syahril Efendi, tidak memiliki dasar yang sah mengatasmakan yayasan. Yang bersangkutan tidak teregistrasi atau terdaftar pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI.¹²⁴

3. Tanah Wakaf Tengku Darwisah Sergai

Tengku Darwisah terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dengan luas sekitar 47 hektar yang dahulunya milik keluarga Almarhum T Darwisah yang belum mempunyai sertifikat secara hukum.

¹²⁴ LADUI MUI-SU Minta Poldasu Tanggukkan Penyidikan Dualisme Kepemimpinan Yayasan al Ishlahiyah Binjai, SUMUTPOS.CO, diakses dari <https://sumutpos.co/2019/08/03/ladui-mui-su-minta-poldasu-tanggukkan-penyidikan-dualisme-kepemimpinan-yayasan-al-ishlahiyah-binjai/>, baca juga: <https://kurio.id/app/articles/15716321>

1 September 2016, Bupati Sergai Ir. H. Soekirman saat menerima audiensi dari perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di ruang rapat Kantor Camat Perbaungan mengungkapkan, tanah wakaf Tengku Darwisah Potensi tanah wakaf tersebut cukup besar jika benar-benar dikelola dengan profesional sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat luas. Untuk itu tanah wakaf harus dikembangkan secara optimal dan produktif untuk mencapai hasil yang maksimal. Sekretaris Nazir Juarno yang bertugas mengurus tanah wakaf tersebut menyarankan, harus diadakan pertemuan maupun audiensi untuk dilakukan dialog antara kelompok penyewa tanah dengan pihak yayasan dan difasilitasi oleh Pemkab Sergai. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan titik terang persoalan tersebut.¹²⁵

7 Januari 2011, Ketua MUI Kabupaten Serdang Bedagai KH Lukman Yahya meminta Pemkab Sergai melalui FKUB untuk bertindak tegas. Forum Komunikasi Umat Beragama itu diminta untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga resmi yang mengatur tata tertib tentang pembangunan sebuah rumah ibadah. Regulasi tentang hal itu jelas tertuang dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga FKUB Kabupaten Sergai yang dipimpin Drs.H.Irfan El Fuadi Lubis. Hal itu dicetuskannya terkait sebuah Vihara telah dibangun diatas tanah wakaf milik umat Islam tanpa melalui mekanisme musyawarah.

Drs. H. Irfan El Fuadi Lubis mengaku, pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan tertulis, laporan atau izin lisan dari warga keturunan atas pembangunan Vihara diatas tanah wakaf Permaisuri Tengku Darwisyah. Sikap dan tindakan itu merupakan langkah sepihak warga keturunan di dusun IV Setia Budi d/h kampung persawahan Nardjil Kota Galuh kecamatan Perbaungan. Ketentuan dalam AD/ ART Organisasi FKUB sudah ada mengatut tentang tata cara berdiri sebuah sarana rumah ibadah. Tetapi FKUB mengaku belum mengetahui persoalan itu. Menurutny, pembangunan Vihara itu merupakan inisiatif dari para pengurus Vihara.¹²⁶

¹²⁵ *Banyak Tanah Wakaf di Sergai Belum Terdaftar*, HetaNews, Selasa, 10 September 2019, <https://www.hetanews.com/article/64922/banyak-tanah-wakaf-di-sergai-belum-terdaftar>

¹²⁶ *Tanah Wakaf dibangun Vihara, MUI Minta FKUB Sergai Jalankan Tatib*, WAKUBAN.CO, 7 Januari 2019, diakses dari <https://www.wakuban.co/2019/01/07/tanah-wakaf-dibangun-vihara-mui-minta-fkub-sergai-jalankan-tatib/>

4. Rumah Sakit Haji Medan

Status wakaf Rumah Sakit (RS) Haji Medan didasarkan pada sejarah sebelum rumah sakit dibangun, dimana ulama dan tokoh-tokoh Islam telah menggagas untuk membangun rumah sakit Islam di tanah milik Yayasan Islamic Center Medan, seluas 17 hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubsu No: 593.4/239/K Tahun 1983 tanggal 6 Juni 1983. Menurutnya, pembangunan RS Haji sesuai keinginan para ulama untuk mengenang musibah/peristiwa terowongan Mina Saudi Arabia pada 1990. Mulanya RS itu bernama Rumah Sakit Haji Syuhada Mina (RSHSM), yang dibangun berdasarkan SKB Menteri Agama Nomor: 24 Tahun 1991, Menteri Kesehatan Nomor: 131-Menkes, SKB II/1991 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1991, dengan total biaya pembangunan sebesar Rp9,1 M bersumber dari Pemprov Sumut sebesar Rp2,4 M dan Rp7,1 M dari Depag dan umat Islam. Pembangunan tersebut dengan dana dari Pemerintah./terdiri dari Kemenag Rp. 7,1 miliar, Pemprov Sumut sekitar Rp 2 miliar dan sebagian besar merupakan dana sumbangan dari umat Islam.¹²⁷

Sejarah tanah wakaf RS Haji Medan juga diuraikan dalam draft Surat Permohonan/ Hak Uji Materiil Atas Peraturan Daerah terkait Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dari LADUI MUI-SU yang ditulis di Medan, ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA) RI:

Tahun 1989, para tokoh Ummat Islam seperti Sarifuddin Harahap dkk, menggagas untuk mengumpulkan dana Umat Islam guna keperluan Umat dan gagasan itu mendapat dukungan dari Raja Inal Siregar Gubernur Sumatera Utara, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), DPRD SU, al Washliyah SU, Muhammadiyah SU, al Ittihadiyah, Nahdatul Ulama (NU) SU dan disepakati wadah (Organisasinya) dibentuk Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) ;

Tahun 1990, Drs H. Adnan Harahap Kepala Kantor Departemen Agama Sumatera Utara mengusulkan kepada Raja Inal Siregar agar dana Umat Islam yang terkumpul dijadikan modal awal pembanguna Rumah Sakit Islam dan usul tersebut disetujui oleh BAZIS dan Raja Inal Siregar

¹²⁷ 13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf, SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

Gubernur SU membentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Islam dan terpilih Abdul Wahab Dalimunthe sebagai Ketua Panitia Pembangunan, dengan tugas mencari lahan/ tanah dan dana tambahannya dan Panitia memperoleh:

- a. Pertapakan tanah seluas 60.000 m2 dari Yayasan Islamik Center ;
 - b. Bantuan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, sebesar
Rp. 500.000.000,- ;
 - c. Bantuan korban Terowongan Haji di Mina Arab Saudi (tahun 1990)
sebesarRp. 800.000.000.- ;
 - d. Bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Pusat
sebesar..... Rp. 3.000.000.000.- ;
 - e. Bantuan Pemda Tingkat I dan Tingkat II se Sumatera Utara,
sebesar Rp. 2.415.000.000.- ;
 - f. Infaq, Jakat PNS, Calon/Jemaah Haji, Ormas Islam dan
Swadaya Masyarakat (Tabungan Infak Sholat Idul
Fitri dan Idul Adha di Lapangan Merdeka Medan)
sebesar..... Rp.2.817.213.546,50 ;
- +
- Jumlah Rp.9.532.213.546,50,-

(sembilan miliar lima ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam lima puluh rupiah).

Tahun 1991 RS. Haji Medan mulai dibangun ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI dan selesai tahun 1992 yang diresmikan pemakaiannya oleh H. M. Soeharto Presiden RI pada masa itu. Niat tulus dan ikhlas (baik) para tokoh lokal Sumatera Utara tersebut diatas sejalan dengan Gagasan H.M Soeharto Presiden RI yang hendak membangun RS. Haji Indonesia di seluruh Kota Besar di Indonesia, maka melalui Menteri Agama RI, Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Kesehatan RI membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: 336 Tahun 1996, Nomor: 118 Tahun 1996 dan Nomor: 794/MENKES/SKB/VII/1996, dalam konsideran keputusan bersama tersebut, terukir frasa-frasa, sebagai berikut:

Menimbang:

- a. *Bahwa sesuai dengan amanat Gagaris-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 pemerintah harus berupaya meningkatkan pelayanan*

dan kelancaran menunaikan Ibadah haji bagi Ummat Islam sesuai dengan kemampuan masyarakat antara lain Pelayanan Kesehatan;

- b. Bahwa untuk melaksanakan upaya tersebut pada huruf A diatas dan untuk mengenang serta mengambil hikmah terjadinya musibah terowongan Al Muaisim di Mina tahun 1990 M/1410 H tanggal 2 Juli tahun 1990 pemerintah bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Seluruh Ummat Islam dan Donatur utama, pada tahap pertama membangun 4 (empat) buah RS. Haji di daerah Embarkasih Jakarta, Ujung Pandang, Medan dan Surabaya untuk pelayanan kesehatan Jammah Haji dan Masyarakat pada Umumnya.

Dalam SKB tersebut, yakni dalam pasal 13 jelas dinyatakan "untuk pelaksanaan putusan bersama ini perlu dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Indonesia" dan dalam Pasal 14 disebutkan "apabila terjadi pencabutan terhadap keputusan bersama dan pembubaran Yayasan RS. Haji tersebut, maka kekayaan Yayasan dikuasai oleh pemerintah untuk diserahkan kepada yayasan Sosial yang memiliki latar belakang kepentingan Islam dan kepentingan Dakwah Islamiah";

Bahwa untuk mewujudkan amanat SKB Ketiga Menteri tersebut Raja Inal Siregar dalam kapasitasnya sebagai pribadi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I SU No. 445/1049/K/1998, telah menyisihkan harta bendanya sebagai uang pangkal dalam mendirikan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (sebagai Pendiri) sesuai dengan Akte No. 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Alina Hanum, SH Notaris di Medan tertanggal 3 Juni tahun 1998.

Sebelum tahun 2011, RS Haji Medan dikelola oleh Dr. MP Siregar sebagai Direktur RS Haji Medan di bawah hak kelola Yayasan RS Haji Medan, RS Haji Medan dikenal dan terkenal kualitas pelayanan cukup bagus di tengah-tengah masyarakat, telah beberapa kali mendapat penghargaan dari Pemerintah dan pihak Swasta.

Tahun 2011 pengelolaan rumah sakit dialihkan ke Pemprovsu dan Pergub dikeluarkan pada tahun yang sama.¹²⁸ Yayasan RS Haji Medan dibubarkan setelah terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.: 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan RS Haji

¹²⁸ 13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf, SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

Medan kepada Pemprovsum yang ditandatangani Gatot Pujo Nugroho, ST Msc. sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara dengan menunjuk dr. Roro dr Raden Roro Suriyanti Hartati sebagai Direktur RS Haji Medan yang saat itu menjabat Kadis Kesehatan Provsu ternyata pelayanan kesehatannya menjadi menurun. Diduga terjadi penggelapan kekayaan harta/wakaf RS Haji Medan dan penyimpangan bantuan bersumber dari APBD Provsu, dengan modus pembubaran/ pengalihan Yayasan RS Haji Medan menjadi dikelola Pemprovsum berdasarkan Pergub No 78 Tahun 2011. Pembubaran Yayasan RS Haji Medan merupakan pelanggaran hukum, dilakukan tanpa membentuk Tim Likuidasi, tak ada alasan pembubaran dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan RS Haji Medan, sesuai kajian hukum dalam LHP BPK RI Perwakilan Sumut dan putusan Pengadilan Negeri Medan No 441/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang membatalkan Pergub No 78 Tahun 2011.¹²⁹

Roh, jiwa dan semangat Yayasan Rumah Sakit Haji Medan (selanjutnya disebut RS Haji Medan) sejalan dengan roh, jiwa dan semangat dengan maksud SKB Ketiga Menteri tersebut di atas yang dituangkan dalam preambule dan diperjelas lagi dalam klausula (pasal demi pasal) batang tubuh Akte Yayasan RS Haji Medan tersebut, seperti: Latar belakang berdirinya Yayasan RS Haji Medan, niat yang tulus serta kerja keras semua pihak yang terlibat, Panitia Pelaksana Pembangunan RS. Haji Medan, musibah Terowongan Al Muassim di Mina Saudia Arabia dan dalam batang tubuh, yakni Pasal 18 ayat 2 dan ayat 3 AD Yayasan RS Haji Medan diatur: *Pasal 18 ayat 2: "..... terjadi pembubaran, harta benda yang tersisa setelah dikurangi hutang-hutang diserahkan kepada Badan Amal Sosial Islam," Pasal 18 ayat 3: "Untuk menyelesaikan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) Badan Pengurus membentuk tim likwidasi"*

Tahun 2013, sesuai dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut Tahun 2012 No.: 87.A/LHP/XVIII.MDN/05/2013, uang Negara yang disalurkan

¹²⁹ Aliansi Ormas Islam Pertanyakan Kejatisu Soal Tindak Lanjut Laporan Dugaan Penyimpangan Pengalihan RS Haji Medan. *Kejatisu: Kasusnya Proses Penyelidikan*, SIB, Senin, 01 September 2014 12:43 WIB,

<https://hariansib.com/Medan-Kita/Aliansi-Ormas-Islam-Pertanyakan-Kejatisu--Soal-Tindak-Lanjut-Laporan-Dugaan-Penyimpangan-Pengalihan-RS-Haji-Medan>

melalui APBD SU TA 2011, 2012 dan 2013 diduga telah disalahgunakan penggunaannya untuk tujuan lain hingga sebesar Rp. 12.802.201.066,00,- secara melawan hukum yang mengakibatkan keuangan negara dirugikan. atas temuan tersebut Aliansi Ormas Umat Islam SU telah melaporkannya ke Kejatisu.¹³⁰

11 Desember 2013, LADUI SU menyurati kejaksanaan perihal laporan permohonan penyelidikan dan penyidikan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan dalam hal pengalihan harta wakaf Rumah Sakit Haji (RSH) Medan. Surat laporan Aliansi Ormas Islam Sumut ke Kejatisu itu meminta dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para terlapor yakni Plt. Gubsu dan Direktur RS Haji Medan terkait dugaan penyimpangan dalam pengalihan dan pembubaran RS Haji Medan. Laporan LADUI SU didukung dokumen autentik, yaitu LHP BPK Sumut disertai kajian hukum. Laporan itu memiliki alat bukti permulaan yang cukup sehingga layak diteruskan di persidangan. Kasus pengalihan RS Haji Medan ini merupakan bagian dari perkara yang sistematis. Pada pengaduan itu disebut, sebagai pelapor yaitu Drs H Leo Imsar Adnan (Ketua Aliansi Ormas Islam Sumut), H Sofyan Edihar Harahap SH (KAHMI Sumut), Indra Suheri MA (Ketua Forum Umat Islam SU), Ahmad Husin Yusuf (Sekretaris Dewan Angkatan 66 Sumut, Drs Hasan Basri Ritonga (Ketua PERTI SU), Ir Rahmad Setia Budi MSc (Ketua ICMI Muda SU), Khalid (Ketua MMI Medan), Ir Abu Sauqi (HTI Sumut), Umar Abdur Rahim MA (Liga Muslim Indonesia SU) Heri Abdul Rahim (Ketua FKAM SU), H Haidan Panggabean (Ketua JBMI SU), Indra Buana Tanjung (Ketua KIRAB Sumut), Roni Syamsuri (Ketua FUBI SU) dan H Hamdani Harahap SH MH (Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumut).¹³¹

Tahun 2014, DPRD Sumut membuat Perda untuk menguatkan hal tersebut. Ormas Islam berharap agar status hukum RS tersebut dapat dikembalikan pada umat Islam karena statusnya adalah wakaf umat Islam.¹³² Saham atau dana yang bersumber dari PemprovSU diusulkan sebagai hibah.¹³³

¹³⁰ Aliansi Ormas Islam Pertanyakan...

¹³¹ Aliansi Ormas Islam Pertanyakan...

¹³² Ormas Islam Minta Status RS Haji Dikembalikan Sebagai Wakaf, RRI, Selasa 5 Maret 2018, http://rri.co.id/medan/post/berita/498248/daerah/ormas_islam_minta_status_rs_haji_medan_dikembalikan_sebagai_wakaf.html

¹³³ 13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf,

Oktober 2014, LADUI MUI SU menyusun Surat Permohonan/ Hak Uji Materiil atas Peraturan Daerah terkait Organisasi dan Tata Kerja RSU Haji Medan Provsu yang ditujukan kepada MA RI.

14 November 2014, FUI SU melalui surat No 27/FUI-SU/XI/2004 meminta kepada Kepala BPN Deliserdang untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah RS Haji Medan yang diminta oleh Pemprovsu. Pasalnya, tanah lebih kurang 6 hektar yang di atasnya berdiri bangunan RS Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKES) adalah wakaf milik umat Islam di Sumut yang masih dalam proses sengketa. Hasil musyawarah bersama umat Islam Sumut antara lain, MUI, IPHI, KAHMI Sumut, Islamic Center, FUI-SU, LADUI, dan para tokoh masyarakat/pendiri RS Haji Medan memutuskan dan menunjuk FUI SU untuk menggugat Pemprovsu dan memperjuangkan kembali RS Haji kepada umat Islam, karena RS Haji adalah asset/wakaf umat Islam¹³⁴ Gugatan kepada Gubsu atas pengambilalihan RS Haji Medan oleh Pemprovsu dilakukan melalui PN Medan. PN Medan memutuskan dengan menyatakan batal demi hukum pembubaran yayasan dan pengambilalihan RS Haji oleh Gubsu. Perkara antara FUI SU dengan Gubsu tersebut masih dalam tahap kasasi. Informasi yang didapat FUI SU, Pemprovsu telah mengajukan permintaan kepada Kepala BPN Deli Serdang untuk menerbitkan sertifikat atas nama Pemprovsu. FUI juga telah mengirimkan surat keberatan ke Kepala BPN DS.¹³⁵ LADUI MUI SU juga menyurati Kejatisu memertanyakan perkembangan atau tindak lanjut surat Aliansi Ormas Islam.

29 Agustus 2014, Aliansi Ormas Islam Sumur meminta keseriusan Kejatisu menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan menindaklanjuti laporan tertanggal 11 Desember 2013. Kasi Penkum Kejatisu melalui Kasi Penyidikan (Kasidik) Nusrim SH, membenarkan adanya penanganan terkait kasus di RS Haji

SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

¹³⁴ FUI Minta BPN Tidak Terbitkan Sertifikat RS Haji, MedanBisnis, Senin, 24 Nov 2014 08:44 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/n/131482/>, dapat juga diakses dari

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/24/131482/fui-minta-bpn-tidak-terbitkan-sertifikat-rs-haji/>

¹³⁵ FUI Minta BPN...

Medan. Namun hingga Agustus 2014 proses hukumnya masih tahap penyelidikan (Lid), belum ditingkatkan ke penyidikan (Dik).¹³⁶

Selasa, 5 Maret 2018, Tim Wakaf Rumah Sakit Haji Medan (RSHM) bersama 13 organisasi umat Islam di Sumatera Utara meminta pengembalian status hukum RSHM sebagai wakaf umat Islam, sesuai sejarah pendirian rumah sakit tersebut. Permintaan tersebut disampaikan tim dan belasan ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut, Kesatuan Alumni HMI (KAHMI) Sumut, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Sumut, Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut, Nahdhatul Ulama (NU) Sumut, dan al Washliyah Sumut, saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman.¹³⁷

5. Tanah Wakaf Masyarakat Arab Jalan Kuda (Madrasah Arabiyah)

Sejak 2008 kasus ini sudah inkrah tetapi tak kunjung dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Tanah yang berada di Jalan kuda, Kelurahan Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota kini telah menjadi perumahan pribadi. Padahal, tanah wakaf ini merupakan sebagai pusat syiar Islam dan ibadah. Seperti diketahui, Usman merupakan ahli waris dari Pengurus Madrasah yang merupakan pemilik tanah wakaf itu. Pihak PN Medan terindikasi mengulur-ulur waktu untuk melakukan eksekusi. Tetap akan diajukan eksekusi walaupun ketua PN Medan sekarang minta *aanmaning* (pemanggilan tergugat) lagi adalah *aanmaning* sebelumnya sudah dilakukan dan gagal. Sebelumnya sudah meminta dua kali untuk dilakukan hingga tiga kali pergantian Ketua PN Medan. Permohonan eksekusi sudah diajukan sudah 2 kali, dan sudah 3 kali ganti ketuanya (PN). Pihak warga wakaf Madrasah Masyarakat Arab telah mendesak ketua PN Medan segera melakukan eksekusi terhadap

¹³⁶ Aliansi Ormas Islam Pertanyakan Kejatisu Soal Tindak Lanjut Laporan Dugaan Penyimpangan Pengalihan RS Haji Medan. *Kejatisu: Kasusnya Proses Penyelidikan*, SIB, Senin, 01 September 2014 12:43 WIB,

<https://hariansib.com/Medan-Kita/Aliansi-Ormas-Islam-Pertanyakan-Kejatisu--Soal-Tindak-Lanjut-Laporan-Dugaan-Penyimpangan-Pengalihan-RS-Haji-Medan>

¹³⁷ 13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf, SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Demi kepastian hukum para pemohon eksekusi. Keinginan dari pihak pemohon Usman Balatif dalam perkara ini adalah untuk mengembalikan fungsi awal dari tanah tersebut sebagai wakaf.

Tahun 1935, Madrasah Arabiyah menjadi pusat syiar dan pendidikan agama, didirikan di atas tanah wakaf Masyarakat Arab. Belakangan, oknum bernama Ali Umar yang mengaku ahli waris dari pemilik dan melakukan jual beli sepihak dengan beberapa orang hingga akhirnya tanah tersebut terjual. Hingga akhirnya madrasah tersebut harus dibongkar.

Tahun 2000 awal, masyarakat mulai menggugat. Tahun 2008, Peninjauan Kembali selesai, dimenangkan oleh masyarakat Arab. Kasus sengketa bekas lahan wakaf Madrasah Masyarakat Arab atas pemohon Usman Balatif inkrah. Kuasa Hukum Aidil A Aditya menyebutkan bahwa melalui putusan eksekusi adalah Putusan Nomor: 270/pdt.g/2000/PNMDn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 265/ pdt.G/PT.MDN jo. Putusan Kasasi: 995/K/pdt/2002 jo. Putusan PK Nomor: 07/PK/Pdt/2009. Isi dalam putusan PK Mahkamah Agung menyebutkan, bahwa permohonan kita atas nama pemohon Usman Balatif sejak 2008 namun hingga sekarang tak kunjung dieksekusi. Dalam poin lainnya putusan tersebut menyebutkan bahwa para pihak telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayarkan ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp 1 miliar. Serta isi dalam putusan untuk mengosongkan tanah sengketa. Dalam perkara para pihak tergugat adalah sesesai urutan adalah Yayasan Sech Oemar dan oknum yang menjual tanah tersebut Ir. Ali Umar bin Salmin Bahadjad serta empat nama yang telah menempati Jl. Kuda Pandau Hulu I tersebut.

Rabu 4 Juli 2018, pasca Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Madrasah Arabiyah Islamiyah untuk membongkar bangunan yang berada di atas tanah wakaf sebanyak empat pintu di Jalan Kuda, PN Medan diperintakan untuk segera dieksekusi. Namun, putusan itu tak diindahkan, PN kembali menyidangkan kasus dengan alasan adanya bukti baru. Memang banyak sekali kejanggalan atas sidang tanah wakaf yang digelar di PN Medan yang malah kembali menggugat Usman Balatif. Selain sidang yang ditunda dua kali tanpa alasan, PN juga seharusnya bisa menjalankan eksekusi bangunan rumah mewah empat pintu di atas tanah wakaf itu meski proses sidang masih berlanjut. Bahkan MA juga

sudah memerintahkan PN Medan untuk melakukan eksekusi, sudah inkrah tetapi PN Medan terus menunda dan mengulur eksekusi. Kasus ini mencuri perhatian masyarakat luas. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan juga meminta PN Medan melakukan eksekusi terhadap tanah wakaf di Jalan Kuda berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) No.07 PK/PDT/2009 yang telah berkekuatan hukum.¹³⁸

Namun bukannya menjalankan putusan yang telah inkrah tersebut, para termohon tetap terus mengajukan gugatan-gugatan baru. Artinya hanya mengulang dan diduga hanya untuk menunda-nunda eksekusi. Kasus tersebut pasti diproses setelah mangkrak selama 11 tahun tanpa kejelasan. Disebutkan tidak bisa serta merta langsung eksekusi, melainkan aanmaning terlebih dahulu sesuai prosedur.¹³⁹

6. Tanah Wakaf Jl. Tuasan Medan Timur

Yusuf Sutrisno (66 Tahun) dan Zulkarnaen (53 Tahun) adalah Pengurus (Nazir) tanah wakaf di tanah wakaf di Jl Tuasan, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara sejak tahun 1998. Keduanya dituduh melakukan penyerobotan tanah tanah wakaf seluas empat ribu meter persegi. Padahal keduanya sudah mereka menjaga tanah wakaf tersebut selama 14 tahun. Tuduhan tersebut adalah rekayasa.

Pada 10 April 2012 lalu, keduanya dipanggil oleh Reskrimsus Polda Sumut untuk mengklarifikasi terkait penyerobotan tanah di Jl Tuasan yang diklaim milik dr Maruli Simanjuntak. Padahal setahun yang lalu Mahkamah Agung RI sudah memenangkan gugatan atas sengketa tanah tersebut dan mengalahkah dr Maruli Simanjutak selaku tergugat. Sutrisno dan Zulkarnaen tidak memenuhi panggilan tersebut.

Menurut Mahmud Irsad Lubis selaku kuasa hukum Sutrisno dan Zulkarnaen, dulu tanah seluas empat ribu meter persegi yang

¹³⁸ PN Medan Tak Indahkan Putusan MA Soal Tanah Wakaf Madrasah Arabiyah Islamiyah, *Harian ORBIT*, 5 Juli 2018, diakses dari <https://orbitdigitaldaily.com/putusan-ma-tanah-wakaf-madrasah-arabiyah-islamiyah-tak-diindahkan-pn-medan/>

¹³⁹ 11 Tahun Mangkrak, Warga Madrasah Desak PN Medan Lakukan Eksekusi Tanah, *Tribun Medan*, Ahad, 30 Juni 2019, 19:24, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2019/06/30/11-tahun-mangkrak-warga-madrasah-desak-pn-medan-lakukan-eksekusi-tanah>

diperkirakan bernilai Rp 4 miliar itu adalah bangunan pesantren yang dikelola oleh suatu badan bernama Perkumpulan Masyarakat Muslim Sidorejo Hilir. Namun pesantren tersebut tidak dapat berjalan lagi dan dihancurkan. Lahannya saat ini menjadi tanah wakaf. Sejak tahun 1998 Sutrisno dan Zulkarnaen dipercaya sebagai nazir wakaf. Sekarang hanya tanah kosong dan diwakafkan untuk kepentingan umum. Seperti Salat Id, maulid, dan kegiatan keagamaan lainnya.

Sejak tahun 1955 tanah wakaf Tuasan merupakan tanah Perkumpulan Masyarakat Muslim Sidorejo Hilir. Berdasarkan surat Kartu Tanda Pendaftaran Tanah (KRPT) Nomor 152/2/IV/ (PTK: No.53) tertanggal 17 Maret 1956 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Reorganisasi pemakaian tanah Sumatera Timur. Yang kemudian dikelola oleh Yusuf Sutrisno dan Zulkarnaen selaku pengurusnya (nazir).

Tahun 1998 Yusuf Sutrisno dan Zulkarnaen dipercaya menjadi Nazir Tanah Wakaf Jl Tuasan, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Tanah seluas 4.000 meter persegi. Pada tahun 2003, ada pihak yang mempermasalahkan status tanah tersebut. Yakni dr Maruli Simanjuntak yang mengaku sebagai ahli waris dari Emas Sitompul yang mengklaim bahwa tanah wakaf seluas 4.000 M2 adalah milik mereka. Dengan kekuatan Surat Keterangan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang Nomor 33907/A/IV/26 pada Tanggal 4 Februari 1974. Yusuf Sutrisno dan Zulkarnaen selaku pengurusnya keberatan dengan klaim tersebut. Mereka pun menggugat dr Maruli Simanjuntak ke Pengadilan Negeri Medan pada 17 Juli 2008. Dengan register perkara nomor 288/Pdt.G/2008/PN.Mdn.

24 Juli 2009, dijatuhkannya putusan pengadilan, keduanya malah dikalahkan. Mereka banding ke PT, tetapi keputusan tak jauh berbeda, mereka dikalahkan. Tak ingin tanah wakaf berpindah ke tangan yang bukan pemiliknya, proses hukum berlanjut ke Mahkamah Agung. Keduanya melakukan kasasi.

12 Januari 2011, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan dengan status kabul. Artinya gugatan Yusuf Sutrisno dan Zulkarnaen dimenangkan. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan Surat KRPT Nomor 152/2/IV/ (PTK: No.53) tertanggal 17 Maret 1956 yang dikeluarkan Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur, seluas 4.000

meter persegi adalah sah demi hukum. Serta menyatakan surat atas nama Emas Sitompul tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam putusannya, MA juga memerintahkan dr Maruli Simanjutak sebagai tergugat untuk mengosongkan dan kembali menyerahkan tanah tersebut kepada nazir tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi. Namun hingga saat ini, sudah lebih dari satu tahun, tersebut belum dieksekusi. Pasalnya, panitera PN Medan mengaku belum menerima salinan putusan dari MA.¹⁴⁰

10 April 2012 lalu, kedua nazhir dipanggil oleh Reskrimsus Polda Sumut untuk mengklarifikasi terkait penyerobotan tanah di Jl Tuasan yang diklaim milik dr Maruli Simanjuntak. Padahal setahun yang lalu Mahkamah Agung RI sudah memenangkan gugatan atas sengketa tanah tersebut dan mengalahkan dr Maruli Simanjutak selaku tergugat. Ternyata Polda melakukan pemanggilan atas dasar laporan masyarakat secara perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan. Keduanya dipanggil atas adanya laporan penyerobotan tanah oleh dr Maruli. Zulkarnaen berharap yang memenangkan mereka segera dikirimkan ke PN Medan. Diharapkan putusan MA segera turun dan segera dieksekusi.

Rabu, 25 April 2012, kedua nazhir wakaf mendatangi panggilan Poldasu didampingi Tim Pengacara Muslim Medan¹⁴¹ didampingi Tim Pengacara Muslim (TPM). Poldasu oleh pengacara dianggap tidak mengetahui bahwa kasus ini sudah sampai pada tahap kasasi dan dimenangkan oleh kedua nazir tanah wakaf tersebut. Ternyata dasar Polda melakukan panggilan itu dari laporan masyarakat ke PTUN.

Selasa, 18 Juni 2019, terjadi kerichan di areal tanah wakaf milik umat Muslim di kawasan Jalan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung. Kekisruhan dipicu saat Ketua Badan Kenaziran Tanah Wakaf Yusuf Sutrisno didampingi penasehat hukum Ibrahim Nainggolan, staf Romo Centre Wahyu Kurnia berusaha menerobos blokade masyarakat untuk membuka gembok pagar pintu

¹⁴⁰ *TPM Medan Datangi Polda Sumut*, TRIBUN-MEDAN.com, Rabu, 25 April 2012 18:21, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/04/25/tpm-medan-datangi-polda-sumut>

¹⁴¹ *Nazir Tanah Wakaf Dituduh Serobot Tanah*, TRIBUN-MEDAN.com, Senin, 23 April 2012 17:32 diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/04/23/nazir-tanah-wakaf-dituduh-serobot-tanah>

masuk menuju tanah wakaf seluas 2300 M tersebut. Saling tolak terjadi. Sejumlah warga bersama pengacara Lubis dan Rekan menghadang Yusuf Sutrisno untuk tidak masuk ke areal tanah wakaf dengan menghancurkan gembok pintu pagar. Yusuf dihujat warga sehingga mengurungkan niatnya.

31 Mei 2019, mediasi bersama yang dilaksanakan di kantor kelurahan, dihadiri kedua belah pihak, mewakili Polsek Percut Seituan, Babinsa, Lurah Sidorejo Hilir, Sekretaris Lurah M Havinsyah Rozi dan sejumlah tokoh masyarakat lain. Sebagaimana notulen rapat diputuskan, antara lain masyarakat menginginkan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum dan pembangunan masjid bukan untuk pembangunan yayasan sekolah. Masyarakat dan pihak kenaziran tanah wakaf juga menyepakati untuk tidak melakukan kegiatan apapun di areal tanah wakaf di luar ketentuan hukum yang berlaku. Gugatan pembatalan akta yang ditandatangani Ketua Yayasan Darul Quran Awaluddin Pane dan Ketua Kenaziran Tanah Wakaf Yusuf Sutrisno sebagai tergugat telah disampaikan ke Pengadilan Agama yang akan melakukan persidangan pada 17 Juli 2019. Kapolsek Percut Seituan Kompol Subroto meminta kedua belah pihak untuk dipertemukan kembali dalam satu mediasi. Mediasi direncanakan dilakukan di kantor kecamatan setempat dengan mengundang Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Wali Kota Medan, Dinas Perkim, KUA Medan Tembung, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, MUI Kota Medan dan Camat Medan Tembung.¹⁴²

7. Tanah Wakaf Aras Kabu Deliserdang

Permasalahan tanah wakaf Aras Kabu Kecamatan Beringin ini sudah sampai ke ranah hukum baik pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri) maupun tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan (Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.MDN).

Permasalahan ini melibatkan dua pihak antara nazhir Wakaf dan Ahli Waris. Pengurus/nazir tanah wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Pengurus Badan

¹⁴² *Sengketa Tanah Wakaf di Jalan Tuasan Kembali Kisruh*, InilahMedan.com, Kamis, 20 Juni 2019, 09:19 WIB, diakses dari <https://www.inilahmedan.com/2019/06/sengketa-tanah-wakaf-di-jalan-tuasan.html>

Kenaziran sebelumnya menerangkan bahwa Badan Kenaziran Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang.

Tahun 1927 sebidang tanah wakaf diperoleh/diberikan oleh Datuk Menteri Kedatukan Aras Kabu yang terletak di Dusun Karya, Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan batas-batas yang sepadan tanah luasnya sekitar 38.000 m2.) semasa pembukaan kampung besar Aras Kabu yang diperuntukkan bagi pekuburan Muslim.

Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara dengan jalan/ Abd. Rahman/Bilal Muhammad; Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junib/Agam dan Sebelah Barat berbatas dengan Paret/Alur. Pada awalnya tanah wakaf tersebut diperoleh cukup luas.

Tahun 1950 tanah tersebut yang belum dipergunakan sebagai kuburan, dikelola oleh H. Rais untuk diusahai tanaman palawija agar tidak menjadi semak dan hutan, setelah beberapa tahun dikelola oleh H. Rais tanah tersebut ditinggalkan karena sering terjadi banjir.

Tahun 1963, tanah wakaf itu digarap oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) untuk dikuasai, sehingga pada waktu itu Khatib Mansur dan Zakaria D. selaku Pengurus PATM (Persatuan Amal Tolong Menolong) bersama masyarakat setempat merebut kembali tanah wakaf tersebut. Setelah tanah wakaf tersebut dapat dikuasai kembali, maka tanah wakaf tersebut diusahai dan dikelola kembali oleh pengurus PATM Khatib Mansur, Muhammad Ayat, Amran, Ismail Amal termasuk Zakaria D. (Ketua PATM) yang terus menerus menguasai tanah wakaf tersebut sampai meninggal dunia dan selanjutnya dikelola oleh ahli warisnya. Tahun-tahun berikutnya masyarakat menganggap masih dikelola oleh pengurus PATM dan silih berganti mengelola tanah tersebut seperti: alm. Husni, Ahmad, alm. Hasan, Azharuddin, Muhtar Buyung, yang semuanya termasuk pengurus PATM.

Tahun 2002, pengurus PATM berganti, kemudian Pengurus baru PATM tersebut mempertanyakan keberadaan Tanah Wakaf Binjai, Desa Aras Kabu tersebut kepada Pengurus PATM lama (Zakaria D. mantan Ketua PATM), apakah tanah wakaf tersebut sudah disuratkan/ disertifikatkan? Tapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang pasti

Tahun 2005, dalam rapat tahunan persoalan tanah wakaf ini kembali dipertanyakan, dan ketika itu mendapatkan jawaban dari mantan Kepala Desa Aras Kabu yang bernama Syaparuddin bahwa tanah wakaf tersebut sudah disertifikatkan dan disampaikan juga kepada pengurus PATM agar mempertanyakan kepada KUA Kec. Beringin. Pengurus PATM tersebut mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Beringin. Ternyata tanah yang disertifikatkan dengan Sertifikat No. 4 tanggal 02-06-1992 hanya seluas 8.945 m², dan disitu terlihat jelas sebagai penunjuk batas adalah alm. Zakaria D. (sesuai yang tertera dalam sertifikat). Karena ketika itu alm Zakaria D. sebagai Nazir tanah wakaf bersama dengan Hasan dan Azharuddin yang pada waktu itu sebagai pengurus PATM. Yang kesemuanya saat ini telah meninggal dunia. Disinilah awal kecurigaan warga masyarakat dimana tanah wakaf seluas 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan sesuai dengan batasbatas yang sepadan tanah luasnya sekitar 38.000 m².) tapi yang disertifikatkan hanya seluas 8.945 m². Atas kecurigaan masyarakat tersebut akhirnya setelah ditelusuri ternyata atas Tanah Wakaf Binjai seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan luasnya sekitar 38.000. m².) telah terbit beberapa surat atas nama orang lain atau lembaga sebagai berikut:

1. Seluas 5.765 m². Atas nama Zakaria D. berdasarkan Surat Keterangan Tanah Bupati Deli Sergang Nomor : 69768/A/V/8. tanggal 26 Agustus 1974. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa.
Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Junib/Agam.
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.
2. Seluas 600 m². Atas nama Nilawati Lubis, dibeli dari Zakaria D. berdasarkan SURAT Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor: 592.27309/Br/3/ 1997 tanggal 16 Juni 1997. Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah wakaf.
Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kas Desa.
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

3. Seluas 2.200 m². Atas nama Tanah Kas Desa Aras Kabu. Dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Tanah wakaf/Nilawati Lubis.

Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Prepol.

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zakaria D.

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

Atas 3 bidang tanah tersebut diatas yang seluruhnya seluas sekitar 8.565 m². berdasarkan rapat warga masyarakat diputuskan untuk tidak mempersoalkan atau menuntut kepada yang bersangkutan. Dalam artian warga masyarakat secara ikhlas melepaskan tiga bidang tanah tersebut dari Tanah Wakaf Binjai Desa Aras Kabu tersebut. Selain itu, di atas tanah wakaf seluas sekitar 4 bahu (yang setelah pengukuran di lapangan luasnya sekitar 38.000 m²) juga sudah terbit 2 (dua) surat tanah wakaf yaitu: (1) Seluas 8.945 m². berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf No. 4 Milik Wakaf, tanggal tanggal 2 Juni 1992, dengan tanda batas sesuai dengan Gambar Situasi Nomor: 1650-06/1992; dan (2) Seluas 12.028 m². berdasarkan Surat Keterangan Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Kepala desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin Nomor : 593/626/AK/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun Karya; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah wakaf; Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah wakaf; dan Sebelah Barat berbatas dengan Tanah wakaf.

Dengan demikian Tanah Wakaf Binjai seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan luasnya sekitar 38.000 m².) yang telah memiliki surat wakaf jumlahnya baru seluas 8.945 m². + 12.028 m. = sekitar 20.973 m². Bahwa dengan demikian, tanah wakaf binjai yang seluas sekitar 4 bahu (yang setelah dilakukan pengukuran di lapangan luasnya sekitar 38.000 m².) yang telah keluar suratnya, seluruhnya luasnya berjumlah 8.565 m². + 20.973 m². = sekitar 29.538 m². Sehingga sisa tanah wakaf binjai yang belum memiliki surat sekitar seluas 38.000 m². - 29.538 m². = sekitar 8.462 m².

Pada tahun 2007, di Desa Aras Kabu terjadi pengukuran tanah-tanah yang akan terkena proyek Jalan Arteri Bandara Kualanamu, diatas tanah wakaf dan tanah Zakaria D., Tanah Kas Desa dan Tanah Nilawati Lubis tersebut terkena pembebasan jalan seluas + 9.583 m².

sesuai dengan pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 Februari 2008.

Bahwa setelah dilakukan pendataan ulang terhadap tanah-anah yang terkena pembebasan jalan tersebut terdapat tanah Kas Desa seluar + 2.200 m², tanah Nilawaty Lubis seluas 600 m², serta sebahagian tanah atas nama Zakaria D. dari seluas 5.765 m², sebagai mana dilampirkan Surat Keterangan Bupati Deli Serdang No. 69768/A/V/8. Tanggal 26 Agustus 1974 dan sebagian dari tanah wakaf yang belum bersurat seluas sekitar sekitar 2.000 m², yang hingga saat ini uang ganti rugi tanah wakaf yang terkena proyek jalan Arteri tersebut masih dititipkan kepada Pengadilan negeri Lubuk Pakam sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) Karena masih sengketa dengan ahli waris

Pada Pengadilan Tingkat I PN Medan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut, dikarenakan pada satu sisi permasalahan wakaf adalah wewenang absolut di Pengadilan Agama. Putusan ini juga dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Medan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita bersama jika memang Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili sengketa wakaf, maka perlu ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya di Pengadilan Agama.

8. Masalah Tanah Wakaf Lainnya

Di Sumatera Utara diketahui banyak pesantren. Namun sejauh ini, baru dua yang menyatakan diri sebagai badan wakaf, yaitu Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah dan Pesantren Ta'dib Asy-Syakirin. Pengamalan wakaf di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah sepertinya ada pengembangan dalam hal pemasukan wakaf, yaitu sisa pembayaran yang diserahkan oleh wali santri kepada Pesantren dari kepentingan yang harus dikeluarkan oleh Pesantren untuk biaya operasional belajar mengajar untuk pembelian lahan (tanah) atau pembangunan sebuah gedung atau pembelian sesuatu yang bersifat permanen seperti lemari, meja dan kursi yang semuanya ini dianggap menjadi harta wakaf bagi Pesantren, tanpa mensyaratkan adanya niat dan lafaz dari pemberinya sebagai wakaf. Suatu hal yang perlu dicatat bahwa asal muasal dari lahan pesantren ini juga ada semacam kebijakan. Dalam profil Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah edisi pertama Januari 2008 disebutkan bahwa

Bapak H. Ahkam Tarigan mewakafkan tanahnya seluas 256,5 m2 pada tahun 1978. Dalam waktu yang hampir bersamaan Bapak H. Mahdian Tarigan juga mewakafkan tanahnya seluas 243 m2. Di atas tanah tersebut dibangun sebuah musalla sederhana. Pada tahun 1977 H. Pakhruddin Tarigan mewakafkan tanahnya di jalan Binjai kepada Yayasan Dukun Patah Pergendangan. Selanjutnya direncanakan akan didirikan sebuah perguruan Islam di atas tanah wakaf tersebut. Tahun 1981 cita-cita itu hampir terwujud dengan didirikannya sebuah sekolah di atasnya. Dengan berbagai pertimbangan, keluarga berkesimpulan untuk memindahkan tanah wakaf tersebut ke sebuah lokasi ke Medan Tuntungan yang dikenal dengan nama Paya Bundung. Tahun 1981 itu tanah tersebut dijual. Hasil penjualannya dibeli tanah seluas 3.933 m2 di Paya Bundung sebagai ganti wakaf yang di jalan Binjai. Tanah wakaf yang baru ini, disatukan dengan tanah wakaf dari H. Ahkam Tarigan dan H. Mahdian Tarigan sehingga luasnya menjadi lk 4.432,5 m2. Maka di atas tanah inilah dibangun Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Jadi, dapat dipahami, antara lahan tempat Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah terjadi jual beli terhadap tanah wakaf dan penggantinya. Tentu ini tidak sejalan dengan prinsip wakaf dalam mazhab Syafi'i. Padahal ketentuan dalam akte wakafnya masih tetap mengikuti prinsip wakaf dalam mazhab Syafi'i, seperti dalam hal tidak boleh menjual, menggadaikan, dan menghibahkan wakaf.¹⁴³

Di Deliserdang, sebanyak hampir 4 hektar lahan wakaf al Washliyah dibebaskan. Karena ketiadaan modal dan keterikatan kepada pemahaman wakaf secara yang lazim di kalangan al Washliyah, maka lahan tersebut belum dapat dikelola dan dimanfaatkan. Lahan tersebut belum dapat disertifikasikan, belum dapat dipagar, tidak dapat disewakan, tinggal terlantar, tidak dapat dikelola untuk menjadikannya produktif. Kasus ini dapat dipandang sebagai kasus yang membutuhkan sistem pengelolaan wakaf. Tanpa pengelolaan produktif yang memerlukan modifikasi dari faham yang lazim dalam masyarakat ini, harta wakaf ini diduga akan terlantar dan kembali diduduki orang secara tidak sah. Tapi, siapa yang menyertifikasikannya dan dari mana modal

¹⁴³ Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (*Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi serta Anggota Komisi Fatwa MUI SU*), Medan, 23 Januari 2014, *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, diakses dari <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/>

untuk sertifikatnya serta bagaimana pengelolaan lahan ini selanjutnya merupakan pertanyaan yang mendesak untuk dijawab. Karena itu pula, selain dari rasa turut bertanggung jawab atas harta-harta wakaf kaum Muslim yang bertebaran di Indonesia umumnya, dan di Sumatera Utara khususnya, kasus tanah wakaf al Washliyah di Deli Serdang ini termasuk kasus yang membutuhkan pengkajian yang serius dan mendalam di Sumatera Utara.¹⁴⁴

Oleh karena penyerahan wakaf dilakukan hanya secara lisan, maka tidak sedikit pula harta wakaf beralih tangan karena tidak adanya bukti-bukti yang sah untuk dijadikan pegangan ketika terjadi sengketa antara pewakif atau warisnya dengan nazir atau bahkan penyimpangan dilakukan oleh nazirnya sendiri.¹⁴⁵

Ada pula di Medan, tanah wakaf pekuburan pun diduga dijual oleh oknum lurah. Seperti yang terjadi pada Ahad 4 Januari 2009, ratusan warga Kelurahan Sei Mati, Medan, Sumatra Utara, mendatangi Markas Kepolisian Sektor Medan Kota, mengadukan rencana alihfungsi tanah wakaf pekuburan untuk dijadikan kompleks pertokoan. Empat pengukur tanah dan Lurah Sei Mati, Ah, diduga menjadi dalang diamankan polisi untuk mengantisipasi amuk warga, kemudian diperiksa. DS, seorang tersangka yang melakukan pengukuran, berkilah tidak mengetahui permasalahan pembebasan tanah. Tanah wakaf tersebut telah diserahkan pengelolaannya oleh Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3).¹⁴⁶

¹⁴⁴ Ramli Abdul Wahid, Medan, 23 Januari 2014, *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, diakses dari <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya/>

¹⁴⁵ Wahid, 2014. *Wakaf dan...*

¹⁴⁶ *Tanah Wakaf Dijual Lurah, Warga Marah*, Liputan6.com 05 Jan 2009, 05:51, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/170901/tanah-wakaf-dijual-lurah-warga-marah>

Bagian Kedua

**PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI
MASJID DAN TANAH WAKAF
DI SUMATERA UTARA**



BAGIAN KEDUA: PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID DAN TANAH WAKAF DI SUMATERA UTARA

1. Perlindungan Negara

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang pengaturannya terkait dengan wakaf, di antaranya:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 1977, tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991, tentang Pendaftaran Tanah.
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, tentang Yayasan.
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang wakaf.

9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 422 dan Nomor 3 tahun 2004 /SKB/ BPN/2004 tentang Setifikasi Tanah Wakaf.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010.
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 Tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia masa bakti tahun 2007-2010.
14. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
15. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap permohonan penukaran/perubahan status harta benda wakaf.
16. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.
17. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran dan pergantian Nazir Harta Benda Wakaf tidak bergerak berupa tanah.
18. Permenag nomor 4 tahun 2009 tentang tentang Administrasi pendaftaran wakaf uang
19. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
20. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi nazir Badan Wakaf Indonesia.
21. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Wakaf Indonesia.
22. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang tata cara Pendaftaran nazir wakaf uang.

23. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang perwakilan Badan Wakaf Indonesia .
24. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara perwakafan Benda Tidak Bergeak dan Benda Bergerak selain uang.

Surat edaran Sekertaris jenderal Kementerian Agama RI nomor: SJ./B.V/2/HK.00/178.01/2013, tentang pendaftaran tanah wakaf bagi masjid, mushalla, dan makam yang berdiri di atas tanah negara, tertanggal 23 Agustus 2013.¹

Adapun dasar hukum terkait penerbitan hak atas tanah Wakaf di antaranya: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 128 Tahun 2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian ATR/BPN, Peraturan MNA/ Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/ Ka. BPN No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, SKB Menteri Agama dan Kepala BPN RI No. 422 Tahun 2004 dan No. 3/ SKB /BPN /2004 tentang Pensertifikatan Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Peraturan Ka. BPN No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, SKB Kakanwil Depag Prov. Sumut dan Kakanwil BPN Prov.Sumut No. 338 Tahun 2007 dan No. 2127/ SKB/ BPN-SU/ 2007 tentang Tim Kerja Sertifikasi Tanah Wakaf Prov. Sumut.²

¹ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

² Bambang Priono, SH, MH. (Kakanwil BPN Provsu), 2019. *Tata Cara Penerbitan Hak atas Tanah Wakaf*, makalah dipresentasikan oleh Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG., dalam Focus Group Discussion (FGD) *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf*

Secara umum, definisi Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan definisi Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak). Adapun syarat wakif, jika perorangan maka harus seorang yang dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah benda wakaf. Jika wakif adalah Badan hukum, maka harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) nya. Jika wakif adalah sebuah organisasi, maka juga harus memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan sesuai dengan AD-nya.³

Nazhir didefinisikan sebagai, Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun syarat Nazhir, jika perorangan, maka disyaratkan sebagai WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Jika Nazhir adalah Badan hukum, maka pengurusnya harus memenuhi syarat, bidang tertentu (sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam) yang memiliki badan hukum Indonesia. Sementara jika Nazhir adalah Organisasi, maka pengurusnya harus memenuhi syarat, bidang tertentu (sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam). Nazhir wajib didaftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Dalam mewakafkan harta benda, Wakif wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi.⁴

Ikrar Wakaf meliputi: Dari Wakif kepada pihak yang disertai mengurus harta bendanya (nazhir); baik lisan maupun tulisan; Wakif dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan

di Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut), Medan, 3 September 2019.

³ Bambang Priono, SH, MH, *Ibid*.

⁴ Bambang Priono, SH, MH., *Ibid*.

yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit; dan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau APAIW harus memuat Wakif, Nazhir, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu.

Dalam hal ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bertugas antara lain, meneliti/ memeriksa kelengkapan berkas administrasi perwakafan (data yuridis) untuk memastikan bahwa harta benda wakaf dikuasai oleh wakif; memeriksa keadaan fisik harta benda wakaf, misalnya cek lokasi.⁵

Jenis tanah dan objek sertifikat tanah wakaf dapat berupa Hak Milik (HM) atau Tanah Milik Adat yang belum terdaftar; Hak Guna Bangunan (HGB); Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai (HP) atas tanah Negara; HM atas Satuan Rumah Susun; Tanah Negara; Tanah HGB dan HP di atas Hak Pengelolaan (HPL) atau HM, harus dengan persetujuan tertulis/ pelepasan dari pemegang HPL/ HM. Syarat tanah objek sertifikasi tanah Wakaf, yaitu: Dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah dengan salah satu jenis hak tertentu; hak atas tanah yang bebas dari segala beban ikatan, bukan jaminan hutang, bukan objek sitaan dan sengketa; menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya pada saat pembuatan AIW atau APAIW.

Larangan terhadap tanah wakaf, yaitu: Dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, diwariskan, ditukar, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya (Kecuali untuk kepentingan umum sesuai RUTR dan sesuai dengan syariah, dengan izin tertulis dari Menteri dan persetujuan BWI).⁶

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN.1960 No. 104) yang dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) memberikan pengaturan khusus akan masalah wakaf di dalam pasal 5-nya yakni mengenai kewajiban-kewajiban pembentukan undang-undang untuk mengindahkan unsur-unsur yang bersandarkan pada hukum agama. Dalam Bab XI tentang Hak Milik untuk Keperluan Suci dan Sosial pada pasal 49 ditentukan:

1. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan social

⁵ Bambang Priono, SH, MH., *Ibid.*

⁶ Bambang Priono, SH, MH., *Ibid.*

diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sejak diundangkannya UUPA pada tanggal 24 September 1960. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan dalam Pasal 49 ayat 3 UUPA tersebut baru dapat dikeluarkan setelah 17 (tujuh belas) tahun kemudian yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (LN. 1977 No. 38) tentang Perkawafan Tanah Milik pada tanggal 17 Mei 1977. Latar belakang dari dikeluarkannya peraturan pemerintah ini adalah sebagaimana dalam pertimbangannya ialah: (1) bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiel menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; (2) bahwa pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka keinginan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak ada data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan; dan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah.⁷

Perkembangan selanjutnya tentang hukum wakaf adalah dimuatnya substansi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari: Buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan dan; Buku

⁷ *Dn. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. Wakaf dalam Bingkai Hukum, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>*

III tentang Wakaf. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahir Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Buku III tentang Hukum Perwakafan ini terdiri dari 14 pasal, dimulai pasal 215 sampai dengan pasal 229 isinya mirip dengan PP. Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam penjelasan pasal demi pasal hanya dicantumkan kata "cukup jelas". Menurut H.M. Tahir Azhary, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu elaborasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, obyek wakaf yang diatur hanya tanah milik berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria, sehingga obyek wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sangat terbatas.⁸

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), obyek wakaf meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Selain itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pula tentang ketentuan yang belum pernah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu tentang pembatasan jumlah nazir sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian pengaturan wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih luas jika dibandingkan dengan pengaturan wakaf yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1977. Dan Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang wakaf; Hukum Perwakafan di dalam KHI tersebut diatur di dalam Buku III, yang terdiri dari 5 (lima) bab, mulai Pasal 215 sampai dengan Pasal 229; Bab I berisi ketentuan umum yang menjelaskan beberapa definisi. Kompilasi ini mengatur wakaf benda yang berlaku untuk selamanya; Bab II KHI ini mengatur fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf; Bab III KHI mengatur tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf; Bab IV KHI mengatur tentang perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf dan Bab V KHI mengatur tentang ketentuan peralihan.⁹

⁸ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

⁹ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini

Pada Tahun 2004 diundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dasar pertimbangan UU ini adalah: bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensial dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum; dan wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁰

Anatomi umum dari isi undang-undang ini adalah:

Bab I : Ketentuan Umum.

Bab II : Dasar-dasar Wakaf

- Bagian Pertama: umum.
- Bagian kedua: Tujuan dan Fungsi Wakaf.
- Bagian ketiga Unsur Wakaf.
- Bagian keempat : Wakif.
- Bagian kelima: Nazir.
- Bagian keenam: Harta Benda Wakaf.
- Bagian ketujuh: Ikrar Wakaf.
- Bagian kedelapan : Peruntukan harta benda wakaf .
- Bagian kesembilan: Wakaf dengan wasiat.
- Bagian kesepuluh: Wakaf benda bergerak berupa uang.

Bab III : Pendapataran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf.

Bab IV : Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

Bab V : Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Bab VI : Badan Wakaf Indonesia

- Bagian Pertama: Kedudukan dan Tugas.
- Bagian Kedua: Organisasi.

disampaikan dalam kegiatan *Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara*, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

¹⁰ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019, *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan *Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara*, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

- Bagian Ketiga : Anggota.
- Bagian Keempat: Pengangkatan dan Pemberhentian.
- Bagian Kelima: Pembiayaan.
- Bagian Keenam: Ketentuan ketentuan Pelaksanaan.
- Bagian Ketujuh: Pertanggung Jawaban.

Bab VII : Penyelesaian Sengketa.

Bab VIII : Pembinaan dan pengawasan.

Bab IX : Ketentuan Pidana dan sanksi Administrasi.

- Bagian Pertama: ketentuan Pidana.
- Bagian Kedua: Sanksi Administrasi.

Bab X : Ketentuan Peralihan.

Bab XI : Ketentuan Penutup.

Penjelasan atas UU RI nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf: Undang-undang wakaf ini diharapkan menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.¹¹

Hal ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu: (1) ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf, dan tanda baca; (2) kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kesesuaian dari aspek yuridis ini memperlihatkan terdapat kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan, mengikuti cara-cara tertentu, tidak ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku. Kesesuaian sosiologis menampakkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan kesesuaian filosofis meunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dalam rangka mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat; (3) peraturan perundang-undangan

¹¹ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

tersebut dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakannya maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu akan berlaku. Daya dukung ini diantaranya ketenagaan, keuangan, keorganisasian, kondisi masyarakat, dan lain-lain.¹²

Menurut dosen Fakultas Hukum UMSU, Tengku Erwinsyahbana, dalam makalahnya yang disampaikan pada FGD dengan tema *Perlindungan Atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara* yang diselenggarakan oleh MUI Sumut pada 3 September 2019, di Sumatera Utara banyak ditemukan fenomena kasus yang mengusik eksistensi dan tanah wakaf, di antaranya alih lahan (*ruislag*) tanah dan bangunan masjid Al-Ikhlas, di Jalan Timor Medan pada tahun 2011; alih lahan (*ruislag*) Masjid Raudhatul Islam, di Kelurahan Silalas Medan pada tahun 2011; penggusuran beberapa masjid di kota Medan, di Komplek PJKA Gang Buntu, Komplek Kavaleri Padang Bulan, dan Komplek Kodam Polonia, tetapi tidak ada berita detail yang diungkap media tentang kasus ini. Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa, sebut Tengku Erwinsyahbana, antara lain: Semakin tingginya tingkat kebutuhan tanah khususnya di daerah urban; ketiadaan database dan administrasi terkait lembaga masjid dan perwakafan; bangunan masjid berdiri di atas tanah non wakaf.¹³

Padahal, tanah wakaf dilindungi oleh hokum, sebagaimana ditegaskan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Meski demikian, Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 masih menyisakan setidaknya sejumlah Pengecualian, antara lain: Pengecualian bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud

¹² Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

¹³ Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH, M.Hum (dosen Fakultas Hukum UMSU), 2019. *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, materi dipresentasikan dalam kegiatan FGD *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah"; pengecualian bahwa "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia"; dan pengecualian bahwa: "Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula." Tengku Erwinsyahbana menambahkan, perlindungan atas tanah wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 49 ayat (1) PP tersebut dimaktubkan, "Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI." Untuk itu, Tengku Erwinsyahbana merekomendasikan perlunya mendata kembali tanah wakaf untuk selanjutnya kemudian mendaftarkan tanah wakaf.¹⁴

2. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Secara etimologis kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al fatwa*. Menurut Ibnu Manzhur kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat a Fayumi, yang menyatakan bahwa al Fatwa berasal dari al fata yang artinya pemuda yang kuat. Sedangkan menurut al Jurjani fatwa berasal dari *al fatwa* atau *al futya*, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan (*musykil*) dalam bidang hukum. Sehingga fatwa dalam pengertian ini juga diartikan sebagai memberikan penjelasan (*al Ibanah*).

¹⁴ Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH, M.Hum (dosen Fakultas Hukum UMSU), 2019. *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, materi dipresentasikan dalam kegiatan FGD *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan proses pemberian fatwa yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yakni: *al ifta* atau *alfutya* artinya kegiatan menerangkan hukum syara' (fatwa) sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. *Mustafti*, artinya individu atau kelompok yang mengajukan pertanyaan atau meminta fatwa. *Mufti*, artinya orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut atau orang yang memberikan fatwa. *Mustafti Fih*, artinya masalah, peristiwa, kasus, atau kejadian yang ditanyakan status hukumnya. Fatwa, artinya jawaban hukum atas masalah, peristiwa, kasus atau kejadian yang ditanyakan.

Kata fatwa juga terdapat dalam Al Qur'an, hal ini merupakan jawaban atas pertanyaan sahabat ketika itu, namun demikian kandungan hukum ayat tersebut berlaku umum bagi ummat Islam, karena dalam hal ini yang diperhitungkan adalah bunyi teks tersebut bukan semata-mata kekhususan permasalahan yang menjadi ayat itu turun.¹⁵

Secara terminologis fatwa adalah penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas pertanyaan seorang atau kelompok. Menurut as Syatibi, fatwa dalam arti *al iftaa* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.¹⁶ Menurut Yusuf al Qardhawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.

Fatwa merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan atau merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Seorang pemberi fatwa (*mufti*) boleh untuk menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar:

لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر نهى عن ذلك

Jangan kalian menanyakan tentang peristiwa yang belum terjadi karena Umar RA (pernah) melarang hal tersebut.

¹⁵ Hal ini sesuai dengan kaidah Al Ibratu bi umummi lafadz la bi khususi sabab

¹⁶ Abi Ishaq as Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Mesir: tt, hal

Seorang mufti tidak harus menjawab semua masalah yang ditanyakan kepadanya, tetapi menjawab yang ia ketahui. Dari 40 pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Malik, beliau hanya menjawab 4 (empat) pertanyaan saja dan mengatakan "tidak tahu" untuk 36 pertanyaan lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i bahkan para sahabat nabi banyak yang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka.

Disatu sisi fatwa bersifat responsif terhadap perkembangan zaman, namun dari sisi kekuatan hukum, tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini karena sebuah fatwa yang dihasilkan dari ijtihad mufti tidak lah sama dengan sebuah istimbat hukum yang dihasilkan *qhadi*.

Ulama telah membuat batas perbedaan antara fatwa dan *qhada*, baik dari aspek hakekat atau dari tinjauan implikasi yang dihasilkan dari keduanya. Secara garis besar perbedaan antara fatwa dan *qadha* dapat diketengahkan sebagai berikut:¹⁷

1. Ketetapan hakim (*qadha*) bersifat mengikat bagi seseorang untuk patuh menjalankan ketentuan yang telah diputuskan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan fatwa lebih bersifat informatif (*tabyiin*) tentang ketentuan Allah yang menuntut bagi orang Islam untuk melaksanakan atau hanya sekedar kebolehan.
2. Ketetapan hakim (*qadha*) mengharuskan adanya lafadz yang terucap jelas, sedangkan fatwa bisa dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.
3. Ketetapan hakim (*qadha*) wajib diterima dan dilaksanakan oleh ter hukum, baik ketetapan hakim tersebut salah atau benar. Sedangkan fatwa berbeda dengan *qadha*, pemohon fatwa tidak mempunyai kewajiban untuk menerima apalagi melaksanakan fatwa tersebut
4. Fatwa mempunyai implikasi yang luas dibanding ketetapan yang diputuskan oleh hakim. Jika fatwa itu tidak sekedar menjangkau pribadi pemohon fatwa tetapi mencakup orang banyak, maka

¹⁷ KH. Maruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, eISAS Jakarta, 2008, hal. 41

ketetapan hakim lebih khusus dan personal, hanya diperuntukkan bagi tersangka atau pihak terhukum.

5. Obyek permasalahan yang menjadi wilayah garapan *qadha* hanya pada aspek-aspek muamalah, sedangkan kewenangan produk fatwa menjangkau aspek ibadah, akhlak, adab, dan sekaligus masuk pada wilayah muamalah.
6. Ketentuan hakim hanya pada masalah hukum wajib, mubah, dan haram, tidak menjangkau pada masalah hukum makruh dan sunnah. Sedangkan kewenangan fatwa dapat menjangkau pada semua masalah hukum dan lain-lainnya.
7. Disyaratkan bagi seorang hakim itu sosok pribadi yang merdeka, berjenis kelamin laki-laki, mampu mendengar dan tidak boleh bagi hakim menetapkan hukum untuk kerabatnya. Sedang, seorang mufti tidak terikat dengan gender dan status dirinya, apakah ia seorang budak, tidak mendengar atau tidak melihat, tetap mempunyai hak untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan seorang mufti dibolehkan mengeluarkan fatwa bagi kerabatnya.
8. Fatwa secara definitif merupakan ketentuan hukum syar'i yang diinformasikan oleh seorang mufti, sedangkan *qadha* lebih bersifat penegasan dan memisahkan antara manusia dengan hukum syar'i
9. Pada model fatwa mewajibkan bagi pemohon untuk mengikuti mazhab yang dianut oleh sang mufti, sedangkan *qadha* memungkinkan untuk mengacu kepada seluruh mazhab yang ada.

Dalam statuta MUI tentang metode pembuatan fatwa yang dibuat pada tahun 1975, bahwa fatwa MUI ditetapkan oleh Komisi fatwa dan dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi fatwa. Atas dasar sidang pleno MUI pada 18 Januari 1986, perubahan dalam prosedur itu diputuskan: keputusan yang berkaitan dengan fatwa dari Komisi Fatwa selanjutnya diambil alih oleh pimpinan pusat MUI dalam bentuk "Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa yang dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum bersama-sama dengan Ketua Komisi Fatwa MUI. Petunjuk prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ M.B. Hooker, *Indonesian Islam, Social Change Trought Contemporary Fatawa*, Asaa Sothest Asia Publication Series, 2003, Hal. 61

1. Dasar Penetapan fatwa adalah: al Qur'an, Sunnah, Ijma (kesepakatan pendapat para ulama), dan qiyas (penarikan kesimpulan dengan analogi)
2. Pembahasan masalah yang memerlukan fatwa harus mempertimbangkan dasar-dasar fatwa merujuk ke atas dan pendapat para imam terkemuka diperoleh melalui penelitian terhadap penafsiran al Qur'an
3. Pembahasan yang merujuk ke atas adalah metode untuk menentukan penafsiran mana yang lebih kuat dan bermanfaat sebagai fatwa bagi masyarakat Islam.
4. Ketika suatu masalah yang memerlukan fatwa tidak dapat dilakukan seperti prosedur di atas, maka harus ditetapkan dengan penafsiran dan pertimbangan (ijtihad)
5. MUI mempunyai otoritas untuk menangani fatwa yang berkaitan dengan masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum, dan masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu yang dianggap dapat diterapkan di wilayah lain. MUI tingkat propinsi mengeluarkan fatwa yang sifatnya lokal dan kasus kedaerahan.
6. Sidang komisi fatwa harus dihadiri para anggota Komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan pusat MUI Propinsi dengan kemungkinan mengundang para ahli jika dianggap perlu.
7. Sidang Komisi fatwa harus diselenggarakan ketika: ada permintaan atau kebutuhan yang dianggap MUI memerlukan fatwa, permintaan ini bisa dari pemerintah, lembaga-lembaga sosial, ataupun dari masyarakat
8. Sesuai dengan aturan Sidang Komisi Fatwa, bentuk fatwa yang berkaitan dengan masalah tertentu harus diserahkan Ketua Komisi Fatwa kepada MUI Pusat dan MUI Propinsi
9. Pimpinan Puast MUI/Propinsi akan merumuskan kembali fatwa itu kedalam bentuk Sertifikat Keputusan Penetapan Fatwa.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka komisi fatwa melakukan beberapa kegiatan di antaranya;

1. Mengembangkan kegiatan ilmiah syariah dikalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tuntutan kebutuhan, dalam rangka memberikan tuntutan dan pedoman hukum bagi umat Islam.
2. Meningkatkan kedudukan dan peran Komisi Fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai forum ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan sistematis
3. Peningkatan dan perluasan fatwa dengan mengundang ulama-ulama terkemuka atau lainnya untuk mewujudkan kesatuan pandangan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hisab dan rukyah, makanan dan minuman halal dan lain-lainnya.
4. Pengembangan kajian-kajian hukum Islam yang mempunyai manfaat jangka panjang di dalam berbagai bidang muamalah dalam rangka mewujudkan tersusunnya Kodifikasi Hukum Islam Indonesia yang berisikan ijma' ulama Indonesia
5. Pemasyarakatan hasil kajian ulama-ulama pada umumnya dan masukan bagi penyelenggaraan proses peradilan di lingkungan lembaga peradilan agama pada khususnya, maupun dalam rangka melayani kebutuhan akan nasihat agama dari berbagai pihak yang memerlukan, seperti instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan ummat Islam.
6. Mengusahakan agar setiap fatwa MUI baik pusat maupun daerah mempunyai kekuatan hukum yang positif.

Di Indonesia (demikian juga halnya di Sumatera Utara) fatwa-fatwa sepenuhnya dilakukan oleh para ulama. Dimulai dari fatwa perorangan hingga fatwa berkelompok.¹⁹ Pada tahun 1912 organisasi Muhammadiyah terbentuk, meski pada awal pembentukannya tidak menghasilkan fatwa hukum, namun pada tahun 1927 telah dibentuk Majelis Tarjih yang bertugas menetapkan soal-soal keagamaan umumnya dan hukum, yang pada intinya Majelis Tarjih ini menghasilkan produk hukum yang disebut fatwa. Sedangkan pada tahun 1926 para ulama tradisional telah mendirikan perkumpulan Nahdatul Ulama sekaligus menghasilkan fatwa-fatwa secara berkelompok.

¹⁹ Sebelum tahun 1926 fatwa-fatwa di Indonesia diberikan pada ulama secara perorangan, setelah itu barulah fatwa-fatwa dikeluarkan secara berkelompok

Di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus yang masuk ke Pengadilan hakim selalu menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan utama, terutama dalam permasalahan aliran sesat dan penistaan agama. Sekalipun fatwa dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*ghair mulzimah*). Namun fatwa merupakan sumber hukum di Indonesia, yaitu doktrin. Doktrin merupakan pendapat para sarjana/ ahli hukum yang diakui sebagai salah satu sumber hukum. Jika pendapat seorang ahli saja bisa menjadi sumber hukum tentu pendapat sekelompok ahli yang bernaung di bawah lembaga resmi Majelis Ulama tentunya lebih layak untuk dijadikan sumber hukum.

Kewenangan MUI sebagai pemberi fatwa tidak terlepas dari fungsi MUI yang ditentukan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) MUI, yakni sebagai berikut Majelis Ulama Indonesia berfungsi: Pertama Sebagai wadah musyawarah para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Kedua Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. Ketiga Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, dan Keempat Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa MUI dapat memberikan fatwa yang ditujukan secara khusus kepada umat Islam maupun pemerintah dalam urusan yang berkaitan dengan umat Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Artinya bahwa, fatwa MUI tersebut dapat dikeluarkan, karena diminta oleh umat Islam maupun pemerintah atau karena terkait dengan permasalahan atauperistiwa konkrit yang memerlukan jawaban yang musykil secara syari"at atau hukum Islam.

Hasil dari *google trend* beberapa fatwa misalnya tentang menghadiri natal, rokok, BPJS, bunga band, fatwa DSN selalu mendapat perhatian masyarakat Hasil Ijtima Ulama Fatwa se Indonesia di Padang Panjang, yang membahas beberapa permasalahan, dan menghasilkan beberapa fatwa yang strategis baik dibidang Masail Asasiyah

Wathaniyah (Masalah Stategis Kebangsaan), Masail Fiqhiyah Mua'sirah (Masalah Fikih Kontemporer), dan Masalah Qanuniyah (Masalah Hukum dan Perundang-perundangan).

Dari beberapa fatwa yang dihasilkan terdapat dua fatwa yang menjadi pembicaraan banyak orang, banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang membantah. Misalnya tentang Kewajiban Memilih Pemimpin atau Larangan untut Golput, dan larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak, bagi wanita hamil, dan bagi pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk larangan Golput misalnya, meski dipermukaan banyak yang tidak sependapat bahwa hukum Golput adalah haram, akan tetapi seluruh komponen masyarakat, baik dari tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama di Sumatera Utara khususnya selalu mengkampanyekan atau mentausiyahkan untuk tidak Golput, dan masyarakatpun menyambut baik dan mendukung hal ini.

Dari sini diperoleh fakta bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberi pengaruh bagi tatanan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Fakta atas hal-hal yang penulis sebutkan di atas menunjukkan dua hal penting. *Pertama*, fatwa-fatwa MUI memiliki makna penting dalam masyarakat Indonesia, khususnya ummat Islam. Kenyataannya selama ini menunjukkan meskipun fatwa MUI tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak fawa yang telah menjadi rujukan. Fatwa masalah aliran keagamaan banyak dijadikan rujukan Kejaksaan Agung dan kepolisian, fatwa masalah ekonomi syari'ah menjadi rujukan "wajib" bagi pelaku ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah, fatwa tentang produk halal menjadi rujukan bagi produsen dan konsumen pangan, obat-obatan dan kosmetika, dan lain-lain

Kedua, karena mempunyai efek dan pengaruh yang cukup signifikan ke masyarakat, meniscayakan Majelis Ulama Indonesia untuk responsif atas dinamika dan kecenderungan masyarakat, sehingga fatwa yang dikeluarkan sejalan dengan kemaslahatan mereka.

Di Rakorda 2019, hubungan Islam dan Negara dianggap sangat perlu untuk didiskusikan. Sebab, ketika umat Islam bicara soal hukum

Islam (semisal Wakaf dsb. Pen.), tetapi tak berlaku di Negara Indonesia, yang ada hukum Negara. Padahal, UUD 1945 yang diberlakukan kembali dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 erat hubungan dengan Piagam Jakarta. Sebab, perlu diingat, dalam Dekrit Presiden 1959 dinyatakan, bahwa "Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945." Kini, sejarah terkait hal itu tidak pernah diungkapkan lagi. Mengenai hubungan Islam dan Negara semacam ini, pernah ditanyakan oleh Ramlan Yusuf Rangkuti kepada Pak Yamin dan Pak Solly selaku guru beliau. Dijawab, "Tak bisa itu (diungkapkan lagi, pen.) lagi." Menurut Ramlan Yusuf Rangkuti, jawaban itu dicetuskan oleh kedua gurunya, karena keduanya benar-benar mengetahui dan memahami seluk beluk Tatanegara.²⁰

Perlunya ketegasan mengenai kedudukan Fatwa MUI di Negara, apakah Fatwa MUI harus didengar atau tidak? Apakah fatwa MUI merupakan produk hukum atau tidak di Negara? Ketegasan kedudukan fatwa MUI sangat diperlukan agar Umat Islam tidak lagi bingung, sehingga ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Dalam paparan narasumber yang terlibat langsung masalah masjid dan tanah wakaf, banyak disebut-sebut fatwa. Fatwa MUI dijadikan alasan hukum, sebagai dasar alasan melindungi masjid dan tanah wakaf. Padahal dalam UU Negara tak ada fatwa. Selain perlu adanya ketegasan kedudukan fatwa MUI, perlu pula dipertegas bagaimana hubungan Islam dan Negara. "jika memang ditolak, ya ditolak, resmi. Kalau dibilang, pelan-pelanlah! Sama saya tidak ada pelan pelan, kalau putih putih, hitam ya hitam. Kalau saya begitu," tegas Pak Ramlan.

UU Negara jelas diakui. Sebenarnya, meskipun tidak diakui Negara, kalau pemimpin Negara ini kuat semua jiwa Islamnya, tidak masalah. Tapi, masalahnya kalau jiwa pemimpinnya tidak kuat, termasuk para legislator yang duduk di DPRD daerah tingkat I, dan DPRD Pusat tak lagi mewakili suara umat Islam, bahkan tidak ada partai Islam yang menang. Semua pemenangnya adalah partai yang tidak mewakili kepentingan Islam. Sehingga MUI Sumut perlu hati-hati. Pemimpin yang jiwa Islam yang dianggap baik pun bisa diperkuat oleh

²⁰ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

umat Islam. Sejak awal perlu ditegaskan, hitam ya hitam putih ya putih. Fatwa harus bermanfaat dan bisa digunakan sebagai alas an hukum. Untuk apa dikeluarkan fatwa kalau kedudukan fatwa tak ada gunanya di mata hokum. Taka da gunanya fatwa kalau tidak memiliki kekuatan hokum dalam UU Negara. Seharusnya, perlu ada Keputusan Presiden untuk menegaskan kedudukan Fatwa MUI sebagai salah satu produk hukum yang memiliki kekuatan hukum.

3. Perlindungan Fatwa Majelis Ulama Indoensia

Kekuatan fatwa sebagai hukum materil pertama kali mengemuka pada tahun 2011, seiring mencuatnya kasus perobohan masjid al Ikhash Jalan Timor. Meskipun fatwa tersebut diputuskan pada tanggal 16 Februari Tahun 1982. Data-data yang melatarbelakangi dan konteks kasus terkait keluarnya fatwa tersebut juga belum banyak ditemukan. Yang jelas, pada tanggal 9 Mei 2011, MUI Sumut kembali memperkuat fatwa tahun 1982 dengan mengeluarkan fatwa bahwa penghancuran masjid al Ikhlash adalah haram.²¹

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Tentang Hukum Masjid dan Asal Hukum Harta Wakaf, ditetapkan di Medan, 16 februari 1982, yang pada substansi menyatakan:

"... Apabila kita melihat satu bangunan Masjid dan tidak mengetahui apakah Masjid itu pada tanah wakaf atau bukan, maka tetaplah hukumnya Masjid. Begitu pula apabila seseorang tanahnya sementara untuk Masjid, maka hukumnya menjadi Masjid yang berkekalan....

Apabila sebidang tanah dijadikan Masjid atau Pekuburan Umum, maka tanggallah daripadanya hak seseorang dan ia telah menjadi wakaf tanpa berhajat kepada lafazd, oleh karena itu dibolehkan kepada umum menanam mayat pada tanah tersebut dan oleh karena masjid tidak sah kecuali wakaf...

Apabila harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan, akan tetapi apabila ditukar atau dijual dapat yang lebih besar manfaatnya, maka dalam hal ini harta wakaf tersebut belum boleh dijual, karena kebolehan menjual harta wakaf itu hanyalah karena dharurat untuk memelihara wakaf jangan sampai sia-sia;

²¹ MUI Sumut: Penghancuran Masjid Al Ikhlash Haram! Harian Mandiri, 9 Mei 2011.

Dalam perjuangan memperjuangkan masjid al Ikhlash tercatat pada 19 Juli 2011, MUI Sumut mengeluarkan surat yang menyatakan Masjid Al-Ikhlash Medan yang dalam sengketa itu sebagai wakaf berdasarkan Surat No. C.179/DP-P II/SR/VIII/2011 tanggal 19 Juli 2011 kepada FUI SU. Dalam konsideran surat MUI Sumut itu ditegaskan, Masjid al Ikhlash adalah wakaf. Sehingga pada masjid tersebut berlaku fatwa MUI Sumut tanggal 16 Februari 1982, yaitu menjadi wakaf dan tidak bisa diperjualbelikan, kecuali setelah proses hukum wakaf sesuai keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ-II/522 tahun 2010. Affan Lubis, salah seorang aktivis FUI Sumut mengatakan, keluarnya surat MUI Sumut semakin memantapkan FUI SU untuk memperjuangkan Masjid al Ikhlash untuk dibangun kembali.²² Pada Ahad, 24 Juli 2011, Surat MUI Sumut dikirimkan oleh FUI Sumut kepada Republika sebagai informasi perkembangan masalah pembongkaran Masjid al Ikhlash.²³ Temuan-temuan selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan memberi petunjuk yang mendukung pernyataan MUI Sumut itu.²⁴

Keluarnya fatwa berkaitan dengan kasus sengketa umat Islam berhadapan dengan pihak pengembang atau pihaknya lainnya, dalam sejarah juga pernah mencatat adanya pendapat di kalangan ulama dalam melihat suatu masalah.

Dalam kasus masjid al Ikhlash misalnya, MUI Sumut dan MUI Kota medan seia sekata, memfatwakan bahwa Masjid al Ikhlash Jalan Timor Medan adalah 'wakaf' dan sama-sama tidak menyetujui/ menolak pembongkaran masjid Al Ikhlash Jalan Timor Medan.

Perbedaan pendapat ulama (MUI SU dan MUI Medan) misalnya, terjadi pada istibdal masjid at Thoyyibah, sejak 26 April 2007, seriring

²² *Kasus Masjid Al-Ikhlash, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf*, REPUBLIKA.CO.ID, Senin 25 Juli 2011 06:37 WIB, diakses dari <https://republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/25/lov2z9-kasus-masjid-alikhlash-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf>

²³ *MUI Sumut: Masjid Al Ikhlash Wakaf*, BWI.or.id, Rabu 27 Juli 2011, 07:00 WIB, diakses dari <https://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/800-mui-sumut-masjid-al-ikhlash-wakaf?lang=ar> dikutip dari sumber: Republika. Baca juga *Kasus Masjid al Ikhlash, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf*, Dakwatuna, 27 Juli 2011, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2011/07/25/13601/kasus-masjid-al-ikhlash-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf/>

²⁴ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

keluar fatwa MUI Kota Medan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa dan Ketua MUI Kota Medan. Fatwa ini kemudian dijadikan alasan pembenaran oleh Direktur PT. MIL untuk menghancurkan Masjid at Thoyyibah. Komisi D DPRD Medan menilai peran ulama terkesan tidak mendukung upaya pembelaan masjid. Sekretaris MUI Kota Medan.²⁵ Padahal tiga hari sebelumnya, dalam menjaga eksistensi at Thoyyibah, pada 23 April 2007, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan pada pertemuan di kantor MUI Kota Medan menegaskan, "Jangan dulu Masjid at Thoyyibah lama dibongkar, dan jangan pula masjid baru pengganti diresmikan sampai ada keputusan dari Mahkamah Agung mengenai kasasi yang diajukan oleh masyarakat."²⁶

Perbedaan pendapat juga terjadi pada Masjid Roudhatul Islam yang terletak di dekat Emerald Garden Hotel Jalan Puteri Hijau Medan berkat perjuangan FUI SU dan seluruh Ormas Islam Sumatera Utara masjid itu dikembalikan kepada kaum muslimin.²⁷ Tapi masjid al Khairiyah yang bersebelahan dihilangkan dengan sengaja oleh pengembang. Setelah melalui perjuangan panjang yang memakan tenaga dan airmata berhasil direbut umat Islam dan dibangun kembali, tapi surat hak alas masjid itu sampai sekarang belum diberikan kepada BKM Masjid oleh Pengembang.²⁸ Masjid Masjid Roudhatul Islam yang terletak di Kelurahan Silalas jalan Peringatan Kecamatan Medan Barat itu pada tanggal 11 April 2011 digusur Pemko Medan, dengan surat rekomendasi No.557/Kep/MUI/MEDAN/VI/2009 kepada pengembang.²⁹

²⁴ *Beri Rekomendasi Pembongkaran Masjid, Fatwa MUI Kota Medan Digugat*, VoA-Islam, Senin, 9 Muharram 1441 H / 24 September 2012 14:06 wib, <http://voa-islam.id/read/indonesiana/2012/09/24/20800/beri-rekomendasi-pembongkaran-masjid-fatwa-mui-kota-medan-digugat/>

²⁶ *Beri Rekomendasi Pembongkaran Masjid, Fatwa MUI Kota Medan Digugat*, VoA-Islam, Senin, 9 Muharram 1441 H / 24 September 2012 14:06 wib, <http://voa-islam.id/read/indonesiana/2012/09/24/20800/beri-rekomendasi-pembongkaran-masjid-fatwa-mui-kota-medan-digugat/>

²⁷ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid..., Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

²⁹ Tengku Zulkarnain, Rencana Jahat Penggusuran Masjid Amal Silaturrahim di Medan <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-penggusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medantengku-zulkarnainti-da/1651091238317321/>

²⁹ Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penahancuran Masjid...*

Dalam kasus masjid Amal Silaturrahim, umat Islam, selain berpegang pada UU Nomor 41 Tahun 2004, juga berpedoman pada Fatwa MUI Sumut yang menyebutkan masjid tidak dapat dipindahkan begitu saja.³⁰ Dalam fatwa MUI tahun 2014 terkait masjid, disebutkan bahwa, BPN tidak boleh mensertifikatkan tanah yang di atasnya terdapat mesjid kecuali sertifikat wakaf. Yang terjadi, BPN mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) yang di atasnya terdapat tanah wakaf yang sudah Akta Penganti Akta Ikat Wakaf (APAIW).³¹

Selain Fatwa MUI Sumut, fatwa-fatwa lain yang senada, berkaitan dengan eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara dan di daerah lain di Indonesia juga banyak tercatat dalam sejarah, yaitu:

Pada 27 Maret 2011, MUI Kota Medan mengeluarkan fatwa dengan No: 47/Kep/MUI-MDN/III/2011 tentang Status Tanah Yang Dibangun di Atasnya Masjid. Yang Memutuskan "bahwa tanah yang direlakan pemiliknya untuk dibangun di atasnya masjid adalah wakaf, walaupun tidak diikrarkan."

Terkait tanah wakaf, MUI Sumut juga telah memfatwakan terkait lahan Yayasan Asrama Putri serta RS Bersalin Islam (YAPRSBI) atau tanah wakaf Arakundo, melalui Fatwa MUI Sumut No. 001/KF/MUI-SU/V/2016 bahwa status tanah tersebut adalah wakaf.

Adapun beberapa fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara terkait Wakaf

1. Fatwa Tentang Pembongkaran Masjid di Jalan Zainal Arifin Desa Madras Tahun 1979
2. Fatwa Tentang Hukum Masjid Tahun 1982
3. Fatwa Tentang Harta Wakaf Tahun 1982
4. Pemindahan Kuburan Tahun 1982
5. Istibdal Wakaf Tahun 1982

³⁰ Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, MuslimOnline.Id, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>

³¹ Ketua APMAS: Kami Tolak Segala Bentuk dan Cara Untuk Merelokasi Mesjid Amal Silaturahmi yang Berdiri di Tanah Wakaf, METRORAKYAT.COM, Kamis 22 Agustus 2019, <https://metrorakyat.com/ketua-apmas-kami-tolak-segala-bentuk-dan-cara-untuk-merelokasi-mesjid-amal-silaturahmi-yang-berdiri-di-tanah-wakaf/>

6. Hukum Pengalihan Tanah Perkuburan ke Pembangunan Masjid 1982
7. Pembatasan Jumlah Wakaf tahun 2002
8. Menjual Tanah Baitul Mal tahun 2002
9. Hukum Menjual Wakaf Ahli Untuk Dialihkan Menjadi Yayasan tahun 2004
10. Hukum Pembatalan Ikrar Wakaf
11. Hukum Mendirikan Bangunan di atas tanah wakaf yang dibangun masjid
12. Status Rumah Sakit haji tahun 2013

4. Advokasi melalui LADUI MUI Sumut

Dalam advokasi masjid al Ikhlas, pada tanggal 23 Februari 2011, dalam Rapat bersama Pimpinan MUI Kemenag Medan, MUI Medan dan DMI Medan, sudah tercatat adanya keterlibatan LADUI MUI SU dalam upaya membela, mempertahankan dan melindungi eksistensi masjid dan tanah wakaf melalui jalur hukum (litigasi). Ditemutuskan bahwa masjid adalah harta wakaf yang harus dipertahankan. Dalam kasus Masjid al Ikhlas, akan dipertahankan sesuai prosedur yang ada. Opsi terakhir yang bisa ditempuh adalah tanah akan dibeli sehingga pertapakan Masjid tidak beralih fungsi. Pada 10 Maret 2011, LADUI MUI SU telah membuat sebuah *Legal Opinion Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Masjid al Ikhlas dan menyimpulkan bahwa perlu kiranya MUI Sumatera Utara Membuat Fatwa agar Pembongkaran terhadap Masjid Al Ikhlas tidak dilakukan. Nomor surat laporan: 01/ADV-MUI-SU/III/2011. Selain LADUI MUI SU, Tim Pembela Muslim juga pernah melakukan usaha pembelaan terhadap al Ikhlas, hal itu terekam dalam sejarah pada 28 April 2011, sebanyak 44 Pengacara Pembela Masjid al Ikhlas resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan Nomor Register 220/Pdt.G/2011/PN Mdn. Setelah didaftarkan, TPM menyampaikan surat tanggal 28 April 2011 Nomor 01/TPM-A/IV/2011 kepada Panglima Kodam (Pangdam) I/ BB yang isinya agar Pangdam I/BB memberikan perlindungan kepada Masjid al Ikhlas untuk tidak dilakukan pembongkaran.

Catatan pembelaan LADUI SU pada eksistensi masjid Amal Silaturrahim juga terekam pada Kamis, 17 Januari 2019, Direktur

LADUI MUI SU H. Hamdani Harahap SH MH meminta kepada Ketua MUI Kota Medan agar dapat mengeluarkan fatwa bahwa Masjid Amal Silaturahmi pengganti yang dibangun Perum Perumnas adalah masjid *dhiror*. Surat bernomor 108/LADUI-MUISU/2019 bertanggal 16 Januari 2019 itu disebutkan, LADUI MU SU telah mempelajari SK Menteri Agama RI No. 580 tahun 2018 tentang pemberian izin perubahan status/ tukar menukar tanah wakaf. LADUI MUI SU menilai Menag melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut untuk kepentingan lain.. LADUI MUI SU juga menyurati BWI Sumut agar mempengaruhi atau mengambil alih kewenangan dari BWI Kota Medan agar membatalkan surat rekomendasi No. 013/BWI/A/RS/V/2018 tentang persetujuan penukaran Masjid Amal Silaturahmi Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area Kota Medan.³²

Terkait perlindungan eksistensi masjid at Thoyyibah, pada 10 Maret 2006, tim advokasi MUI SU pula hadir menyuarakan mengenai status harta waqaf itu tidak bisa diubah, itu haknya Allah, tidak boleh seorang pun yang merasa memiliki.³³

Selain masjid, fatwa terkait langsung dengan status dan perlindungan terhadap eksistensi tanah wakaf juga mendapat perhatian dari MUI Sumut. Di antaranya adalah Tanah Wakaf Arakundo atau Tanah Wakaf YAPRSBI. Status tanah ini adalah tanah wakaf berdasarkan Fatwa MUI Sumut melalui Keputusan Nomor: 001/Kf/MUI-SU/V/2016 tentang: Status Wakaf Yayasan Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam. Dengan demikian, berdasarkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf, termasuk tanah tidak dilarang dijadikan jaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. (pasal 40). Pada 19 Agustus 2019, LADUI MUI SU telah menyurati DPRD Sumut cq Ketua Komisi A dalam rangka permohonan perlindungan dan pengawasan politik terhadap masalah tanah wakaf yang dikuasai dan diusahai oleh YAPRSBI. Pada

³² Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, MuslimOnline.Id, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>

³³ Masjid Dhirar Berdiri di Medan? hidayatullah.com, Ahad, 27 Mei 2007, 03:20 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/05/27/41275/masjid-dirar-berdiri-di-medan.html>

Juli 2019, LADUI MUI-SU juga meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Medan agar tidak memeroses/ tidak menerbitkan Hak Atas Tanah (sertifikat) atas tanah wakaf tersebut.

Senin 29 Juli 2019, disebutkan, LADUI MUI SU juga merupakan penasehat hukum untuk Yayasan Ishlahiyah Binjai yang terdaftar di Kemenkum HAM dengan Ketua Umum Dr HM Jamil MA yang juga Ketua Umum MUI Kota Binjai dan Sekretaris Umum Drs. H Ahmad Fauzi guna memberikan advokasi dan bantuan hukum. Hamdani bersama Ketua Yayasan Al-Ishlahiyah Binjai, periode 2018-2023, Dr HM Jamil, Ketua Pembina H Riswan Rika, Sekretaris Drs H Ahmad Fauzi, Wakil Ketua Drs H Yundiser, Bendahara H Khudri Kamil dan pengurus lainnya, menilai polisi harus menanggukkan penyidikan. Sebab berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyebutkan, ada prasa 'wajib' didaftarkan. Jika tidak terdaftar, maka konsekwensi hukumnya adalah kepengurusan tidak sah serta tidak mengikat. Pada Kamis, Kamis 1 Agustus 2019, LADUI MUI SU meminta kepada Polda Sumut, untuk menanggukkan penyidikan terkait laporan Dr H Syahril Efendi Pasaribu. Terkait perselihan dualisme kepemimpinan di Yayasan al Ishlahiyah Binjai ini, Polda Sumut telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Hamdani Harahap mengharapkan Polda Sumut lebih responsif serta mengedepankan fakta fisik dan yuridis terkait kemelut ini.³⁴

LADUI MUI-SU juga aktif dalam mengangkat persoalan tanah wakaf RS Haji Medan, bahkan bersama Aliansi Ormas Umat Islam SU telah melaporkan masalah ini ke Kejatisu. ³⁵ Pada 11 Desember 2013, LADUI SU menyurati kejaksaaan perihal laporan permohonan penyelidikan dan penyidikan dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan dalam hal pengalihan harta wakaf Rumah Sakit Haji (RSH) Medan. Surat laporan Aliansi Ormas Islam Sumut ke Kejatisu itu meminta dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para terlapor yakni Plt. Gubsu dan Direktur RS Haji Medan terkait dugaan penyimpangan dalam pengalihan dan pembubaran RS Haji Medan.

³⁴ *LADUI MUI-SU Minta Poldasu Tangguhkan Penyidikan Dualisme Kepemimpinan Yayasan al Ishlahiyah Binjai*, SUMUTPOS.CO, diakses dari <https://sumutpos.co/2019/08/03/ladui-mui-su-minta-poldasu-tangguhkan-penyidikan-dualisme-kepemimpinan-yayasan-al-ishlahiyah-binjai/>,

baca juga: <https://kurio.id/app/articles/15716321>

³⁵ *Aliansi Ormas Islam Pertanyakan...*

Laporan LADUI SU didukung dokumen autentik, yaitu LHP BPK Sumut disertai kajian hukum. Sebagai pelapor saat itu yaitu Drs H Leo Imsar Adnan (Ketua Aliansi Ormas Islam Sumut), H Sofyan Edihar Harahap SH(KAHMI Sumut), Indra Suheri MA (Ketua Forum Umat Islam SU), Ahmad Husin Yusuf (Sekretaris Dewan Angkatan 66 Sumut, Drs Hasan Basri Ritonga (Ketua PERTI SU), Ir Rahmad Setia Budi MSc (Ketua ICMi Muda SU), Khalid (Ketua MMI Medan), Ir Abu Sauqi (HTI Sumut), Umar Abdur Rahim MA (Liga Muslim Indonesia SU) Heri Abdul Rahim (Ketua FKAM SU), H Haidan Panggabean (Ketua JBMI SU), Indra Buana Tanjung (Ketua KIRAB Sumut), Roni Syamsuri (Ketua FUBI SU) dan H Hamdani Harahap SH MH (Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam MUI Sumut).³⁶ Ormas Islam berharap agar status hukum RS tersebut dapat dikembalikan pada umat Islam karena statusnya adalah wakaf umat Islam.³⁷ Saham atau dana yang bersumber dari Pemprov Sumut diusulkan sebagai hibah.³⁸ Pada Oktober 2014, LADUI MUI SU menyusun Surat Permohonan/ Hak Uji Materiil atas Peraturan Daerah terkait Organisasi dan Tata Kerja RSUD Haji Medan Prov Sumut yang ditujukan kepada MA RI.

Dalam pengembalian tanah wakaf RSHM, LADUI MUI SU dilibatkan dalam litigasi, antara lain, menjadi kuasa hukum FUI SU dalam hal gugatan kepada Gubsu dan mendesak Kejatisu dan mempertanyakan perkembangan atau tindak lanjut surat Aliansi Ormas Islam. Sebelumnya, 29 Agustus 2014, Aliansi Ormas Islam Sumut meminta keseriusan Kejatisu menggunakan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan menindaklanjuti laporan tertanggal 11 Desember 2013.

5. Perlindungan Umat Islam dan Masyarakat

Selain melalui upaya litigasi oleh LADUI MUI SU upaya membela, mempertahankan dan melindungi eksistensi masjid dan tanah wakaf melalui jalur pendampingan dan pengorganisasian massa (non-litigasi).

³⁶ *Aliansi Ormas Islam Pertanyakan...*

³⁷ *Ormas Islam Minta Status RS Haji Dikembalikan Sebagai Wakaf*, RRI, Selasa 5 Maret 2018, http://rri.co.id/medan/post/berita/498248/daerah/ormas_islam_minta_status_rs_haji_medan_dikembalikan_sebagai_wakaf.html

³⁸ *13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf*, SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

Upaya umat Islam untuk mempertahankan dan memperjuangkan rumah ibadah dan asset umat Islam juga tercatat dalam sejarah, di antaranya FUI SU, Aliansi Ormas Islam, APMAS, KAUMI, KAHMI, NU Sumut, al Washliyah, Ittihadiyah, FPI, PA 212 dan berbagai elemen Islam yang tak dapat disebutkan satu per satu, baik membawa nama organisasi, jamaah masjid tertentu atau perorangan.

Pada perjuangan membela eksistensi Masjid al Ikhlas Jalan Timor misalnya, FUI SU sudah melakukan berbagai upaya-upaya damai dan dialog melalui beraudiensi dengan berbagai pihak. Misalnya, pada, 13 Mei 2009, sudah berupaya dengan beraudiensi dengan Dandim, memohon dukungan atas penolakan perobohan Masjid al Ikhlas. Dilanjutkan pada 16 Juli 2009 dan 2 Desember 2009, FUI SU beraudiensi kepada Pangdam I/ Bukit Barisan (BB). Pada 5 Februari 2011, FUI menyampaikan kepada Pengawas yang memimpin pembongkaran tersebut bahwa janji dari Pangdam I / BB yang akan terlebih dahulu membangun masjid pengganti sebelum Masjid al Ikhlas dibongkar.³⁹ Pada 10 Juni 2011, FUI, KAHMI Medan dan 32 Ormas yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam beraudiensi dengan plt. Gubsu. Pada 14 Februari 2011, digelar rapat dengar pendapat Ormas Islam dengan Komisi A & E DPRD Sumut dan sejumlah pihak terkait, ternasuk jamaah Masjid al Ikhlas. Dari Ormas Islam, S. Timsar Zubil, Affan Lubis, Irwansyah, Heriansyah, R. Setia Budi, Indra Suheri, Rony R Siregar, M Hadi Nainggolan, Sarjana, SH.⁴⁰ Pada 11 April 2011, FUI SU mengadakan Perihal Sengketa Masjid Al Ikhlas dan Upaya perobohannya ke Komnas HAM, di Jakarta. ⁴¹ Pada 2 Mei 2011, FUI SU dan Perwakilan ormas Islam beraudiensi dengan Kapoldasu. Pada Rabu, 5 Mei 2011, FUI SU menggelar diskusi dengan Kontras Sumut, dan mendapatkan informasi bahwa tanggal 3 Mei 2011 Kapoldasu telah meminta Kodam I/BB agar tidak membongkar Masjid Al Ikhlas.⁴² Pada 15 Mei 2011 FUI SU dan Ormas Islam, bersilaturahmi kepada Tuan Syekh Haji Hasyim al Syarwani, Guru besar Besilam.⁴³ Bahkan pada Kamis, 28 Juli 2011, Tim

³⁹ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴⁰ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...* Lihat juga: Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁴¹ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴² *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁴³ *Ulama Sumut Tangisi Masjid yang Dibongkar*, Hidayatullah, Jum'at, 20 Mei 2011, 09:56 WIB <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/05/20/50131/ulama-sumut-tangisi-masjid-yang-dibongkar.html>

dari Komisi I DPR RI juga mempelajari kasus itu, mencari informasi dengan datang langsung lokasi bekas masjid itu di Jalan Timor, Medan, di antaranya Yahya, Azwar Abubakar, Maiyasak Johan, Mayjen (Purn) Tritamtomo Syahfan Badri, dan Neil Iskandar Daulay.⁴⁴

Dalam pembelaan Masjid Amal Silaturahmi, pada September-Oktober 2018, Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturrahim (APMAS) dibentuk oleh 17 Ormas Islam, dan tetap berkoordinasi dengan MUI Kota Medan, berserta MUI Sumut. Perjuangan APMAS telah melalui upaya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Sumut, bahkan ke tingkat Pusat di Jakarta.⁴⁵ Romo H. R. Muhammad Syafi'i ikut mendukung berupa data yang menguatkan kepentingan perlindungan eksistensi masjid tersebut yakni keberadaan HGB Perumnas pada Desember 2017. Selain ke legislatif, APMAS juga telah beraudiensi ke pihak Kepolisian dan Dandim.⁴⁶ Masyarakat khususnya Umat Islam Kota Medan menolak pemindahan Masjid Amal Silaturahmi akibat pembangunan Rusun.⁴⁷

Terkait perlindungan eksistensi masjid at Thoyyibah, pada 10 Maret 2006, FUI telah menyuarakan banyaknya kegagalan terkait penggusuran masjid tersebut.⁴⁸ Kamis 10 Mei 2007, sekitar 300 KK kaum Muslimin yang tinggal di sekitar masjid at Thoyyibah ikut mempertahankan keberadaan Masjid at Thayyibah, yang saat itu dihancurkan para preman bayaran pengembang, dikawal ketat oleh ratusan Brimob. Padahal lahan masjid yang masih dalam proses

⁴⁴ DPR Pelajari Kasus Pembongkaran Masjid di Medan, REPUBLIKA.CO.ID, Kamis 30 Jun 2011 19:18 WIB, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/30/lnlriq-dpr-pelajari-kasus-pembongkaran-masjid-di-medan>

⁴⁵ Affan Lubis (Ketua PA 212 Sumut, Ketua APMAS), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁴⁶ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁴⁷ Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, MuslimOnline.Id, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>

⁴⁸ Masjid Dhirar Berdiri di Medan? hidayatullah.com, Ahad, 27 Mei 2007, 03:20 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/05/27/41275/masjid-dirar-berdiri-di-medan.html>

kasasi (pemeriksaan tingkat kasasi perkara dengan No.90/G.TUN/2005-PTUN-MDN. Banding No.18/BDG/2009/PTUN-MDN dan kasasi No.25/K/2006/PTUN-MDN). Kakandepag Kota Medan pada 21 Februari 2006 juga menyatakan bahwa Masjid at Thayyibah berstatus wakaf dari seorang waqif bernama Syamsuddin.

Jadi, dialog tampak merupakan jalan utama yang ditempuh. Jika jalur dialog, lobby, audiensi dan sejenisnya menemui jalan buntu, barulah demonstrasi dengan pengerahan massa dilakukan, itu pun dengan cara damai dan tertib. Dalam beberapa kesempatan memang pernah terjadi kericuhan, hal tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap fatwa yang dianggap tidak memihak umat Islam, putusan pengadilan yang dinilai diskriminatif atau disebabkan pembiaran oleh aparat keamanan. Selain itu upaya menempuh jalur hokum juga dilakukan dengan melaporkan tindak pidana kepada pihak-pihak yang diduga melanggar hukum.

Tercatat pada Kamis, 6 September 2012, pada sidang lanjutan perkara perdata pembongkaran Masjid At-Thoyibah, Kelurahan Hamdan, Medan Maimoon, di Pengadilan Negeri (PN) Medan, berakhir ricuh. Massa menyerang pengurus MUI Kota Medan. Sempat terjadi saling balas kata-kata kasar, hingga terjadi pengejaran dan pemukulan terhadap mewakili tergugat. Pihak tergugat mengatakan, tanah tempat berdiri masjid tersebut menurut ahli waris bukan wakaf. Padahal, pihak ahli waris sendiri tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini.⁴⁹ Untuk diketahui, Masjid At-Thoyibah dibongkar pada 10 Mei 2007 lalu usai shalat Dzuhur, diganti dengan ruko oleh PT Multatuli Indah Lestari (MIL). Akibatnya, masyarakat mengugat PT MIL, Pemkot Medan, MUI Kota Medan, dan Polda Sumut.⁵⁰

Bahkan, Selasa, 11 September 2012, Kantor MUI Medan, di Jalan Amaliun ikut digeruduk FUI SU berkaitan dengan adanya fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI Medan tentang Masjid At Thyiybah, di

⁴⁹ *Sidang Pembongkaran Masjid Berujung Ricuh*, BWI, 9 September 2012, 17:50, <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/berita-mainmenu-109/1024-sidang-pembongkaran-masjid-berujung-ricuh.html>, mengutip sumber: Kompas.

⁵⁰ *Sidang Pembongkaran Masjid Berujung Ricuh*, Kompas.com, 06/09/2012, 17:25WIB, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2012/09/06/17254424/SidangPembongkaran.Masjid.Berujung.Ricuh>.

Jalan Multatuli, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, yang dijadikan dasar perobohan Masjid At Thayybah. Aksi itu diikuti sejumlah masyarakat yang tinggal di seputaran kawasan masjid. PN Medan menunda persidangan beragenda putusan atas persoalan masjid yang dirobohkan atas dasar kepentingan pembangunan ruko oleh PT MIL. Selain berorasi massa aksi juga sempat menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan perobohan masjid.⁵¹ Puncaknya, Kamis, 13 September 2012, saat sidang putusan terhadap gugatan perdata kasus perubuhan Masjid at Thayyibah digelar, kericuhan tak dapat dihindari. Puluhan masyarakat yang selalu setia hadir di setiap persidangan dan didominasi oleh kaum ibu-ibu langsung berteriak dan menghujat majelis hakim. Merasa tak puas, ibu-ibu masuk ke gedung PN Medan melakukan orasi yang mendapat pengawalan ketat petugas kepolisian. Di luar gedung, masyarakat juga berteriak-teriak menghujat majelis hakim. FUI SU menegaskan, putusan itu sesat dan keliru. Penghancuran masjid adalah tindak kriminal, yang tanpa delik aduan pun para pelakunya seharusnya ditangkap. Tindakan hakim adalah diskriminatif.⁵²

Terkait eksistensi Masjid al Khairiyah dan Madrasah al Khairiyah yang dimusnakan. Tapi Gereja Okumene sampai saat ini masih berdiri tegak. Pelaku penggusuran diduga adalah PT Jatimasindo. Tersangkanya adalah Nazir Masjid al Khairiyah saat itu. Persoalan masjid ini sudah diadukan ke Polrestabes Medan sejak tahun 2004. Tersangka sudah dutetaokan tapi proses hukum belum tuntas, bahkan hingga Februari 2018, pen.) kembali diadukan oleh FUI SU ke Polrestabes Medan langsung kepada Kapolrestabes yang baru untuk diproses ulang. Berkas sudah diserahkan kembali untuk diproses lanjut. Lanjutan proses hokum masih ditunggu.⁵³

Dalam membela eksistensi Masjid al Ikhlas, tercatat pada 7 Februari 2011, FUI SU dan Ormas Islam mulai menggelar aksi unjuk

⁵¹ *MUI Medan Terus Dikecam*, Sumut Pos, 12/09/2012, diakses dari <https://sumutpos.co/2012/09/12/mui-medan-terus-dikecam/>

⁵² *Perubuhan Masjid di Multatuli, Hakim Menangkan PT MIL*, TRIBUN-Medan.com, Kamis, 13 September 2012, 16:08, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/09/13/perubuhan-masjid-di-multatuli-hakim-menangkan-pt-mil>

⁵³ *Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid....*; Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

rasa menolak pembongkaran Masjid al Ikhlas.⁵⁴ Aksi demonstrasi juga kembali dilakukan pada 20 Mei 2011. FUI-SU dan Ormas Islam menggelar Aksi Unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) meski Gubsu (Gatot) tak bersedia menemui demonstran sehingga FUI SU dan Ormas Islam membubarkan diri dengan tertib.⁵⁵

Dalam pembelaan Masjid Amal Silaturrahim, tercatat pada Senin, 12 Maret 2018, Puluhan warga dan jamaah Masjid Amal Silaturrahim di Komplek Asia Mega Mas mulai berjaga-jaga di masjid. Mereka menolak rencana Pemko Medan yang akan memindahkan masjid itu ke tempat lain karena lokasi semula akan dibangun rusunawa.⁵⁶

Masjid Ar-Ridho terletak di Polonia Ujung, di bekas Kompleks TNI. Masjid ini dibongkar dan dimusnahkan. Namun dengan perjuangan kaum muslimin di sana masjid ini berhasil dibangun kembali.⁵⁷ Masjid al Jihad Pulo Brayan pernah diruntuhkan pada tahun 90-an, juga berhasil dipertahankan setelah memakan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, airmata dan harta. Ustadz Tengku Zulkarnain bersama almarhum *al hafizh* Haji Mahyuddin merupakan dua tokoh yang ikut memperjuangkan masjid tersebut bersama masyarakat Muslim Pulo Brayan saat itu.⁵⁸ Masjid al Ikhlas Jalan Nyiur di Perumnas Simalingkar Medan pernah diklaim oleh Yayasan keluarga Amal Sholih sebagai aset mereka, hingga FUI SU melaporkannya kepada pihak Poldasu.

⁵⁴ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁵⁵ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, ...*

⁵⁶ *Terkait Masjid Amal Silaturrahim, DPRD Medan: Tanah Wakaf Tidak Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Bisnis*, Medan Bisnis, Selasa, 13 Mar 2018 19:08 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/o/28874/>; Lihat juga http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/03/13/28874/terkait_masjid_amal_silaturrahim_dprd_medan_tanah_wakaf_tidak_bisa_dialihkan_untuk_kepentingan_bisnis/

⁵⁷ *Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid...; Tengku Zulkarnain, Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁵⁸ *Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax*, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>, lihat juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah*, KH Tengku Zulkarnani (Facebook Page), diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>

FUI SU juga mempertimbangkan untuk menggugat Prapradilan untuk mempertahankan masjid itu.⁵⁹

Jadi, dalam perjuangan non-litigasi, baik FUI SU, APMAS, pewakif Arakundo, para jamaah masji-masjid dan berbagai komponen umat Islam lainnya, biasanya mereka tidak bergerak sendiri-sendiri, dengan kesadaran yang mereka miliki, mereka mengorganisir diri, memenuhi dan mempersiapkan segala kebutuhan perjuangan, berbagi tugas dan mengembangkan jaringan untuk kepentingan perjuangan mempertahankan eksistensi masjid, hak kebebasan beribadah dan asset-aset umat Islam. Bahkan jaringan perjuangan juga melibatkan para ulama tokoh-tokoh nasional, Misalnya, Jum'at 6 Mei 2011, sholat Jum'at bersama dilaksanakan di Jl. Timor, di depan reruntuhan Masjid al Ikhlas dipimpin oleh KH M al Akhattat dari Jakarta. Dalam perjuangan melindungi masjid Amal Silatirrahim, pula, 17 Maret 2018, Wakil Sekjend MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menegaskan, umat Islam, MUI Pusat, MUI Propinsi Sumatera Utara, MUI Kota Medan, dan semua Ormas Islam di Sumatera Utara tegas menolak pemindahan Masjid Amal Silatirrahim.

Terkait perobohan masjid at Thoyyibah Drs. KH Tengku Zulkarnain MM mengungkapkan keprihatinannya. "Sebagai ulama saya merasa malu di kota Medan sampai 12 Masjid dihancurkan untuk kepentingan bisnis..." saat menjadi saksi ahli di PN Medan dalam gugatan Perdata atas penghancuran Masjid At Thoyyibah oleh preman-preman suruhan Direktur PT. MIL, Drs. Benny Basri, pada 10 Mei 2007.

Masjid Nurul Hidayah, berlokasi di simpang Jalan Pancing dengan Jalan Unimed, yang karena bisnis hendak dipindah. Sudah hampir digusur pada tahun 2007 dan berhasil dipertahankan FUI SU dan Ormas Islam di Medan. Sekarang sedang dalam upaya membangunnya lebih baik.⁶⁰ Dalam penyelesaian kasus Masjid Nurul Hidayah, MUI

⁵⁹ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>, lihat juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah, KH Tengku Zulkarnani* (Facebook Page), diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>

⁶⁰ Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid..., Baca Juga: Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

Sumut telah dua kali diterima oleh Kemenag Sumut. MUI Sumut selalu mendorong terjaganya dialog antara Kemenag Sumut bersama FUI SU. Ini merupakan gerakan umat Islam yang selalu cepat merespons masalah masjid, memperjuangkan dan berupaya agar terlaksananya sertifikasi wakaf. Dialog dengan PTPN dan BPN dengan melibatkan MUI Deliserdang masih akan diagendakan, in syaa Allah. Keseriusan BWI Deliserdang juga masih diharapkan.⁶¹

Perjuangan berbagai komponen umat Islam dan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat dalam catatan sejarah perjuangan membela eksistensi masjid juga banyak menghadapi jalan terjal, tak jarang mereka menghadapi ancaman dan terror, intimidasi, tindakan anarkis dan tindakan melawan hukum dari berbagai pihak yang dianggap terancam kepentingannya. Hal itu sudah terekam dalam sejak sejarah, bahwa pada Rabu, 4 Mei 2011 Pukul 00.55 WIB dini hari,⁶² jamaah masjid al Ikhlas disergap oleh 2-3 orang, lalu tanpa perlawanan 18 jamaah itu diseret keluar, diangkut ke atas truk tanpa diberi kesempatan untuk mengenakan lobe/peci, sandal atau sepatu mereka. Saat penyeragaman, aparat juga merampas ponsel, dompet, tas, dan barang-barang lain milik jamaah. Bahkan di antara jamaah ada yang ditendang.⁶³ Nama-nama mereka yang terekam dalam sejarah adalah: Affan Lubis, Ahmad Husein Yusuf, Aswandi Lubis, Muhammad Irfan, Sofyan Syah, Hasan Basri Koto, Dedi Irawan, Bakti Sutarno, Ahmad Suadi Lubis, Danil, Robi K. M Akbar, Ardi, Angga, Aidan, Sunar. Sedangkan dua orang lainnya belum tercatat.⁶⁴

⁶¹ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁶² Sudirman Timsar Zubil, *Fenomena Penghancuran Masjid...*

⁶³ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan*, Eramuslim, Jumat, 17/06/2011 10:18 WIB, diakses dari <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/kronologis-perjuangan-mempertahankan-masjid-al-ikhlas-medan.htm>. Informasi yang sama dengan sedikit tambahan, *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas*, Nahimunkan.com, Medan, 30 Juni 2011, diakses dari <https://www.nahimunkan.org/kronologi-perjuangan-umat-islam-pertahankan-masjid-al-ikhlas-medan/>; lihat juga, <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2011/05/10/14581/kronologis-penyerangan-penculikan-penghancuran-masjid-al-ikhlas-medan/>

⁶⁴ *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan*, Eramuslim, Jumat, 17/06/2011 10:18 WIB, diakses dari <https://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/kronologis-perjuangan-mempertahankan-masjid->

1 Muharram 1429 H, Ustadz Timsar Zubil bersama delapan orang lainnya ditangkap dan diperiksa di Poltabes Medan atas tuduhan merusak bangunan (pagar seng pengembang). Padahal, beberapa hari sebelumnya, pengembang merobohkan masjid at Thoyyibah tetapi tidak ditanggapi malah dikawal ratusan Brimob, Juru periksa menyarankan agar perobohan masjid dilaporkan ke Poldasu dan Kapolri.⁶⁵ Pada Kamis, 28 September 2007, FUI SU melalui surat Nomor: 11/FUI-SU/IX/2007 telah melaporkan kepada Poldasu, Bareskrim Mabes Polri, dan terakhir kepada Kapolri. Namun setelah belasan tahun, laporan tersebut tak pernah ditindaklanjuti.

Dukungan para cendekiawan Muslim, para pakar hukum dan segenap kaum Muslim lainnya juga tak kalah pentingnya. Mereka menggunakan kepakaran dan kecakapan yang mereka miliki serta kesaksian mereka untuk kepentingan mempertahankan eksistensi masjid yang terancam oleh pengembang dan pihak lain untuk kepentingan bisnis atau alas alasan-alasan lain yang tidak kuat secara syar'i. Mereka antara lain, Dr.Hasyim Purba,SH., M.Hum., Drs.H.Asro,S.H., M.Ag., Zaidar,S.H., M.Hum., dan lainnya. Demikian pula para saksi yang dengan kesaksian mereka untuk terlindunginya eksistensi rumah Allah dari tangan-tangan serakah. Mereka antara lain, dalam kasus al Ikhlas, yaitu Hasyim Huseini, Murwinto, Irwan Idris, Muslim Kamal, Afrian Effendi, Muhammad Yahya Rum, H. Maslin Batubara.

Dalam masalah masjid al Ikhlas misalnya, sebagai ahli hukum Agraria Fahum USU, yang pada substansinya menyatakan Masjid Al Ikhlas Jalan Timor Medan adalah wakaf sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004, dan Fatwa MUI Sumut 16 Pebruari 1982, Fatwa MUI Kota Medan tanggal 27 Maret 2011, serta penerbitan sertifikat Nomor 847 tahun 2006 adalah cacat hukum administrasi karena tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis dengan adanya Masjid yang berfungsi

al-ikhlas-medan.htm. Informasi yang sama dengan sedikit tambahan, *Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas*, Nahimunkancom, Medan, 30 Juni 2011, diakses dari <https://www.nahimunkan.org/kronologi-perjuangan-umat-islam-pertahankan-masjid-al-ikhlas-medan/>; lihat juga, <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2011/05/10/14581/kronologis-penyerangan-penculikan-penghancuran-masjid-al-ikhlas-medan/>

⁶⁵ Sudirman Timsar Zubil. *Surat FUI SU kepada Presiden RI SBY*, dipublikasikan Kamis, 21 Oktober 2010, ditulis di Medan, 27 September 2010.

sosial sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 seharusnya tidak memasukkan tanah dan masjid dalam sertifikat Hak Pakai Nomor 847 tahun 2006.⁶⁶

Masjid al Munawwarah, Sarulla, Pahae Jae, Tapanuli Utara, masih perlu keseriusan umat Islam untuk menyelesaikan masalah ini.⁶⁷ Tahun 1998, gagasan pembangunan masjid sudah dimulai. Selain media massa, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) dan Penelitian Yusuf Asry telah menyampaikan banyak informasi mengenai perkembangan masalah ini. Perjuangan Umat Islam (104 KK) yang berasal dari 6 desa dan 1 kelurahan di wilayah setempat (Kelurahan Pasar Sarulla 47 KK, desa Nahornop Marsada 40 KK, desa Parsala Samosir 8 KK, desa Tor Dolok Nauli 2 KK, desa Sibulung-bulung 3 KK, desa Silangkitang 3 KK dan desa Parbuluan Nainggolan 1 KK) untuk mendirikan masjid mendapat penolakan dari sebagian yang mengatasnamakan masyarakat, sehingga izin tidak diberikan. Pihak BKM telah berupaya pendirian masjid dilakukan pendekatan adat/ budaya, Aliansi Sumut Bersatu (ASB) menyatakan sikap antara lain memberi dukungan, solidaritas dan simpati kami terhadap jamaah Masjid al Munawar bertahun-tahun terkendala membangun masjid. Kantor Kemenag Taput hendaknya mendorong dan memfasilitasi penerbitan IMB Masjid Al Munawar yang diupayakan oleh Panitia Pembangunan Masjid tersebut.⁶⁸

⁶⁶ Sudirman Timsar Zubil, Sudirman Timsar Zubil, Ketua Umum FUI Sumatera Utara, Ketua BKM Al Ikhlas, *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, dipublikasikan pada Senin, 05 Desember 2011, 13:47:38 WIB, <http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2011/12/05/16913/fenomena->, bersumber dari surat yang ditulis di Medan, 4 Desember 2011.

⁶⁷ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019, *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁶⁸ M.Yusuf Asry, *Pendirian dan Penolakan Pembangunan Masjid al Munawwar Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara*, <http://radioayfm.com/> bersumber dari penelitian El Munir Aritonang, M.AP, diakses dari <https://parapejuanghidup.wordpress.com/2013/04/26/pendirian-dan-penolakan-pembangunan1-masjid-al-munawar-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara2-oleh-m-yusuf-asry3/>

Di Porsea, Masjid Fii Sabilillah dibakar sampai tiga kali FUI SU, Affan Lubis bersama alm. Togo, Alm. Pak Hadi, juga Pak Leo berperan aktif membangun kembali masjid itu. Ustadz Ustadz Sudirman Timsar Zubil yang meletakkan batu pertama pembangunan kembali masjid itu.⁶⁹ Persatuan Batak Islam (PBI) berharap agar pengungkapan kasus pembakaran rumah Allah itu diselesaikan secara tuntas.⁷⁰ Namun, pasca pembakaran Masjid tersebut belum ada pengusutan serius dari Polres Tobasa. Poldasu diminta mengambil alih pengusutan kasus ini.⁷¹ Bahkan, sangat disesalkan, pada 5 November 2010. Kapoldasu melalui media massa mengatakan, bahwa pembakaran Masjid Fi Sabilillah tersebut dilakukan oleh orang Islam sendiri. FUI SU kemudian melakukan investigasi bahwa pernyataan tersebut tidak terbukti.⁷² Masjid Taqwa (Aek Loba, Asahan) dan Nur Hikmah (Aek Loba, Asahan) juga dibakar pada satu malam yang sama di Aek Loba, pada 2011. Walaupun Masjid Taqwa tidak sampai musnah terbakar, akan tetapi masjid Nur Hikmah musnah dilalap api. Pelaku dikabarkan pihak Kepolisian sebagai orang gila. Peresmian masjid baru Nur Hikmah dilakukan oleh Bupati Asahan pada 16 Maret 2012.⁷³

Selain masjid, dalam melindungi eksistensi tanah wakaf, FUI SU dan elemen umat Islam lain juga tak pernah surut. Bahkan, tanah wakaf Tuasan berhasil mendapatkan sertifikat wakaf, meskipun belakangan masih perlu diperbaiki dalam hal pengelolaan sehingga tidak lagi berpotensi masalah baru.⁷⁴

⁶⁹ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁷⁰ *Tiga Kali Dibakar, Masjid Fii Sabilillah Berdiri Kembali*, EraMuslim, Rabu, 22 Jumadil Awwal 1432 H / 27 April 2011 11:48 WIB, diakses dari <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/tiga-kali-dibakar-masjid-fii-sabilillah-berdiri-kembali.htm>

⁷¹ *Masjid Di Porsea Sengaja Dibakar*, Voa-Islam, Jum'at, 27 Muharram 1441 H / 20 Agustus 2010 17:09 wib, mengutip sumber Waspada, diakses dari <https://www.voa-islam.com/read/suaraislam/2010/08/20/9388/masjid-di-porsea-sengaja-dibakar/>

⁷² *FUI Sumut Surati Presiden Yudhoyono soal Pembakaran Masjid*, Hidayatullah, Jum'at, 5 November 2010 - 09:14 WIB, diakses dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2010/11/05/45473/fui-sumut-surati-presiden-yudhoyono-soal-pembakaran-masjid.html>

⁷³ Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid ...*

⁷⁴ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Dalam mempertahankan tanah wakaf Arakundo, Laskar Umat Islam (LUI), FPI dan para pewakif bersama ibu-ibu perwiridan bertahan di lokasi tanah wakaf Arakundo Bahkan mereka sempat menghadapi intimidasi dan terror dari preman bayaran. Tanah wakaf itu dijaga sepanjang 24 jam.⁷⁵ Para Emak-emak, sejumlah Ormas Islam dan Mujahid Sholat Ashar juga sempat memprotes pihak pengembang yang datang ke lokasi tanah wakaf membawa peralatan bangunan pagar. Mereka menghalangi dan menghentikan aktifitas para pengembang di lokasi serta menjaga lokasi tersebut selama 24 jam. Keberadaan ibu-ibu militan sangat diperhitungkan. Jumlah mereka lebih dari 40 orang.⁷⁶ Pada Selasa, 13 Agustus 2019, FUI SU, 5 Oktober 2015, puluhan aktifis FPI dan LUI juga mendatangi Polresta Medan memenuhi panggilan penyidik Polresta Medan terkait aduan adanya dugaan pemalsuan akta otentik tanah wakaf Arukundo. Ada dugaan, para pelapor terindikasi merekayasa sejumlah berkas terkait lahan Yayasan Asrama Putri serta RS Bersalin Islam (YAPRSBI).⁷⁷

Terkait tanah wakaf alm. Tengku Darwisah terletak di Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) dengan luas sekitar 47 hektar, BWI Sumut⁷⁸ dan MUI Sergai⁷⁹ telah memperjuangkan masalah-masalah terkait sewa-menyewa, hingga alihfungsi yang tidak sesuai menurut syariat, hingga sertifikasinya.

Terkait RS Haji Medan, 14 November 2014, FUI SU melalui surat No 27/FUI-SU/XI/2004 meminta kepada Kepala BPN Deliserdang untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah RS Haji Medan yang diminta

⁷⁵ Hj. Mariani, Sulhani Harahap dan Marwiyah (Pewakif Arakundo), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁷⁶ Hj. Mariani, Sulhani Harahap dan Marwiyah (Pewakif Arakundo), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁷⁷ FPI dan LUI 'Serbu' Polresta Medan, WOL 5 Oktober 2015, diakses dari <http://waspada.co.id/medan/fpi-dan-lui-serbu-polresta-medan>

⁷⁸ Banyak Tanah Wakaf di Sergai Belum Terdaftar, HetaNews, Selasa, 10 September 2019, <https://www.hetanews.com/article/64922/banyak-tanah-wakaf-di-sergai-belum-terdaftar>

⁷⁹ Tanah Wakaf dibangun Vihara, MUI Minta FKUB Sergai Jalankan Tatib, WAKUBAN.CO, 7 Januari 2019, diakses dari <https://www.wakuban.co/2019/01/07/tanah-wakaf-dibangun-vihara-mui-minta-fkub-sergai-jalankan-tatib/>

oleh Pemprovsu. Pasalnya, tanah lebih kurang 6 hektar yang di atasnya berdiri bangunan RS Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKES) adalah wakaf. Hasil musyawarah bersama umat Islam Sumut antara lain, MUI, IPHI, KAHMI Sumut, Islamic Center, FUI-SU, LADUI, dan para tokoh masyarakat/pendiri RSHM memutuskan dan menunjuk FUI SU untuk menggugat Pemprovsu dan memperjuangkan kembali RSHM kepada umat Islam, karena RSHM adalah asset/wakaf umat Islam⁸⁰ Gugatan kepada Gubsu dilakukan melalui PN Medan. PN Medan memutuskan dengan menyatakan batal demi hukum pembubaran yayasan dan pengambilalihan RS Haji oleh Gubsu. Perkara antara FUI SU dengan Gubsu tersebut masih dalam tahap kasasi. FUI SU juga telah mengirimkan surat keberatan ke Kepala BPN DS.⁸¹

Selasa, 5 Maret 2018, Tim Wakaf Rumah Sakit Haji Medan (RSHM) bersama 13 ormas Islam di Sumut meminta pengembalian status hukum RSHM sebagai wakaf umat Islam, sesuai sejarah pendirian RS tersebut. Ormas-ormas Islam tersebut yaitu MUI Sumut, BWI Sumut, BAZNAS Sumut, KAHMI Sumut, DDII Sumut, FUI SU, IPHI Sumut, NU Sumut dan al Washliyah Sumut.⁸²

⁸⁰ *FUI Minta BPN Tidak Terbitkan Sertifikat RS Haji*, MedanBisnis, Senin, 24 Nov 2014 08:44 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/n/131482/>, dapat juga diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/24/131482/fui-minta-bpn-tidak-terbitkan-sertifikat-rs-haji/>

⁸¹ *FUI Minta BPN...*

⁸² *13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf*, SUMUTPOS.CO, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>

Bagian Ketiga

**PENATAAN NAZHIR
DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**



BAGIAN KETIGA: PENATAAN NAZHIR DAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF

Berbicara kompetensi dan karakteristik nazhir, maka tidak akan terlepas dari sosok nazhir yang amanah dan professional. Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004, definisi nazhir terdapat dalam bab I, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Pasal 9 UU ini bentuk nazhir yang diakui ada 3 bentuk; bentuk perorangan, badan hukum, dan organisasi. Dalam peraturan sebelumnya, Kompilasi Hukum Islam Buku III Pasal 219 ayat 5 dijelaskan, sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang.

Nazhir profesional adalah manajer wakaf yang dalam mengelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Apa yang dimaksud manajer adalah subjek manajemen. Yaitu individu yang bertanggungjawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya. Dalam ilmu manajemen, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Nazhir wakaf perorangan, apalagi nazhir organisasi dan badan hukum, karenanya, termasuk kategori organisasi. Dalam setiap organisasi, termasuk para nazhir wakaf, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional.

Berdasarkan UU wakaf No 41/2004, tugas nazhir adalah: (1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. (2) Mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. (4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Untuk dapat mengimplementasikan tugas-tugas sebagai manajer wakaf tersebut, nazhir wakaf diisyaratkan memiliki persyaratan dan keahlian manajemen (*managerial skill*) tertentu. Dalam fiqh, seorang nazhir diisyaratkan harus dewasa, berakal, dan *amanah* (mampu memanej dan menjaga harta wakaf dengan baik). Karena beratnya tugas itu, seorang nazhir boleh diganti nazhir lain oleh wakif atau pemerintah yang berwenang, jika alasannya yang bisa dipertanggungjawabkan. Antara lain karena gila, sakit yang tidak dimungkinkannya melakukan tugas-tugasnya dengan baik, berkhianat dengan tugasnya, mengajukan pemberhentian dirinya, melakukan tindak kriminal yang merusak, atau karena melakukan perbuatan yang dilarang agama yang mengharuskannya dipecat

Dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004, syarat nazhir perorangan, adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat menjadi nazhir dalam bentuk organisasi adalah apabila memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Persyaratan nazhir organisasi ini juga menjadi persyaratan bagi nazhir dalam bentuk badan hukum, ditambah dengan syarat bahwa badan hukum tersebut dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baik dalam fiqh maupun dalam UU Wakaf yang baru, persyaratan nazhir adalah persyaratan umum, kecuali kata amanah. Dalam Islam, kata amanah menunjuk pada kualitas ilmu, keterampilan, dan etis. Artinya, seorang yang *amanah* adalah seorang profesional yang mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien serta mempunyai komitmen pada kode etik profesinya. Kata ini merujuk pada gelar *al-Amin* yang diberikan orang-orang Mekah kepada Nabi Muhammad pada waktu berusia 35 tahun. Gelar itu diberikan karena beliau bisa menyelesaikan perselisihan antar kepala suku yang masing-masing mengklaim paling berhak melakukan peletakan Hajar Aswad pada tempatnya semula setelah banjir besar menimpa Masjid al-Haram. Nabi

waktu itu membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah, kemudian meminta seluruh kepala suku yang bertikai untuk memegang tepi sorban dan mengangkatnya bersama-sama.¹

Selain itu, kata *amanah* juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer, yang disebut al-Qur'an (QS. 28:26). Yakni, paling tidak memiliki dua kriteria: *al-qawiy* (kuat yaitu memiliki otoritas/kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat menghadapi resiko), dan *al-amin* (terpercaya yaitu kemampuan etis dan juga manajerial). Dalam ilmu manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya nazhir harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) berikut:

1. Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu, seperti mengadministarsikan harta benda wakaf, mengelola dan menjaga harta benda wakaf, dan lain-lain.
2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat. Di antara contoh keahlian ini adalah keahlian dalam bernegosiasi memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Dalam wakaf, terutama manajer penggalangan dananya, keahlian ini sangat diperlukan.
3. Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berfikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa akan datang.
4. Keahlian dalam pengambilan keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.
5. Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Mengingat sangat sulit seseorang dapat menguasai secara

¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal. 18

sekalius berbagai keahlian manajemen ideal di atas, apalagi jika itu semua menjadi kualifikasi bagi nazhir wakaf atau yang diberi wewenang oleh nazhir, paling tidak keahlian yang harus dimiliki adalah keahlian yang berkaitan dengan peran dan tugasnya saja. Peran dan tugas itu secara organisasional dibagi menjadi beberapa tingkatan yang bersifat piramidal meliputi: (1) Manajemen tingkat puncak (*top management*) yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya organisasi. Keahlian yang diperlukan untuk manajer atau nazhir tingkat ini adalah keahlian dalam hal konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. (2) Manajemen tingkat menengah (*middle management*) yang biasanya ditempati oleh para manajer operasional. Untuk manajemen tingkat menengah ini, keahlian yang diperlukan diantaranya adalah keahlian konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. (3) Manajemen supervisi tingkat pertama atau *supervisory or first line management* yang bertugas sebagai pembantu manajer operasional untuk mengawasi para tenaga teknis seperti tukang ketik dan *cleaning service* agar pekerjaan yang dibebankan kepadanya tidak terbengkalai dan apa yang telah direncanakan pada setiap bagian operasional dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diantara keahlian yang perlu dimiliki untuk manajer tingkat ini adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknis. (5) Manajemen nonsupervisi atau *non-supervisory management* yang ditempati oleh para pekerja teknis seperti tukang ketik dan ekspedisi yang bertugas menyebarkan surat kepada wakif dan tugas implementatif lainnya. Keahlian yang terutama perlu dimiliki dalam level ini adalah keahlian teknis, komunikasi, dan manajemen waktu.²

1. Menata Kemampuan Nazir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut, Syariful Mahyar Bandar mengaku pertanyaan terkait penempatan nazhir merupakan hal yang cukup berat untuk dijawab. Menurutnya, penetapan nazir dilakukan oleh pewakif sendiri, pewakif datang KUA, selanjutnya KUA

² Ernie Tisnawati Sale dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 18-24,

hanya mengaktakan akta ikrar wakaf, Sejauh yang beliau ketahui, tidak ada yang mengatur terkait penetapan nazhir. Masalah kemudian terjadi dalam perjalanan wakaf.

Beliau mencontohkan kasus yang terjadi di sebuah Komplek, nazhir merangkap sebagai anggota Badan Kemakmuran Masjid (BKM). Padahal pada dasarnya ia nazhir. Di masjid lain, tugas nazhirnya justeru hanya tukang menyapu-nyapu masjid. Itulah tugas nazhir. Bahkan, banyak yang mempertanyakan, antara BKM dan nazhir siapa yang paling menentukan dalam pengelolaan harta benda wakaf? Padahal BKM, jelas tugasnya, memakmurkan masjid. Semestinya yang bertanggungjawab mengelola harta benda wakaf ada pada nazhir. Untuk itu ke depan sangat perlu menata kembali tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewenangan nazhir dengan mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU Wakaf, yang antara lain menegaskan, yang berhak memberhentikan nazhir adalah BWI.³

Hal lain lagi terkait dengan kewenangan Kemenag juga terkait nama dan penyebutan BKM, yang belakangan mulai tidak seragam dan konsisten, malah semakin simpang siur di tengah masyarakat. Apakah Badan Kenaziran Masjid, Badan Kemakmuran Masjid, bahkan ada pula belakangan SK yang dikeluarkan dengan sebutan Badan Kesejahteraan Masjid, yang singkatannya sama-sama BKM. Hal ini perlu juga ditelusuri dari masa munculnya istilah ini dan bagaimana penanganan ketidakseragaman ini. Padahal, dari diskusi yang pernah dilakukan di Masjid Musabbihin yang diikuti Syariful Mahyar Bandar bersama Pak Wahab Dalimunthe dan Pak Maulana Pohan, Badan Kesejahteraan Masjid merupakan institusi yang berbeda, dikhususkan bagi sejahtera masjid, karena kebutuhan yang berbeda dengan BKM, sehingga istilah kesejahteraan yang dipakai, dan diikrarkan di sana. Namun, belakangan pengurus sebagian sudah mundur atau meninggal, dan belakangan kian menyimpang dari gagasan awal institusi tersebut dibentuk.

Masalah lain yang dihadapi BWI dalam melaksanakan amanat UU Wakaf juga terkait nazhir yang tidak terima diberhentikan oleh BWI. Ini

³ Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP (Ketua BWI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

terjadi di Delitua. Ketika BWI mengganti nazhir, BWI dihadapkan dengan aksi premenisme, BWI harus berhadapan dengan orang-orang bertato yang ikut campur dalam persoalan wakaf. Sungguh menjadi pengalaman yang luar biasa. Padahal, jangankan tidak memiliki sertifikat, tanah wakaf yang tak memiliki surat pun masih banyak ditemukan oleh BWI. Ada yang hanya menyimpan dokumen fotocopy, tidak jelas dokumen aslinya.

Masalah inventarisasi harta benda wakaf juga nyaris tak tersentuh. Misalnya terkait madrasah yang didata di KUA Kecamatan terkait. Perlu didata, apa saja inventaris yang dimiliki, dokumen apa saja yang ada sebagai legalitas. Seharusnya, masalah yang terjadi akan mudah diselesaikan satu per satu bila terdata. Jika misalnya akta ikrar wakafnya tidak ada, seharusnya bias dicarikan solusinya, misalnya dengan membuat akta pengganti ikrar wakaf. Cara-cara yang pernah diterapkan BPN Sumut di lapangan patut juga dicoba, untuk menghadapi pihak-pihak yang banyak alasan saat dimintai pertanggungjawabannya terkait pengelolaan harta benda wakaf. Padahal, semestinya tidak ada alasan. Cukup menegaskan, "Saudara tinggal pilih, mau ke penjara nanti atau ke neraka?"

Potret pengelolaan harta benda wakaf, jika dibedah kasus per kasus tentu akan lebih bagus. Tetapi BWI mengakui belum dapat berbuat banyak untuk menanganannya. Contoh kasus yang belum juga bias clear adalah tanah wakaf di Sergai, tanah Wakaf alm. Tengku Darwinsyah tahun 1965 yang luasnya sekitar 47 hektar yang disewakan kepada orang Cina dan kemudian tanah wakaf itu digunakan sebagai tempat beternak babi (kandang babi).⁴ Sejauh pemahaman nazhirnya, yang dilakukannya hal yang dibolehkan dan merayu-rayu, "Janganlah begitu!" Jadi, penataan nazhir perlu dilakukan kembali dimulai dari mendudukan kembali pemahaman nazhir mengenai harta benda wakaf. Sehingga diharapkan ke depan, setiap lokasi wakaf, jelas nazhirnya, jelas pemahamannya, jelas tugas dan tanggung jawabnya, tidak lagi dianggap hanya tukang sapu masjid lagi. Ketidakpahaman nazhir dengan UU Wakaf tidak akan banyak membantu penyelesaian masalah, malah justru membuat masalah semakin runyam.

⁴ Syariful Mahya Bandar, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Masalah yang tidak kalah runyamnya adalah masalah penegerian madrasah-madrasah swasta oleh Kemenag di tahun 1990-an di hampir seluruh kecamatan. Perubahan status itu kemudian diikuti dengan terdaftarnya madrasah tersebut di dalam daftar inventaris Negara. Dalam hal ini Kemenag 'berhutang' ke BWI.⁵

Ramlan Yusuf Rangkuti, terkait masalah penataan kembali nazhir, menawarkan, tindakan yang perlu dinomorsatukan, adalah membuat surat edaran atau surat instruksi kepada seluruh KUA di tingkat Kecamatan bahwa yang berwenang menunjuk nazir adalah BWI. Bagi yang hendak berwakaf, pewakif menunjuk pengganti nazhir yang meninggal atau berhenti, tidak boleh lagi menunjuk sendiri, seperti anaknya, apalagi menjualnya. Kewenangan menentukan nazir itu bukan KUA melainkan BWI. Surat edaran yang berisi antara lain seperti itu, perlu diterbitkan dari Kakanwil Depag. Selain itu, mengenai masalah kepanjangan atau penamaan BKM menjadi badan kesejahteraan, kenaziran, kemakmuran atau apa pun namanya, Kakanwil Depag juga perlu menerbitkan surat edaran setidaknya melakukan sosialisasi kepada seluruh KUA, bahwa kepanjangan BKM adalah ini. Sehingga tidak ada lagi, nama-nama lain, istilah yang digunakan hanya satu. Sebab itu merupakan wewenang Kakanwil Depag. Dengan beragamnya kepanjangan BKM, jangkakan masyarakat, mantan Kakanwil Depag saja dibuat bingung. Singkatnya, selain kewajiban memberi tahu kedudukan kenaziran, juga menertibkan kepanjangan BKM, baik melalui surat edaran kepada semua KUA.⁶

Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem pengaturan Perundang-undangnya disebutkan dengan Nazhir. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku di dalam lingkungan istilah fiqh. Selain sebutan Nazhir, banyak juga para ahli (fuqaha) yang menyebutnya dengan istilah mutawalli. Kedua istilah tersebut secara etimologis berasal dari nazira-yanzaru dan tawalla-yatawalli dengan arti menjaga dan mengurus.⁷ Sedangkan secara

⁵ Bandar, 2019. FGD...Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁶ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Majelis Fatwa MUI Sumut), 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁷ Muhammad Yunus, 1973, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al Qur'an, hal 447 dan 507

terminologis dimaksudkan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.⁸

Dalam PP Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 ayat (4) jo Permeneg Nomor 1 tahun 1978, Pasal 1 huruf (e) jo Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (5) Nazhir dirumuskan sebagai suatu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 Nazhir dirumuskan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: perseorangan; organisasi; atau badan hukum.

Pola seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistem yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pada kenyataannya banyak nazhir wakaf yang diangkat tanpa mempertimbangkan keahliannya (jika tidak dikatakan asal-asalan) yang mengakibatkan banyak harta benda wakaf, khususnya tanah tidak terkelola dengan baik

Kemudian, Persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf) haruslah dijalankan dengan benar. Dalam UU No. 41 tahun 2004, Pasal 9: nazhir meliputi: a. perseorangan, b. organisasi, atau c. badan hukum. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan: a. warga Negara Indonesia, b. beragama Islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁹

Yang menarik untuk dicermati adalah poin "d" yakni amanah. Kata amanah memang merupakan suatu yang abstrak, tapi bisa dibuat standardisasi atau karakteristik seseorang yang dikatakan amanah, misalnya merujuk kepada fiqh klasik dan kebiasaan. Akan tetapi yang harus diperhatikan setelah syarat diatas adalah saksi yang diberlakukan apabila syarat-syarat di atas tidak dipenuhi ataupun dilanggar.

⁸ Aboerraeof, 1970, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 130

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI tahun 2005

Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 67 Bab IX UU No. 41 Thn 2004 yakni;

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa seizin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukkan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Sanksi Administratif Pasal 68

- 1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syaria'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32
- 2) Sanksi adminsitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syaria'ah
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Hal-hal yang berkenaan dengan Nazhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 (pasal 6 s/d pasal 8, pasal 16), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 218 s/d pasal 222) dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 9 s/d pasal 14, pasal 23, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 42 s/d pasal 46). Menurut pasal 14 ayat (2) Undang-undang wakaf, ketentuan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana diatur dalam pasal 9 s/d pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Direktur Pengembangan Wakaf Departemen Agama, Peraturan Pemerintah dimaksud sedang dalam proses pembahasan dengan instansi yang terkait.

Pembahasan peran dan wewenang nazhir akan dilihat dari tiga hal bagian utama yaitu:

- a. persyaratan nazhir (sistem rekrutmen nazhir) ;
- b. kewajiban nazhir ;
- c. hak nazhir

Persyaratan Nazhir

Nazhir yang berupa kelompok perorangan

Kelompok perorangan ini berarti sekumpulan orang yang merupakan suatu kesatuan atau merupakan suatu pengurus sekurang-kurangnya harus terdiri dari tiga orang dimana salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai ketua dan sebanyak-banyaknya terdiri dari sepuluh orang yang diangkat oleh KUA Agama Kecamatan atas saran MUI Setempat dan Camat setempat. Ketentuan ini di samping untuk mensukseskan nazhir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, juga untuk menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf oleh perorangan, menghindari perselisihan dikemudian hari, dan memudahkan koordinasi serta bimbingan bagi nazhir.¹⁰

Kualifikasi Nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fiqh sebagai berikut: beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa) dan aqil (berakal

¹⁰ Abdullah Gofar, 1999, *Nazhir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Mimbar Hukum, No. 14 Tahun X, Jakarta: AL Hikmah, hal 28

sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional) dan amanah, jujur dan adil.

Menurut Eri Sudewo, CEO Dompot Dhuaffa Republika, dari persyaratan minimal seorang atau lembaga nazhir dalam pandangan fiqh tersebut dijabarkan sebagai berikut:¹¹

(a) Syarat Moral

- (1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan Negara RI
- (2) Jujur, amanah, adil, dan ihsan sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
- (3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- (4) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
- (5) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

(b) Syarat Manajemen

- (1) mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
- (2) Visioner
- (3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, social dan pemberdayaan
- (4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta

(c) Syarat Bisnis

- (1) mempunyai keinginan
- (2) mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
- (3) punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur"

Dalam pasal 9 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir perseorangan diharuskan memenuhi persyaratan warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani serta tidak terhalang melakukan peraturan

¹¹ Dikutip dari buku *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, diterbitkan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Tahun 2005, hal. 39

hukum. (Pasal 10 ayat 1). Sedang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 6 ayat (1) tidak ada persyaratan amanah, hanya saja ditambah persyaratan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Dicantumkan persyaratannya amanah dalam Undang-undang Wakaf bagi persyaratan nazhir merupakan hal yang sangat penting karena nazhir telah menerima tanah wakaf tersebut dari wakif, pada saat wakif mengucapkan ikrar wakaf, untuk mengelola dan mendayagunakan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf itu.

Undang-undang Wakaf menetapkan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Pasal 4 dan 5).

Dari persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa nazhir menempati pos yang sangat sentral dan strategis dalam pola pengelolaan harta wakaf. Dan hal ini sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk mengelola harta wakaf produktif. Dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi syaria'ah yang mendidik sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik.

Nazhir Organisasi dan Badan Hukum

Apabila nazhir tersebut merupakan organisasi, diharuskan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-undang Wakaf yaitu pengurus organisasi itu memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi itu bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Sedang bagi nazhir yang berbentuk badan hukum wajib didaftarkan pada Menti dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, jika belum ada pendaftaran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. Dan diharuskan memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan, mulai dari; beragama Islam,

sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan tidak berada dibawah pengampuan

- 2) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam;
- 3) Mempunyai perwakilan di kabupaten/kota letaknya benda wakaf berada
- 4) Memiliki:
 - salinan akta notaris tentang perdirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - daftar susunan pengurus
 - anggaran rumah tangga
 - program kerja dalam pengembangan wakaf
 - daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan
 - surat pernyataan bersedia diaudit

Selain itu, baik nazhir yang berbentuk kelompok perorangan maupun yang berbentuk suatu badan hukum, harus terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Pendaftaran dan pengesahan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya suatu perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk mempermudah pengawasan. Pengesahan dimaksud harus dituangkan secara tertulis yang antara lain memuat: pernyataan pengesahan nazhir untuk suatu desa atau kelurahan tertentu; dan identitas dari seluruh anggota nazhir serta kedudukan masing-masing di dalam kelompok kenazhirannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Nazhir disahkan oleh Kepala KUA kecamatan setempat selaku PPAIW. Akan tetapi secara tersurat, tidak ada suatu ketentuan yang jelas siapa sebenarnya yang berhak untuk menunjuk dan mengangkat nazhir, apakah wakif atau Kepala KUA Kecamatan selaku PPAIW. Jika diteliti secara mendalam dan yang terjadi dalam praktek pengesahan nazhir, maka sebetulnya antara keduanya, wakif dan Kepala KUA kecamatan bekerjasama dalam menentukan Nazhir wakaf tersebut. Wakif sebagai orang yang sangat berkepentingan dengan harta wakaf tersebut

menunjuk wakif sebagai pengelola harta wakafnya. Penunjukan dimaksud harus diajukan kepada Kepala KUA kecamatan untuk didaftar dan disahkan. PPAIW berkewajiban secara moral untuk meneliti persyaratan-persyaratan bagi seorang yang akan ditunjuk sebagai nazhir s /esuai ketentuan undang-undang, sehingga nazhir tersebut nantinya benar-benar diharapkan mampu mengemban tugas-tugas kenazhiran dalam mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan tanah wakaf, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, khususnya yang telah ditetapkan wakif dan tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Dalam suatu desa atas kelurahan, hanya dapat ditetapkan satu nazhir bagi nazhir yang berbentuk kelompok perorangan dan untuk satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa atau kelurahan yang terdapat di kecamatan tersebut. Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum, dapat ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut.¹²

Pembatasan jumlah Nazhir di dalam suatu daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan tanah wakaf dan mengurangi persaingan yang tidak sehat diantara para Nazhir wakaf.

Dari beberapa ketentuan persyaratan diatas dalam rangka rekrutmen nazhir yang amanah dan professional tentunya perlulah peningkatan kemampuan nazhir seperti:

- 1) meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan para nazhir wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional dan bertanggung jawab.
- 2) Membentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban dihadapan Allah kelak
- 3) Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perudnang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan control, baik di daerah maupun pusat.

¹² Peraturan Mentri Agama No 1 Tahun 1978, Pasal 9

- 4) Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang. Sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi Syari'ah secara terpadu.

Keempat hal diatas dapat dilakukan pembinaan melalui:

- 1) pendidikan formal. Melalui sekolah-sekolah umum dan kejuruan dapat dicetak calon-calon SDM kenazhiran yang siap pakai, dengan catatan sekolah itu sendiri harus dibentuk secara berkualitas dengan memberikan format kurikulum yang mantap dngan disiplin pengajaran yang tinggi, terarah menurut bidang yang dituju
- 2) pendidikan non formal. Bentuk dari pendidikan model ini adalah dengan mengadakan kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan SDM kenazhiran baik yang terkait dengan manejerial organisasi, atau meningkatkan keterampilan dalam bidang profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan pertanian, teknik perbankan, pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan lain sebagainya.
- 3) Pendidikan informal, berupa latihan-latihan dan kaderisasi langsung ditempat-tempat pengelolaan benda wakaf. Nazhir yang telah ada, ditingkatkan kemampuannya melalui latihan-latihan intensif dan bimbingan yang membuatnya kian maju dan mampu dalam bidang tugas dan tanggung jawabnya
- 4) Pembinaan fisik dan mental, jasmani dan rohani haruslah terus menerus dibina agar para pemegang amanah perwakafan senantiasa bergairah dalam melaksanakan pekerjaannya. Demikian juga pembinaan mental budi pekerti (akhlak) yang luhur dibina melalaui berbagai kesempatan seperti ceramah-ceramah agama, out bond, simulasi pengembangan diri dan organisasi untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan mental supaya SDM kenazhiran bisa mengemban amanat untuk kesejahteraan masyarakat banyak.

Masa Bakti Nazhir dan Pemberhentian Nazhir Nazhir Perseorangan

Dalam PP No 42 Tahun 2006 disebutkan dalam Pasal 14 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali nazhir dilakukan oleh BWI apabila yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syaria'ah dan perundang-undangan.

Dengan adanya periodeisasi masa bhakti nazhir, akan lebih memudahkan mengontrol peran dan wewenang nazhir, jika dalam satu periode lima tahun, seorang (sekelompok) nazhir dinilai oleh BWI telah melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, maka BWI boleh merekomendasikan dan mengangkat kembali, akan tetapi apabila dinilai tidak amanah dan tidak professional dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka dapat digantikan dengan nazhir yang lebih amanah dan professional.

Fungsi pengawasan ini pada akhirnya akan dapat memacu dan memberikan efek yang sangat positif bagi setiap nazhir untuk lebih mengembangkan potensi diri baik yang terstruktur dan dilaksanakan oleh pemerintah, maupun pengembangan diri pribadi secara individual.

Dalam Permenag Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa nazhir dapat diberhentikan atau dianggap berhenti dari jabatannya apabila ternyata:

- a. meninggal dunia
- b. mengundurkan diri
- c. dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disebabkan oleh:
 - 1) tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
 - 2) melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir, seperti halnya kerana manipulasi atau menyelewengkan hasil dan atau harta wakaf yang dikelolanya;
 - 3) tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai nazhir, seperti karena sering sakit-sakitam dan lain-lainnya

Dalam hal terjadi suatu pemberhentian seorang anggota kelompok dari jabatannya sebagai nazhir, yang dikarenakan; meninggal dunia,

mengundurkan diri; tidak dapat lagi menjalankan tugasnya; atau dibatalkan, maka anggota nazhir yang lainnya diwajibkan untuk segera melaporkannya kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat

Apabila ternyata dari adanya pemberhentian dimaksud mengakibatkan jumlah anggota nazhir yang berbentuk kelompok perorangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 8 ayat (1) Permeneg Nomor 1 Tahun 1978 (setidaknya terdiri dari 3 orang), maka anggota nazhir yang lainnya berkewajiban untuk mengusulkan penggantinya guna disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka nazhir yang bersangkutan harus diganti (PP No 42 Thn 2006 Pasal 8)

Nazhir perwakilan Daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh BWI

Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka nazhir organisasi dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Dan Apabila nazhir organisasi dalam jangka waktu satu tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian nazhir.

Jika salah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nazhir, maka organisasi yang bersangkutan

harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI untuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian tersebut.

Nazhir Badan Hukum

Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam AIW, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWI. (PP No 42 Pasal 12 ayat (1))

Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat menjalankan kewajiban, maka nazhir bdan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat (Pasal 12 ayat (2)).

Apabila nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakfi atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Kewajiban Nazhir

Nazhir merupakan pemegang amanat untuk memelihara, mengurus, mengembangkan dan mendayagunakan harta wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Sebagai pemegang amanat tentu Nazhir mempunyai kewajiban dan hak-hak tertentu. Kewajiban-kewajiban Nazhir diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan, baik Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maupun Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No. I Tahun 1978 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kep/D175/78 serta Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11. Dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 13 Secara garis besar Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf ;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;

- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Adapun tatacara pembuatan laporan akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Menti

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004, kewajiban-kewajiban nazhir telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan pelaksanaannya. Kewajiban nazhir ini meliputi hal-hal yang berkenaan mengenai pemeliharaan, pengurusan, pengawasan harta wakaf dan hasil-hasilnya serta laporan tentang semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf

Kewajiban nazhir juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 yaitu :

- a. mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- b. membuat laporan secara berkala atas semua harta yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala KUA kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat

Secara terperinci kewajiban nazhir adalah sebagai berikut :

- 1) menyimpan baik-baik atas lembar kedua dari salinan Akta Ikrar Wakafnya. Hal ini sangat penting karena salinan AIW ini merupakan bukti otentik terhadap peristiwa wakaf tersebut, yang dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu waktu diperkarakan di Pengadilan Agama ;
- 2) mendaftarkan harta benda wakaf tersebut kepada instansi yang berwenang. Khusus tanah wakaf, pendaftarannya dilakukan kepada Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan, yang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 32, dilaksanakan oleh PPAIW yang bertindak atas nama Nazhir ;
- 3) menyimpan sertifikat harta benda wakaf yang diterima dari PPAIW ;
- 4) memelihara, mengurus dan memanfaatkan harta benda wakaf serta berusaha meningkatkan produksinya; Ia berwenang

melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf, misalnya, apabila harta wakaf dimaksud berupa kebun, maka ia boleh menanaminya sendiri, boleh juga menyewakan kepada orang lain.

- 5) mempergunakan hasil-hasil harta wakaf sebagaimana mestinya, sesuai dengan ikrar dan kehendak wakif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan tujuan dan fungsi wakaf ;
- 6) Menyelenggarakan administrasi pengelolaan harta benda wakaf sesuai manajemen modern, antara lain : a. buku catatan keadaan harta benda wakaf ;b. buku catatan tentang pengelolaan harta benda wakaf
- 7) menyampaikan laporan insidentil dan laporan tahunan tentang pengelolaan harta benda wakaf kepada pihak / instansi yang berwenang seperti KUA Kecamatan setempat, Badan Hukum Indonesia ;
- 8) dalam hal tanah wakaf tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau akan terkena pembuatan jalan baru, fasilitas umum, maka nazhir berkewajiban memproses pengurusan izin perubahan peruntukan atau perubahan statusnya kepada instansi yang berwenang. Selanjutnya nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas tanah wakaf yang ditukar / diubah statusnya atau diubah peruntukannya itu;
- 9) Dengan adanya perubahan-perubahan seperti poin delapan di atas maka nazhir yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada: pertama; Kepala Badan Pertanahan Nasional Setempat guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut dan kedua; Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat tentang hasil pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal terjadi perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Setempat.
- 10) Melaporkan pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Badan Pertanahan nasional setempat.

Hak Nazhir

Nazhir sebagai orang (kelompok) atau badan hukum yang bersusah payah menjalankan tugasnya dalam mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf tentunya berhak untuk mendapatkan bagian dan menerima penghasilan yang pantas dari hasil tanah wakaf. Hal ini dimaksudkan agar diharapkan tugas yang diberikan kepadanya dapat dijalankannya dengan sebaik-baiknya dan terhindar dari penyimpangan terhadap penggunaan harta wakaf itu sendiri.

Selain itu nazhir juga berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota c.q. Kepala Seksi Urusan Agama Islam setempat, dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.¹³

Kompilasi Hukum Islam pasal 222 menyatakan bahwa Nazhir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atau saran Majelis Ulama Kecamatan dan KUA Kecamatan setempat.

Sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut, UndangUndang No. 41 Tentang Wakaf menetapkan bahwa sebagai imbalan atas pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir, maka Nazhir dapat menerima dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen)

Ketentuan 10 % ini adalah batasan maksimal, setelah dikurangi biaya operasional yang wajar atas pengelolaan harta benda wakaf ini. Hal ini tergantung dari hasil bersih yang didapat. Semakin besar hasil bersih atas pengelolaan harta benda wakaf, maka tentunya semakin kecil pula prosentase penerimaan untuk Nazhir, demi optimalisasi penggunaan hasil harta benda wakaf untuk peningkatan kesejahteraan umat.

Dengan diberinya imbalan ini, yang merupakan sebagai honorarium atau bagi hasil atas pengelolaan harta benda wakaf maka

¹³ Permeneg Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 11 jo Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 lampiran II

diharapkan pemeliharaan, pengurusan dan pengelolaan harta wakaf akan dapat dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel serta terhindar dari penyelewengan.

2. Risiko Hukum Kesalahan Pengelolaan Dana Wakaf

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada benda wakaf (tanah) itu, Pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan peraturan pelaksanaannya dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang telah memenuhi asas legalitas, dan memiliki sifat mengatur, mengikat serta digunakan dan dipertahankan masyarakat.¹⁴ Sedangkan PP No 42 Tahun 2006 juga mengatur sanksi, meski hanya terbatas pada sanksi administratif.

Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum yang dapat merugikan perwakafan tanah, dikategorikan sebagai sesuai perbuatan melanggar hukum yang dapat dituntut secara pidana kepada Peradilan yang berwenang.

DI dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 12 dinyatakan secara tegas bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62 dan penjelasannya dinyatakan bahwa sengketa perwakafan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, mediasi dan arbitrase, penyelesaiannya dapat melalui Pengadilan Agama dan / atau Mahkamah Syariah.

Adapun perbuatan seseorang yang mencakup pelanggaran ketentuan pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 14 dan 15 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 67

¹⁴ Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT, Tintanusa, hal. 205

sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diatur dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa disamping sengketa perwakafan yang harus diselesaikan secara musyawarah, mediasi, arbitrase dan Pengadilan Agama, terdapat dua macam sanksi hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perwakafan tanah yaitu :1. Sanksi pidana 2. Sanksi administratif

Sanksi Pidana

Baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maupun Undang-undang Wakaf, dicantumkan Bab Khusus tentang Ketentuan Pidana, masing-masing dalam Bab V (Pasal 14 dan 15) dan Bab IX (Pasal 67 dan 68). Dengan pencantuman ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah dan Undangundang dimaksud, berarti pelaksanaan perwakafan tanah yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan, maka pelakunya dapat dituntut secara pidana pada pengadilan yang berwenang untuk itu yaitu Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam pasal-pasal tersebut di atas tidak dijelaskan apakah tindakan pidana itu termasuk jenis kejahatan atau jenis pelanggaran.

Menurut Subekti dan Tjirosoedibyo, lazimnya setiap ketentuan pidana didalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, senantiasa menyebutkan jenis tindak pidana dimaksud apakah tindak pidana atau kejahatan.¹⁵ Untuk mengetahui apakah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan bidang perwakafan tersebut, termasuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran perlu dilihat terhadap pengertian dan sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing tindak pidana¹⁶ Dalam hal ini para ahli hukum mengartikan "suatu tindak pidana pelanggaran" dengan suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, sedangkan untuk "tindak pidana kejahatan" diartikan dengan suatu perbuatan tercela.¹⁷

¹⁵ Subekti dan Tjirosoedibyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita, hal 79

¹⁶ Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, hal 206

¹⁷ Subekti dan Tjirosoedibyo, 1980, hal 79

Sedang menurut Taufiq Hamami, ketidakbaikan suatu tindak pidana pelanggaran dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sedang dalam tindak pidana kejahatan, sifat ketidakbaikannya telah dikenal dan dinyatakan oleh hukum, sebelum pembuat undang-undang itu menyatakannya.¹⁸

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa ukuran ketidakbaikan yang dimiliki oleh tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada yang dimiliki oleh tindak pidana kejahatan, sehingga sanksi pidananya juga lebih ringan.

Memperhatikan pendapat para Ahli hukum tersebut di atas dan ancaman pidana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Perbuatan yang diancam pidana dalam PP No. 28 Tahun 1977 dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan :
 - a. ancaman pidananya ringan yaitu hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. perbuatan yang diancam hukuman pidana antara lain pelanggaran pasal 5 yang menyatakan bahwa wakif harus mengikrarkan kehendak wakafnya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan PPAIW. Padahal sebelum adanya ketentuan ini, ikrar wakaf yang dilakukan tidak dihadapan PPAIW bukanlah perbuatan melawan hukum/ tindak pidana.
 - c. Dalam pasal 14 disebutkan kata-kata melanggar yaitu "*Barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dst....*"
- 2) Perbuatan yang diancam pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan :
 - a. Perbuatan yang diancam hukuman pidana antara lain menjual harta benda wakaf. Dalam hukum Islam, harta wakaf tidak boleh dijual dan dengan ikrar wakaf, pemilikan wakaf menjadi hak

¹⁸ Taufiq Hamami, hal 207

Allah. Oleh karena itu, perbuatan menjual harta wakaf adalah perbuatan melawan hukum, walaupun belum dinyatakan dalam Undang-undang.

- b. Ancaman pidananya cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).

Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Tindak Pidana

Ada beberapa tindak pidana terhadap perwakafan tanah yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan secara limitatif dalam PP No. 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu : A. Tindak Pidana dalam PP Nomor 28 Tahun 1977.

- a. Seseorang (wakif) yang mewakafkan tanahnya tidak dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang meliputi :
 - 1) Ikrar wakaf tidak dilakukan dihadapan PPAIW.
 - 2) Ikrar wakaf tersebut tidak dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf
 - 3) Pengucapan dan/atau pencatatan ikrar wakaf tidak disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;
 - 4) Tidak membawa dan/atau menyerahkan kepada PPAIW setempat surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diwakafkan tersebut, yaitu :
 - Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat, yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut dengan sengketa.
 - Surat Keterangan pendaftaran tanah.
 - 5) Izin Bupati / Walikota Cq. Kepala Sub Direktorat Agraria (Kantor Pertanahan) setempat.

Namun demikian, dalam keadaan tertentu, perbuatan yang disebut dalam point a, b, c dapat dianggap sebagai bukan tindak pidana, apabila terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

- b. Nazhir yang tidak mendaftarkan diri tentang kenazhirannya kepada Kepala KUA Kecamatan untuk mendapat pengesahan.
- c. Nazhir yang melalaikan kewajibannya, dalam hal :
 - 1) Mengurus dan mengawasi kekayaan harta wakaf dan hasilnya (Pasal 14 Jo Pasal 7 ayat (1).
 - 2) Tidak membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf kepada Kepala KUA Kecamatan setempat. (Pasal 14 Jo Pasal 7 ayat (2)
 - 3) Merubah status tanah wakaf atau peruntukannya atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Agama. (Pasal 14 Jo Pasal 10)
- d. PPAIW atas nama Nazhir yang tidak mendaftarkan tanah yang diwakafkan kepada Kantor Sub Direktorat Agama (Kantor Pertanahan) setempat. (Pasal 14 Jo Pasal 11)

Apabila wakif atau Nazhir yang melakukan tindak pidana tersebut di atas merupakan suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau penanggung jawab dalam perbuatan tersebut atau terhadap kedua-duanya. (Pasal 15)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tidak menyatakan bahwa tindak pidana tersebut di atas bukan merupakan delik aduan. Ini berarti, jika perbuatan-perbuatan tersebut telah diketahui oleh pihak yang berwajib (penyidik), baik karena adanya laporan dari orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut maupun karena penyidik mengetahuinya sendiri secara langsung, maka tindak pidana tersebut dapat diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan pidana tersebut dianggap telah merugikan kepentingan umum atau masyarakat pada

Tindak pidana tersebut di atas pada point 1 sampai dengan 4, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Ancaman hukuman ini terasa sangat ringan dan tidak menimbulkan rasa takut/jera kepada wakif, Nazhir atau PPAIW yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu dengan masih banyaknya tanah

wakaf di Indonesia, khususnya Serdang Bedagei yang belum didaftarkan pada PPAIW dan Kantor Pertanahan menunjukkan bahwa telah banyak terjadi tindak pidana terhadap perwakafan tanah yang dilakukan oleh Wakif, Nazhir dan/atau PPAIW yang merugikan perwakafan tanah dan/atau masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian kami belum menemukan satu kasus tindak pidana terhadap perwakafan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 an 15 PP Nomor 28 Tahun 1977, yang telah dituntut dan/atau diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri.

Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

1. Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan harta benda wakaf yang telah diwakafkan. UU No 41 Thn 2004 Pasal 67 Ayat (1) Jo Pasal 40 Sub A
2. Setiap orang yang dengan sengaja menghibahkan, menjual, mewariskan dan/atau mengalihkan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan. (Pasal 67 ayat (1) Jo Pasal 40 Sub ©, (d), (e), dan (g)
3. Setiap orang yang dengan sengaja, tanpa izin Menteri Agama menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan. (Pasal 67 ayat (1) Jo Pasal 41)
4. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. (Pasal 67 ayat (2))
5. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi 10 % (sepuluh persen). (Pasal 67 ayat (3) Jo Pasal 12

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, memperhatikan besarnya ancaman pidana dan sifat perbuatan tindak pidana yang merugikan kepentingan masyarakat serta melanggar ketentuan hukum agama Islam sebagaimana dimaksud Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Umar, yang melarang benda wakaf dijual, diwariskan dan/atau dihibahkan, maka tindak pidana tersebut di atas merupakan tindak pidana kejahatan.

Sebagai tindak kejahatan, sangat wajar apabila ditetapkan ancaman pidana yang cukup berat bagi para pelakunya, untuk memberikan efek jera dan rasa takut, serta memberikan perlindungan kepada harta wakaf yaitu untuk tindak pidana menjaminkan, menghibahkan, menjual dan mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya serta menukar harta benda wakaf tanpa izin diancam hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sedang ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana mengubah peruntukan tanpa izin berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Adapun terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 67 ayat 3 Undang-undang Wakaf, diancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dalam penelitian kami, ketentuan Pasal 67 Undang-undang Wakaf ini telah cukup efektif dalam upaya memberikan perlindungan kepada tanah wakaf, yang memberikan rasa takut kepada orang-orang yang akan berbuat merugikan wakaf tanah.

Sanksi Administrasi dalam Undang-Undang Wakaf

Selain tindak pidana tertentu yang diancam dengan hukuman pidana yang cukup berat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga mengatur tentang pemberian sanksi administratif kepada lembaga keuangan syariah dan PPAIW.

Dalam Undang-Undang Wakaf, dinyatakan bahwa Menteri Agama dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkanya benda wakaf yaitu :

- a. Pemberian sanksi administratif kepada Lembaga Keuangan Syariah yang tidak mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang (Pasal 68 Jo Pasal 30)
- b. Pemberian sanksi administratif kepada PPAIW yang bertindak atas nama Nazhir, tidak mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani. (Pasal 68 Jo. Pasal 32)

Dalam Pasal 68 ayat (2) Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada Lembaga Keuangan Syariah dan PPAIW tersebut di atas, berupa:

- a. Peringatan tertulis :
- b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 39 UU No 41 menyebutkan dalam Pasal 57:

- 1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban :
 - a) mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS penerima Wakaf Uang
 - b) menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
 - c) menerima secara tunai wakaf uang dari wakaf atas nama nazhir
 - d) menempatkan uang wakaf kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif
 - e) menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif
 - f) menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif dan
 - g) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir
- 2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian berbeda
- 3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 kali surat peringatan tertuli
- 4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud dan/atau rekomendasi dari instansi terkait

Apabila ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 Undang-undang Wakaf ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsisten dan efektif oleh semua pihak yang berwenang, kami yakin bahwa perlindungan terhadap perwakafan tanah dan harta benda wakaf akan menjadi kenyataan. Kepercayaan

masyarakat kepada Pemerintah, Nazhir dan PPAIW akan meningkat dan pada gilirannya akan dapat memotivasi umat Islam dalam melaksanakan wakaf untuk kesejahteraan umat.

3. Penyelesaian Perselisihan Perwakafan.

Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui mufakat tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (*mediator*) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa, maka sengketa dibawa kepada badan arbitrase syari'ah. Dalam hal badan arbitrase syari'ah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau Mahkamah Syar'ah.

Adapun wewenang Pengadilan Agama dalam masalah perwakafan tanah ini meliputi masalah-masalah:

- a. Wakaf, Wakif, Ikrar, Nazhir, dan Saksi. Kewenangan di bidang ini menyangkut sah tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan wakif, ikrar, saksi dan nazhir. Dalam hal ini perselisihan banyak didorong oleh faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali tanah (*harta*) yang telah diwakafkan, baik oleh Wakif atau oleh ahli warisnya. Faktor pendorong lainnya antara lain:
 - 1) makin langkanya tanah
 - 2) makin tingginya harga tanah
 - 3) menipisnya kesadaran beragama sehingga sikap serakah dan tamak akan muncul
 - 4) Wakif mewakafkan seluruh atau sebahagian besar hartanya sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rizki dan menjadi terlantar kehidupannya sehingga hal tersebut dapat menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Akibatnya ahli waris mengingkari adanya ikrar wakaf dari orangtuanya dan tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nazhir, atau sama sekali tidak mau melaporkan.

- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf) seperti akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat tanah wakaf, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan tanah wakaf
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpanan penggunaan harta wakaf oleh nazhir dan lain-lain.

Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Perkara Perselisihan Perwakafan Tanah

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa atau pihak-pihak mana yang berhak mengajukan perkara perwakafan dan bagaimana tata cara pengajuannya ke Pengadilan. Ketentuan didalamnya hanya berupa ketentuan bahwa cara penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, melalui mediasi atau arbitrase dan penyelesaian di Pengadilan.

Dengan demikian untuk mengetahui masalah ini terutama tata cara pengajuannya ke Pengadilan Agama, perlu memperbandingkan dan melaksanakan tata cara pengajuan perkara di sekitar masalah perkawinan dan perceraian, serta perkara-perkara lain yang telah berlaku selama ini di Pengadilan Agama, yakni hukum acara perdata Peradilan Agama sebagaimana diatur oleh Pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Jika dilihat dari teori baku Hukum Acara Perdata tentang siapakah yang berhak mengajukan sebuah perkara, maka orang-orang yang berhak mengajukan perkaranya itu sendiri pada dasarnya adalah orang yang ada dan atau merasa berkepentingan dengan perwakafan/ tanah wakaf tersebut. Mereka antara lain:

- b. Wakif atau keluarganya (ahli warisnya)
- c. Wakaf (yang pelaksanaannya dilakukan oleh nazhir)
- d. Wakif (ahli warisnya dan wakaf secara bersama-sama;
- e. Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut
- f. Nazhir atau anak keturunannya.

Di dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 pada Pasal 67 dinyatakan ada ketentuan pidana yang berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukuman pidana dapat dilakukan di Pengadilan Agama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai pengganti Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dibuka peluang Pengadilan Agama mengadili perkara pidana selama masih berkaitan dengan wewenang atau kompetensi absolute Pengadilan Agama, seperti halnya permasalahan wakaf.

Sampai saat ini masih merupakan kemusykilan bagaimana menerapkan sebuah sanksi pidana seperti tertera di atas. Di satu sisi Undang-Undang No 41 Tahun 2004 telah melegalisasi tentang adanya sanksi hukum pidana bagi pelaku yang merugikan harta benda wakaf. Namun disisi lain belumlah jelas bagaimana teknis dan tata cara penyelesaian sengketa, seperti

- a. jika ini merupakan domainnya perkara pidana, Hukum acara apakah yang dipakai? Sebagaimana dimaklumi bahwa yang dipakai sampai saat ini di Pengadilan Agama hanya Acara perdata yang diberlakukan.
- b. Siapakah yang menjadi penuntut dalam kasus perkara di atas, apakah seorang jaksa? Padahal di Pengadilan Agama sampai saat ini belum ada Jaksa Penuntut Umum.

Di samping itu, sampai saat ini belum adanya putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana terhadap perwakafan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-undang Wakaf. Hasil wawancara singkat dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Bapak H. Arso mengatakan bahwa Meski dengan keluarnya Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perluasan kewenangan pengadilan agama, namun sampai saat ini memang belum jelas aturan bagaimana tata cara persidangan yang akan diberlakukan jika ada perkara pidana di Pengadilan Agama, khususnya perkara pidana tentang wakaf¹⁹.

¹⁹ Hasil wawancara singkat tanggal 7 Juni 2007

Sedangkan Peraturan Pemerintah No 42 yang mestinya lebih jelas dan gamblang mengatur hal tersebut diatas malahan hanya memuat sanksi administratif.

Menurut M Yamin Lubis, dari Kom Kumdang MUI Sumut, fokus FGD yang diselenggarakan MUI Sumut adalah tanah wakaf, sehingga diskusi tidak melebar pada wakaf komersial atau pun wakaf produktif. Bagi Pak Yamin, tidak apa-apa, tetapi intinya adalah informasi dari BPN Sumut mengenai prosedur sertifikasi tanah wakaf.²⁰

Pak Yamin juga mengkritisi di sejumlah daerah, terutama di desa-desa banyak berkas pendaftaran tanah wakaf yang sudah dilengkapi, sutar dari camat lengkap, ada tanah wakafnya, ada surat tanah hak miliknya, sudah diukur, tetapi sertifikatnya masih belum keluar, bahkan SK dari BPN saja belum ada. Tidak diketahui prosesnya nyangkut di mana. Padahal sudah 3 bulan dilalui. Belakangan kembali dicek di lapangan dan dicek ke Kanwil BPN Sumut. Padahal seperti dipaparkan, BPN Sumut, sebenarnya bisa cepat dengan biaya Rp.0,-.

Mengenai fungsi wakaf, wakaf itu ada untuk dikelola, sehingga sampai pada diinventarisir asset. Persoalan terjadi pada fungsi wakaf terkait hak tanah, misalnya masjid di USU. Bolehkah diwakafkan? Kalau dikeluarkan oleh USU misalnya, bagaimana dengan gereja? Bagaimana menuntaskan masalah itu? Misalnya, BPN Sumut hanya mengeluarkan hak pakai khusus, lalu bagaimana hak pengelolaan dapat dikeluarkan? Sebagai perbandingan Negara Malaysia, haknya bersertifikat, bagi mereka diadakannya wakaf. Di sana dibuat mudah. Kendati begitu boleh diterima menjadi persoalan. Memang sebaiknya harus diawali dari kerjasama untuk menginventarisir masalah, sehingga baru kemudian dikaji kembali.²¹

Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN SU, Dr. Zulham, M.Hum mengatakan, menanggapi polemik terkait dengan nazir, bahwa UU Wakaf kewenangan untuk pengelolaan wakaf, kepada BWI, secara kelembagaan. Di dalam pasal-pasalanya, UU Wakaf juga memperhatikan

²⁰ Prof. Dr. M Yamin Lubis, SH, MS, CN (Kom Kumdang MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

²¹ M Yamin Lubis, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

kerjasama dengan BPN, bekerjasama dengan Kemenag, sejumlah pihak harus dilibatkan, Lalu, terkait nazir ini ada perbedaan pertanggungjawaban nazhir dan BKM, Nazhir bertanggung jawab kepada BWI, sedangkan BKM tidak bertanggungjawab kepada BWI, tentu juga tidak melaporkan kegiatannya kepada BWI, karena memang kedudukannya berbeda.²² Tanggung jawab BKM dengan nazhir juga berbeda. Nazhir bertanggung jawab kepada BWI karena diatur dengan adanya regulasi. Dari segi independensi, BWI pun berdiri sendiri dan bersifat terpusat, mengatur pertanggungjawaban nazir dan mekanismenya, di samping memang beroleh berkah harta wakaf, juga ada pertanggungjawabannya. Untuk ini, diperlukan sebuah regulasi ulang mengenai pola hubungan nazir, misalnya, terkait BKM dan tanah wakaf. Paling penting adalah menyelesaikan sejumlah masalah, di antaranya masalah administrasi. BWI, MUI, BPN Depag memang perlu duduk bersama untuk berbagi tugas, siapa melakukan apa. Inilah kunci penyelesaian masalah ²³

Menurut Syariful Mahya Bandar, pengembangan wakaf harus berangkat dari pengalaman. Tetapi tidak akan ada pengembangan, sebelum masalah administrasi dapat teratasi. Jadi, penyelesaian masalah administrasi harus perlu didudukkan kembali. Permohonan sertifikasi harus jelas tahapan-tahapannya dan bagaimana Kepala Desa/ Lurah dan Camat juga ikut mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf ini. Untuk itu, perlu dikumpulkan juga untuk sosialisasi. ²⁴

Penyebutan dan perbedaan BKM dan kenazhiran juga memang perlu didudukkan. Penamaan badan kenaziran dan badan kemakmuran akan ditertibkan kembali. Nazhir yang juga duduk di BKM juga ditertibkan, agar tertib wakif. Di masa mendatang, pemahaman bagi anak-anak nazhir mengenai tanah wakaf di kemudian hari juga akan ditindaklanjuti agar tidak menjadi sumber masalah.

²² Dr. Zulham, M.Hum (Dekan Fak Syariah dan Hukum UIN SU), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

²³ Zulham, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

²⁴ Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP (Ketua BWI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Selain itu, permasalahan tanah wakaf selain dipandang dari sisi tugas sebagaimana dijelaskan oleh BPN Sumut, juga memiliki sisi social. Jika dilihat dari sisi social, dinamika social yang terjadi turut menyebabkan munculnya masalah tanah wakaf. Banyak masalah baru ditemukan sampai sekarang. Ada yang membangun rumah di atas tanah wakaf. Ada tanah wakaf yang nazhir sama sekali tidak jelas tugasnya dan tanggung jawabnya selaku nazhir. Ada pula tanah wakaf yang tidak jelas siapa nazirnya. Ada lagi, tanah wakaf yang nazhirnya non Muslim. Pun ada tanah wakaf yang menjadi konflik setelah nazhirnya meninggal, dan ada tanah wakaf yang dibawa ke ranah hukum, BKM dijadikan tertuduh. Seharusnya, bagi nazhir yang diangkat atau dipilih adalah pihak yang dititipkan amanah, sehingga perlu diperhatikan, kenazhiran harus dititipkan kepada yang potensial dan produktif. Sehingga wakaf yang dikelolanya menjadi produktif. Banyak juga nazhir tanah wakaf yang hidup dalam kondisi memprihatinkan bahkan ada yang tinggal di belakang rumah orang. Ada juga nazhir diwariskan turun temurun. Jadi, untuk merubah kenaziran tanah wakaf ini menjadi lebih baik, orang-orang yang dituakan juga perlu bergerak. Selain harus mengatasi berbagai dinamika masalah tanah wakaf dan kenaziran ini, target percepatan sertifikasi tanah wakaf juga tetap terus ditingkatkan, target juga harus dicapai. BWI Pusat telah mencatat sekitar 65 persen sertifikasi telah tercapai. Sementara Sumut masih 40 persen, belakangan agak meningkat, tetapi masih di bawah 50 persen.²⁵

Walau pun jumlah nazhir yang sudah bersertifikat bertambah 50 sertifikat, tetapi data terakhir menunjukkan, nazhir yang sudah bersertifikat sebanyak 8707 nazhir, tetapi nazhir yang belum bersertifikat jumlahnya masih 7500 nazhir. Jadi, sekitar lebih 50 persen nazhir yang sudah bersertifikat. Untuk sertifikasi nazhir ini disiapkan biaya nol rupiah. Tetapi yang menjadi masalah berikutnya adalah biaya ukur dan biaya transportasi. Jika dianalogikan, sepertinya mampu membeli kerbau, tetapi tidak mampu membeli tali. Ini perlu dijelaskan supaya bias meluruskan pemahamannya.²⁶

²⁵ Syariful Mahya Bandar, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

²⁶ Bandar, 2019. *FGD...*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Menurut guru besar USU, OK Saidin, topik yang didiskusikan dalam FGD sangat terkait tanah dan wakaf. Sehingga, sahabatnya seorang Prof. Hilal dari negeri Jiran profil dianggap lebih ahli. Wakaf seharusnya juga berkaitan dengan persoalan sosiologis dan persoalan bersifat komersial. Wakaf produktif seharusnya bisa menjadi basis ekonomi rakyat. Wakaf dapat dikembangkan melalui usaha macam-macam, took, sentra bisnis, beasiswa dan lain-lain sebagainya. Mainset mengenai wakaf sebenarnya perlu dirobah. FGD yang diselenggarakan MUI Sumut ini diharapkan dapat menjadi cikal-bakal perubahan, diharapkan dapat terus dilanjutkan sehingga dapat memberi masukan kepada pemerintah, termasuk penyempurnaan UU Wakaf. Pak Saidin mengaku tidak ahli di bidang wakaf, untuk itu beliau memenuhi undangan MUI Sumut dengan didampingi Prof Hilal yang dianggap lebih ahli dalam bidang itu. "Kita semua perlu dikasih gambaran tentang kenaziran, pengangkatan nazir," ujar OK Saidin.²⁷

Menurut guru besar di salah satu universitas di Malaysia, pentadbiran wakaf di Indonesia. Sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Orang kampung sudah mengenal pengelolaan wakaf secara tradisional. Biasanya, nazhirnya dijalankan seorang Tuan Kadhi dan Imam atau Bilal di suatu masjid. Dalam perkembangannya setelah merdeka, di Indonesia wakaf memiliki suatu hambatan tertentu. Di Malaysia, setiap negeri yang dipimpin seorang Sultan, dan awalnya wakaf ditadbir oleh sultan masing-masing. Pada perkembangannya, Institusi wakaf diletakkan di bawah Majelis Agama Islam (MAI), yang langsung di bawah kuasa Sultan, wakaf tidak diletakkan di bawah federasi. Itu sangat berbeza. Malaysia telah mulai memikirkan isu pendaftaran wakaf sejak era 1990-an. Di masa itu, banyak tanah yang wakaf didaftarkan. Beberapa kali terjadi perubahan kebijakan. Dalam perkembangannya terjalin persetujuan untuk bergabung karena menemukan titik persamaan dalam pengelolaan tanah wakaf ini. Jadi, pentadbir wakaf di bawah kuasa MAI semakin berkembang, kebijakan mengenai wakaf, secara khusus dikelola di bagian jabatan *Ahwal Wakaf Baitul Mal Jauhar*. Tetapi kebijakan di bawah kuasa Sultan atau MAI sifatnya tidak mengikat.

²⁷ OK Saidin (Guru Besar Fakultas Hukum USU), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Tetapi, dari proses kemajuan yang terjadi, dalam jangka waktu 15 tahun sudah semakin banyak yang lepas, tidak di bawah kuasa Sultan tetapi bernaung di bawah MAI. Kendati demikian, untuk sampai ke tahap itu tidak mudah. Awalnya juga melalui proses yang sulit. Diawali di Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Di masa itu, dibentuk akta khusus perbadanan wakaf di negeri Johor, Selangor dan Negeri Sembilan.

Menjadikan setiap wakaf produktif, dilegalkan oleh Negara, juga berniat bergabung kepada MAI. Niat mewakafkan tanah tidak perlu sulit diwujudkan, cukup mengisi borang, lalu diluluskan oleh negeri. Namun, grand tanah tidak akan menjadi tanah wakaf kecuali melewati prosedur, pendaftaran yang ketat dan jika ada perselisihan maka perselisihan harus selesai dulu, baru bisa didaftarkan. Dalam menjalankan fungsi perbadanan wakaf negeri, akta ditetapkan oleh kuasa limitasi pentadbir wakaf. Dalam masalah pemindahan, majelis fatwa yang berhak menentukan hukum *istibdal*. Untuk dapat memperjuangkan adanya tanah wakaf commission, maka isu wakaf harus terlebih dahulu menjadi tren popular.

Peruntukan tanah wakaf tidak saja masjid dan tanah kubur. Tanah wakaf juga dapat dikelola menjadi rumah kedai, disewakan dan hasilnya dimasukkan ke tabung wakaf. Wakaf dipandang sebagai kebaikan orang Islam, jadi harus dikelola menjadi kemashlahatan umat Islam seperti beasiswa, pondok asrama dan dukungan untuk masjid-masjid seperti pembayaran *bill* air. Semuanya wangnya berasal dari dana wakaf itu.

Banyak *case* tanah wakaf ke mahkamah disebabkan oleh kegagalan mewakafkan tanah terjadi pada saat mengisi borang dan mendaftarkan. Pengaturan yang tegas dan bukti yang kuat sangat mendukung sahnya tanah wakaf. Perbincangan musyawarah sesama negeri-negeri seperti Sarawak, Perlis di situasi politik Kerajaan juga tidak bisa dihindari. Apalagi, menyangkut Bandaraya, tidak bisa sedikit salah, *very sensitive*. Sedikit saja ada penyelewangan, bisa membuat geger satu Negara.

Di Malaysia saat ini, wakaf didaftarkan sebagai fungsi komersial, yakni untuk manfaat ekonomi, stasiun bensin staunya wakaf, wakaf masuk ke semua lini, ada perumahan rakyat dijual, kemudian diwakafkan, disewakan, biaya sewanya dikembalikan kepada wakaf. Untuk sampai ke tahap ini, Malaysia membutuhkan proses selama 50 tahun.

Case wakaf di Indonesia banyak terjadi karena Nazhir yang diamahkan sebagai pendabir wakaf. Dulu, di Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Johor, case seperti ini sudah dilalui, seperti case yang hari ini banyak terjadi di Indonesia. Saat ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut mengisiasi untuk menyeragamkan, misalnya *istibdal*, sehingga dapat diikuti dengan fatwa negeri-negeri (provinsi) lain, selanjutnya melangkah ke pentadbir negeri-negeri (provinsi) lain. Arahnya sudah lebih bagus. Memang, ada juga kebijakan mengenai tanah simpanan Melayu yang tidak boleh diwakafkan, tetapi belakangan, Sultan mengizinkan dengan akta khusus. Jadi keseragaman keputusan/*policy* sangat penting untuk mengoptimalkan wakaf, khususnya dalam mengomersialkan wakaf menjadi bernilai ekonomi. Di Malaysia kilang-kilang (pabrik) boleh dari wakaf, gedung membeli-belah (ruko, mall, supermarket) boleh dari wakaf, sehingga setelah dibayar sewa dan gaji operasional, keuntungan bersihnya masuk ke wakaf. Ada pula wakaf untuk manufaktur. Intinya, ada pada kesepakatan. Masalah wakaf di masa lalu, dapat diperbaiki di masa mendatang.

Isu wakaf yang tak kalah penting hingga saat ini adalah, pentadbir (dari tingkat pejabat wakaf hingga nazhir) haruslah orang professional, yang paham, *degree* dalam bidang *finance* memiliki ilmu ekonomi yang mumpuni, setidaknya S1-S2 di bidang *finance* manager, sehingga, diharapkan lebih kreatif mengembangkan idea-idea, akan berbeda jika pentadbir berasal dari ustadz lulusan 'timur,' yang dianggap kurang cakap dalam mengelola keuangan dan memberi *policy* dalam pengembangan komersial wakaf. Pengurus wakaf yang cakap pada *finance* manager dan professional di bidang ekonomi, akan lebih paham pada dinamika dunia komersial, sehingga bisa mengoptimalkan tanah wakaf. Berbeda jika pengurus tidak ada idea kreatif, tidak ada kemampuan mengurus keuangan, tidak punya wawasan mengenai manajemen investasi. Bila perlu mengambil S2 untuk posisi tadbir wakaf, harus didik orang khusus untuk memantapkan keilmuan itu, sehingga pelaksana wakaf adalah ahli ekonomi, ahli keuangan dan ahli mengelola project, orang yang dapat mengelola wakaf sesuai dengan perkembangan dunia, pergerakan dunia global, orang yang dapat merebut saham-saham di New York dari wakaf.

Perlu ditegaskan, ekonomi dunia itu dikendalikan oleh central law, ini merupakan cabaran bagi umat Islam. Dalam beberapa perbincangan

di Jakarta, ketika wakaf mau dikembangkan masing-masing pening mau dibawa ke mana, meskipun ada semangat untuk mengembangkannya.

Selain itu, menyeragamkan *best practice* pengelolaan wakaf dan ketegasan UU sangat penting. MUI Sumut sudah bagus dapat membicarakan wakaf bersama-sama, ini sudah perjuangan. Jadi, boleh berjayakan dulu Provinsi Sumut dalam wakaf, maka yang lain akan ikut ingin berjaya seperti Sumut. Buktinya di Malaysia, dalam 5 tahun, Negeri Selangor, Negeri Sembilan bisa membuktikannya. Memang, nesti ada *champion*, yang menjalankan dulu dengan bersama-sama proaktif dan produktif, meskipun terkadang dibawa ke isu politik untuk kepentingan masing-masing, tetapi itu tantangan, yang pentung Sumut berjaya dulu, sehingga provinsi lain akan lihat dan lebih mudah lagi mengikutinya.²⁸

4. Sertifikasi Tanah Wakaf di Sumatera Utara

Menurut Kanwil Kemenag Sumut, Muhammad al Farabi, tanah wakaf di akhir milenial incaran para pihak pengembang untuk kepentingan bisnis. Karena itu, Kemenag Sumut sejak awal sudah melakukan antisipasi. Tetapi, akhir-akhir ini, permasalahan eksistensi masjid dan tanah wakaf seperti pekuburan memang semakin banyak, termasuk masalah pengelolaan tanah wakaf, masalah administratif. Untuk mengatasi masalah yang banyak itu, memang sangat dibutuhkan kebersamaan dan sinergitas. Kemenag Propsu menyadari tanggung jawab yang berat itu, tetapi untuk meretas itu, harus dimulai dengan mengelola komitmen aparaturnya daerah hingga tingkat kecamatan. Di era Kakanwil sebelumnya, memang sudah pernah dilakukan pembinaan dan sosialisasi mengenai kedudukan BKM termasuk kesejahteraan nazir. Tetapi, seiring waktu berjalan dan telah terjadi perganti Kepala KUA, maka yang tersisa hanya tinggal 30 persen pengurus yang lama. Kepala KUA sudah banyak berganti, SK Nazir pun sudah banyak yang baru.²⁹

Kewajiban Kemenag Sumut antara lain memberikan pemahaman kita nazir dalam perspektif UU Wakaf, bahwa tanah wakaf diamanahkan,

²⁸ Prof. Hilal (Guru Besar dari Malaysia), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

²⁹ Dr. Muhammad al Farabi (Kanwil Kemenag SU), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

sehingga tugas dan tanggung jawab nazhir adalah menjaga wakaf, ada periodisasinya, tidak sekedar menyerahkan amanah kepada amanah orang yang dipercaya yang mempunyai nasab dengan pewakif, dengan pertimbangan tidak hilang hingga akhir hayatnya. Tetapi, banyak juga yang karena kehidupan ekonominya merosot akhirnya diperjualbelikan. Maka UU Wakaf perlu dijadikan acuan, sehingga ketika nazhir meninggal dunia, BWI yang berwenang mengangkat nazhir pengganti, karena begitu perintah Undang-Undang. BWI juga memiliki SOP, selain nazhirnya ada SK dari BWI, juga terpenuhi empat syarat untuk bisa digantinya nazir, misalnya berhalangan tetap atau lainnya.³⁰

Mengenai BKM, memang di-SK-kan sebagai Badan Kemakmuran Masjid. Mereka memiliki tugas dan periodisasi, yakni 3-5 tahun. Memang pernah digagas mengenai Badan Kesejahteraan Masjid, tetapi tidak ada peraturan yang menaunginya. Ada pula Badan Pemerhati Masjid yang diberi tugas menilai, melakukan pembinaan, memikirkan permasalahan masjid. Namun, setelah banyak pergantian Kepala KUA, barangkali banyak yang tidak belajar, di-SK-kan juga. Gagasan awalnya, SK Badan Kesejahteraan Masjid tidak sama dengan kemakmuran. Kesejahteraan masjid dimaksud memiliki unsur idarah, imarah, idayah, yang diharapkan konsepnya dapat dikontekstualkan. Jadi, BKM secara institusi memang membutuhkan tim pemerhati masjid, melakukan penilaian kepada pengelolaan BKM secara paripurna. Di internal Kemenag sebenarnya sudah lengkap materi pembinaan tentang wakaf, karena sejak bertahun-tahun sudah ada DIPA-nya, tercakup di dalam pembinaan masjid. Tetapi, sayangnya, sebagian KUA yang baru tidak mau belajar.³¹

Kemenag Sumut terus mengupayakan melindungi harta benda umat Islam yang disebut wakaf. Salah satu yang diharapkan dapat membantu upaya ini adalah forum nazir, yang dibentuk atas perintah dan instruksi dari Peraturan Bimas Islam, Kemenag RI. Forum nazir merupakan wadah berdiskusi, wadah bermusyawarah sesama nazhir mengenai pengelolaan tanah wakaf, termasuk pemeliharaan harta benda wakaf dan percepatan sertifikasi tanah wakaf ke BPN Sumut. Pengurus Forum Nazhir di Sumut yang sudah di-SK-kan adalah H.

³⁰ Muhammad al Farabi, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

³¹ al Farabi, 2019. *FGD ...* Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

Taufiqurrahman. Forum ini merupakan sebuah gebrakan Kemenag pada tahun 2018. Kemenag memberikan kesempatan kepada setiap forum nazir di daerah masing-masing untuk berlomba-lomba dalam penyertifikatan tanah wakaf. Pada tahun 2018, dana yang alokasikan, untuk tiap 1 persil senilai Rp. 500 ribu, dengan catatan harus membawa kelengkapan administrasi. Jika sudah lengkap baru bisa dibawa ke BPN. Upaya itu telah berjalan di Kabupaten/ Kota se-Sumut. Sebagian ada yang serius dan ada juga acuh tak acuh melaksanakannya, hal itu tampak dari hasil. Misalnya, di Asahan dapat 5 berkas, Binjai hanya dapat 1 berkas. Labuhanbatu 10 persil, yang keluar cuma 1, 9 lagi belum keluar karena syarat belum lengkap dan sudah dicek dan ditelusuri apa masalahnya untuk segera dapat dibincangkan di daerah. Jelasnya, sertifikasi tanah wakaf tetap mendapat prioritas karena menyangkut harta umat Islam.³²

Dalam setahun terakhir (2019) tercatat, sertifikasi tanah wakaf di Sumut antara lain, Paluta tercatat 48 berkas, Tapteng diperoleh 3 berkas, ada juga dari Nias sebanyak 8 berkas. Sehingga sertifikat yang sudah dikeluarkan dari jumlah berkas yang masuk sudah hampir mencapai 40 persen, karena berkas sudah lengkap. Tahun 2019, terus diusahakan untuk mengejar target agar dapat meraih angka 100 persil tanah wakaf, Kemenagsu juga berharap restu dari Baznas.

Di Sumut, dari tahun ke tahun, permohonan sertifikasi terus meningkat, sekarang lebih dari 100 tanah wakaf untuk didaftarkan, beberapa sudah ada yang sampai ke BPN, apalagi dengan ada program PTSL, sehingga sertifikasi jadi terbantu. Tetapi jika dimasukkan ke program tersebut, banyak yang tidak bisa di proses, karena adanya zona. Jadi program pendaftaran tanah dan sertifikasi tanah wakaf seharusnya lebih mudah, hanya perlu memilah yang mana tanah wakaf dan mencocok-cocokkan tahun angkatan.

Dalam mewujudkan komitmen, mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat juga perlu. Sehingga UU tidak selamanya bisa diterapkan secara kaku. Apalagi UU Wakaf memang memungkinkan terjadilah istilah *ruislaag* pertukaran dan pergeseran tanah wakaf. Tetapi jangan sampai UU Wakaf dijadikan pertahanan bagi pengembang, dijadikan alasan bagi pengembang. Di

³² al Farabi, 2019. FGD ... Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

satu sisi, perlu toleransi mengingat pergeseran zaman, diikuti dengan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat. Kendati demikian, di sisi lain pembinaan syariah dan mendudukan fungsi dan menertibkan administrasi administrasi terhadap pejabat KUA eksposio juga memang menjadi catatan perbaikan di masa mendatang.³³

Menurut akademisi dari UMSU Tengku Erwin Syahbana, adanya UU Wakaf menunjukkan bahwa Negara mengakui eksistensi tanah wakaf. Apalagi sudah ada upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf dengan biaya Rp.0,- Tetapi, untuk melihat masalah yang terjadi, memang perlu mundur ke masalah masjid yang pernah menjadi sengketa. Pada kenyataannya, banyak masjid berdiri di asrama tentara, awalnya adalah mushalla, lalu berkembang menjadi masjid. Bahkan ada yang sudah berstatus masjid saat berdiri sejak tahun 1969. Ada juga pada tahun 2000-an menjadi masjid, lalu dikeluarkan dari bagian asrama. Pertanyaannya, bagaimana status masjid tersebut dan perlindungan eksistensinya, bagaimana statusnya? Masalah semacam ini seringkali luput dari perhatian umat Islam, belum lagi masalah melindungi tanah wakaf yang menjadi kasus karena status tanahnya direbut atau datang ahli waris dan kembali memperkarakan tanah tersebut, di bawa ke ranah hukum perdata. Jadi, banyak tanah wakaf yang dalam perjalanan waktu statusnya diotak-atik dan berurusan dengan aparat hukum. Sehingga untuk melindungi eksistensi tanah itu diperlukan diskusi dalam rangka mendiskusikan apa bukti bahwa tanah tersebut adalah wakaf. Apakah hanya sertifikat saja yang bias menjadi alat bukti yang kuat? Lalu bagaimana membuat tanah itu menjadi milik umat tanpa sertifikat? Jangan sampai eksistensi tanah wakaf diruntuhkan tanpa bukti sertifikat. Selain itu, mengenai eksistensi masjid juga belum ada aturan yang tegas. apalagi, jumlah masjid di Sumatera Utara juga tidak ketemu detil berapa jumlahnya. Padahal, dengan perangkat yang dimiliki untuk itu seperti KUA, Kepala Desa atau Lurah, pendataan khusus secara berkala mengenai itu bukan tidak bisa dilakukan. Masalahnya dalah ketidakmauan, jadi bukan masalah yang sulit untuk dilakukan. Seharusnya, data jumlah masjid di tiap Kecamatan hingga tiap Kabupaten/ Kota. Setidaknya, bagi internal Kemenag Sumut sendiri, data masjid sudah tersedia hingga tiap-tiap kecamatan dan

³³ al Farabi, 2019. *FGD...* Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

desa. Umat Islam akan kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah jika data tidak punya, apalagi untuk mendata yang sudah atau belum bersertifikat. Jelasnya, komitmen sangat dibutuhkan dalam rangka membangun program kerja percepatan sertifikasi itu. Diperlukan juga kerjasama antara MUI, Kemenag, Pemerintah Provinsi dan BWI untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf yang bersertifikat dan masjid yang berdiri bukan di atas tanah wakaf.³⁴

Sertifikasi tanah wakaf terkait dengan tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ BPN. Tugas Kementerian ini meliputi pendaftaran tanah, reforma agraria, pengadaan tanah dan pemberantasan mafia tanah. Terkait tugas pendaftaran tanah, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5 juta bidang, tahun 2018 sebanyak 7 juta bidang dan tahun 2019 sebanyak 9 juta bidang. Reforma Agraria yang sudah dilaksanakan tercatat seluas 9 juta hektar. Dari sisi tugas pengadaan tanah, data BPN menyebut pembagiannya terdiri dari untuk pembangkit listrik 35.000 megawatt, jalan tol sepanjang 7.338 kilometer, bandara sebanyak 24, pelabuhan sebanyak 24, Jalur Keretaapi seluas 3.258 km, rumah MBR sebanyak 5 juta unit, waduk sebanyak 49, jaringan irigasi seluas 1.000.000 ha, KEK sebanyak 12 kawasan, Kawasan Industri sebanyak 15 kawasan, stasiun BBG sebanyak 78 unit. Sedangkan tugas dalam pemberantasan mafia tanah tidak terdata. (Sumber: Ikhtisar paparan Menteri ATR/Kepala BPN pada Raker Kementerian ATR/BPN 2018).³⁵

Sumatera Utara dengan luas wilayah 72.981,23 km², terbagi menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan jumlah penduduk 14.725.093 jiwa. Dari luas wilayah tersebut, jumlah bidang tanah terdaftar tercatat sebanyak 1.907.061 bidang dengan perkiraan jumlah bidang tanah 8.026.397 bidang. Sementara jumlah bidang sertifikat tanah wakaf yang

³⁴ Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH, M.Hum (Dosen UMSU), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

³⁵ Bambang Priono, SH, MH. (Kakanwil BPN Provsu), 2019. *Tata Cara Penerbitan Hak atas Tanah Wakaf*, makalah dipresentasikan oleh Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG., dalam Focus Group Discussion (FGD) *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut), Medan, 3 September 2019.

terdata hanya 846 bidang dengan luas bidang Sertifikat Tanah Wakaf 797.161 m² (Kanwil BPN Sumut: Data per Januari 2018)³⁶

Sesuai Permen ATR/ Ka. BPN No. 2 Tahun 2017, untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf pada tanah wakaf dari hak milik, syarat permohonan pendaftaran wakafnya yaitu: Surat Permohonan; Surat Ukur; Sertifikat Hak Milik yang bersangkutan; AIW atau APAIW; Surat Pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama setempat; dan Surat Pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan. Masih mengacu pada Permen ATR/ Ka. BPN No. 2 Tahun 2017, untuk untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf pada tanah wakaf dari HGU, HGB dan HP di atas tanah Negara, syarat permohonan pendaftaran wakafnya yaitu: Surat Permohonan; Surat Ukur; Sertifikat HGU, HGB, HP yang bersangkutan; AIW atau APAIW; Surat Pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama setempat, Surat Pernyataan dari Nazhir bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan; dan Identitas Wakif dan Nazhir. Selanjutnya, syarat permohonan pendaftaran wakaf pada tanah wakaf dari tanah milik adat (pengakuan/ penegasan tanah wakaf), sesuai yang tertuang dalam Permen ATR/ Ka BPN No. 2/2017, adalah: Surat Permohonan; Peta Bidang Tanah; Bukti kepemilikan tanah yang sah; AIW atau APAIW; Surat Pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama setempat; Surat Pernyataan dari Nazhir/ Wakif atau Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan; dan Identitas Wakif dan Nazhir. Berikutnya, syarat permohonan pendaftaran wakaf pada tanah wakaf dari tanah Negara (keputusan pemberian tanah Wakaf) sebagaimana ketentuan Permen ATR/ Ka BPN No. 2/2017, yaitu: Surat Permohonan; Peta Bidang Tanah/ Surat Ukur; Bukti perolehan tanah yang sah; AIW atau APAIW; Surat Pengesahan Nazhir yang bersangkutan dari Kantor Urusan Agama setempat; dan

³⁶ Bambang Priono, SH, MH, 2019. *Tata Cara Penerbitan Hak atas Tanah Wakaf*, makalah dipresentasikan oleh Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG., dalam Focus Group Discussion (FGD) *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut), Medan, 3 September 2019.

Surat Pernyataan dari Nazhir/ Wakif atau Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa/ tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam keadaan sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.³⁷

Lebih Lanjut, Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, BPN Sumut, Obed Milton Simamora, menyampaikan, kemajuan jumlah bidang tanah wakaf dalam dua tahun terakhir adalah berhasil dilakukannya sertifikasi terhadap 123 bidang tanah wakaf di 16 Kabupaten di Sumatera Utara, dari jumlah tersebut di antaranya, Tapteng 32 bidang, Deli Serdang 10 bidang, Langkat 15 bidang, dan Tobasa 2 bidang, sehingga totalnya menjadi 123 bidang tanah wakaf bersertifikat.³⁸

Pertama, Sertifikasi tanah wakaf. Upaya sertifikasi tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat adalah bentuk pembaharuan paham di lingkungan masyarakat muslim Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukan dengan lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintah. Fenomena ini banyak terjadi sebelum UU No. 5 tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977, meski setelah tahun 1980-an pun masih ada juga yang mewakafkan tanahnya tanpa dicatatkan secara resmi.

Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tanah wakaf tersebut didaftarkan pada lembaga pemerintah yang berwenang dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan. Namun kenyataannya banyak sekali tanah wakaf yang tidak didaftarkan dan dengan sendirinya tidak mendapat perlindungan hukum negara, yang ada baru sebatas pencatatan

³⁷ Bambang Priono, SH, MH. (Kakanwil BPN Provsu), 2019. *Tata Cara Penerbitan Hak atas Tanah Wakaf*, makalah dipresentasikan oleh Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG., dalam Focus Group Discussion (FGD) *Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut), Medan, 3 September 2019.

³⁸ Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG (Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, BPN Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

(Pembuatan Akta Ikrar Wakaf) saja oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), bahkan ada yang belum tercatat sama sekali..

Eksistensi tanah wakaf di Indonesia dalam sistem perundang-undangan telah direspon dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) pada bagian XI tentang Hak-hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial. Dalam pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, perwakafan tanah mendapat perhatian, khusus, yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dalam peraturan pemerintah³⁹.

Dan pasal itu jelas sekali bahwa perwakafan tanah dilindungi dan akan mendapat pengaturan dari pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat 3 Undang-Undang tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam pasal 10 sub I Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa: "Setelah Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati / Walikota, Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961"⁴⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah pasal I ditegaskan sebagai berikut: "Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing masing daerah"

Berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, seharusnya setiap tanah wakaf didaftarkan pada lembaga pemerintah yang berwenang, dengan

³⁹ S. Arief, (ed), *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria*, Surabaya :Pustaka Tinta Mas, tt, hal. 27

⁴⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tahun 1977

tujuan untuk mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sesuai dengan Data Departemen Agama tersebut di atas, dalam kenyataannya masih banyak tanah wakaf yang belum tidak terdaftar yang kerap mengundang persoalan-persoalan baru, seperti ahli waris para nazhir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga tidak dikelola dengan baik. Untuk itu perlu sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya.

Kedua, sering terjadi tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga, pengingkaran peristiwa wakaf oleh ahli warisnya, serta permasalahan lain yang muncul dalam pelaksanaan wakaf itu sendiri. Bahkan terjadi pengalihfungsian wakaf tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at maupun ketentuan yang berlaku.

Kejadian-kejadian tersebut di atas dapat menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, di lain pihak terdapat persengketaan-persengketaan tanah yang disebabkan tidak jelasnya status hukum atas tanah wakaf tersebut. Apabila keadaan ini tetap dibiarkan, tidak mustahil akan menimbulkan keengganan masyarakat Islam untuk berwakaf khususnya mewakafkan tanahnya.

Pengalaman dua tahun di BPN Sumut dan bekerja di lapangan, selain membantu pengurusan sertifikat wakaf masjid-masjid juga digunakan untuk menulis tentang wakaf. Dari banyak masjid yang dikunjungi, berbagai ragam cerita mengenai masalah tanah wakaf dan masjid berikut daftar masalah masing-masing, termasuk di antaranya masalah calo tanah wakaf. Pembahasan yang bersifat normatif sudah banyak dilakukan, baik UU No. 5 1960 tentang UUPA, UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 maupun PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tetapi masalah masih berderet panjang di belakangnya. Jelasnya, daftar masalah ada di antara deretan produk hukum yang mengatur mengenai tanah wakaf.

Misalnya masalah nazir, selaku pihak yang menerima harta benda wakaf harus didaftarkan Departemen Agama, BWI dan KUA. Sesuai dengan ketentuan yang ada, BPN pada prinsipnya tidak mau menghalangi proses, tetapi dalam proses percepatan sertifikasi juga

butuh sinergitas dari BWI dan Kementerian Agama. Apalagi dengan dukungan kemajuan teknologi informasi saat ini, kepengurusan juga memungkinkan untuk dapat dilakukan secara online.

Dalam menggugah para nazhir terkadang tidak bisa menggunakan bahasa hukum, karena tanggapan yang sering didengar hanya pengakuan bahwa mereka tidak mengerti dengan peraturan perundang-undangan yang disebutkan, maka petugas dari BPN lebih menggugah mereka dengan bahasa yang lebih sederhana, memberikan pilihan yang mudah. "Mau pilih dipenjara atau ke neraka?" Para nazhir harus diberitahu bahwa tanggung jawab mereka mengandung dua risiko itu, di dunia atau akherat. Sampai di situ, biasanya bisa clear untuk satu poin, agar para nazhir tergerak untuk mengurus sertifikat tanah wakaf.

Di dalam peraturan baru tercantum bahwa, hampir semua jenis tanah bisa diwakafkan, hanya saja, sifatnya ada pihak ketiga yang mengelolanya, misalnya Hak Guna Bangunan, Hak pakai di atas Hak milik. Sehingga saat di lapangan, pemegang hak perlu diteliti kata-katanya, barangkali, setelah HGU diberikan untuk kebun-kebun tersebut, sebagiannya telah diwakafkan dan sebagainya.

Menurut Obed Milton Simamora, dari pengalaman berpindah-pindah tugas di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, hingga terakhir ditugaskan di Sumut, banyak masalah tanah wakaf yang sudah dirangkum dan dapat dipaparkan dalam FGD yang digelar MUI Sumut itu. Namun, hal yang paling mengejutkannya, setelah ditugaskan di Sumut ia baru menemukan ada masjid menggugat ke pengadilan dan masjidnya malah kalah. Sejauh yang ia ketahui, itu baru terjadi di Indonesia. "Di sini, hebat sekali, tetapi saya malu mendengarnya, tidak pernah terpikirkan selama ini ada masjid yang menggugat ke pengadilan dan kalah," tukas Obed.

Untuk itu, Obed menekankan perlunya kehati-hatian dalam mewakafkan tanah, apalagi untuk masjid. Umat Islam perlu belajar dari pengalaman. Artinya, kenapa bisa kalah, karena adanya kelemahan dari sisi administrasi, bukan dari sisi fisik.

Selain membuat daftar masalah wakaf, BPN juga telah melakukan banyak diskusi terkait latar belakang dan penyebab munculnya masalah tanah wakaf. "Salah satu penyebab munculnya masalah pada tanah wakaf adalah karena pewakif atau ahli waris imannya berkurang atau ekonominya merosot," terang Obed.

Pengalaman masalah yang pernah dihadapi, contoh Obed, sebidang tanah wakaf yang sudah dalam proses disertifikatkan, ada Akta Ikrar Wakafnya. Namun kemudian, masalahnya adalah ahli warisnya tidak beragama Islam, sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai pewakif.

Masalah lain yang perlu dikaji adalah mengenai wakaf terkait pendidikan tentang wakaf. Masalah bisa sederhana jika ada menemukan akta ikrar dan ada barang wakafnya, maka selesai. Terkadang, ada anak yang tidak mengetahui pada saat orang tua mewakafkan tanah, atau itu dilakukan hanya secara lisan, walaupun diketahui semua orang, tetapi bila iman dan ekonomi si anak merosot, maka sewaktu-waktu muncul masalah. Anak mengharapkan tanah yang sudah diwakafkan tersebut bisa balik ke mereka. Di awal saat mewakafkan tampaknya sederhana, tetapi kejadiannya tidak seperti itu di belakang hari. Selain, ada akta, aspek lain juga perlu dikaji secara mendalam, menyangkut potensi masalah tanah wakaf yang dapat digugat kembali oleh ahli warisnya.

Dari sisi peruntukan harta benda wakaf potensi masalah juga terjadi ketika dinamika sosial berubah, misalnya masuk ke kawasan pemukiman, perindustrian, POM bensin dan sebagainya, sehingga pemindahan, penggantian tanah dan pembangunan kembali, serta tukar guling masih terbuka untuk dilakukan dan sangat memungkinkan. Selain memperhatikan perubahan sosial, peruntukan juga harus memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat luas, serta dampaknya pada kelanggengan lingkungan. Jelasnya, peruntukan harus membawa pada kedamaian, peruntukan perlu mempertimbangkan potensi masalah yang muncul dan tetap menjaga sistem lingkungan dan keakuran dalam kehidupan sosial.

Mengenai soal kelengkapan dokumen, masalah tidak diprosesnya sertifikasi wakaf bukan terletak pada uang. BPN sudah punya anggaran untuk melakukan percepatan sertifikasi. Tetapi, masalahnya terkadang datang dari pewakif yang akan mewakafkan tanah. Pengalaman yang pernah dihadapi BPN adalah, saat menyerahkan dokumen, ternyata surat yang diberikan bukan hak milik dia, tetapi surat tanah orang lain. Lalu kemudian BPN dikatakannya terus mempersulit sertifikasinya. Padahal, ketidakkelengkapan dokumen tersebut yang membuat sertifikasi tersebut tidak dapat dilakukan oleh BPN. Jelasnya,

kelengkapan dokumen sangat menolong terjadinya percepatan sertifikasi tanah wakaf.⁴¹

Dalam forum FGD yang digelar oleh MUI Sumut yang melibatkan instansi lain terkait wakaf, BPN mengharapkan agar dijadikan model pembahasan yang dapat merinci bagian masing-masing dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Pada intinya, BPN Sumut, dengan terselenggaranya FGH tersebut, akan semakin banyak permohonan sertifikasi yang masuk ke BPN Sumut. Selain itu, BPN Sumut berpesan kepada para pewakif agar memperhatikan batas-batas tanah yang diwakafkan, menjaga kondisi fisik tanah wakaf tersebut agar tetap aman. Sehingga tidak berpikir soal uang yang akan dikeluarkan. BPN Sumut sangat komitmen untuk melindungi masjid dari konflik dengan membantu sertifikasinya. Bagi BPN Sumut, terutama untuk eksistensi masjid, sebaiknya pintu masuk pengacara perlu dikurangi. Justeru, bagi BPN Sumut, semakin banyak permohonan sertifikasi tanah wakaf untuk masjid yang masuk ke BPN, malah semakin bagus.

Jelasnya, tanah wakaf ada, jelas siapa wakifnya, dokuemnnnya lengkap, sudah ada tim yang mengeceknya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat dengan nilai biaya Rp.0,-⁴²

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan mengungkapkan, di Kota Medan 5 tahun terakhir ini terjadi masalah besar ketika harga tanah sangat mahal sehingga banyak yanah-tanah yang sebenarnya dianggap oleh hukum Islam itu tanah wakaf tapi karena tidak ada alas hukumnya, maka usaha orang tertentu sangat mudah menggulingkan status tanah dengan menjualnya dengan pihak asing dan dijadikan perumahan. Bahkan Masjid yang sebelumnya sudah ada dibongkar dengan alasan tidak diperlukan lagi karena umat Islamnya sudah tidak ada.⁴³

⁴¹ Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG (Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, BPN Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁴² Obed Milton Simamora, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁴³ *Banyak Tanah Wakaf di Sumut Belum Punya Sertifikat*, MUI Medan, 25 November 2018, diakses dari <https://muimedan.orid/2018/11/25/banyak-tanah-wakaf-di-sumut-belum-punya-sertifikat/>

Banyak pula tanah wakaf digugat ahli waris dari orangtua yang mewakafkan sebelumnya, sehingga tanah disita pengadilan karena penggugat memenangkan kasus. Sedangkan nazir tidak ada bukti dan saksi serta jadi peluang ahli waris menuntut.

Nahar A Abdul Ghani memaparkan, istibdal merupakan solusi akhir bagi harta benda wakaf yang tidak lagi memberikan manfaat dan dampak istibdal terhadap harta benda wakaf yakni sebagai sarana jaminan sosial umat Islam. "Istibdal dalam hukum Islam dibolehkan. Di masyarakat banyak dijumpai kualitas hidup yang masih minim sehingga memang harus diperhatikan, karena kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja," imbuhnya.⁴⁴

Ketua Yayasan Pesantren Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam, Hamidah Tanjung, membenarkan akibat kelalaian dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf berdampak kepada sengketa. Ia mengakui lahan Yayasan Pesantren Asrama Putri dan Rumah Sakit Bersalin Islam merupakan tanah wakaf dahulu saat ini sedang sengketa di pengadilan. "Taulah di sini banyak ibuibu pengurus, merasa aman saja karena ini tanah wakaf. Rupanya ada oknum tertentu yang ingin menguasainya. Makanya kita tuntutan, dan saat ini sudah masuk ke pengadilan," katanya.⁴⁵

⁴⁴ *Banyak Tanah Wakaf Belum Punya Sertifikat*, Analisa, Senin, 26 November 2018, diakses dari

<http://harian.analisadaily.com/kota/news/banyak-tanah-wakaf-belum-punya-sertifikat/654438/2018/11/26>

⁴⁵ *Hanya 3% Tanah Wakaf di Medan Miliki Sertifikasi*, Koran Sindo, 1 Agustus 2016, diakses dari http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-01/5/40/Hanya_3_Tanah_Wakaf_di_Medan_Miliki_Sertifikasi

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Deli Serdang - Sumatera Utara⁴⁶

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Hamparan Perak	39	0,96	38	0,94	1	0,02
2. Labuhan Deli	66	3,50	60	2,59	6	0,91
3. Sunggal	63	2,90	7	0,26	56	2,65
4. Deli Tua	32	12,68	14	1,96	18	10,72
5. Patumbak	41	2,86	7	0,33	34	2,53
6. Percut Sei Tuan	111	53,44	82	49,89	29	3,55
7. Biru-Biru	45	2,27	34	0,89	11	1,39
8. Kuta Limbaru	23	1,24	12	0,24	11	1,00
9. Namo Rambe	18	1,11	1	0,02	17	1,09
10. Pancur Batu	38	2,98	16	0,61	22	2,37
11. Sibolangit	11	0,72	0	0,00	11	0,72
12. Galang	35	2,10	0	0,00	35	2,10
13. Batang Kuis	34	0,90	34	0,90	0	0,00
14. Pantai Labu	54	3,00	39	1,18	15	1,82
15. Tanjung Morawa	42	2,66	31	0,64	11	2,03
16. Lubuk Pakam	42	1,94	39	1,29	3	0,66
17. Gunung Meriah	1	0,01	0	0,00	1	0,01
18. Bangun Purba	62	2,15	33	0,94	29	1,21
19. Snb. Tanjung. Md. Hulu	10	1,67	0	0,00	10	1,67
20. Snb. Tanjung. Md. Hilir	21	0,50	4	0,06	17	0,44
21. Pagar Merbau	24	3,23	0	0,00	24	3,23
22. Beringin	74	3,07	52	1,83	22	1,24
Jumlah	886	105,90	503	64,54	383	41,36

⁴⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI), *Jumlah Tanah Wakaf...*, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=aDY5SzVGOUhyL3jiTllqdVdVTkdSZz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Karo – Sumatera Utara⁴⁷

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Kabanjahe	11	0,75	6	0,60	5	0,14
2. Tiga Binanga	18	1,25	11	0,78	7	0,47
3. Juhar	17	0,76	7	0,25	10	0,51
4. Mardingding	10	0,61	9	0,59	1	0,02
5. Munthe	31	1,95	9	0,59	22	1,36
6. Payung	13	0,45	2	0,07	11	0,38
7. Simpang Empat	11	0,67	8	0,41	3	0,26
8. Kuta Buluh	9	0,53	0	0,00	9	0,53
9. Tiga Panah	5	0,41	3	0,25	2	0,16
10. Barus Jahe	2	0,04	0	0,00	2	0,04
11. Brastagi	8	1,22	5	0,58	3	0,64
12. Merek	3	0,23	1	0,12	2	0,11
13. Lau Baleng	10	1,77	10	1,77	0	0,00
14. Dolat Rakyat	1	0,02	0	0,00	1	0,02
15. Merdeka	4	0,14	2	0,07	2	0,07
16. Tiganderket	13	0,85	2	0,17	11	0,68
17. Naman Teran	4	0,32	2	0,29	2	0,03
Jumlah	170	11,96	77	6,54	93	5,42

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeDjQT09&_kid=bVhQRHBPR2Zxa0Nwa092UUFST0N6UT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Langkat - Sumatera Utara⁴⁸

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Gebang	45	5,26	42	5,13	3	0,13
2. Besitang	56	7,89	39	3,85	17	4,04
3. Pangkalan Susu	76	15,53	40	5,99	36	9,53
4. Babalan	71	8,06	60	5,82	11	2,24
5. Stabat	74	5,26	71	5,13	3	0,13
6. Padang Tualang	56	138,81	50	136,78	6	2,03
7. Hinai	47	6,58	46	5,69	1	0,89
8. Secanggang	50	6,09	50	6,09	0	0,00
9. Tanjung Pura	109	12,34	106	11,61	3	0,73
10. Sei Bingai	52	3,72	47	3,45	5	0,27
11. Binjai	62	6,51	62	6,51	0	0,00
12. Selapian	46	1,73	32	1,23	14	0,50
13. Kuala	55	2,44	50	2,30	5	0,14
14. Selesai	69	8,37	67	7,90	2	0,47
15. Bahorok	69	5,27	41	2,81	28	2,46
16. Sei Lapan	39	5,21	33	4,84	6	0,38
17. Berandan Barat	56	21,85	37	20,17	19	1,69
18. Batang Serangan	35	2,94	13	0,92	22	2,02
19. Sawit Seberang	22	2,22	18	2,07	4	0,16
20. Wampu	71	5,52	70	5,50	1	0,02
21. Serampit	0	0,00	0	0,00	0	0,00
22. Kutambaru	0	0,00	0	0,00	0	0,00
23. Pematang Jaya	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	1.160	271,59	974	243,77	186	27,81

⁴⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf*, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=Tys1YXM0YTJkYmZjaWNVTjBFRnBdz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Tapanuli Tengah - Sumatera Utara⁴⁹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]
1. Sibolga	43	12,75	39	4,48	4	8,26
2. Lumut	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Sorkam	23	2,68	23	2,68	0	0,00
4. Barus	28	1,74	19	1,11	9	0,62
5. Mandua Mas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Koalang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Sibabangun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Tapan Nauli	12	0,60	9	0,54	3	0,06
9. Andam Dewi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Sirandorung	4	0,21	2	0,13	2	0,08
11. Sosor Gadong	13	3,08	6	0,27	7	2,82
12. Sorkam Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13. Sitahuis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Tukka	15	1,98	15	1,98	0	0,00
15. Badiri	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16. Barus Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17. Pasaribu Tobing	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18. Sarudik	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19. Suka Bangun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20. Pinang Sori	24	4,31	23	3,45	1	0,86
Jumlah	162	27,35	136	14,65	26	12,70

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAyb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=dXZuWUdpVEowdkFiOGZxTWhtc2ZGZz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Simalungun - Sumatera Utara⁵⁰

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Siantar	40	4,25	40	4,25	0	0,00
2. Jorlang Hataran	15	2,04	9	1,68	6	0,36
3. Sidamanik	25	2,77	17	2,05	8	0,72
4. Dolok Perdamean	7	0,40	4	0,23	3	0,17
5. Raya	15	1,70	9	0,75	6	0,96
6. Paneli	17	2,93	16	2,90	1	0,02
7. Silimakuta	4	0,97	2	0,46	2	0,51
8. Dolok Silau	5	0,31	4	0,27	1	0,04
9. Purba	1	0,43	1	0,43	0	0,00
10. G.S. Bolon	6	0,49	3	0,41	3	0,08
11. Bosar Maligas	59	5,33	16	1,71	43	3,62
12. Dolok Panribuan	9	9,33	9	9,33	0	0,00
13. Tanah Jawa	79	17,92	42	4,24	37	13,68
14. Raya Kahean	15	1,48	12	1,28	3	0,20
15. Silau Kahean	27	2,41	5	0,34	22	2,08
16. Dolok Bt. Nanggar	92	8,64	91	8,61	1	0,03
17. Bandar	84	12,95	81	11,31	3	1,65
18. Pematang Bandar	38	6,82	38	6,82	0	0,00
19. Huta Banyuraja	22	4,83	16	3,85	6	0,98
20. Ujung Padang	67	4,63	7	0,61	60	4,02
21. Tapian Dolok	66	9,35	64	9,23	2	0,11
22. Gunung Malela	58	7,34	58	7,34	0	0,00
23. Gunung Maligas	42	6,38	34	5,99	8	0,39
24. Bandar Masilam	33	8,76	32	8,47	1	0,29
25. Jawa Maraja Bahjambi	15	1,82	9	0,94	6	0,88
26. Hatonduhan	33	3,79	16	1,64	17	2,15
27. Pematang Sidamanik	26	2,29	19	2,06	7	0,23
28. Panombelan Paneli	4	0,96	4	0,96	0	0,00

⁵⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=cjU3ZnNZUFIRdm4xTHdwU3hUR1hkdz09

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
29. Harangaol Horison	1	0,07	1	0,07	0	0,00
30. Bandar Hulan	76	7,59	42	4,43	34	3,16
31. Pematang Slimahuta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	981	138,99	701	102,69	280	36,31

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Labuhan Batu - Sumatera Utara⁵¹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Bilah Hulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Bilah Hilir	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Panai Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Panai Hilir	82	3,09	31	1,07	51	2,02
5. Rantau Utara	11	0,29	0	0,00	11	0,29
6. Rantau Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Pangkatan	3	0,12	0	0,00	3	0,12
8. Bilah Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Panai Hulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	96	3,51	31	1,07	65	2,43

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=eTJTMTJvbThwN0dyYTDGdEZUTXVwUT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Dairi - Sumatera Utara⁵²

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Sidikalang	21	2,86	5	0,48	16	2,38
2. Siempat Nempu	14	5,15	1	0,00	13	5,15
3. Sumbul	13	1,75	1	0,14	12	1,61
4. Tanah Pinem	5	0,28	1	0,03	4	0,26
5. Tingga Lingga	3	0,50	0	0,00	3	0,50
6. Silima Punga-Punga	3	0,50	0	0,00	3	0,50
7. Sempat Nempu Hulu	15	8,71	1	1,92	14	6,79
8. Perbuluan	8	0,59	0	0,00	8	0,59
9. Pegagan Hilir	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Sempat Nempu Hilir	4	0,19	0	0,00	4	0,19
11. Lae Parira	3	0,20	2	0,16	1	0,04
12. Berampau	1	0,04	0	0,00	1	0,04
13. Gunung Sتمبر	19	1,43	0	0,00	19	1,43
14. Silahi Sabungan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Sitinjo	1	0,04	0	0,00	1	0,04
Jumlah	110	22,25	11	2,74	99	19,52

⁵² Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpsTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=VkfMSE1RVEduanV6ZGdja0NwZ0VWdz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Tapanuli Utara - Sumatera Utara⁵³

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Tarutung	12	2,03	5	0,23	7	1,80
2. Garoga	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Pahaé Jaa	27	7,21	8	0,56	19	6,65
4. Pahaé Julu	7	2,22	1	0,13	6	2,09
5. Pangaribuan	7	0,59	5	0,25	2	0,34
6. Sipahutar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Pagaran	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Adian Koting	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Si Borong-Borong	3	0,36	3	0,36	0	0,00
10. Simangumban	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Purba Tua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Siatas Barita	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	56	12,40	22	1,52	34	10,88

⁵³ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=aWwzRXgzMTdrY2NoOUNEcE55ZEtnUT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Tapanuli Selatan - Sumatera Utara⁵⁴

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Batang Toru	52	5,72	4	0,17	48	5,55
2. Saipar Dolok Hole	2	0,23	2	0,23	0	0,00
3. Batang Angkola	95	10,62	62	6,82	33	3,80
4. Sipirok	129	16,50	91	8,44	38	8,06
5. Arse	15	2,48	0	0,00	15	2,48
6. Sayur Matinggi	13	2,20	12	1,30	1	0,90
7. Marancar	43	9,04	0	0,00	43	9,04
8. Aek Bilah	15	3,01	0	0,00	15	3,01
9. Angkola Barat	5	0,12	0	0,00	5	0,12
10. Angkola Timur	18	15,43	13	10,10	5	5,34
11. Angkola Selatan	7	0,55	6	0,42	1	0,13
12. Muara Batang Toru	3	1,14	0	0,00	3	1,14
13. Tantom Angkola	11	0,61	7	0,35	4	0,26
14. Angkola Sangkunar	3	0,30	0	0,00	3	0,30
Jumlah	411	67,95	197	27,83	214	40,12

⁵⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf*, http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTGi4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=NENWWklhai9kdGllNTBvaWlwdFR3dz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Asahan - Sumatera Utara⁵⁵

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Sei Kepayang	50	10,13	29	2,80	21	7,33
2. Air Joman	99	17,25	92	16,62	7	0,64
3. Simpang Empat	63	11,06	52	6,11	11	4,95
4. Air Batu	55	4,84	52	4,31	3	0,53
5. Buntu Pane	48	4,33	40	3,80	8	0,53
6. Pulau Rakyat	53	6,50	28	3,55	25	2,96
7. Bandar Pulau	32	5,95	7	0,78	25	5,18
8. Bdr. Pasir Mandoge	46	6,82	45	6,53	1	0,29
9. Tanjung Balai	66	16,40	56	15,29	10	1,11
10. Kisaran Barat	59	4,78	55	4,58	4	0,20
11. Kisaran Timur	63	6,59	58	5,49	5	1,09
12. Meranti	23	1,48	20	1,26	3	0,22
13. Sei Dadap	40	4,32	40	4,32	0	0,00
14. Aek Kuasan	58	8,29	32	4,07	26	4,22
15. Sei Kepayang Barat	23	1,35	14	0,65	9	0,70
16. Aek Ledong	48	4,86	25	1,90	23	2,96
17. Aek Songsongan	23	4,62	3	0,41	20	4,21
18. Pulo Bandring	45	3,80	43	3,70	2	0,10
19. Rahuning	12	1,07	9	0,91	3	0,16
20. Rawang Panca Arga	38	5,78	34	4,88	4	0,90
21. Setia Janji	23	2,77	20	2,01	3	0,76
22. Silau Laut	76	16,45	73	16,06	3	0,39
23. Teluk Dalam	34	5,22	30	4,31	4	0,91
24. Tinggi Raja	71	7,20	62	5,82	9	1,39
25. Sei Kepayang Timur	43	15,27	27	8,53	16	6,74
26. Sei Dpinjamp	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	1.191	177,14	946	128,69	245	48,45

⁵⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=dDZOQUJLbVhVRGlZVW1mNUw4aC5vUT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Toba Samosir - Sumatera Utara⁵⁶

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Nassau	1	0,00	0	0,00	1	0,00
2. Balige	7	0,34	3	0,17	4	0,16
3. Habinsaran	3	0,30	0	0,00	3	0,30
4. Porsea	15	0,78	11	0,52	4	0,26
5. Lumban Julu	6	0,69	4	0,35	2	0,34
6. Ajibata	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Borbor	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Laguboti	2	0,08	2	0,08	0	0,00
9. Pintu Pohan Meranti	6	0,27	0	0,00	6	0,27
10. Siantar Namuronda	5	0,20	3	0,12	2	0,09
11. Sigumpar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Silaen	1	0,08	1	0,08	0	0,00
13. Tampahan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Uluan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Parmaksian	6	0,25	4	0,17	2	0,08
16. Banatua Lunasi	1	0,00	1	0,00	0	0,00
Jumlah	53	2,99	29	1,49	24	1,50

⁵⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDcEdjQT09&_kid=V1BxS21RM2dMWkFvdDZlZ09zdkjVQT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Mandailing Natal - Sumatera Utara⁵⁷

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
	Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Bantahan	33	523,00	0	0,00	33	523,00
2. Muara Batang Gadis	28	10,51	1	0,07	27	10,44
3. Siabu	79	25,45	38	6,70	41	18,75
4. Panyabungan	161	21,69	102	12,46	59	9,23
5. Kotanopan	121	16,31	23	2,67	98	13,64
6. Muara Sipongi	69	9,05	38	2,75	31	6,30
7. Natal	79	32,50	32	2,70	47	29,80
8. Batang Natal	71	18,22	0	0,00	71	18,22
9. Bukit Malintang	20	1,54	9	1,11	11	0,43
10. Penabungan Utara	49	4,19	9	0,73	40	3,46
11. Penabungan Timur	53	6,88	4	0,03	49	6,85
12. Penabungan Barat	38	8,14	15	0,38	23	7,76
13. Penabungan Selatan	73	5,87	8	0,87	65	5,00
14. Lembah Sorik Merapi	77	7,72	20	2,26	57	5,46
15. Tambangan	89	11,17	22	4,66	67	6,51
16. Ulu Pungkut	46	14,75	0	0,00	46	14,75
17. Lingga Bayu	41	10,18	14	1,20	27	8,97
18. Ranto Baek	25	1,84	12	0,57	13	1,27
19. Huta Bargot	54	11,21	1	0,12	53	11,09
20. Puncak Sorik Marapi	53	25,96	2	0,03	51	25,93
21. Pakantan	33	4,26	0	0,00	33	4,26
22. Sinunukan	39	21,59	3	2,74	36	18,86
23. Nagajuang	4	1,17	0	0,00	4	1,17
Jumlah	1.335	793,21	353	42,06	982	751,16

⁵⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Nias - Sumatera Utara⁵⁸

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Indano Gawo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Gunung Sitoli	57	3,96	34	2,48	23	1,48
3. Tuhemberua	1	0,05	1	0,05	0	0,00
4. Mandrehe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Gido	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Alasa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Lahewa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Sirombu	6	0,72	6	0,72	0	0,00
9. Huliduhu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. L. Moi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	64	4,73	41	3,25	23	1,48

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara⁵⁹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Padang Hulu	18	0,74	0	0,00	18	0,74
2. Padang Hilir	30	1,28	0	0,00	30	1,28
3. Rambutan	34	4,04	0	0,00	34	4,04
4. Tebing Tinggi Kota	11	0,22	0	0,00	11	0,22
5. Bajenis	17	0,70	14	0,61	3	0,09
Jumlah	110	6,98	14	0,61	96	6,38

⁵⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=WktGUzhRVEdUNndra0M3ZFdyQINDUT09

⁵⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=Y05qSIUvdXZMbW4xb1NYMURRbkQ3QT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Binjai - Sumatera Utara⁶⁰

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Binjai Kota	35	1,57	30	1,34	5	0,24
2. Binjai Selatan	60	1,18	58	1,15	2	0,03
3. Binjai Utara	99	2,46	96	2,42	3	0,04
4. Binjai Timur	40	2,50	38	2,42	2	0,08
5. Binjai Barat	54	0,91	53	0,91	1	0,00
Jumlah	288	8,62	275	8,24	13	0,39

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Pematang Siantar - Sumatera Utara⁶¹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Siantar Timur	16	0,84	14	0,78	2	0,07
2. Siantar Selatan	5	0,12	5	0,12	0	0,00
3. Siantar Barat	43	4,21	42	4,17	1	0,04
4. Siantar Utara	22	2,62	20	2,56	2	0,06
5. Siantar Marihat	21	1,09	20	1,05	1	0,04
6. Siantar Martoba	48	4,58	48	4,58	0	0,00
7. Siantar Sitalasari	35	4,12	32	3,99	3	0,12
8. Siantar Marimbun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Siantar Maribun	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	190	17,58	181	17,24	9	0,34

⁶⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=QzM2M1Fad0hkeForWGdUWFliQ2xqd z09

⁶¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=dkx6Mzj jR0dLdzBl eE9YN3psUVhtZz09

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Tanjungbalai - Sumatera Utara⁶²

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Tanjungbalai Selatan	24	4,06	21	2,43	3	1,62
2. Tanjungbalai Utara	8	0,29	8	0,29	0	0,00
3. Datuk Bandar	49	1,42	41	1,18	8	0,24
4. Sei Tualang Raso	18	0,59	16	0,45	2	0,14
5. Teluk Nibung	51	3,79	22	1,05	29	2,74
6. Datuk Bandar Timur	46	22,35	19	0,94	27	21,40
Jumlah	196	32,49	127	6,35	69	26,15

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Sibolga - Sumatera Utara⁶³

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Sibolga Kota	10	0,43	8	0,28	2	0,15
2. Sibolga Selatan	13	0,64	13	0,64	0	0,00
3. Sibolga Utara	8	0,26	8	0,26	0	0,00
4. Sibolga Sambas	8	0,38	8	0,38	0	0,00
Jumlah	39	1,72	37	1,57	2	0,15

⁶² Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeDjQT09&_kid=M1JFWVFwYm8xM2JOQTlza0hyNzI3UT09

⁶³ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeDjQT09&_kid=R1gzajlrM1lON29KWGHxbGhqSIRvUT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Medan - Sumatera Utara⁶⁴

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Medan Kota	42	1,50	42	1,50	0	0,00
2. Medan Barat	18	2,05	18	2,05	0	0,00
3. Medan Baru	19	1,80	18	1,80	1	0,00
4. Medan Timur	78	3,63	58	2,63	20	0,99
5. Medan Belawan	2	0,16	0	0,00	2	0,16
6. Medan Labuhan	61	31,13	35	2,29	26	28,84
7. Medan Deli	6	0,30	6	0,30	0	0,00
8. Medan Sunggal	36	3,18	26	2,75	10	0,43
9. Medan Tuntungan	21	1,55	19	1,08	2	0,48
10. Medan Denai	12	0,56	8	0,36	4	0,21
11. Medan Johar	37	4,05	37	4,05	0	0,00
12. Medan Amplas	65	5,72	50	5,41	15	0,32
13. Medan Tembung	74	17,42	61	2,33	13	15,10
14. Medan Helvetia	41	4,05	32	2,05	9	2,00
15. Medan Petisah	26	3,85	21	1,02	5	2,83
16. Medan Polonia	5	0,52	5	0,52	0	0,00
17. Medan Maimun	30	5,57	30	5,57	0	0,00
18. Medan Selayang	5	1,14	5	1,14	0	0,00
19. Medan Area	129	3,58	103	2,67	26	0,92
20. Medan Perjuangan	18	1,40	16	1,16	2	0,24
21. Medan Marelan	74	5.988,11	43	2,20	31	5.985,92
Jumlah	799	6.081,31	633	42,88	166	6.038,42

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeDjQT09&_kid=a2lTeFpmMTU1eWk5MW5MN2U5RDlZQT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Padang Sidempuan - Sumatera Utara⁶⁵

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]
1.	P.Sidempuan Tenggara	33	4,50	26	2,61	7	1,89
2.	P.Sidempuan Batunadua	4	1,17	0	0,00	4	1,17
3.	P.Sidempuan Hutaimbara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	P.Sidempuan Angkola Julu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	P.Sidempuan Utara	87	3,52	62	2,63	25	0,90
6.	P.Sidempuan Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah		124	9,19	88	5,24	36	3,95

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Serdang Bedagai - Sumatera Utara⁶⁶

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
			Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1.	Pegajahan	59	3,28	21	0,33	38	2,96
2.	Sei Bamban	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Tebing Syahbandar	13	0,84	13	0,84	0	0,00
4.	Bintan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Silindak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Serba Jadi	10	0,92	8	0,84	2	0,08
7.	Sei Rampah	38	5,87	38	5,87	0	0,00
8.	Perbaungan	84	64,15	13	0,86	71	63,30
9.	Tebing Tinggi	52	8,60	31	2,34	21	6,26

⁶⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=c0lpOERYd3dIVGpOVHFIWC83REpWdz09

⁶⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=L0RrNVRud0RUk1BFd0hiWmZtSjFIZz09

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
10. Dolok Masihul	7	1,30	3	1,24	4	0,06
11. Pantai Cermin	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12. Teluk Mengkudu	15	1,04	8	0,41	7	0,63
13. Dolok Merawan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14. Sipispis	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15. Kotarih	15	0,81	5	0,13	10	0,68
16. Tanjung Beringin	18	1,71	2	0,09	16	1,62
17. Bandar Khalifah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	311	88,52	142	12,95	169	75,57

Sumber data lain (2006/2007) menyebutkan, objek tanah wakaf yang ada di Serdang Bedagei tersebar di 961 lokasi meliputi sebelas kecamatan yaitu; Sei Rampah, Perbaungan, Tebing Tinggi, Dolok Masihul, Pantai Cermin, Teluk Mengkudu, Dolok Merawan, Sipis-Pis, Kotarih, tanjung Beringin, dan Bandar Khalifah. Luas tanah wakaf di kabupaten Serdang Bedagei seluas 1.711.589,4 M2. yang sudah bersertifikasi sejumlah 437.140 M2 atau sekitar 25,5%. Dalam proses BPN ada 22 lokasi dengan luas tanah 38292 M2 (2.2%). Dari keseluruhan objek harta wakaf yang berupa tanah di

Kabupaten Serdang Bedagei dipergunakan untuk:

1. Masjid : 353 lokasi (211713,15 M²)
2. Langgar/ Mushalla : 284 lokasi (88058,61 M²)
3. Madrasah/Sekolah : 113 lokasi (1032747,21 M²)
4. Kuburan/Makam : 208 lokasi (654906,5 M²)
5. Rumah Suluk : 1 lokasi (1.820 M²)
6. Lapangan : 1 lokasi (6.610 M²)
7. Sosial : 4 lokasi (474140 M²)
8. Kantor Depag : 1 lokasi (3040 M²)
9. Pondok Pesantren : 1 lokasi (1200 M²)
10. Petapaan : 2 lokasi (1800 M²)

11. TPQ : 1 lokasi (750 M²)
12. Balai Nikah : 1 lokasi (400 M²)

Sosial lainnya yang dimaksud adalah rumah suluk, lapangan. Berdasarkan luas tanah, wakaf di Kecamatan Serdang Bedagei bisa dibagi kedalam tiga katagori:

- (1) tanah wakaf yang sempit, seluas kurang lebih 200 M², yang hanya cukup untuk tempat ibadah,
- (2) tanah wakaf yang agak luas, dimana ditanah itu selain tempat ibadah juga untuk kegiatan lain seperti pendidikan dan kesehatan.
- (3) Tanah wakaf yang luas, yaitu tanah wakaf yang terdiri dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Terkadang juga terdiri dari tanah wakaf yang asli lalu ada penambahan lewat pembelian oleh nazhir atau ditambah wakaf tanah lainnya. Tanah ini biasanya dikelola oleh nazhir lembaga dan dikembangkan untuk perkebunan, peternakan, industri, dan lain sebagainya.

Untuk jelasnya objek wakaf harta wakaf di Kabupaten Serdang Bedagei akan di paparkan perkecamatan di bawah ini

1. Kecamatan Sei Rampah terdapat 100 lokasi tanah wakaf dengan seluas 183.804,14 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 33 lokasi dengan luas 24296,62 M²
 - b. Mushalla/ Langgar sebanyak 38 Lokasi dengan luas 10122,11 M²
 - c. Madrasah/Sekolah sebanyak 13 lokasi dengan luas 68544,71 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 14 lokasi dengan luas 72410,7 M²
 - e. Sosial Lainnya sebanyak 2 lokasi dengan luas 8430 M²
2. Kecamatan Perbaungan terdapat 244 lokasi dengan luas 883.442 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 69 lokasi dengan luas 72.844 M²
 - b. Mushalla sebanyak 100 lokasi dengan luas 28.139 M²
 - c. Madrasah sebanyak 32 lokasi dengan luas 41.652 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 37 lokasi dengan luas 262.827 M²
 - e. Sosial lainnya sebanyak 6 lokasi dengan luas 477.980 M²

3. Kecamatan Tebing Tinggi terdapat 118 lokasi dengan luas 858.257 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 45 lokasi dengan luas 1769 M²
 - b. Mushalla sebanyak 38 lokasi dengan luas 13848,5 M²
 - c. Madrasah sebanyak 8 lokasi dengan luas 823248 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 27 lokasi dengan luas 31855,5 M²
4. Kecamatan Dolok Masihul terdapat 172 lokasi dengan luas 178.212 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 75 lokasi dengan luas 50.265 M²
 - b. Mushalla sebanyak 45 lokasi dengan luas 13825 M²
 - c. Madrasah sebanyak 15 lokasi dengan luas 15663 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 36 lokasi dengan luas 98458 M²
 - e. Sosial lainnya sebanyak 1 lokasi dengan luas 400 M²
5. Kecamatan Pantai Cermin terdapat 44 lokasi dengan luas 24.042,55 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 24 lokasi dengan luas 2904,75 M²
 - b. Mushalla sebanyak 5 lokasi dengan luas 356 M²
 - c. Madrasah sebanyak 7 lokasi dengan luas 1053,5 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 8 lokasi dengan luas 19728,3 M²
6. Kecamatan Teluk Mengkudu terdapat 90 lokasi dengan luas 136.960 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 34 lokasi dengan luas 29.106 M²
 - b. Mushalla sebanyak 17 lokasi dengan luas 12.747 M²
 - c. Madrasah sebanyak 10 lokasi dengan luas 6.3742 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 29 lokasi dengan luas 31362 M²
7. Kecamatan Dolok Merawan 10 lokasi dengan luas 36.853,75 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 12 lokasi dengan luas 2.149,75 M²
 - b. Kuburan/Makam sebanyak 10 okasi dengan luas 34.704 M²
8. Kecamatan Sipis Pis terdapat 70 lokasi dengan luas 26.535 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. Masjid sebanyak 27 lokasi dengan luas 9.402 M²

- b. Mushalla sebanyak 7 lokasi dengan luas 1.679 M²
 - c. Madrasah sebanyak 12 lokasi dengan luas 2.200 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 23 lokasi dengan luas 1.3254 M²
 - e. Sosial lainnya sebanyak 1 lokasi dengan luas 196 M²
9. Kecamatan Kotarih terdapat 51 lokasi dengan luas 61.587 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
- a. Masjid sebanyak 18 lokasi dengan luas 6984 M²
 - b. Mushalla sebanyak 10 lokasi dengan luas 2444 M²
 - c. Madrasah sebanyak 6 lokasi dengan luas 8272 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 17 lokasi dengan luas 43887 M²
10. Kecamatan Tanjung Beringin terdapat 46 lokasi dengan luas 60.816,03 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
- a. Masjid sebanyak 10 lokasi dengan luas 5696 M²
 - b. Mushalla sebanyak 20 lokasi dengan luas 4085 M²
 - c. Madrasah sebanyak 8 lokasi dengan luas 5580 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 8 lokasi dengan luas 45455 M²
11. Kecamatan Bandar Khalifah terdapat 15 lokasi dengan luas 7866 M² yang diperuntukkan sebagai berikut:
- a. Masjid sebanyak 6 lokasi dengan luas 3296 M²
 - b. Mushalla sebanyak 4 lokasi dengan luas 813 M²
 - c. Madrasah sebanyak 2 lokasi dengan luas 2 792 M²
 - d. Kuburan/Makam sebanyak 3 lokasi dengan luas 965 M²

Dalam praktiknya di Serdang Bedagei mayoritas tanah wakaf pada tahun 2007 diperuntukkan untuk kepentingan ibadah yaitu 353 lokasi dipakai untuk mesjid, 284 lokasi dipakai untuk mushalla, 113 lokasi dipakai untuk madrasah/sekolah, 208 lokasi dipakai untuk kuburan/makam, dan 12 lokasi untuk lainnya. Lokasi lainnya yang dimaksud di sini seperti Pondok Pesantren, Kantor Departemen Agama, TPQ, petapaan, dan balai nikah.

Hal ini terjadi karena ikrar wakaf yang dilakukan wakif untuk tempat ibadah. Jika ikrar wakaf yang dilakukan wakif dari awal di samping untuk ibadah juga diperuntukkan kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh T. Darwinsyah yang mewakafkan tanah seluas

500.620 M² yang membuat surat wakaf untuk mesjid, langgar, rumah perguruan Islam, Rumah Yatim Piatu Islam dan Rumah Miskin Islam di Negeri Serdang (Sekarang Kabupaten Serdang Bedagei) yaitu: (1) Sebidang tanah dikampung Jambur Pulau Perbaungan dengan luas 7.120 M² (2) Sebidang tanah kebun kelapa di Kampung Jambur Pulau Perbaungan luasnya 9.196 M² (3) Sebidang kebun kelapa di kampung Pulau Perbaungan luasnya 13.120 M² (4) Sebidang tanah kebun kelapa di kampung Nardjil Perbaungan luasnya 471.184 Ha.

Mestinya dengan tanah seluas itu jika dikelola oleh nazhir yang profesional dan amanah secara produktif, maka paling tidak akan dapat mengangkat perekonomian umat Islam di Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai. Akan tetapi terjadi hal sebaliknya tanah yang diperuntukkan tersebut tidak dikelola dengan amanah dan profesional. Bahkan sebahagian telah berubah fungsi menjadi Tepekong, kandang babi, ternak ayam, tempat pengobatan (dupa), dan rumah Tionghoa. Pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan wakaf serta apa tujuan dari wakaf itu sendiri belumlah dipahami secara komperhensif, dimana tingkat pemahaman tradisional dan turun temurun bahwa wakaf dilakukan untuk pemenuhan sarana ibadah. Jika dinggap untuk kepentingan umum, hal ini dianggap menyimpang. Hal ini terjadi tidak hanya di Kabupaten Serdang Bedagei, tapi sudah berlaku umum di Indonesia.⁶⁷.

Artinya baik wakif atau calon wakif sebagai stakeholder maupun nazhir sebagai manajer melihat wakaf hanya sebatas untuk sarana ibadah tanpa melihat makna sesungguhnya yaitu kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Tanah yang bersertifikat di Kabupaten Serdang Bedagei adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 2002, hal 117-123

Rekapitulasi Data Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Serdang Bedagei Tahun 2006/2007

No	Kecamatan	Jumlah Persil Tanah		Bersertifikat	
		Lokasi	Luas M ²	Lokasi	Luas M ²
1.	Sei Rampah	100	183.804,14	25	31904
2.	Perbaungan	245	883.442	113	82.435
3.	Tebing Tinggi	114	71.705,48	82	58.266
4.	Dolok Masihul	172	178.611	36	44.672
5.	Pantai Cermin	54	51.555	40	38.881
6.	Teluk Mengkudu	90	145.075	57	107.403
7.	Dolok Merawan	22	39.853,75	10	8.600
8.	Sipis-Sipis	52	27274	7	5.386
9.	Kotarih	51	61567	16	6379
10	Tanjung Beringin	46	60816,03	32	52524
11.	Bandar Khalifah	15	7.866	1	690
	Jumlah	961	1711589,4	419	437140

Dari data diatas terlihat bahwa di Kabupaten Serdang Bedagei tanah wakaf yang telah bersertifikat jika dilihat dari lokasi ada 419 lokasi atau sekitar 43.6%, hampir setengahnya. Akan tetapi jika dilihat dari luas tanah wakaf permeterer persegi ada 437140 sekitar 25% dan yang belum terdaftar ada 127449 sekitar 75%.

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Padang Lawas Utara - Sumatera Utara⁶⁸

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
	Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Padang Bolak	24	5,59	0	0,00	24	5,59
2. Dolok	0	0,00	0	0,00	0	0,00

⁶⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA_vb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=MHBZSTNH0EVmTnJlWWl6SGhOSWptZz09

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
3. Halongonan	56	68,46	0	0,00	56	68,46
4. Batang Onong	3	0,42	0	0,00	3	0,42
5. Dolok Sigompulon	9	0,94	0	0,00	9	0,94
6. Padang Bolak Julu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Portibi	46	15,58	0	0,00	46	15,58
8. Simangambat	11	8,09	0	0,00	11	8,09
9. Hulu Sihapas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	149	99,09	0	0,00	149	99,09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat - Sumatera Utara⁶⁹

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Si Telu Tali Urang Julu		4	1,80	0	0,00	4	1,80
2. Pengindar		2	0,00	0	0,00	2	0,00
3. Pergenteng-Genteng Sangkut		2	0,35	0	0,00	2	0,35
4. Siempat Rube		5	1,20	5	1,20	0	0,00
5. Salak		11	2,22	0	0,00	11	2,22
6. Kerajaan		2	0,53	0	0,00	2	0,53
7. Si Telu Tali Urang Jehe		3	0,14	0	0,00	3	0,14
Jumlah		29	6,23	5	1,20	24	5,03

⁶⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHSpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=MzJlSVMOSEg4QVLXdxgvVW9qU0c3UT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Nias Selatan - Sumatera Utara⁷⁰

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Teluk Dalam	7	0,19	7	0,19	0	0,00
2. Pulau Batu	8	0,25	8	0,25	0	0,00
3. Lahusa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Lolowau	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	15	0,44	15	0,44	0	0,00

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Humbang Hasundutan - Sumatera Utara⁷¹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Dolok Sanggul	7	1,63	7	1,63	0	0,00
2. Pakkat	7	0,46	7	0,46	0	0,00
3. Parlilitan	14	0,81	4	0,15	10	0,66
4. Tarabintang	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	28	2,90	18	2,24	10	0,66

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Batubara - Sumatera Utara⁷²

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Medang Deras	90	5,67	19	1,48	71	4,19
2. Sei Suka	98	4,32	34	1,28	64	3,03

⁷⁰ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=Wlp0OFZyVTYrSy9jSnliYUl jUmYvZz09

⁷¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=aGFPMlFuZzJGNkZjYzZVZmRLQWd2UT09

⁷² Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YT Avb2wyUH pSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=TUQ1WHJQWE9oeTNsL2haSzhSQ3 NCUT09

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
3. Air Putih	80	5,13	6	0,30	74	4,82
4. Lima Puluh	93	10,06	89	9,76	4	0,29
5. Talawi	128	10,29	51	3,60	77	6,69
6. Tanjung Tiram	79	2,44	61	2,01	18	0,44
7. Sei Balai	51	4,72	13	0,70	38	4,02
Jumlah	619	42,62	273	19,13	346	23,49

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Padang Lawas - Sumatera Utara⁷³

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]		Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah Luas [Ha]		Jumlah Luas [Ha]	
1. Barumon	70	11,68	1	0,07	69	11,61
2. Sosopan	76	11,23	5	1,06	71	10,17
3. Barumon Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Sosa	44	24,92	0	0,00	44	24,92
5. Lubuk Barumon	34	5,00	0	0,00	34	5,00
6. Ulu Barumon	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Hutaraja Tinggi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Batang Lubu Sutam	57	5,40	0	0,00	57	5,40
9. Huristak	13	5,41	1	0,00	12	5,41
Jumlah	294	63,64	7	1,13	287	62,50

⁷³ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=NlhRUjB6djR1dHQ4RGtKZ3dhdUNsUT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Samosir - Sumatera Utara⁷⁴

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Harian	6	0,22	3	0,12	3	0,11
2. Panguruan	2	0,07	1	0,02	1	0,04
3. Onan Runggu	2	0,28	0	0,00	2	0,28
4. Sianjur Mula-Mula	1	0,03	0	0,00	1	0,03
5. Simanindo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Nainggolan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Palipi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Ronggur Nihuta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Sitio Tio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	11	0,61	4	0,14	7	0,47

Jumlah Tanah Wakaf di Kota Gunung Sitoli - Sumatera Utara⁷⁵

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Gunung Sitoli Pasar	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Gunung Sitoli Alo'oa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Gunung Sitoli Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Gunung Sitoli Idanoi	17	2,89	4	0,30	13	2,60
5. Gunung Sitoli Selatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Gunung Sitoli Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	17	2,89	4	0,30	13	2,60

⁷⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTG14aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=Sk5SeUtDWGw2Q0o1Q09tQXZNSEJ KUT09

⁷⁵ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTA vb2wyUH pSTG14aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=TVZnSDd0eUNoMU5HSHk4UHj2cGM rQT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Nias Utara - Sumatera Utara⁷⁶

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Alasa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Lahewa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Sawo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Tuhemberua	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Afulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6. Lahewa Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Latu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Namohalu Esiwa	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9. Sitolu Ori	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10. Tugala Oyo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11. Alasa Botomuzoi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Nias Barat - Sumatera Utara⁷⁷

No Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
			Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1. Lolofitu Moi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2. Sirombu	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3. Mandrehe	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4. Lahomi	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5. Mandrehe Barat	2	0,05	0	0,00	2	0,05
6. Mandrehe Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7. Moro'o	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8. Ulu Moro'o	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Jumlah	2	0,05	0	0,00	2	0,05

⁷⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=ZGJ1SHNFUUIjaVVaE5CZWZKbC9tdz09

⁷⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGI4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=RHFZU2lidzdhVzNhUWF4U0Ija2s1QT09

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Labuhan Batu Utara - Sumatera Utara⁷⁸

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Aek Kuo	41	5,78	11	1,26	30	4,52
2. Aek Natas	74	6,92	10	0,74	64	6,18
3. Kualuh Hilir	99	16,96	26	5,40	73	11,56
4. Kualuh Hulu	143	26,38	37	4,31	106	22,07
5. Kualuh Selatan	150	26,85	47	3,40	103	23,45
6. Kualuh Ledong	63	7,14	15	1,06	48	6,08
7. Merbau	145	14,78	56	5,64	89	9,15
8. Na Ix-X	42	5,45	42	5,45	0	0,00
Jumlah	757	110,25	244	27,25	513	83,00

Jumlah Tanah Wakaf di Kabupaten Labuhan Batu Selatan - Sumatera Utara⁷⁹

No Kantor Urusan Agama	Jumlah Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat		
		Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	Jumlah Luas [Ha]	
1. Kota Pinang	29	1,03	29	1,03	0	0,00
2. Kampung Rakyat	83	4,06	50	1,82	33	2,24
3. Torgamba	15	0,42	13	0,37	2	0,05
4. Sei Kanan	32	1,20	32	1,20	0	0,00
5. Silangkitang	45	1,35	45	1,35	0	0,00
Jumlah	204	8,06	169	5,77	35	2,29

⁷⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=bEjJR2dwWlhtZldOdakraVpZUWRKZz09

⁷⁹ Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf...* http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_kab.php?_pid=YTAvb2wyUHpSTGl4aVRnMkxDeEdjQT09&_kid=aWM0azdML2loUkxzbFEvb1pwQnl4UT09

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf, telah memberikan landasan yuridis dan hukum yang kuat bagi pengembangan wakaf di masa depan, baik berupa aset tetap seperti gedung dan tanah maupun berupa uang. Tiga hal dijanjikan BWI Kota Medan adalah: Pertama, pencerahan dan pembinaan nazhir. Kedu, inventarisasi yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, memproduksi harta wakaf. Ditambahkan, mengembalikan tanah wakaf yang hilang juga diagendakan.⁸⁰

Undang-undang (UU) Wakaf diharapkan dapat menjadi instrument yang dapat memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik dari (1) segi ketepatan struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa (peristilahan), pemakaian huruf, dan tanda baca; (2) kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis, dan filosofis, diharapkan mampu mewujudkan, melaksanakan, atau memelihara cita hukum (*rechtsidee*) yang menjadi patokan hidup bermasyarakat; (3) dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Jadi, Wakaf harus diberdayakan secara optimal. Sinergitas antara para ulama, pemerintah dan "praktisi" wakaf (wakif, nazir, BWI, unsur pemerintah yang bertanggung jawab) harus secara kontinu dilakukan. Semoga wakaf dapat menjadi bagian harapan umat dalam menyelesaikan berbagai persoalan keumatan ke depan.⁸¹

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan Saiful, SP, MH mengatakan Sabtu (17/2/2018), baru ada tiga kecamatan dengan beberapa kelurahan yang digratiskan dalam hal pengurusan tanah wakaf, yaitu Medan Tuntungan, Medan Marelan dan Medan Labuhan. Tetapi, tidak semua kelurahan di kecamatan ini yang digratiskan, melainkan hanya beberapa kelurahan saja. Di Kecamatan Medan Tuntungan, ada sembilan kelurahan yaitu: Laucih, Namo Gajah, Simalingkar B, Mangga, Kemenangan Tani, Simpang Selayang, Tanjung Selamat, Ladang Bambu dan Sidomulyo. Di Kecamatan Medan Marelan

⁸⁰ BWI Medan Diharapkan Mampu Atasi Sengketa Wakaf, Sabtu, 28 Februari 2015 13:14 <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1584-bwi-medan-diharapkan-mampu-atasi-sengketa-wakaf.html>

⁸¹ Dr. Syafruddin Syam, M.Ag, *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, disampaikan dalam kegiatan Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara. <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

ada empat kelurahan yaitu, Rengas Pulau, Paya Pasir, Terjun dan Tanah Enam Ratus. Sementara untuk Kecamatan Medan Labuhan ada empat kelurahan yaitu Tangkahan, Besar, Martubung dan Nelayan Indah. BPN Kota Medan akan memberikan harga spesial tergantung ukuran tanahnya, antara Rp.500 ribu-Rp1 juta. Ia menargetkan pengurusan sertifikasi khusus tanah-tanah wakaf sebanyak 17 ribu persil. Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan Dr H Ahmad Zuhri mengimbau agar para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar mem-ba-ntu nazir dalam proses Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sehingga dalam hal pengurusan sertifikasi tanah-tanah wakaf di BPN dapat berjalan dengan lancar. Pengukuran tanah wakaf bersama antara BPN dan BWI Kota Medan di beberapa lokasi juga telah dilakukan, di antaranya di Masjid Jami' Darul Ikhlas Jalan Batu Kelurahan Seirengas Permata, Kecamatan Medan Area, Mushalla Al-Ghazali Jalan Kapten Juhana Sukaramai 2 Medan Area, Masjid al Huda Jalan Seto Gang Karya Budi, Masjid al Muhtadin Jalan AR Hakim Gang Tengah Medan Area, Pertapakan Madrasah Jalan Bambu V Medan Timur serta Masjid Al-Muhajirin Kompleks Taman Perkasa Indah (TPI) Ringroad Pasar II Tj. Sari.⁸²

Ketua Umum MUI Kota Medan, Prof M Hatta mengatakan, baru 25% tanah wakaf di Sumut ini yang memiliki sertifikat tanah. Dalam Pasal 40 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan mengatakan, dari sekian ribu lokasi tanah wakaf di Medan hanya sekitar 3% yang memiliki sertifikat. Tanah wakaf di Medan berupa Masjid berjumlah sekitar 1.030-1.040, pekuburan 100-an lebih, belum lagi gedunggedung seperti kantor MU, yayasan, lembaga pendidikan serta tanah kosong belum terdata. Hanya sekitar 3% memiliki sertifikat. Selama setahun setengah BWI Medan berdiri sudah mengurus puluhan sertifikat tanah (30-40-an).⁸³

⁸²Nazir Segera Lakukan Sertifikasi Tanah Wakaf Analisa, Selasa, 20 Februari 2018, diakses dari <http://harian.analisadaily.com/kota/news/nazir-segera-lakukan-sertifikasi-tanah-wakaf/508244/2018/02/20>

⁸³ Hanya 3% Tanah Wakaf di Medan Miliki Sertifikasi, KORAN SINDO, 1 Januari

Di Kabupaten Batubara, Bupati telah menghimbau kepada para lurah dan kepala desa untuk turut serta mensukseskan program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019, Pemkab Batubara juga akan terus mempercepat setifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah demi kemaslahatan umat.⁸⁴

Walikota Medan Dzulmi Eldin kepada BWI Kota Medan berharap agar menjadi lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, berperan dalam upaya mengatasi persoalan sengketa wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf melandasi pengembangan wakaf. Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah perlu mendapat perhatian dan harus dikembangkan, karena memiliki potensi ekonomi besar.⁸⁵

Kakankemenag Medan H Al Ahyu MA mengingatkan, Nazhir Wakaf bertanggungjawab menyelamatkan tanah wakaf agar tidak dirubah peruntukannya atau berpindah tangan. Jumlah masjid dan musholla di Medan, tercatat lebih dari 1.070 masjid di Medan dan 678 musholla. Dari jumlah itu, masih banyak mesjid yang belum bersertifikat tanah wakaf.⁸⁶

Menurut Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Binjai Nur Nuh, ada 2 hal penting terkait pengamanan tanah asset dan wakaf. Pengamanan fisik seperti penyerobotan, sengketa batas dan lain sebagainya. Pengamanan segi hukum berupa pembuatan sertifikat atas tanah asset dan tanah wakaf dimaksud.⁸⁷

2016, diakses dari http://koran-sindo.com/page/news/2016-08-01/5/40/Hanya_3_Tanah_Wakaf_di_Medan_Miliki_Sertifikasi

⁸⁴ *Cegah sengketa, Zahir minta rumah ibadah dan tanah wakaf disertifikatkan*, Antaranews Sumut, Sabtu, 2 Februari 2019 9:41 WIB, diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/189154/cegah-sengketa-zahir-minta-rumah-ibadah-dan-tanah-wakaf-disertifikatkan>

⁸⁵ *BWI Medan Diharapkan Mampu Atasi Sengketa Wakaf*, Sabtu, BWI.orid, 28 Februari 2015 13:14, <https://bwi.orid/index.php/en/publikasi/news/1584-bwi-medan-diharapkan-mampu-atasi-sengketa-wakaf.html>

⁸⁶ *Nazhir Wakaf Bertanggungjawab Selamatkan Tanah Wakaf*, SUMUT24, 21 Mei 2018, 22:43, diakses dari <https://www.sumut24.co/nazhir-wakaf-bertanggungjawab-selamatkan-tanah-wakaf/>

⁸⁷ *Rakerda Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Binjai*, Suara Muhammadiyah, Ahad 8 Agustus 2017/ 13 Zulkaidah 1438 H, diakse dari <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/08/rakerda-majelis-wakaf-dan-kehartabendaan-pdm-binjai/>

5. Kerjasama untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Ramlan Yusuf Rangkuti mengatakan, tujuan MUI Sumut merangkul dan mengumpulkan Kanwil Depag Sumut, Baznas Sumut untuk bekerjasama membuat Mou dalam rangka percepatan sertifikasi tanah wakaf. Diharapkan Mou tersebut dapat segera disusun, ditandatangani dan dilaksanakan.⁸⁸

Untuk menuju tahapan MoU itu, sebelumnya telah digelar diskusi terlebih dahulu dalam rangka mengumpulkan masalah untuk bisa diketahui oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Sumut. Komisi Fatwa sebelumnya juga telah merencanakan, dengan memprioritaskan beberapa tanah wakaf yang memungkinkan untuk segera dilaksanakan, yaitu mendaftarkan tanah wakaf ke BPN. Tanah wakaf yang dimaksud dapat berupa masjid, madrasah, pesantren atau pekebunan, asalkan tanah wakaf. Jadi, tidak semua dalam dilaksanakan dalam waktu dekat. Pada Selasa, 3 September 2019, juga telah diadakan diskusi dengan BPN mengenai apa saja syarat-syarat sertifikasi tanah wakaf.⁸⁹

Syarat-syarat sertifikasi akan dibawa MUI tingkat II sewaktu Rakorda. MUI Tingkat I sebagai penyambung lidah ke Kanwil BPN tingkat I Sumut, supaya dikeluarkan sertifikatnya. Memang, sebagaimana dikatakan sebelumnya, meskipun sudah ada sertifikat, pun belum bisa menentukan wakaf itu, kalau umat Islam sekelilingnya tidak mendukung. Diharapkan umat Islam seluruhnya akan mendukung kalau sudah keluar sertifikat. Masalahnya sekarang yang dihadapi, masjid umat Islam belum ada yang bersertifikat, kalau pun ada hanya jarang, hanya hitungan jari. Untuk itu masjid perlu disertifikatkan, supaya ada alat bukti, supaya alasan kita menuntut.

Itu tujuan kita, Kalau pun ada, tidak bisa diharapkan pada kemauan politik pemerintah, karena tidak selamanya Gubernur misalnya, atau Walikota/ Bupati berpihak kepada kepentingan Islam.

⁸⁸ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

⁸⁹ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Untuk itu, umat Islam harus punya alasan. Sehingga Komisi Fatwa meminta agar Rakorda MUI Sumut 2019 juga membahas masalah hukum masjid dan tanah wakaf. Sehingga tidak lagi dari musyawarah ke musyawarah masalah ini terus terlewat, tanpa ada pertinggal bagi umat Islam. Dalam Rakorda hendaknya, setiap MUI Daerah Tingkat II harus mengemukakan mengenai adanya sertifikat tanah wakaf sebagai dokumen yang dapat jadi alasan menuntut hak. Dalam Rakorda juga dikemukakan persyaratan yang harus bawa dan disiapkan untuk diantar ke BPN. MUI Sumut telah memprioritas itu sebagai tugas pertama bagi MUI Kabupaten/ Kota.⁹⁰

Dalam diskusi sebelumnya sudah banyak informasi mengenai tanah wakaf yang dirampok, termasuk masjid. Seperti masjid at Thoyyibah. Bahkan MUI Sumut pernah bertentangan dengan MUI Kota Medan terkait *istibdal* masjid itu. Saat itu MUI Sumut melalui Koisi Fatwa sangat menyayangkan, di saat umat Islam sedang memperjuangkan Masjid at Thoyyibah tiba-tiba keluar fatwa membolehkan *istibdal* dengan kondisi yang ada saat itu. Hal itu tidak dapat dibenarkan. Padahal, jika dalam kondisi sekarang, nazarinya dapat dilaporkan ke BWI dan BWI juga harus bertindak, dengan mengganti nazir yang bermasalah itu. Tetapi saat itu, BWI beluam ada. Jelasnya, masjid tidak boleh dialihfungsikan, tidak boleh dipindahkan dan boleh diganti rugi kecuali dengan alasan tertentu, misalnya jamaahnya tidak ada.

Dalam penelian S3 yang dilakukan Ramlan Rangkuti, memang pernah terjadi masjid yang dipindahkan karena di lokasi tersebut sudah tidak ada lagi orang Islam, jamaah masjid jauh semuanya. Jika kondisinya demikian, maka hal itu dapat menjadi alasan untuk memindahkan masjid tersebut ke lokasi di mana orang-orang Islam banyak. Hal tersebut diamini Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat di masa itu. "Itu boleh," ucapnya saat diwawancarai Ramlan Yusuf Rangkuti.⁹¹

⁹⁰Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

⁹¹Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Dalam kondisi masjid seperti yang terjadi pada Masjid at Thoyyibah, cukup membuat heran, karena berdasarkan wawancara dengan salah seorang warga asal Binjai yang menyewa rumah di sekitar lokasi masjid mengatakan, jamaah masjid tersebut banyak, di Gang di mana lokasi masjid itu berdiri orang Muslim semua. Oleh karena itu, alasan Fatwa MUI Kota Medan menjadi terbantahkan Kota Medan. Walaupun masjid pengganti dilengkapi AC dan kaca, semua beres, tetapi tetap saja untuk memindahkan tanah wakaf itu tak boleh.

Jadi, ke depan masalah pemahaman nazhir mengenai wakaf harus ketat, jangan sampai nazhir yang diamanahkan tanah wakaf dari pewakif malah ikut membahas tukar guling tanah wakaf. Tak jarang, seolah ketika nazhir meninggal, anaknya secara otomatis menjadi nazhir, padahal, tanah wakaf tidak bisa diwariskan kenazhirannya. Masalah semacam ini akan dibawa MUI Sumut ke BWI, agar BWI dapat menentukan hasil akhir. Sat ini banyak sekali pertentangan aturan. Ada nazir yang dikeluarkan KUA Kecamatan. Apa pula nazhir yang dikeluarkan BWI dari kenazhiran. Sebenarnya mana yang betul? Dalam hal tindakan pemberhentian nazhir selama ini MUI Sumut selalu mengambil sikap diam saja. Kendati demikian, MUI Sumut masih mempertanyakan, kenapa masih KUA Kecamatan yang mengeluarkan nazhir dari kenazhiran, apakah BWI sudah tidak kewenangan? Jika BWI memiliki kewenangan, apakah kewenangannya mutlak atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, diharapkan dapat terjawab dalam Rakorda 2019.⁹²

Pada sesi I FGD, Ustadz Sudirman Timsar Zubil telah banyak menyampaikan masalah-masalah tanah wakaf, di antaranya terungkap bahwa, dulu, ketika masalah masjid at Thoyyibah muncul, BWI belum ada muncul. Kepada Ketua BWI, Pak Yasir, lantas Pak Ramlan Yusuf Rangkuti mempertanyakan kedudukan nazhir masjid itu. "Bagaimana masjid seperti ini, di masa itu, Pak?" Tanya Pak Ramlan. "Kenaziran diwariskan oleh nazir. Padahal, dalam UU Wakaf, kenazhiran tidak bisa nazir diwariskan ke anaknya, memang bisa ditunjuk oleh pewakif nazhirnya, tetapi yang menilai nazir itu harus BWI. Jika menurut BWI penjelasannya itu batal, maka batal, kalau kata BWI penjelasannya

⁹² Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

diterima, ya diterima, kalau dipecat BWI, ya dipecat. Itu BWI!," jelas Pak Ramlan kemudian.

Kendati demikian, menurut perkiraan Pak Ramlan, BWI belum cukup berwenang dalam hal kenazhiran. Hal itu terbukti dari kasus tanah wakaf di Perbaungan, belum selesai sampai sekarang. "Tapi in syaa Allah bisa diselesaikan BWI nanti. Itu urusannya," ucap Pak Ramlan.⁹³

Selain agenda membahas kekuatan fatwa MUI secara hukum, hubungan dengan BWI dan stakeholder juga akan dibahas pada Rakorda 2019. Tahap berikutnya, diharapkan hasil pembahasan dapat dibawa ke forum, semisal workshop dan sebagainya yang melibatkan pemerintah. Dengan demikian, agenda yang dibangun terdiri dari 3 tahapan. Untuk agenda pertama, dibagi menjadi dua sesi.

Jadi, pada sesi I FGD, dilaksanakan guna mengumpulkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanah wakaf dan masjid di Kota Medan di luar kota Medan. Sedangkan pada sesi II FGD, dilaksanakan guna membahas masalah dengan menghadirkan antara lain BWI, Baznas, BPN dan pakar hukum tanah serta pakar hukum wakaf. Dalam kesempatan menampung masalah, perlu diinventarisir konsep-konsep pengalaman terbaik atau pembelajaran, misalnya, untuk masalah al Ikhlahsh berbagai pihak banyak yang berperan. Peran-peran tersebut dikumpulkan. Diharapkan, pada November 2019, BPN, MUI dan stakeholder telah dapat berbagi pengalaman dalam percepatan masjid dan tanah yang bersertifikat wakaf. Pengalaman tersebut dicetak dan dibagikan dalam kesempatan duduk bersama itu.

Pada sesi pengumpulan masalah, MUI Sumut secara khusus mengundang para narasumber yang berkompeten dalam rangka mendengar apa yang sudah dilakukan dalam rangka melindungi eksistensi masjid dan tanah wakaf. Diharapkan dari berbagai informasi, ada celah yang didapatkan. Dari beberapa masjid, semisal masjid al Ikhlahsh yang awalnya tidak memiliki dokumen tetapi dapat dianggap sukses. Sebaliknya, ada yang dokumennya ada, tetapi belum sukses, seperti tanah wakaf Arakundo.

⁹³ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Setelah data-data diolah dari informasi yang dikumpulkan, MUI Sumut selanjutnya mengelaborasi *step by step*, menghayati setiap masalah yang terjadi di lapangan. Dalam analisis datanya yang lebih tajam dan penyusunannya yang lebih sistematis, Sekjend MUI Sumut dan Ustadz Fuad dapat diharapkan dukungannya, khususnya dalam membreakdown data-data yang dikumpulkan ke dalam matriks analisa SWOT. Dengan pemahaman yang baik terhadap masalah dan analisis yang tajam dalam menguraikan sisi kuat-lemah, tantangan-hambatan, diharapkan MUI Sumut dalam membangun dialog yang lebih berisi dengan pihak terkait, terutama dalam merumuskan roadmap perlindungan eksistensi dan tanah wakaf. Kendati demikian, agar pemikiran tidak langsung melompat ke analisa SWOT, agenda MUI Sumut Diwali dari pengumpulan masalah yang bersifat kasuistik terlebih dulu. Langkah-langkah berikutnya tetap selalu diinformasikan di menjelang akhir pelaksanaan kegiatan. Hal yang patut diutamakan, dalam setiap sesi berbagi informasi adalah bagaimana tetap terus belajar menghargai pendapat satu sama lain.⁹⁴

⁹⁴ Dr. H. Ramlan Yusuf Rangkuti, MA, (Ketua Komisi Hukum MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.



DRAFT KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA;

KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SUMATERA UTARA;

BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA;

BADAN AMIL ZAKAT SUMATERA UTARA;

TENTANG

PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF DI WILAYAH

PROVINSI SUMATERA UTARA

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IWAN ZULHAMI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan
..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 261 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. BAMBANG PRIONO : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 428/KEP-3.38/X/2016 dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 45 Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. SYARIFUL MAHYA BANDAR : Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 001A/BWI/P-BWI/2018, tanggal 15 Januari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Gedung King A Azis Asrama Haji, Jl. Jend. Besar A. Haris Nasution, Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

4. H. AMANSYAH NASUTION : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan
.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371 selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama Tentang Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 92);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

- tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
 14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan jo. Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);
 15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
 17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
 18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
 19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf;
 20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 21. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah takaf di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi, memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum terhadap tanah wakaf melindungi eksistensi tanah wakaf di Provinsi Sumatera Utara dengan cara memberikan prioritas pelayanan melalui Pelaksanaan Percepatan Pensertipikatan Tanah Wakaf oleh PARA PIHAK;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Melakukan peningkatan kapasitas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- b. melakukan sosialisasi pensertipikatan tanah wakaf dan peningkatan kompetensi Nazhir Wakaf oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
- c. memberikan akses pembiayaan proses pensertipikatan tanah wakaf oleh PIHAK KEEMPAT;
- d. penanganan permasalahan tanah wakaf;
- e. pertukaran data dan/atau informasi harta wakaf berupa tanah di Provinsi Sumatera Utara;
- d. melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dalam pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah wakaf serta pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pelayanan dalam proses pengukuran dan pemetaan, penerbitan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sesuai dengan kewenangan, serta penerbitan sertipikat hak atas tanah terhadap bidang tanah serta melakukan percepatan pensertipikatan tanah wakaf;
- f. pensertipikatan tanah wakaf meliputi Pendaftaran Tanah Pertama

Kali dan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 6

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat melimpahkan wewenangya

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;

- (3) PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;
- (4) PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan wewenangnya kepada Perwakilan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing untuk secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan melaporkan hasilnya kepada PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK, ditandatangani dengan disaksikan Ketua Umum MUI Sumatera Utara.

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA,

H. IWAN ZULHAMI

BAMBANG PRIONO

PIHAK KETIGA

KEPALA BADAN WAKAF
INDONESIA PROVINSI SUMATERA
UTARA,

PIHAK KEEMPAT

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

H. SYARIFUL MAHYA BANDAR

H. AMANSYAH NASUTION

SAKSI
KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SUMATERA UTARA

H. ABDULLAH SYAH

Bagian Keempat

**PENGALAMAN TERBAIK, PEMBELAJARAN
DAN CATATAN AKHIR**



BAGIAN KEEMPAT: PENGALAMAN TERBAIK, PEMBELAJARAN DAN CATATAN AKHIR

Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (MUI Sumut), Abdullah Syah selalu mengingatkan agar fokus dalam setiap menangani suatu urusan. Ketika beliau pernah ditanya bagaimana kedudukan Fatwa MUI, menurut beliau, sebenarnya kedudukan fatwa kuat. Lalu, sejauh mana kuatnya? Itu barangkali masih perlu diuji. Dalam masalah terkait perlindungan masjid dan tanah wakaf, Fatwa MUI Sumut tanggal 16 Februari 1982, bahwa tidak boleh memindahkan masjid apabila bukan dalam keadaan darurat," memang selalu dijadikan dasar hukum materil. Jika kedudukan Fatwa MUI memang diragukan sebagai produk hukum, karena fatwa sifatnya tidak mengikat sebagai sebuah keputusan hukum, maka pembicaraan tentu akan mengarah pada hubungan Negara dan Islam.

Masalah perlindungan terhadap eksistensi masjid dan tanah wakaf di Sumatera Utara juga merupakan masalah yang dihadapi di Provinsi lain. Dicontohkan, MUI DKI Jakarta, pada 2 Mei 2002, juga mengeluarkan fatwa tentang hukum pengalihan wakaf. Dalam fatwa tersebut dinyatakan antarlain, Wakaf adalah menyerahkan (menyedekahkan) tanah atau benda-benda lain yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokok (asal)-nya kepada seseorang atau suatu badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Seperti mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim piatu, tempat pemakaman

dan sebagainya.¹ Definisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan definisi yang kemudian tertera dalam UU No. 41 tentang Wakaf. Karena itu, jelaslah, pengalihan wakaf sangat dilarang dengan tegas terhadap harta benda wakaf dan pengalihan hak atas harta benda wakaf termasuk pidana, kecuali akan digunakan untuk kepentingan umum.

Pengalaman menunjukkan, saat memberi keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri (PN) Medan terkait masalah Masjid at Thoyyibah Jalan Multatuli, Fatwa MUI tahun 1982 pernah dijadikan dasar hukum mempertahankan eksistensi masjid at Thoyyibah. Tetapi saat itu, pengacara dari pihak pengembang membantah kedudukan Fatwa MUI sebagai dasar hukum, karena Fatwa adalah keputusan yang tidak mengikat, hanya boleh dijadikan sumber hukum materil, bahkan dalam masalah itu, fatwa MUI malah diabaikan sebagai sumber hukum materil. Seharusnya, situasi akan menjadi berbeda dengan diterbitkannya UU No 41 tentang Wakaf yang dapat dijadikan landasan hukum. Untuk mendapatkan bukti kuat, dukungan Kanwil BPN juga telah memberikan prioritas untuk menerbitkan sertifikat, apalagi secara *de facto* masjid Atthoyyibah memang 'dikuasai' Umat Islam, hanya saja sementara secara *de jure*, tidak ada surat yang menjadi legalitas.²

Dari berbagai masalah yang timbul terkait eksistensi masjid dan tanah wakaf, memang dapat ditarik kesimpulan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumut bersama MUI Sumut perlu memprakarsai suatu kajian tingkat lanjutan, dalam rangka melakukan pemetaan terhadap asset umat Islam yang belum bersertifikat, tentu saja setelah pemetaan terhadap masjid dan tanah wakaf secara menyeluruh telah dilakukan.

Kasus tanah wakaf Arakundo, misalnya, hingga 2019 masih terus mendapat pembelaan dari berbagai elemen umat Islam. Oleh pengembang, tokoh sentral yang dianggap paling mempunyai pengaruh yang cukup menentukan terkait keputusan terhadap tanah wakaf ini adalah Prof. H. Aslim. Sehingga pihak pengembang, untuk pengembangan hotelnya, menjadikan beliau sebagai salah satu target utama. Hamdani Harahap bersama tim advokasi dari LADUI MUI SU merupakan tim kuasa hukum dan tim yang dijadikan tempat berkonsultasi terkait

¹ MUI Kota Jakarta Timur, *Hukum Pengalihan Wakaf*, 6 Juni 2016, <http://mui-jakartatimur.or.id/hukum-pengalihan-wakaf/>

² Purba, FGD..., Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait perkembangan yang terjadi. Sertifikat tanah itu kemudian diambil, lalu tanah wakaf tersebut dipasang pagar oleh pihak pengembang. Pertinggal sertifikat tanah wakaf Arakundo pernah ditunjukkan oleh salah seorang pegawai BPN. Forum Umat Islam (FUI) selama 24 jam secara bergantian bersama masyarakat menjaga tanah wakaf tersebut di lapangan menghadapi preman bayaran yang disuruh oleh pihak pengembang. Polisi dalam beberapa kesempatan juga disiagakan.

Prof. Aslim dengan kekuatan massa yang berada di belakangnya, tetap terus membuka posko pengamanan. Masyarakat juga memasang spanduk di dinding beton yang bertuliskan, "Tanah ini wakaf teregistrasi di bawah pengawasan LADUI MUI SU."

Sampai saat ini, perlawanan fisik juga terus terjadi dan mendapat dukungan penuh dari umat Islam untuk merebut kembali tanah wakaf tersebut, dipimpin Ustadz Indra Suheri, sementara Hamdani Harahap bersama tim kuasa hukum dari LADUI MUI SU terus membela tanah wakaf ini di ranah hukum. MUI Sumut measilitasi,

Perjuangan hukum tanah wakaf Arando dirasakan masih cukup panjang, masih diperlukan surat-surat yang menguatkan, termasuk dari surat dari lurah dan camat. Namun, di atas kelemahan-kelemahan yang ada, semangat Prof. Aslim memperjuangkan tanah wakaf itu telah menutupi banyak kelemahan dari sisi kelengkapan proses hukum, beliau

Tim kuasa hukum LADUI MUI SU kemudian melanjutkan kasus tanah wakaf ini ke gugatan perdata. Hakim menilai dari sisi formalitas hokum dan akhirnya menolak gugatan. Pembangunan hotel terus dilakukan, sehingga tanah wakaf tersebut semakin terancam, karena tidak ada legalitas formal, meskipun secara *de facto* dikuasai oleh umat Islam, tetapi UU tidak membenarkan penguasaan *de facto* saja.³

Dari sisi internal umat Islam, Ustadz H. Tengku Zulkarnain, dikenal sangat vocal dalam menyuarakan kepentingan perlindungan eksistensi masjid dan tanah wakaf. Beliau selalu berada di baris terdepan dalam membela kepentingan umat Islam. Kendati demikian, ikhlitaf (perbedaan pendapat di kalangan) ulama seringkali dijadikan celah perpecahan bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan umat Islam,

³ Purba, FGD..., Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

khususnya para pengembang yang menyerobot masjid atau tanah wakaf untuk kepentingan bisnisnya.

Sebagai contoh pemanfaatan statemen Ustadz Tengku Zulkarnain adalah mengenai pendapatnya tentang pembolehan *istibdal* masjid yang tanahnya dimiliki oleh Perumnas, meskipun sebelumnya beliau melarangnya karena mengira tanah tapak masjid itu milik Pemko Medan. Pembolehan *istibdal* masjid di kalangan ulama di internal umat Islam cukup dikenal luas meskipun harus memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh syar'i, sehingga umat Islam dapat memahami dan menghormati pendapat Ustadz Tengku Zulkarnain. Tetapi sayangnya, statemen tersebut terus dijadikan alasan oleh pengembang untuk membenarkan tindakan perobohan masjid oleh pengembang dan dijanjikan akan dipindahkan ke lokasi lain. Bahkan lebih miris lagi, Ustadz Tengku Zulkarnaen seolah dijadikan 'bumper'. Ucapan beliau dikutip untuk mengisi spanduk-spanduk yang disebar di mana-mana oleh pengembang.

Ijtihad ulama mengenai *istibdal* ini sebelumnya juga pernah mengemuka saat masjid al Ikhlas Jalan Timor dirobohkan. Ketua MUI Sumut Prof. H. Abdullah Syah, saat itu juga mengatakan, pembolehan *istibdal* sempat dijadikan alasan pengembang, "Karena dulu mau dipindahkan ke seberang, dekat tanah PJKA," kenang Abdullah Syah.

Sebagaimana sebagian ulama lain, Prof. H. Abdullah Syah tidak membenarkan *istibdal* selama benda wakaf tersebut masih bisa dipergunakan atau dengan kata lain hanya alasan darurat, pertimbangan lain yang diharapkan para pembela masjid di masa itu sehingga bermohon kepada Abdullah Syah adalah mengenai marwah umat Islam, sehingga para pemodal dan pengembang, atas nama kepentingan umum tidak sesuka hati saja memindahkan masjid dan tanah wakaf, bahkan tak jarang menyembunyikan kepentingan bisnis di belakangnya.⁴

Fatwa MUI Sumut tahun 1982, menyatakan masjid termasuk wakaf dan tidak bisa diperjualbelikan, kecuali setelah proses hukum wakaf sesuai keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No DJ-II/522 tahun 2010. Fatwa ini seringkali dijadikan landasan pijak untuk

⁴ H. Indra Suheri (Ketua Umum FUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

membela dan melindungi masjid dan tanah wakaf. Kenyataan ini telah berlangsung sejak lama, tetapi baru mulai mencuat kembali saat maraknya perlawanan umat Islam agar masjid al Ikhlas Jalan Timor tidak dirobohkan tahun 2011. Sehingga, sejak lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, umat Islam baru memiliki landasan hukum positif yang lebih spesifik dan kuat mengenai wakaf. Fatwa MUI Sumut tahun 1982 kemudian dikuatkan dengan terbitnya Fatwa MUI Kota Medan No. 47 tahun 2011 bahwa tanah yang direlakan pemiliknya untuk dibangun di atasnya masjid adalah wakaf, dan Fatwa MUI Pusat No. 54 tahun 2014 tentang Status Tanah, yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid.⁵

Sebagai catatan sejarah, di Sumut juga pernah dibuat kesepakatan bersama di Hotel Madani, bahwa tidak boleh lagi ada peruntuhan masjid di Sumatera Utara, terlebih untuk kepentingan bisnis semata. Kesepakatan ini melibatkan seluruh Pimpinan SKPD Medan plus Sumatera Utara, diketahui oleh Walikota Medan. Kesepakatan untuk tidak merobohkan masjid juga pernah dihasilkan pada pertemuan di MUI Medan pada tanggal 1 April 2017. Tetapi setelah itu, tetap saja terus terjadi banyak pelanggaran.

Para pembela masjid dan tanah wakaf suatu waktu pernah mempertanyakan keberadaan dan tanggung jawab BWI dalam berperan mempertahankan eksistensi masjid dan tanah wakaf kepada Ustaz Ardiansyah. Sehingga, saat itu sempat diusulkan agar mendorong terbentuknya suatu Badan yang berperan untuk mempertahankan masjid dan harta wakaf. Padahal sebenarnya menurut UU, BWI sudah cukup. Namun pada kenyataannya, BWI belumlah mampu melindungi eksistensi tanah wakaf.

Selain adanya upaya memecah belah umat Islam, cara-cara keji lain yang dilakukan oleh pengembang adalah melakukan intimidasi terhadap pimpinan Ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh kaum Muslimin yang dianggap berseberangan dengan kepentingan mereka. Mereka diintimidasi, baik dengan cara kriminalisasi maupun dengan memfitnah mereka dengan sandungan kasus-kasus hukum. Pihak penyerobot masjid dan tanah wakaf, cenderung selalu menggiring masalah untuk dibawa ke ranah hukum. "Kalian laporkanlah kepada hukum!" Begitu

⁵ Indra Suheri, 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

ungkapan yang sering terdengar. Pada kenyataannya memang, umat Islam hampir tidak pernah menang menghadapi mereka ketika dibawa ke jalur hukum. Seperti RS. Haji, dugaan suap yang mereka lakukan sudah seringkali terendus umat Islam untuk memuluskan rencana jahat mereka. Mereka sangat menyadari, kelemahan mental sebagian oknum aparat penegak hukum yang masih bisa atur dengan sogokan. Mereka memanfaatkan kelemahan itu. Jadi, selain selalu kalah di ranah hukum, para ulama dan tokoh yang berpihak pada kepentingan masjid dan tanah wakaf seringkali menjadi sasaran fitnah, termasuk mengadu domba dengan mencari celah perbedaan pendapat, misalnya antara ulama yang menyetujui perpindahan masjid (istibdal) dipertentangkan dengan ulama yang tidak menyetujui perpindahan (mengingat syarat syar'i tidak terpenuhi). Modus-modus semacam ini untuk di masa mendatang patut lebih diwaspadai dan dicermati.⁶ Untuk itu, MUI Sumut menyeru kepada instansi terkait perlindungan eksistensi masjid dan tanah wakaf agar selalu merapatkan barisan dengan cara tetap terus berkoordinasi dan terus melakukan sosialisasi perkembangan masalah serta memberikan kepada masyarakat mengenai tuntunan wakaf yang sesuai menurut UU Wakaf. Koordinasi antar instansi terkait sangat penting mengingat prosedural pengurusan legalitas formal memiliki keterkaitan dan jenjang. Misalnya dalam pengurusan IMB masjid yang baru. Jika suatu instansi ditanyakan, kenapa dikeluarkan IMB masjid yang baru? Jawaban yang muncul adalah berdasarkan adanya rekomendasi instansi terkait lainnya. Memang, musti ada rekomendasi terkait. Tetapi sejauh pengalaman yang terjadi, jenjang-jenjang prosedural dilalui begitu saja begitu dengan mengabaikan Fatwa-fatwa MUI terkait pemindahan masjid dan tanah wakaf, tanpa mendasarkannya pada UU Wakaf. Bahkan, tanpa mengecek kondisi yang sebenarnya di lapangan. Padahal boleh jadi, ada pihak-pihak yang tidak dikenal oleh masyarakat, mengatasnamakan BKM, tanpa ada rembuk dengan masyarakat tiba-tiba minta dibuatkan surat rekomendasi pemindahan masjid, dan itu diterima begitu saja, hingga keluarlah IMB masjid yang baru.

Koordinasi yang baik dengan BPN juga sangat diperlukan khususnya dalam hal menjadikan Fatwa MUI Pusat No. 64 Tahun 2014

⁶ Suheri, 2019. *FGD* Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat rekomendasi atau keputusan. Padahal, BPN semestinya tidak menyertifikasi tanah apabila di atasnya ada masjid, kecuali sertifikat wakaf. Jadi hal ini perlu terus disosialisasikan ke BPN.

Selain BPN, Dinas Tata Kota juga perlu menjadi target sosialisasi UU dan Fatwa-fatwa MUI terkait masjid dan wakaf. Sebab surat yang masuk ke Walikota seringkali tidak mengindahkan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga mengeluarkan IMB tanpa mengetahui UU Wakaf.

Dalam hal menjaga kondusifitas masyarakat, sebagai aparaturne Negara, Kepolisian juga seharusnya tidak berpihak, tetapi sebagai penengah, agar tidak berantam antara pihak pembela masjid dengan pihak pengembang atau pengusaha. Artinya, Kepolisian harus tetap berada di pihak kebenaran. Untuk itu, pihak Kepolisian juga perlu mendapatkan sosialisasi UU Wakaf. Sehingga, ketika bertemu, yang ditanyakan bisa lebih berbobot. Sebab, biasanya yang ditanyakan kepada masyarakat adalah legalitas formasi saja, seperti sertifikat atau surat-surat. "Apa alasan kalian bahwa itu wakaf?"

Untuk memperkuat dan melengkapi data, diperlukan juga adanya Pusat Data Wakaf, setidaknya, untuk dapat memilah-milah tanah wakaf yang memiliki surat-surat terbatas, tanah wakaf yang sudah punya legalitas dan tanah wakaf yang masih bermasalah;

Pihak-pihak yang mengganggu harta benda wakaf, juga perlu mendapat tindakan tegas. Untuk itu, Tim Hukum dalam Tim Pembela Wakaf juga semestinya dimiliki.

Untuk pengembangan harta wakaf, tim yang fokus pada pengembangan wakaf juga sangat diperlukan. Sehingga setelah tanah wakaf dipertahankan dan berhasil dapat dikembangkan. Misalnya masjid Shafiyatul Islam, setelah berhasil dipertahankan kemudian bisa berkembang.

Pengawasan terhadap harta benda wakaf juga diperlukan, tentu saja didukung sumber daya nashir yang baik. Misalnya, laporan nashir mengenai pengembangan wakaf sudah dilakukan secara periodik. Dalam hal pengawasan ini, BWI dituntut harus independen dan profesional.

Jika diperlukan, perbaikan dan penyempurnaan UU Wakaf juga terus dipikirkan, karena, Wakaf tidak hanya menyangkut urusan

tanah, tetapi juga benda/ barang pun bias diwakafkan, misalnya wakaf dispenser atau kipas angin ke masjid. Selain itu, pengembangan pemikiran tentang wakaf produktif juga perlu terus dilakukan sehingga dapat memperkaya UU Wakaf. Misalnya, yang masih menjadi pertanyaan, terkait benda/ barang yang diwakafkan seperti dispenser atau kipas angin tadi, apakah mesti ada ikrar wakafnya? ⁷

Kejelasan masalah secara tuntas masih sangat diperlukan bagi masjid-masjid dan tanah-tanah wakaf yang selama ini sudah diperjuangkan. Masjid al Ikhlash Jalan Timor juga dianggap sebagai contoh perjuangan yang tidak tuntas di satu sisi, karena hingga saat ini masjid tersebut belum diketahui sertifikat tanah wakaf. Demikian juga, sertifikat untuk tanah wakaf Masjid Raudhatul Islam, juga tidak ada. Mengingat, demikian mendesaknya penuntasan semua masalah ini, sehingga diperlukan suatu Badan, yang terdiri dari: Pertama, Seksi Pertahanan Wakaf, yang bertugas memperjuangkan di lapangan dan di jalur hukum; Kedua, Seksi Pengembangan Wakaf yang dibutuhkan, ketika setelah diperjuangkan, semestinya tanah wakaf tersebut harus dikembangkan secara professional. Selanjutnya, Ketiga, Seksi Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Antar-Lembaga, yang bertugas melobi BPN misalnya, atau melobi Kepolisian misalnya. Keempat, Seksi Data atau Media, yang bertugas untuk mengelola data dan publikasi. Terkait Badan semacam ini dapat dianalogikan dalam pemberantasan masalah korupsi. Meskipun sudah ada Kepolisian, sudah ada Kejaksaan, tetapi masih diperlukan keberadaan KPK dan sudah berjalan. Badan ini perlu diperkuat sampai dapat mandiri, meskipun langkah pertama dimulai dari pembentukan Tim Pembela Wakaf. Jelasnya, kebutuhan tim ini cukup mendesak, mengingat Sumatera Utara masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait penyelesaian dan penuntasan masalah perlindungan terhadap eksistensi masjid dan tanah wakaf, termasuk Masjid al Ikhlash, Raudhatil Islam, RS Haji dan sebagainya. Gubernur Sumatera Utara yang cukup dikenal dapat diajak bicara baik-baik dengan umat Islam, juga perlu terus diajak bicara secara baik-baik.

Dari sisi data, pendataan kasus per kasus juga sangat diperlukan. Sehingga dapat ditelusuri, latar belakang munculnya kasus, penyebabnya, mandegnya di mana, apa yang perlu dilakukan untuk penuntasannya.

⁷ Suheri, 2019. *FGD ...* Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

Selain pendataan, tim kerja juga perlu diperkuat. Bagaimana APMAS, Tim lapangan yang memperjuangkan tanah wakaf Arakundo dapat meningkatkan kapasitasnya dan wawasannya mengenai Fatwa MUI atau UU tentang Wakaf yang dapat dijadikan 'senjata' menghadapi para penyerobot. Tim ini juga perlu mengembangkan jaringan kepada lebih banyak stakeholder, baik dari kalangan kenazhiran, maupun BPN untuk mempercepat proses sertifikasi, dengan KUA, dengan pihak Kemenag, bahkan dengan pihak Kepolisian. Kebutuhan akan dukungan semua pihak terkait.

Dalam memberikan dukungan moril dan semangat kepada aktivis pembela masjid dan tanah wakaf, misalnya kepada APMAS yang sedang memperjuangkan eksistensi Masjid Amal Silaturrahim, kehadiran MUI Kota Medan dan MUI Sumut juga sangat didambakan. Peningkatan pemahaman dan ghirah dari para alim ulama, professor doctor yang berkompeten, sangat diharapkan dapat diisi melalui taushiyah, khutbah Jumat dan majelis pengajian dan sbegainya. Selain dukungan dari tim hukum dari MUI Sumut, LADUI MUI SU, dukungan fatwa terkait tanah wakaf Arakundo dan status Masjid Amal Silatirrahmi juga sangat diharapkan.⁸

Beberapa catatan akhir yang perlu digarisbawahi dalam buku ini, yaitu: Pertama, yang harus digarisbawahi adalah, umat Islam harus serius dan dapat merasakan bahwa membela wakaf merupakan kewajiban setiap seorang Muslim.

Kedua, selain serius, juga harus dilakukan dengan ikhlas, bukan dengan niat macam-macam, misalnya agar dianggap tokoh pergerakan lalu pengembang kemudian menghubunginya dan menyerahkan amplop kepadanya. Hal seperti itu mungkin saja terjadi, karena di antara pejuang masjid ada juga yang telah masuk dalam jebakan itu. Dengan niat ikhlas, godaan-godaan seperti itu akan mampu disingkirkan dengan sendirinya.

Ketiga, selain keseriusan dan keikhlasan, para pembela masjid juga harus cermat, dalam artimempersiapkan apa yang bisa dipersiapkan terkait kasus yang sedang dipersoalkan. Misalnya, pengalaman terkait kasus Masjid al Ikhlah, awalnya hampir tidak ada dokumen, selain

⁸ Suheri, 2019. FGD... Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

surat yang berisi catatan sejarah yang menyebutkan adanya wakaf dan infaq dari masyarakat. Pada saat itu, para pembela masjid sudah menemukan dokumen Fatwa MUI tahun 1982 bahwa setiap masjid adalah wakaf. Fatwa MUI tersebut dijadikan 'senjata' untuk berhadapan dengan pihak manapun, termasuk dengan pihak Kodam I/BB. "Bahwa ulama kami mengatakan bahwa adalah wakaf! Dan wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar guling dan sebagainya. Inilah makanya kami mempertahankan ini," cetus para pembela masjid al Ikhlah.

Ketua MUI Sumatera Utara, Abdullah Syah langsung membenarkan Fatwa MUI 1982 itu. "Pembongkaran masjid al Ikhlah haram!" Umat Islam merasa dilindungi dan dikuatkan dengan pernyataan itu. Meskipun para orang tua dan ulama yang ada di MUI Sumut tidak ikut turun ke jalan (kecuali ustadz Arso, yang saat itu ikut turun ke jalan) tetapi hubungan umat Islam, khususnya pembela masjid sangat dekat. Meski menjalin kedekatan dengan MUI Sumut, tetapi para pembela masjid di Kota medan khususnya, dalam catatan sejarah perlindungan masjid justru berseberangan dengan MUI Medan terutama dalam kasus Masjid at Thoyyibah.⁹

Kecermatan selain harus mempersiapkan, juga harus hati-hati. Jika ada surat yang harus dipersiapkan surat yang dapat dijadikan 'senjata' menghadapi para pengembang. Umat Islam harus memanfaatkan penguasa Islam yang masih memiliki komitmen terhadap kepentingan Islam. Sebab, jika penguasanya kafir, seperti di Sarulla Taput, meskipun tanah wakafnya sudah ada berada di pinggir jalan, sudah pun sempat dibangun belasan tiang, tetapi masjid itu sampai sekarang ditunda, tidak bisa disiapkan.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut, Fachruddin Azmi, pengurusan tanah wakaf terkait dengan pembuatan yayasan. Sehingga, tak jarang persoalan yang timbul antara Pembina yang dianggap pemilik yayasan. Pembina pun tidak selamanya merangkap sebagai nazhir, yang terjadi kemudian adalah alih fungsi wakaf dari milik umat menjadi milik yayasan. Sehingga, dapat dikatakan ada persoalan konflik hukum antara UU Yayasan dan UU Wakaf, bukan

⁹ Sudirman Timsar Zubil (Dewan Syura FUI), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Sabtu, 31 Agustus 2019, di MUI Sumut.

berkaitan dengan badan pengurusan wakaf atau Yayasan.¹⁰ Untuk itu perlu dijadikan catatan penting, perlunya *review* kebijakan, karena adanya paradoks antar UU. Persoalan yang muncul di permukaan, konflik kepemilikan, misalnya berubah menjadi milik pemerintah atau milik pribadi. Ini merupakan masalah besar yang terjadi pada tanah wakaf.¹¹

Menurut Yasir Nasution, hal yang sangat fundamental bagi BWI adalah menindaklanjuti keluhan yang dirasakan terkait masalah wakaf sejak tahun 2011. Apalagi, keluhan itu tidak secara sungguh-sungguh disupport oleh banyak pihak. BWI perlu segera menyadari, ada permasalahan yang luar biasa sedang terjadi, tetapi tidak bisa dikerjakan satu sektor saja, sehingga akhirnya BWI kewalahan. Untuk itu, kepada BWI disarankan, perlunya dibentuk tim yang solid dari berbagai elemen, yang tugasnya dianggap selesai jika masalah sudah selesai. Masalah tersebut akan menjadi bom waktu yang memberi dampak yang sangat serius. "Kalau pun tidak tuntas seratus persen fundamen sudah terselesaikan," cetus Pak Yasir.¹²

Hasyim Purba menambahkan, UU Wakaf jelas memberi jaminan yang kuat dalam melindungi tanah wakaf dan juga memuat ancaman pidana. Kendati demikian, MUI Sumut dianggap perlu membuat *task post* (berbagi tugas), siapa melakukan apa, baik dalam rangka pemetaan tanah wakaf, mana masjid, musholla dan madrasah yang sudah atau belum bersertifikat wakaf, maupun untuk percepatan pendaftaran/sertifikasi karena ini sangat penting dilakukan terkait terbitnya Peraturan Menteri ATR/ BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.¹³

¹⁰ Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA (Ketua Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

¹¹ Prof. Dr. H. Fachruddin Azmi, MA (Ketua Yayasan Lembaga Wakaf MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

¹² Prof. Dr. H.M Yasir Nasution (Dewan Pertimbangan MUI Sumut), 2019. *FGD Perlindungan atas Eksistensi Masjid dan Tanah Wakaf di Sumatera Utara*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

¹³ Purba, *FGD...*, Selasa, 3 September 2019, di MUI Sumut.

1. Perlindungan Masjid melalui Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf secara produktif, seharusnya menjadi pilihan utama, mengingat umat Islam di Indonesia sedang dalam keterpurukan ekonomi. Wakaf produktif, berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan pada upaya yang lebih menghasilkan. Tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif, memberi harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf ini tidak berkehendak untuk mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdhah an sich*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Saat ini kewajiban kita adalah jihad ekonomi melalui wakaf produktif, bukankah Rasulullah saw selalu membangun pasar setelah membangun masjid. Bukankah Rasul kita seorang pedagang tangguh, bukankah beliau berpesan dari 10 pintu rizki 9 dari padanya adalah berdagang. Oleh sebab itu berbelanja di warung sebelah janganlah hanya menjadi wacana semata, berbelanja di tempat tempat muslim janganlah hanya menjadi ucapan tanpa tindakan, Islam memiliki konsep harta yang sangat jelas, ada infak, sedekah, zakat, hibah, dan wakaf. Umat Islam harus pandai menempatkan konsep konsep ini. Untuk orang yang sangat membutuhkan saat itu juga kita harus memakai konsep sedekah, untuk kewajiban terhadap harta kita kita memakai konsep zakat, dan untuk pemberdayaan umat umat Islam harus memakai konsep wakaf.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun A'raf Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf ialah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra. Ia berkata: Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: "Bahwa sahabat

Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra, menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata: "Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan.

Abu Thalhah mewakafkan "Bahaira" kebun kesayangannya Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.

Nabi juga mewakafkan perkebunan Mukhairik, yang telah menjadi milik beliau setelah terbunuhnya Mukhairik ketika perang Uhud. Beliau menyisihkan sebagian keuntungan dari perkebunan itu untuk member nafkah keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya untuk membeli kuda perang, senjata dan untuk kepentingan kaum Muslimin.

Sahabat Usman bin Affan juga mewakafkan sumur yang airnya digunakan untuk member minum kaum Muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga, maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Beliau bersabda, "Barang siapa yang membeli sumur Raumah, Allah mengampuni dosa-dosanya" (HR. An-Nasa'i). dalam hadis ini beliau menjanjikan bahwa yang membelinya akan mendapatkan pahala yang sangat besar kelak di surge. Karena itu, Utsman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum Muslimin.

Kalau kita membaca sejarah bahwa wakaf pada masa sahabat lebih banyak diperuntukkan untuk hal yang produktif. Penulis tidak menyatakan bahwa wakaf untuk masjid dan kuburan tidak baik. Tentu semua wakaf akan menjadi pahala jariah bagi pewakifnya. Namun saat ini perekonomian umat sedang membutuhkan orang-orang yang mau mewakafkan hartanya untuk pemberdayaan ekonomi. Maka jalan satu satunya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah dengan konsep wakaf produktif.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumut telah melakukan langkah kecil dengan mencontoh paradigma yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan mendirikan usaha yang berbasis wakaf produktif melalui uang. Mimpi ke depan adalah setiap keuntungan dari wakaf produktif akan dikumpulkan dan dibelikan aset. Jika kita memiliki 100 saja gerai bisnis yang berstatus wakaf baik yang berada di masjid, sekolah, maupun tanah wakaf lainnya, maka tidak akan ada lagi pengembang yang akan menggusur atau merobohkan masjid umat Islam, karena masjid memiliki dana wakaf yang tidak terbatas.

Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum. Sebagai contoh, apabila wakaf di masjid atau dimanapun dapat diimplementasikan, maka ada dana potensial yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Jika terdapat 100 masjid saja yang memiliki gerai wakaf produktif akan menghasilkan keuntungan 5 juta perbulan, maka akan terkumpul dana wakaf produktif sebesar 30 milyar pertahun, tentu potensi masjid yang jumlahnya ribuan di Sumatera Utara akan bisa lebih besar.

Bahkan kita bisa memanfaatkan keuntungan tersebut untuk menambah aset umat Islam misalnya membeli SPBU yang berstatus wakaf atau apapun bentuknya, yang pada akhirnya kita akan memiliki rumah sakit yang melayani umat Islam dengan gratis tanpa harus membayar apapun, kita juga bisa memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa untuk berjihad dalam dunia pendidikan.

2. MUI Sumut menjadi Penggerak Wakaf Produktif Melalui Uang

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus; menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada capaian tersebut. Langkah taktis, sebagai derivasi dari filosofis disyariatkannya wakaf produktif dimana lebih berupa teknis-teknis yang produktif.

Wakaf tunai menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam komisi fatwa MUI, tanggal 28 Shafar 1423H/11 Mei 2002M adalah

wakaf uang (*Cash wakaf/Wakaf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Hal di atas menginspirasi pendirian pendirian laboratorium wakaf yang dinamakan Halalmart MUI Sumut. Rencana ini menjadi lebih jelas ibarat "pucuk dicinta ulampun tiba" ketika PTKU MUI Sumut mendapat dana CSR dari Bank Sumut sejumlah 200 juta. Pada awalnya CSR diperuntukkan untuk pembelian perlengkapan mahasiswa, yang pada saat realisasinya muncul beberapa pertimbangan apakah akan dibelikan mobil operasional PTKU, kafetaria halal, dan mini market. Akhirnya pengurus sepakat untuk mendirikan laboratorium intrepeneurship wakaf dalam bentuk mini market yang diberi nama "Halalmart MUI Sumut". Persiapan pun dilakukan melalui kegiatan ekspose Halalmart 20 April 2017 yang diselenggarakan MUI Sumut dengan melibatkan sejumlah *stakeholder* yang dimiliki. Saat itu, MUI Sumut telah mengumumkan kepada *stakeholder* telah tersedianya gedung Halalmart berukuran 12 x 5 meter yang berlokasi di bagian depan Kantor MUI Sumut/ LPPOM MUI Sumut. Kegiatan ekspose sudah mulai muncul semangat berwakaf dari sejumlah *stakeholder* untuk mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi umat. Embiro Halalmart terus berproses menemukan bentuknya yang ideal.

Untuk merealisasikan rencana pengembangan tersebut, pada Kamis, 12 April 2018, Dewan Pimpinan MUI Sumut, membentuk secara resmi Program Laboratorium Entrepreneurship Wakaf *Halalmart MUI Sumut*. Salah satu bagian terpenting dari peresmian program ini diserahkannya penyerahan sertifikat Wakaf Tunai baik abadi maupun berjangka kepada para Pewakif. Momentum tersebut menandai terbangunnya dua sisi kebangkitan ekonomi umat, yakni ulama dan parawakif (pewakif).

Halalmart MUI Sumut telah melakukan hal kecil dengan lompatan yang besar terhadap paradigma wakaf. Prof. Dr. H. Yasir Nasution dalam peresmian Halalmart MUI Sumut pada 12 April yang lalu, mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan oleh Tim Management Halalmart adalah wakaf melalui uang, yaitu pewakif memberikan dananya ke management Halalmart untuk dipergunakan sepenuhnya kepada wakaf produktif. Hal ini pada dasarnya telah lama dilakukan

oleh umat Islam di Indonesia khususnya ketika membangun masjid, banyak umat Islam yang mewakafkan uangnya untuk pembangunan masjid dengan cara memberikan uang kepada nazhir wakaf (panitia pembangunan masjid) untuk dipergunakan membangun masjid.

Halalmart MUI Sumut yang memiliki visi menjadikan Halalmart sebagai gerai toko Muslim yang masif, profesional, berkualitas, dan unggul untuk menghasilkan aset umat Islam. Artinya target dari Halalmart MUI Sumut adalah bertambahnya aset umat Islam. Rencana ke depan adalah setiap keuntungan dari Halalmart MUI Sumut akan dikumpulkan dan dibelikan aset. Jika kita memiliki 100 gerai Halalmart yang berstatus wakaf maka kita akan bisa membeli SPBU yang bertsatus wakaf, yang pada akhirnya kita akan memiliki rumah sakit yang melayani umat Islam dengan gratis tanpa harus membayar apapun.

Saat ini MUI Sumut sudah memiliki dua gerai wakaf yaitu halalmart MUI Sumut dan pada ulang tahun yang pertama diresmikan Kedaiwakaf Coffeeshop, insyaa Allah kedepan MUI Sumut akan mengupayakan aplikasi belanja yang dinamakan kedaiwakaf online

Gerai Wakaf Produktif yang diprakarsai MUI Sumut ditopang dengan tiga misi utama yaitu; (1) membangun semangat interpreneurship di kalangan pemuda Islam khususnya pengkaderan ulama, (2) mensosialisasikan manfaat besar dari wakaf produktif, dan (3) mendirikan bisnis berbasis wakaf produktif diberbagai lokasi dan wilayah.

Tagline MUI Sumut adalah adalah **"Kami memudahkan Anda berwakaf"**. Halalmart dan Kedaiwakaf MUI SU menerima wakaf melalui uang tunai (cash wakaf) karena melihat banyak manfaat dan fleksibilitas yang dimilikinya. Halalmart & Kedaiwakaf MUI SU selaku laboratorium wakaf mengalokasikan wakaf produktif dengan tiga cara:

- a. Wakaf Tunai Abadi, yaitu wakaf melalaui uang yang nominalnya tidak dibatasi, diserahkan kepada Halalmart & Kedaiwakaf MUI SU, bisa juga melalui No. rek Bank Muamalat 4820007446 an Pengelola Laboratorium Interpreneurship
- b. Wakaf Tunai Berjangka, yaitu wakaf uang yang diserahkan kepada Halalmart & Kedaiwakaf MUI SU dengan ikrar pengembalian dalam batasan waktu minimal satu juta dengan jangka waktu minimal satu tahun.

- c. Belanja sambil berwakaf, yaitu bagi setiap individu yang berbelanja di Halalmart & Kedaiwakaf MUI SU adalah suatu bentuk tindakan berwakaf. Setiap nilai rupiah yang dibelanjakan akan diwakafkan. Nominal kembalian uang cash terhadap individu yang berbelanja dapat diwakafkan langsung tanpa memandang nominalnya baik seratus rupiah, dua ratus rupiah dan berapapun itu.

Beberapa keunggulan sehingga Halalmart & Kedaiwakaf MUI SU bermodalkan wakaf produktif sebagai berikut

- a. Wakaf produktif dengan bentuk wakaf melalui uang (cash wakaf) memiliki fleksibilitas (keluesan) dan kemaslahatan besar bagi yang tidak memiliki benda yang lain. Artinya siapapun boleh berwakaf, bahkan hanya dengan Rp. 500.
- b. Wakaf bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat tanpa batas dan golongan, untuk kesejahteraan sosial dan membangun aset umat Islam.
- c. Memiliki dua visi sekaligus: mensejahterakan umat Islam sekaligus memupuk rasa persaudaraan
- d. Mengaplikasikan fatwa MUI Pusat 28 Shafar 1432 H/ 11 Mei 2002 tentang wakaf tentang

Masjid dipilih sebagai tonggak bangkitnya ekonomi Umat Islam. Tujuannya antara lain untuk:

- 1. Mengembalikan fungsi Masjid sebagai pusat pemberdayaan umat di mana pada masa awal Islam difungsikan sebagai pusat pemberdayaan umat
- 2. Mengembalikan kehormatan masjid dan menghilangkan ketergantungan masjid dari sumbangan umat Islam, meskipun memang masjid adalah tanggung jawab umat Islam.
- 3. Memastikan kehalalan dan keberkahan produk yang dikonsumsi umat Islam
- 4. Masjid memiliki tempat tempat yang strategis dan finansial yang cukup
- 5. Mendekatkan umat Islam dengan masjid dan ulama

Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di setiap masjid maupun

lembaga lainnya adalah para BKM Masjid/ pengurus Lembaga yang juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengelolanya. MUI Sumut akan bertindak sebagai supporting penyeragaman (*branding*) seperti: Bentuk dan warna bangunan, sistem transaksi, suplay dan distribusi barang, produk-produk yang bersertifikat halal MUI SU, serta izin usaha dan pelaporan keuangan

Keuntungan menjadi wakaf umat Islam dengan pembagian 75 % kepada Pihak masjid/ pengelola dan 25 % kepada MUI SU. Keuntungan 25 % tidak akan dipergunakan secara sepihak oleh MUI SU, tetapi akan dikumpulkan yang pada jumlah tertentu akan dipergunakan untuk membeli asset umat Islam seperti; SPBU, Rumah Sakit, Pabrik, dsb, yang akan menopang kehidupan umat Islam. Sedangkan 75% dikelola oleh BKM untuk kesejahteraan dilingkungan sekitar.

Oleh sebab itu, kepada umat Islam di manapun berada, marilah kita bergandeng bersama menyisihkan sebahagian rizki yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi penggerak wakaf produktif melalui uang dengan mendirikan gerai gerai bisnis yang berbasis wakaf produktif. Hal ini tentu mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, Hal ini hanya bisa kita capai dengan kebersamaan dan pertolongan Allah swt., bukankah Allah telah berfirman dalam surat Muhammad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ صَفَرُوا فِتْنَةً لَّهُمْ وَأَصْلُ أَعْمَالِهِمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Adapun orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (al-Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka." (QS. Muhammad: 7-9)



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku & Makalah

- Abi Ishaq as Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Mesir
- Aboerraeof, 1970, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang
- Abdullah Gofar, 1999, *Nazhir dan Managemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, *Mimbar Hukum*, No. 14 Tahun X, Jakarta: AL Hikmah
- Amin, Maruf, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, elSAS Jakarta, 2008
- Bambang Priono, SH, MH. (Kakanwil BPN Provsu), 2019. *Tata Cara Penerbitan Hak atas Tanah Wakaf*, makalah dipresentasikan oleh Kasi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Obed Milton Simamora, SH, MAP, MMG., dalam Focus Group Discussion (FGD) *Perlindungan atas Eksistensi*
- M.B. Hooker, *Indonesian Islam, Social Change Trought Contemporary Fatawa*, Asaa Sothest Asia Publication Series, 2003
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Ernie Tisnawati Sale dan Kurniawan Saifullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Muhammad Yunus, 1973, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al Qur'an
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Pramita,
- S. Arief, (ed), *UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hukum Agraria*, Surabaya :Pustaka Tinta Mas, tt
- Taufiq Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa

Sumber Internet

- 11 Tahun Mangkrak, Warga Madrasah Desak PN Medan Lakukan Eksekusi Tanah, *Tribun Medan*, Ahad, 30 Juni 2019, 19:24, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2019/06/30/11-tahun-mangkrak-warga-madrasah-desak-pn-medan-lakukan-eksekusi-tanah>
- 13 Ormas Islam Minta Status Wakaf RS Haji Dikembalikan sebagai Wakaf, *SUMUTPOS.CO*, Selasa, 5 March 16:23 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/03/06/13-ormas-islam-minta-status-wakaf-rs-haji-dikembalikan/>
- 1300 Masjid di Medan, Akhyar: Alhamdulillah, *Pertumbuhan Umat Islam Pesat*, *Sentral Berita* 17 April 2016, diakses dari <https://sentralberita.com/2016/04/konsep-otomatis-368/>
- Alhamdulillah! Kota Medan Miliki 1.040 Masjid, *BeritaSumut*, Jumat 04 Januari 2013 20:53:00, diakses dari <http://beritasumut.com/peristiwa/Alhamdulillah--Kota-Medan-Miliki-1-040-Masjid>
- Allah Akbar! MUI Medan Diminta Keluarkan Fatwa Masjid Dhiror 16 Januari 2019, *MuslimOnline.Id*, diakses dari <http://www.muslimonline.id/2019/01/allah-akbar-mui-medan-diminta-keluarkan.html>
- Abdullah Syah, MA (Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara). *Konsep Wakaf dalam Islam*, *MUISumut.com*, 30 Maret 2019, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/03/30/konsep-wakaf-dalam-islam/>
- Aliansi Ormas Islam Pertanyakan Kejatisu Soal Tindak Lanjut Laporan Dugaan Penyimpangan Pengalihan RS Haji Medan. *Kejatisu: Kasusnya Proses Penyelidikan*, *SIB*, Senin, 01 September 2014 12:43 WIB, <https://hariansib.com/Medan-Kita/Aliansi-Ormas-Islam-Pertanyakan-Kejatisu---Soal-Tindak-Lanjut-Laporan-Dugaan-Penyimpangan-Pengalihan-RS-Haji-Medan>
- BWI Medan Diharapkan Mampu Atasi Sengketa Wakaf, *BWI.or.id*, 28 Februari 2015 13:14, <https://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/1584-bwi-medan-diharapkan-mampu-atasi-sengketa-wakaf.html>
- Banyak Tanah Wakaf di Sumut Belum Punya Sertifikat, *MUI Medan*, 25 November 2018, diakses dari <https://muimedan>

or.id/2018/11/25/banyak-tanah-wakaf-di-sumut-belum-punya-sertifikat/

Banyak Tanah Wakaf Belum Punya Sertifikat, Analisa, Senin, 26 November 2018, diakses dari <http://harian.analisadaily.com/kota/news/banyak-tanah-wakaf-belum-punya-sertifikat/654438/2018/11/26>

Banyak Tanah Wakaf di Sergai Belum Terdaftar, HetaNews, Selasa, 10 September 2019, <https://www.hetanews.com/article/64922/banyak-tanah-wakaf-di-sergai-belum-terdaftar>

Batalkan IMB Gedung Asrama Putri Dan Rumah Sakit Bersalin Islam yang akan diperjuangkan FUI dan Laskar Umat Islam agar tidak berpindah tangan, diakses dari <http://www.waspada.id/ladui-mui-sumut-minta-kadis-pmdptsp-batalkan-imb>.

Beri Rekomendasi Pembongkaran Masjid, Fatwa MUI Kota Medan Digugat, VoA-Islam, Senin, 9 Muharram 1441 H / 24 September 2012 14:06 wib, <http://voa-islam.id/read/indonesiana/2012/09/24/20800/beri-rekomendasi-pembongkaran-masjid-fatwa-mui-kota-medan-digugat/>

Cegah sengketa, Zahir minta rumah ibadah dan tanah wakaf disertifikatkan, AntaraneWS Sumut, Sabtu, 2 Februari 2019 9:41 WIB, diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/189154/cegah-sengketa-zahir-minta-rumah-ibadah-dan-tanah-wakaf-disertifikatkan>

Danny Alit Danardono, *Wakaf Produktif, Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf di Propinsi DKI Jakarta)*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2008, h.1, diakses dari <https://docplayer.info/amp/68557229-Lampiran-a-data-tanah-wakaf-di-indonesia.html>

Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah, diakses dari http://simas.kemenag.go.id/index.php/profil/masjid/page/9700/?provinsi_id=2

Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*, Siwak

- Kemenag, diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_yanah_wakaf.php
- Daftar Masjid/ Musholla di Sumatera Utara, <https://m.dream.co.id/sim/sumatera-utara/index240.html>
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimasy Islam Kemenag RI, *Jumlah Tanah Wakaf Wilayah Sumatera Utara*, Siwak Kemenag, diakses dari http://siwak.kemenag.go.id/tanah_wakaf_prop.php?_pid=ytavb2wyuhpstgl4avrnmkxdce djqt09
- DPR Pelajari Kasus Pembongkaran Masjid di Medan, REPUBLIKA.CO.ID, Kamis 30 Jun 2011 19:18 WIB, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/06/30/lnlriq-dpr-pelajari-kasus-pembongkaran-masjid-di-medan>
- Falsafah Orang batak Toba dalam Dalihan Natolu, hal. 1, dalam Verianto Sihotang, 2013, *Pendirian...* <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>
- <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2011/05/10/14581/kronologis-penyerangan-penculikan-penghancuran-masjid-al-ikhlas-medan/>
- FUI Sumut Surati Presiden Yudhoyono soal Pembakaran Masjid, Hidayatullah, Jum'at, 5 November 2010 - 09:14 WIB, diakses dari <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2010/11/05/45473/fui-sumut-surati-presiden-yudhoyono-soal-pembakaran-masjid.html>
- FUI Minta BPN Tidak Terbitkan Sertifikat RS Haji, MedanBisnis, Senin, 24 Nov 2014 08:44 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/n/131482/>
- dapat juga diakses dari <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/24/131482/fui-minta-bpn-tidak-terbitkan-sertifikat-rs-haji/>
- FPI dan LUI 'Serbu' Polresta Medan, WOL 5 Oktober 2015, diakses dari <http://waspada.co.id/medan/fpi-dan-lui-serbu-polresta-medan>
- Hanya 3% Tanah Wakaf di Medan Miliki Sertifikasi, KORAN SINDO, 1 Januari 2016, diakses dari <http://koran-sindo.com/page/>

news/2016-0801/5/40/Hanya_3_Tanah_Wakaf_di_Medan_Miliki_Sertifikasi

Kasus Masjid al Ikhlas, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf, Dakwatuna, 27 Juli 2011, diakses dari <http://www.dakwatuna.com/2011/07/25/13601/kasus-masjid-al-ikhlas-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf/>

Kasus Masjid Al-Ikhlas, MUI Sumut Tegaskan sebagai Wakaf, REPUBLIKA.CO.ID, Senin 25 Juli 2011 06:37 WIB, diakses dari <https://republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/25/lov2z9-kasus-masjid-alikhlas-mui-sumut-tegaskan-sebagai-wakaf>

Kemenag: Kini Data Masjid dan Mushalla Tersedia di Aplikasi SIMAS, RRI.co.id, 24 November, 2018,19:30, http://rri.co.id/post/berita/602948/nasional/kemenag_kini_data_masjid_dan_mushala_tersedia_di_aplikasi_simas.html

Ketua APMAS: Kami Tolak Segala Bentuk dan Cara Untuk Merelokasi Mesjid Amal Silaturahmi yang Berdiri di Tanah Wakaf, METRORAKYAT.COM, Kamis 22 Agustus 2019, <https://metrorakyat.com/ketua-apmas-kami-tolak-segala-bentuk-dan-cara-untuk-merelokasi-mesjid-amal-silaturahmi-yang-berdiri-di-tanah-wakaf/>

Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas Medan, Eramuslim, Jumat, 17/06/2011 10:18 WIB, diakses dari <https://www.erauslim.com/berita/laporan-khusus/kronologis-perjuangan-mempertahankan-masjid-al-ikhlas-medan.htm>

Kronologi Perjuangan Umat Islam Pertahankan Masjid al Ikhlas, Nahimunkar.com, Medan, 30 Juni 2011, diakses dari <https://www.nahimunkar.org/kronologi-perjuangan-umat-islam-pertahankan-masjid-al-ikhlas-medan/> <http://www.voa-islam.id/read/indonesiana/2011/05/10/14581/kronologis-penyerangan-penculikan>

LADUI MUI-SU Minta Poldasu Tangguhkan Penyidikan Dualisme Kepemimpinan Yayasan al Ishlahiyah Binjai, SUMUTPOS.CO, diakses dari <https://sumutpos.co/2019/08/03/ladui-mui-su-minta-poldasu-tangguhkan-penyidikan-dualisme->

kepemimpinan-yayasan-al-ishlahiyah-binjai/ <https://kurio.id/app/articles/15716321>

Masjid Amal Silaturrahim Disebut Berdiri di Tanah Wakaf Hendak Ditutup, Ormas Islam di Medan Laporkan BKM, KITAKINI.news 22 Agustus 2019, diakses dari <https://kitakini.news/30614/masjid-amal-silaturrahim-disebut-berdiri-di-tanah-wakaf-hendak-ditutup-ormas-islam-di-medan-laporkan-bkm>

Masjid Dhirar Berdiri di Medan? hidayatullah.com, Ahad, 27 Mei 2007, 03:20 WIB, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2007/05/27/41275/masjid-dirar-berdiri-di-medan.html>

Masjid Tertua di Toba Samosir Dibakar OTK, Namun Tak Seheboh Pembakaran Gereja di Singkil, RiauTerbit.com, Sabtu, 17 Oktober 2015, <http://riauterbit.com/mobile/detailberita/777/masjid-tertua-di-toba-samosir-di-bakar-otk,namun-tak-seheboh-pembakaran-gereja-di-singkil.html>

Masjid Di Porsea Sengaja Dibakar, Voa-Islam, Jum'at, 27 Muharram 1441 H / 20 Agustus 2010 17:09 wib, mengutip sumber Waspada, diakses dari <https://www.voa-islam.com/read/suaraislam/2010/08/20/9388/masjid-di-porsea-sengaja-dibakar/>

Massa Muhammadiyah Demo ke Mapolres Belawan: Tangkap Pelaku Perusakan Masjid! Sumut Pos, 18 Juli 2018, diakses dari <https://sumutpos.co/2018/07/18/tangkap-pelaku-perusakan-masjid/>

MUI Kota Jakarta Timur, *Hukum Pengalihan Wakaf*, 6 Juni 2016, <http://mui-jakartatimur.or.id/hukum-pengalihan-wakaf/>

MUI Medan Terus Dikecam, Sumut Pos, 12/09/2012, diakses dari <https://sumutpos.co/2012/09/12/mui-medan-terus-dikecam/>

MUI Sumut: Masjid Al Ikhlas Wakaf, BWL.or.id, Rabu 27 Juli 2011, 07:00 WIB, diakses dari <https://bwi.or.id/index.php/asdfsdf/1-beritawakaf/800-mui-sumut-masjid-al-ikhlas-wakaf?lang=ar>

M.Yusuf Asry, *Pendirian dan Penolakan Pembangunan Masjid al Munawwar Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara*, <http://radiatorayfm.com/> bersumber dari penelitian El Munir Aritonang, M.AP, diakses dari <https://parapejuanghidup.wordpress.com>

/2013/04/26/pendirian-dan-penolakan-pembangunan1-masjid-al-munawar-tapanuli-utara-provinsi-sumatera-utara2-oleh-m-yusuf-asry3/

Nazir Tanah Wakaf Dituduh Serobot Tanah, TRIBUN-MEDAN.com, Senin, 23 April 2012 17:32 diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/04/23/nazir-tanah-wakaf-dituduh-serobot-tanah>

Nazhir Wakaf Bertanggungjawab Selamatkan Tanah Wakaf, SUMUT24, 21 Mei 2018, 22:43, diakses dari <https://www.sumut24.co/nazhir-wakaf-bertanggungjawab-selamatkan-tanah-wakaf/>

Nazir Segera Lakukan Sertifikasi Tanah Wakaf Analisa, Selasa, 20 Februari 2018, diakses dari <http://harian.analisadaily.com/kota/news/nazir-segera-lakukan-sertifikasi-tanah-wakaf/508244/2018/02/20>

Letak Geografis dan Astronomis Kabupaten Tapanuli Utara, h.2-3, dalam Sihotang, 2013. *Pernyataan ...*, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

Ormas Islam Minta Status RS Haji Dikembalikan Sebagai Wakaf, RRI, Selasa 5 Maret 2018, http://rri.co.id/medan/post/berita/498248/daerah/ormas_islam_minta_status_rs_haji_medan_dikembalikan_sebagai_wakaf.html

Pernyataan Sikap ASB: Mendukung Pendirian Mesjid di Kab.Tapanuli Utara, Ourvoice.or.id, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

Perubahan Masjid di Multatuli, Hakim Menangkan PT MIL, TRIBUN-Medan.com, Kamis, 13 September 2012, 16:08, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/09/13/perubahan-masjid-di-multatuli-hakim-menangkan-pt-mil>

Ramli Abdul Wahid (Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi serta Anggota Komisi Fatwa MUI SU), Medan, 23 Januari 2014. *Wakaf dan Potensi Pengembangannya*, diakses dari <http://kabarwashliyah.com/2014/02/02/wakaf-dan-potensi-pengembangannya>

Rakerda Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Binjai, Suara Muhammadiyah, Ahad 8 Agustus 2017/ 13 Zulkaidah

1438 H, diakses dari <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/08/08/rakerda-majelis-wakaf-dan-kehartabendaan-pdm-binjai/>

Sidang Pembongkaran Masjid Berujung Ricuh, BWI, 9 September 2012, 17:50, <https://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/berita-mainmenu-109/1024-sidang-pembongkaran-masjid-berujung-ricuh.html>

Sudirman Timsar Zubil, 2019. (Ketua Umum FUI Sumatera Utara/ Ketua BKM Al Ikhlas) *Fenomena Penghancuran Masjid di Kota Medan*, Senin, 05 Desember 2011, 13:47:38 WIB, diakses dari <http://www.voa-islam.com/lintasberita/suaraislam/2011/12/05/16913/>

Sudirman Timsar Zubil, *Surat FUI SU kepada Presiden RI SBY*, dipublikasikan Kamis, 21 Oktober 2010, ditulis di Medan, 27 September 2010.

Sengketa Tanah Wakaf di Jalan Tuasan Kembali Kisruh, InilahMedan.com, Kamis, 20 Juni 2019, 09:19 WIB, diakses dari <https://www.inilahmedan.com/2019/06/sengketa-tanah-wakaf-di-jalan-tuasan.html>

Syafruddin Syam, 2019. *Wakaf dalam Bingkai Hukum*, (Artikel ini disampaikan dalam kegiatan *Muzakarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara*, Ahad, 28 Juli 2019, di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara, diakses dari <https://www.muisumut.com/blog/2019/07/28/wakaf-dalam-bingkai-hukum/>

Tanah Wakaf akan Diambil Alih, Kaum Ibu Baca Yasin 41, Waspada.co.id, 16 Agustus 2019, diakses dari <http://waspada.id/tanah-wakaf-akan-diambil-alih-kaum-ibu-baca-yasin-41>

Tanah Wakaf dibangun Vihara, MUI Minta FKUB Sergai Jalankan Tatib, WAKUBAN.CO, 7 Januari 2019, diakses dari <https://www.wakuban.co/2019/01/07/tanah-wakaf-dibangun-vihara-mui-minta-fkub-sergai-jalankan-tatib/>

TPM Medan Datangi Polda Sumut, TRIBUN-MEDAN.com, Rabu, 25 April 2012 18:21, diakses dari <https://medan.tribunnews.com/2012/04/25/tpm-medan-datangi-polda-sumut>

- Tengku Zulkarnain, *Ungkapan Ada 12 Masjid yang Sudah Mengalami Penggusuran, dan Bermasalah, KH Tengku Zulkarnani (Facebook Page)*, diposting pada 27 Maret 2018, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/1661487773944334>
- Tengku Zulkarnain, *Rencana Jahat Penggusuran Masjid Amal Silaturrahim di Medan*, diakses dari <https://www.facebook.com/tengkuzulkarnain.id/posts/rencana-jahat-penggusuran-masjid-amal-silaturrahim-di-medantengku-zulkarnaintida/1651091238317321/>
- Terkait Isu Penggusuran 12 Mesjid di Sumut, Poldasu: Itu Hoax.!!*, MetroOnline.Co, Senin, 26 Maret 2018, 13:55WIB, <https://www.metro-online.co/2018/03/terkait-isu-penggusuran-12-mesjid-di.html> Metro_Online.co;
- Terkait Masjid Amal Silaturrahim, DPRD Medan: Tanah Wakaf Tidak Bisa Dialihkan untuk Kepentingan Bisnis*, Medan Bisnis, Selasa, 13 Mar 2018 19:08 WIB, diakses dari <http://www.mdn.biz.id/o/28874/>
- http://www.medanbisnisdaily.com/news/online/read/2018/03/13/28874/terkait_masjid_amal_silaturrahim_dprd_medan_tanah_wakaf_tidak_bisa_dialihkan_untuk_kepentingan_bisnis/
- Tiga Kali Dibakar, Masjid Fii Sabilillah Berdiri Kembali*, EraMuslim, Rabu, 22 Jumadil Awwal 1432 H / 27 April 2011 11:48 WIB, diakses dari <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/tiga-kali-dibakar-masjid-fii-sabilillah-berdiri-kembali.htm>
- Ulama Sumut Tangisi Masjid yang Dibongkar*, Hidayatullah, Jum'at, 20 Mei 2011, 09:56 WIB <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2011/05/20/50131/ulama-sumut-tangisi-masjid-yang-dibongkar.html>
- Veryanto Sitohang, *Direktur Aliansi Sumut Bersatu, 12 April 2013, Pernyataan Sikap ASB: Mendukung Pendirian Mesjid di Kab. Tapanuli Utara*, Ourvoice.or.id, <http://www.suarakita.org/2013/04/pernyataan-sikap-asb-mendukung-pendirian-mesjid-di-kab-tapanuli-utara/>

Wapres JK: Ada 800 Ribu Masjid yang Terdaftar di Indonesia, TribunNews, Sabtu, 10 November 2018 18:25 WIB, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/11/10/wapres-jk-ada-800-ribu-masjid-yang-terdaftar-di-indonesia>

Wasekjen MUI: Penggusuran Masjid-Masjid di Sumatera Utara bukan Hoax, swamedium.com, 28-03-2018, 09:26 WIB, diakses dari <https://www.swamedium.com/2018/03/28/wasekjen-mui-penggusuran-masjid-masjid-di-sumatera-utara-bukan-hoax/5/>



PERLINDUNGAN ATAS EKSISTENSI MASJID & TANAH WAKAF

Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum

Persoalan masjid dan tanah wakaf sebenarnya lebih merupakan persoalan yang sangat mendasar dalam membangun peradaban Islam. Ada empat konsep yang paling mendasar dalam membangun peradaban Islam, semuanya ada pada konsep masjid dan tanah wakaf, yaitu ibadah, manfaat, pertanggungjawaban dan keadilan sosial. Tidak ada jalan lain membangun peradaban Islam yang terbukti dalam sejarah kecuali melalui jalan ini, yakni memakmurkan masjid dan mengelola harta benda wakaf secara professional, sehingga berkembanglah asset umat Islam; sehingga terjaminlah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan umat Islam. *Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara)*

Ancaman terhadap Eksistensi Masjid, Mushollah, Madrasah dan Harta Wakaf pada umumnya terjadi adalah akibat kekosongan hukum atau regulasi tentang perwakafan di tanah air kita, termasuk karena lemahnya peng-administrasian sehingga harta wakaf tersebut tidak dilindungi oleh dokumen yang memadai selama berpuluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun. *Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP (Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)*

Diterbitkan Oleh :
CV. MANHAJI Bekerjasama dengan
**Komisi Hukum, Perundang-undangan,
HAM dan Advokasi
MUI PROV. SUMUT**
Medan 2019



muisumut.com



GET IT ON
Google Play